PANCASILA DALAM PRAKSIS PENDIDIKAN

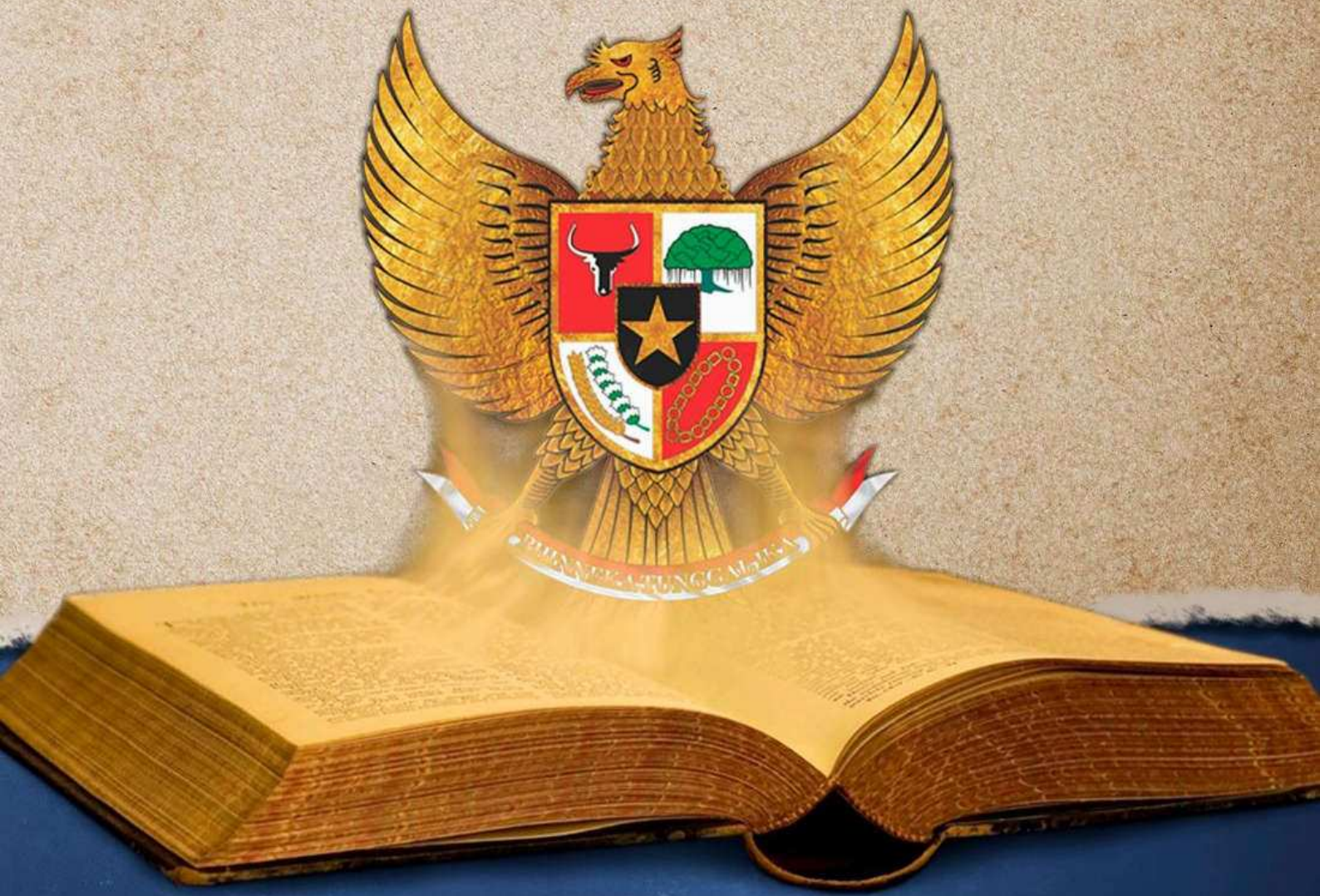

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PANCASILA DALAM PRAKSIS PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PANCASILA DALAM PRAKSIS PENDIDIKAN

Editor:
Ajat Sudrajat
Samsuri
ISBN: 978-602-498-0597

Edisi Pertama

Diterbitkan dan dicetak oleh:
UNY Press
Jl. Gejayan, Gg. Alamanda, Komplek Fakultas Teknik UNY
Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta 55281
Telp: 0274-589346
Mail: unypress.yogyakarta@gmail.com

©2018 Ajat Sudrajat
Samsuri
Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)
Anggota Asosiasi Penerbit Pergutuan Tinggi Indonesia (APPTI)

Penyelaras: Wagiran
Desain Sampul: Kalam Jauhari
Tata Letak: Mindiptono Akbar
Ilustrasi: Muhammad Rodhi As'ad

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Ajat Sudrajat
Samsuri
Ed.1, Cet.1.- Yogyakarta: UNY Press 2019
viii+424 hlm; 15 x 20,5 cm
ISBN: 978-602-498-0597
1. PANCASILA DALAM PRAKSIS PENDIDIKAN
1.judul

SEKAPUR SIRIH

Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd.
Rektor Universitas Negeri Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera untuk Kita Semua

Atas nama pribadi dan selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puja puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Memberi Anugerah. Dengan limpahan anugerah Tuhan sajalah buku *"Pancasila dalam Praksis Pendidikan"* yang sekarang ada di hadapan pembaca dapat dituntaskan sesuai rencana oleh para penulisnya dan diterbitkan sebagai bagian dari kesyukuran kita atas jejak panjang pengabdian almamater tercinta, Universitas Negeri Yogyakarta, hingga menapak usia yang ke 55 tahun pada 21 Mei 2019 ini.

Sidang pembaca yang budiman...

Sebagai negara-bangsa kita tentu saja patut berbangga hati sebab sudah mencapai prestasi besar di berbagai bidang. Pembangunan

sumber daya manusia dan infrastruktur secara simultan sudah dan terus menerus kita lakukan untuk menjadikan kita sebagai bangsa yang maju, disegani, dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi. Pembangunan politik dan hukum juga secara insitusional dan instrumental terus menerus kita laksanakan untuk mewujudkan keadilan sosial, sekaligus untuk menjamin tertib sosial, tertib hukum, dan tertib politik. Di bidang ekonomi, kita juga telah mencapai beberapa kemajuan yang direkognisi tidak saja oleh kawasan, tapi juga oleh dunia. Dalam hubungan dan diplomasi internasional, bangsa terbesar ke empat terbesar di dunia ini pun semakin diakui kiprah dan reputasinya.

Namun demikian, kita tentu tentu masih berhadapan dengan berbagai tantangan, bahkan ancaman. Mulai dari persoalan merosotnya etos dan etika kolektif kita yang tergambar mulai dari fenomena harian seperti peningkatan angka kenakalan remaja, kriminaitas, instrumentasi kekerasan, dan semacamnya di lingkungan mikro sosietal kita, hingga maraknya korupsi, kejahatan korporasi, dan oligarki predatoris di lingkup makro nasional. Singkatnya, pembumian ideologi nasional kita belum ideal. Butuh kerja super keras untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila secara lebih komprehensif dan otentik.

Sidang pembaca yang berbahagia...

Dinamika Pancasila, sebagai dasar negara, fundamen falsafati dasar, ideologi nasional, bintang petunjuk, serta titik temu, titik tumpu dan titik tuju (Yudi Latif, 2011), menunjukkan perjalanan yang fluktuatif, dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi. Fase terbaru perkembangan Pancasila memasuki gelombang kebangkitan kembali (Asvi Warman Adam, 2011) atau fase resurgensi (Halili, 2017). Dalam konteks itu, terdapat tiga momentum yang selayaknya dicatat sebagai penanda kebangkitan dan kebangunan rohani Pancasila. *Pertama,*

pengarusutamaan narasi 'empat pilar kebangsaan' yang dicetuskan oleh MPR RI satu dekade yang lalu. *Kedua*, masuknya kembali Pancasila dalam kurikulum pendidikan formal, sejak diterapkannya Kurikulum 2013, dengan nomenklatur kurikuler Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Ketiga*, institusionalisasi lembaga khusus untuk 'mengurus' pembinaan Pancasila yaitu Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) yang sekarang dinaikkan status kelembagaannya menjadi Badan (BPIP) melalui Perpres Nomer 7 Tahun 2018.

Namun demikian, tantangan kontemporer bangsa Indonesia secara riil semakin meningkat, terutama dalam implementasi nilai-nilai dasar dalam Pancasila sebagai falsafah dasar negara dan ideologi nasional. Terjadi banyak kasus intoleransi. Beberapa peristiwa juga menunjukkan semakin menurunnya kemanusiaan dan keberadaban kita. Ancaman atas integrasi nasional kita juga meningkat yang antara lain diakibatkan oleh fragmentasi elite kita. Demokrasi kerakyatan kita juga belum seideal yang dibayangkan oleh para pendiri negara kita, yaitu demokrasi yang diselenggarakan dengan kebijaksanaan, perwakilan, dan permusyawaratan. Sedangkan keadilan sosial sebagai tujuan puncak Pancasila juga masih jauh panggang dari api.

Khalayak pembaca yang mulia...

Dalam konteks itu, dengan semangat reaktualisasi Pancasila, lembaga pendidikan, lebih-lebih perguruan tinggi harus mengoptimalkan perannya untuk mengimplementasikan Pancasila dan mewujudkan cita-cita kolektif kita sebagai negara-bangsa. Sejalan dengan hal itu, sejak 2017 Universitas Negeri Yogyakarta mencanangkan diri untuk menjadi *center of excellence* dalam pengembangan pendidikan dan pembinaan Pancasila. Prakarsa tersebut ditandai dengan institusionalisasi Pusat Studi Pancasila

dan Konstitusi (PSPK). Beberapa kemajuan dalam pengarustamaan *(mainstreaming)* Pancasila sudah dilakukan oleh lembaga tersebut, mulai dari penguatan jejaring aktor dan lembaga pendidikan Pancasila hingga memperkuat pengetahuan publik melalui Festival Pancasila.

Institusionalisasi PSPK ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penelitian serentak 25 judul mengenai Pancasila dan praktik pembelajarannya, yang diselenggarakan pada tahun anggaran 2018. Penelitian-penelitian tersebut selain menghimpun praktik-praktik baik pendidikan Pancasila, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, juga menawarkan beberapa alternatif metodis-pedagogis pembelajaran Pendidikan Pancasila di berbagai jenjang pendidikan. Penelitian-penelitian tersebut, selain menegaskan keseriusan UNY dalam mewujudkan visi sebagai pusat ekselensi dalam pengembangan pendidikan dan pembinaan Pancasila, juga memberikan *baseline* data bagi pengembangan Pendidikan Pancasila. Dengan demikian, secara akademik-saintifik, penelitian-penelitian tersebut akan memperkuat *knowledge sector* dan pohon keilmuan *(state of the art)* pembelajaran Pendidikan Pancasila.

Buku yang sekarang sedang Ibu/Bapak/Saudari/Saudara baca ini merupakan *magnum opus* pertama UNY dalam bidang pembelajaran Pendidikan Pancasila, yang akan dilanjutkan dengan karya-karya lain berikutnya. Capaian sederhana ini menunjukkan keseriusan serta mengonkritkan kerja keras dan kerja cerdas (juga kerja ikhlas) kita dalam merealisasikan UNY sebagai pusat ekselensi dalam pengembangan pendidikan dan pembinaan Pancasila di satu sisi, dan menjadi bagian dari solusi bagi persoalan kolektif negara-bangsa kita di sisi lain.

Saya pribadi dan kita semua berharap semoga buku ini menjadi sumbangsih yang baik bagi masyarakat, bangsa, dan negara kita serta menjadi jariyah kebaikan bagi para penulisnya. Kita berharap konten buku ini akan memberikan pencerahan budi bagi para pembacanya.

Terakhir, kita tentu meyakini dengan kerendahan hati bahwa begitu banyak kekurangan dan keterbatasan dalam buku ini. Masukan dari para pembaca sekalian tentu akan memberikan input bagi proses produksi gagasan yang lebih baik. Terima kasih atas semua kontribusi para pihak dalam menghasilkan karya baik ini dan mengupayakan karya-karya yang lebih baik di masa depan.

Selamat untuk para penulis dan selamat membaca untuk para pembaca sekalian!

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua.

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih ▸ iii
Daftar Isi ▸ viii
Prolog ▸ 1

BAGIAN 1 Reaktualisasi Pendidikan Pancasila ▸ 18
A. Dimensi-dimensi Pendidikan Pancasila ▸ 22
B. Prioritas dalam Pembudayaan Pancasila ▸ 28

BAGIAN 2 Diskursus Pendidikan Pancasila ▸ 42
A. Dimensi Historis ▸ 43
B. Dimensi Filosofis ▸ 53
C. Dimensi Ideologis ▸ 57
C. Dimensi Kultural ▸ 60
D. Dimensi Pedagogis ▸ 63

BAGIAN 3 Desain Pendidikan Pancasila ▸ 76
A. Model Kultural Negara ▸ 81
B. Model Kurikuler ▸ 89

BAGIAN 4 Praksis Pendidikan Pancasila ▸ 104
A. Lingkup Prasekolah dan Sekolah Dasar ▸ 107
B. Lingkup Sekolah Menengah ▸ 147
C. Lingkup Pendidikan Tinggi ▸ 239

BAGIAN 5 Menjawab Tantangan Pendidikan Pancasila ▸ 358
A. Momentum Kebangkitan ▸ 359
B. Tantangan Pendidikan Pancasila ▸ 362
C. Transformasi Ideologi ▸ 374

Epilog ▸ 381
Daftar Pustaka ▸ 399

PROLOG

PANCASILA: Basis Pendidikan Karakter dan Pemupukan Kecerdasan Kewargaan

YUDI LATIF

Untuk memperkuat basis nilai dan karakter bangsa diperlukan proses persemaian dan pembudayaan dalam sistem pendidikan. Proses pendidikan sejak dini, baik secara formal, non-formal maupun informal, menjadi tumpuan untuk melahirkan manusia baru Indonesia dengan karakter yang kuat.

Dalam kaitan itu, pendidikan sebagai proses belajar menjadi manusia berkarakter berorientasi ganda: memahami diri sendiri dan memahami lingkungannya. Kedalam, pendidikan harus memberi wahana kepada peserta didik untuk mengenali siapa dirinya sebagai "perwujudan khusus" ("diferensiasi") dari alam. Sebagai perwujudan khusus dari alam, setiap orang memiliki keistimewaan-kecerdasannya masing-masing. Proses pendidikan harus membantu peserta didik menemukenali kekhasan potensi diri tersebut sekaligus kemampuan untuk menempatkan keistimewaan diri itu dalam konteks keseimbangan dan keberlangsungan jagad besar.

Aktualisasi dari kesadaran ini adalah pemupukan keandalan khusus seseorang yang memungkinkannya memiliki kepercayaan diri, daya tahan dan daya saing dalam perjuangan hidup, dengan tetap memiliki sensitivitasnya terhadap nilai-nilai kebudayaan yang baik, benar dan indah. Pengenalan terhadap kekhasan potensi diri dan komitmennya terhadap kebersamaan nilai-nilai kebudayaan itulah yang menjadi dasar pembentukan karakter. "Karakter" dalam arti ini adalah kecenderungan psikologis yang membentuk kepribadian moral; *"the dispositions that make up our moral personality"* (Lickona, 2011).

Sedangkan keluar, pendidikan harus memberi wahana kepada anak didik untuk mengenali dan mengembangkan kebudayaan sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem prilaku bersama, melalui olah pikir, olah rasa, olah karsa dan olah raga. Kebudayaan sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem prilaku ini secara keseluruhan membentuk lingkungan sosial yang dapat menentukan apakah disposisi karakter seseorang berkembang menjadi lebih baik atau lebih buruk.

Kebudayaan sebagai lingkungan sosial tersebut bisa juga disebut sebagai wahana pembentukan karakter kolektif. Pengertian "bangsa" *(nation)* yang terkenal dari Otto Bauer, menyatakan bahwa, "Bangsa adalah satu persamaan, satu persatuan karakter, watak, yang persatuan karakter atau watak ini tumbuh, lahir, terjadi karena persatuan pengalaman." Dalam kaitan ini, Bung Karno pernah menyatakan bahwa "Tidak ada dua bangsa yang cara berjoangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjoang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakekatnya bangsa sebagai individu mampunyai keperibadian sendiri. Keperibadiaan yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan lain-lain sebagainya" (Soekarno, 1958)

Dengan kata lain, perilaku manusia adalah fungsi dari karakter personal dan budaya (lingkungan karakter kolektif). Adapun pendidikan sebagai proses belajar memanusia berfungsi untuk memfasilitasi pengembangan karakter personal dan kebudayaan yang baik, benar dan indah, sebagai wahana pembentukan manusia seutuhnya.

Pendidikan karakter diperlukan untuk menempa siswa menjadi pribadi baik (karakter pribadi) sekaligus warga negara baik (karakter kolektif). Antara karakter pribadi dan karakter kolektif bisa dibedakan, namun tidak bisa dipisahkan.

Membangun Pribadi dan Warga Negara yang Baik

Tentang bagaimana menjadi pribadi yang baik, Thomas Lickona (2011), menengarai ada 9 nilai inti karakter pribadi yang harus ditumbuhkan: keberanian *(courage)*, keadilan *(justice)*, kebaikan hati *(benevolence)*, rasa terima kasih *(gratitude)*, kebijaksanaan *(wisdom)*, mawas diri *(reflection)*, rasa hormat *(respect)*, tanggung jawab *(responsibility)*, dan pengendalian diri *(temperance)*.

Tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, Jonathan Haidt (2012), menengarai ada 6 nilai inti moral publik sebagai basis karakter kolektif kewargaan: peduli terhadap bahaya yang mengancam keselamatan bersama *(care)*, rasa keadilan dan kepantasan *(fairness)*, kebebasan dengan menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia *(liberty)*, kesetiaan pada institusi, tradisi dan konsensus bersama *(loyalty)*, respek terhadap otoritas yang disepakati bersama (authority), menghormati nilai-nilai yang dipandang paling "mulia" *(santinctity)*.

Dalam konteks Indonesia, keenam nilai inti moral publik itu terkadung dalam Pancasila. Masing-masing sila mewakili nilai-nilai inti moral publik sebagai berikut.

Ketuhanan: *Sanctity*

Sila Ketuhanan mencerminkan nilai *"sanctity"* (kesucian). Bahwa setiap komunitas moral harus ada nilai yang "disucikan" bersama sebagai jangkar pengikat kohesi sosial. Pengertian "suci" di sini tidak harus dalam konotasi kegamaan, melainkan dalam arti nilai yang paling dipandang penting (dimuliakan). Pada warisan Sumpah Pemuda, nilai yang "disucikan" itu adalah spirit "gotong-royong". Pada Pancasila, spirit gotong-royong itu tetap "disucikan", namun ditarik secara vertikal ke hulu sumbernya dari pancaran sinar Ketuhanan. Bahwa segala keragaman yang saling bergantung (yang memerlukan gotong-royong) pada segala fenomena kehidupan ini merupakan pancaran (iluminasi) dari "Yang Tak Terhingga" (Tuhan), yang tidak bergantung.

Tentang Ketuhanan sebagai nilai yang "disucikan" bisa dijelaskan urgensinya sebagai basis sosiabilitas dengan meminjam pandangan Emile Durkheim. Menurutnya, Homo sapiens itu pada dasarnya adalah *Homo duplex,* makhluk yang eksis pada dua level; sebagai individu dan sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas. Dalam relasi sosial, ada dua sentimen yang bisa dibedakan. Pertama, "sentimen sosial" yang mengikat hubungan seseorang dengan orang lain sebagai sesama warga (anggota kelompok). Hal ini termanifestasi di dalam komunitas, dalam hubungan hidup (antar-individu) sehari-hari. Level relasi ini masuk pada ranah profan.

Kedua, "sentimen sosial" yang mengikat sesorang dengan entitas sosial secara keseluruhan. Hal ini termanifestasi terutama dalam hubungan antara kelompok (komunitas) dengan kelompok (komunitas) lain, yang bisa disebut sebagai relasi "antar-sosial". Di dalam relasi pertama, otonomi dan kepribadian seseorang masih relatif utuh, tidak terlalu kehilangan independensinya. Dalam relasi kedua, seseorang semata-

mata bagian dari suatu keseluruhan, di mana otonomi dan kepribadian seseorang tunduk pada tindakan, pengaruh dan karakter keseluruhan, yang membentuk kohesi sosial. Dalam pandangannya, emosi kolektif ini menarik manusia sepenuhnya, meskipun sera termporer, pada level yang lebih tinggi, yakni ranah "suci" *(sacred),* dimana kepentingan kedirian pudar, sedang kepentingan kolektif menjadi dominan.

Durkheim meyakini, pergerakan manusia secara bola-balik di antara dua ranah (*profane* dan *sadred*) inilah melahirkan ide (keyakinan) tentang Tuhan, spirit, sorga, dan konsepsi tentang tatanan moral bersama. Dengan demikian, eksistensi agama dan Tuhan memiliki fungsi penting sebagai kekuatan integratif dalam relasi "antar-sosial", dimana segala keragaman kelompok bisa dipersatukan secara sosial oleh spirit ketuhanan (Durkheim, 1992).

Tentang pentingnya ketuhanan (agama) sebagai basis sosiabilitas juga dijelaskan oleh Robert Putnam (2000) dalam konteks kebangsaan-kewargaan Amerika Serikat. Dalam pandangannya, keterpautan pada kelompok kecil, seperti sesama anggota gereja dan perkumpulan agama yang melibatkan aneka individu dan latar sosial, merupakan modal awal bagi afeksi publik. "Agama-agama membuat orang-orang Amerika menjadi tetangga dan warga negara yang lebih baik". Bahwa "ramuan aktif yang membuat masyarakat Amerika lebih bajik adalah keterpautan mereka dalam relasinya dengan sesama komunitas agama. Segala hal yang mengikat masyarakat secara bersama ke dalam kerapatan jaringan rasa saling percaya membuat orang-orang kurang mementingkan diri sendiri". Dan itu merupakan modal sosial yang amat penting bagi integrasi nasional.

Gerak vertikal ke wilayah "suci" *(sacred)* sebagai basis sosiabilitas dalam masyarakat multiagama dan multikepercayaan masih menyimpan

persoalan. Tuhan (keyakinan keagamaan) yang berbeda bisa melahirkan keragaman komunitas moral, yang menyulitkan integrasi nasional.[1] Untuk mengatasinya, dalam Pancasila, gerak pendakian menuju ranah "suci" ini tidak berhenti pada stase "Tuhan kelompok" *(tribal-communal god)*, namun ditarik lebih tinggi menuju "Tuhan universal" *(universal god)*. Yakni, Tuhan welas-asih *(rahman-rahim)* yang menjadi titik-temua semua agama dan keyakinan. Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyatakan, "Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada 'egoisme-agama'. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan!"

Dengan demikian, Ketuhanan dalam Pancasila adalah ketuhanan yang telah direkonsiliasikan ke dalam "agama publik" *(civic religion)* yang bersifat inklusif. Untuk memperkuat aspek inklusivitas tersebut, sebutan pada "Yang Mahasuci" itu sendiri tidak menggunakan istilah yang punya konotasi kegamaan tertentu, melainkan istilah yang bisa diterima oleh semua komunitas agama (baik penganut monotheis maupun politheis). Istilahnya adalah "Tuhan" (Ketuhanan).[2]

Sila pertama meyakini bahwa kodrat keberadaan manusia merupakan perwujudan istimewa dari semesta sebagai kristalisasi dari cinta kasih Tuhan (Yang Tak Terhingga). Meski merupakan perwujudan istimewa dari semesta, manusia tetaplah merupakan bagian dari semesta, yang dengan keistimewaannya itu tidaklah menghadirkan kerusakan *(fasad)* bagi kebersamaan, melainkah harus dapat menjaga harmoni (maslahat-manfaat) bagi kebersamaan. Sebagai bagian dari semesta, manusia bersifat terbatas, relatif dan tergantung, sehingga memerlukan keterbukaan pada sesuatu yang transenden dan menjalin kerjasama dengan yang lain. Keterbukaan pada yang transenden itu diperlukan

untuk mencegak absolutisme (memutlakan hal-hal yang imanen), yang dengan itu paham persamaan manusia dan kerjasama dimungkinkan.

Dengan prinsip persamaan manusia di hadapan Tuhan (Yang Tak Terhingga), tiap-tiap manusia harus menjunjung rasa kemanusiaan, dengan memuliakan kehidupan, kehormatan, hak-hak, dan kebebasan sesama manusia, yang dengan kemuliaan dan kemerdekaan pribadinya itu manusia menjadi makhluk moral yang harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Dengan prinsip persamaan dan moralitas, manusia juga didorong menjadi makhluk sosial yang mengembangkan persatuan dengan menjalin kerjasama dan persaudaraan untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan mutu kehidupan bersama (Madjid, 1992: 4). Demi mewujudkan prinsip persamaan dan persaudaraan semasa makhluk yang beragam jenis dan bentuknya, manusia sebagai kristalisasi dari cinta kasih Tuhan (Yang Tak Terhingga) perlu mengembangkan semangat ketuhanan yang welas asih, ketuhanan yang berprikemanusiaan, ketuhanan yang berkebudayaan dan berkeadaban.

Dengan demikian, Ketuhanan dalam Pancasila juga bisa menjadi basis "spirit" elan vital kebudayaan seperti dibayangkan oleh Oswald Spengler; juga menjadi jantung "visi spiritual", sebagai perisai terdalam ketahanan dan keberlangsungan peradaban seperti dibayangkan oleh Arnold Toynbee.

Kemanusiaan: *Care and Liberty*

Sila kemanusiaan mencerminkan nilai *"care"* (peduli terhadap bahaya/*harm* yang mengancam keselamatan bersama) dan *liberty* (bebas dari penindasan dan pengekangan). Bahwa komunitas moral diikat oleh kepedulian terhadap hak-hak dasar manusia (hak negatif dan hak positif), dengan menjungjung tinggi keadilan dan keadaban.

Sila kedua meyakini bahwa keberadaan manusia merupakan ada

bersama. Manusia tidak bisa berdiri sendiri, terkucil dari keberadaan yang lain. Untuk ada bersama dengan yang lain, manusia tidak bisa tidak harus ada-bersama-dengan-cinta, dengan mengembangkan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Perjuangan kemanusiaan bangsa Indonesia, dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Keluar, bangsa kita harus menggunakan segenap daya dan khazanah yang dimilikinya untuk secara bebas-aktif 'ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial', sebagaimana tertera pada (aline 4) Pembukaan UUD 1945. Kedalam, bangsa kita harus menerima, apa yang disebut Muhammad Yamin, 'benda ruhani berupa pengakuan dan pemuliaan hak-azasi kemanusiaan' (Yamin, 1956: 186-187).

Dalam komunitas moral Pancasila, pengakuan terhadap hak dasar itu bersifat menyeluruh-- tidak terbatas pada hak sipil dan politik tapi juga hak sosial, ekonomi dan budaya. Selain itu, ada pengakuan terhadap hak asasi manusia secara universal (seperti hak beragama dan berkeyakinan), hak asasi manusia sebagai warga negara (seperti hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan); ada pengakuan terhadap hak komunitarian (hak ulayat), dan ada pula pengakuan terhadap hak sosial secara keseluruhan (seperti menyangkut bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, serta cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak).

Persatuan Kebangsaan: *Loyalty*

Sila persatuan (kebangsaan) mencerminkan nilai "loyalty" (kesetiaan terhadap ruang hidup/tanah-air, bersama tradisi dan konsensus bersamanya). Bahwa komunitas moral memerlukan kesadaran bersama untuk merawat "rumah" bersama, dimana kebebasan individu dan partikularitas lainnya jangan sampai menghancurkan tatanan tradisi

dan konsensus yang menjaga harmoni dalam kebersamaan.

Sila ketiga meyakini bahwa dalam ada bersama, manusia sebagai makhluk sosial memerlukan ruang hidup yang konkrit dan pergaulan hidup dalam realitas kemajemukan. Cara menghidupkan komunitas moral dengan cara meleburkan kepentingan pribadi/golongan ke dalam kepentingan secara keseluruhan masyarakat bangsa yang mendiami tanah-air sebagai geopolitik bersama itulah manusia mengembangkan rasa kebangsaan. Dalam kaitan ini, cinta negeri (amore patria) merupakan basis moralitas yang penting. Patriotisme berarti menempatkan kemaslahatan umum (*bene commune*) diatas kepentingan lainnya dan dipandang sebagai kesalehan puncak. Melalui cinta negeri tergalilah kekuatan semua komponen bangsa untuk mengambil keputusan berat mengorbankan semua demi kepentingan semua.

Kerakyatan: *Authority*

Bahwa komunitas moral memerlukan respek terhadap otoritas yang menjadi pusat kedaulatan dan keteraturan dalam kehidupan publik. Pengalaman historis yang berbeda, serta karakteristik sosial-budaya yang berbeda memberi perbedaan (variasi) tipe-tipe ororitas di antara berbagai negara-bangsa.

Sila keempat meyakini bahwa dalam mengembangkan kehidupan bersama, cara mengambil keputusan yang menyangkut masalah bersama ditempuh dengan semangat cinta kasih. Ukuran utama dari cinta adalah saling menghormati. Cara menghormati manusia dengan memandangnya sebagai subyek yang berdaulat, bukan obyek manipulasi, eksploitisasi dan eksklusi, itulah yang disebut demokrasi dalam arti sejati.

Dalam institusionalisasinya, pengembangan otoritas ini diarahkan untuk menjadi bangsa yang berdaulat dalam politik, melalui cita kerakyatan, cita permusyawaratan dan cita hikmat-kebijaksanaan

dalam suatu rancang bangun institusi-insitusi demokrasi yang dapat memperkuat persatuan (negara persatuan)dan keadilan sosial. Negara persatuan dilembagakan dalam bentuk demokrasi perwakilan yang dapat mengakomodasi hak individu (lewat anggota DPR), hak komunitas marjinal (utusan golongan) dan hak teritorial (utusan daerah) yang secara keseluruhan terhimpun dalam Majelis Permusyawaratan rakyat. MPR inilah yang (dalam loyalitas tradisi) menjadi pusat otoritas, sebagai penjelmaan seluruh rakyat, penjelemaan seluruh golongan, dan penjelmaan seluruh daerah. Negara keadilan dilembagakan dalam bentuk negara kesejahteraan ala Indonesia,[3] dimana negara bukan sekadar penjaga malam, namun berkewajiban untuk menguapayakan kesejateraan umum. Perwujudan negara persatuan dan keadilan itu termanifestasi dalam kehadiran pemerintahan negara yang dapar melindungi segenep bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemedekaan, perdamaian dan keadilan.

Keadilan Sosial: *Fairness*

Komunitas moral menghendaki nilai *"fairness"* (keadian dan kepantasan). Kohesi sosial memerlukan konsepsi keadilan bersama *(a shared conception of justice)* yang memberi harapan tentang kesejahteraan bersama *(social welfare)*. Sistem produksi, distribusi dan konsumsi yang tidak berkeadilan akan melahirkan berbagai bentuk kesenjangan sosial yang bisa melemahkan kohesi sosial.

Sila kelima meyakini bahwa keberadaan manusia adalah roh yang menjasmani. Secara jasmaniah, manusia memerlukan papan, sandang, pangan, dan pelbagai kebutuhan material lainnya. Perwujudan khusus kemanusiaan melalui cara mencintai sesama manusia dengan berbagi

kebutuhan jasmaniah secara fair itulah yang disebut dengan keadilan sosial (Driyarkara, 2006: 831-865).

Moral ketuhanan *(sanctity)*, kemanusiaan *(care and liberty)*, persatuan kebangsaan *(loyalty)*, kerakyatan *(authority)*, dan keadilan sosial *(fairness)* itu secara horisontal bisa diikat oleh satu nilai "suci" juga, bernama nilai "gotong-royong". Dengan kata lain, secara vertikal, nilai suci kita bernama "Ketuhanan", sedang secara horisontal bernama "gotong-royong".

Bahwa proses peleburan aneka kelompok dengan konflik kepentingan ke dalam kuali kebangsaan kewargaan ini dimungkinkan oleh semangat gotong-royong. Dalam pandangan Soekarno, "Gotong-royong adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari 'kekeluargaan'....Gotong-royong adalah pembanting tulang bersama pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua." Semangat kekeluargaan yang bersifat statis, cenderung mengarahkan welas-asih (altruisme) pada sesama anggota keluarga atau golongan sendiri. Sedang semangat gotong-royong yang bersifat dinamis, lebih memiliki kesanggupan untuk mengarahkan altruisme pada sesama warga sekalipun dari golongan yang berbeda.

Gotong-royong adalah level tertinggi dari proses adaptasi manusia dalam mengarungi tantangan seleksi alam kehidupan, dari makhluk individu dengan kecenderungan simpanse (yang bersifat *selfish*) menjadi makhluk sosial dengan kecenderungan lebah (yang bersifat *groupish*). Semangat gotong-royong itu adalah semangat kooperatif, kolaboratif: "satu untuk semua, semua untuk satu"; senasib-sepenanggungan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing; bukan yang satu untung, yang lain buntung.

Pemupukan Kecerdasan Kewargaan

Pendidikan karakter adalah suatu pendekatan holistik yang menghubungkan dimensi moral pendidikan dengan ranah sosial dan sipil dari kehidupan siswa. Sikap dan nilai dasar dari masyarakat diidentifikasi dan diteguhkan di sekolah dan komunitas. Pendidikan bersifat sarat nilai, karena masyarakat menentukan apa-apa yang akan dan tidak akan diteladani. Moral ditangkap *(caught)* bukan diajarkan *(taught)* dan kehidupan di ruang kelas dirembesi makna moral yang membentuk karakter siswa dan perkembangan moral (Ryan, 1996: 75).

Pendidikan karakter berangkat dari pemahaman bahwa ukuran-ukuran kecerdasan diri berbasis Intelligent Quotient (IQ) dianggap tak memadai untuk menjawab krisis kedirian. Beberapa program pendidikan dan pelatihan kepribadian telah mencoba melengkapinya dengan pengembangan jenis-jenis kecerdasan lain, terutama yang berbasis Emotional Quotient (EQ) dan Spiritual Quotient (SQ).

Usaha menyelesaikan persoalan jatidiri dengan alternatif terakhir itu memang patut diapresiasi. Persoalannya, apakah faktor-faktor IQ, EQ dan SQ itu sudah tepat menyasar sisi terlemah dari kedirian bangsa ini?

Untuk memberikan kerangka penilaian, kita harus ingat bahwa diri manusia terdiri dari dua bagian: kedirian yang bersifat privat *(private self)*—kedirian yang bersifat personal dan khas, dan kedirian yang bersifat publik *(public-self)*—kedirian yang melibatkan relasi sosial. Keduanya bisa dibedakan, namun tak bisa dipisahkan.

Dengan kerangka itu kita bisa melihat bahwa problem kedirian manusia Indonesia pada dasarnya tidaklah bersumber dari kecerdasan diri yang bersifat privat. Secara IQ, manusia Indonesia bukanlah kategori kelompok manusia dengan defisit kepintaran. Tandanya bisa dilihat dari berbagai ajang olimpiade internasional di bidang matematika, fisika dan kimia. Anak-anak Indonesia bukan saja bisa bersaing dengan utusan

negara-negara terpandang seperti Amerika Serikat, Jepang dan China, bahkan berungkali berhasil merebut predikat juara umum.

Manusia Indonesia juga secara umum relatif memiliki kematangan emosional. Berbagai tradisi budaya Indonesia sudah teruji dalam kesanggupannya menanamkan ketahankan emosional seperti kemampuan pengendalian diri untuk tidak berlebihan (*ngono yo ngono ning ojo ngono*), menjujung tinggi yang positif, memendalam yang negatif (*mikul dhuwur, mendem jero),* serta ketahanan dalam menghadapi kesulitan.

Kecerdasan spiritual manusia Indonesia juga relatif kuat. Manusia Indonesia pada umumnya bersifat "religius". Dalam ukuran yang paling kasat mata, kita bisa melihat bagaimana rumah-rumah ibadah dan partisipasi ibadah yang makin meningkat, pertumbuhan calon haji dan umrah yang makin melambung, serta mejamurnya majelis-majelis zikir, penghayat tarekat, yoga, dan berbagai ajaran spiritualitas lainnya.

Sisi terlemah dari manusia Indonesia justru mencolok pada aspek kedirian yang bersifat publik. Hal ini dengan mudah dilihat, bagaimana orang-orang dengan latar pribadi yang baik dengan mudah hanyut dalam arus keburukan begitu terjun ke dalam politik. Kita juga bisa menyaksikan, hampir semua hal yang bersifat kolektif mengalami dekadensi: partai politik sakit, lembaga perwakilan sakit, birokrasi sakit, aparatur penegak hukum dan kemamanan-pertahanan sakit, bahkan organisasi-organisasi keagamaan yang bersekala besar pun mulai menunjukkan gejala sakit.

Krisis pada kedirian yang bersifat publik ini mencerminkan kelalaian dunia pendidikan dan pembudayaan dalam mengembangkan "kecerdasan kewargaan" *(Civic Intelligence Quotient).* Pendidikan terlalu menekankan kecerdasan personal, dengan mengambaikan usaha mempertautkan keragaman kecerdasan personal itu ke dalam kecerdasan kolektif-kewargaan. Masing-masing individu dibiarkan menjadi deret

"huruf" alfabet, tanpa disusun secara kesatuan dalam perbedaan *(bhinneka tunggal ika)* ke dalam "kata" dan "kalimat" bersama. Akibatnya, banyak manusia yang baik dan cerdas tidak menjadi warga negara dan penyelenggara negara yang baik dan cerdas (sadar akan kewajiban dan haknya).

Padahal, bangsa Indonesia sebagai masyarakat majemuk, dengan pecahan yang banyak jumlahnya, tidak mungkin bisa dijumlahkan menjadi kebaikan bersama kalau tidak menemukan bilangan penyebut yang sama *(common denominator),* sebagai ekspresi identitas dan kehendak bersama. Oleh karena itu, pendidikan "kecerdasan kewargaan" berlandaskan Pancasila merupakan jurus pamungkas yang paling dibutuhkan.

Pengembangan "kecerdasan kewargaan" lebih fundamental bagi suatu bangsa yang ingin membebaskan diri dari kolonisasi individualisme yang mendorong kapitalisme dan kolonialisme. Postulat dasar dari individualisme meyakini bahwa relasi sosial bukanlah pembentuk perseorangan dalam pengalamannya yang paling fundamental. Relasi sosial memang sesuatu yang terjadi pada individu namun tidak dipandang sebagai sesuatu yang mendefinisikan identitas dan mengkoordinasikan eksistensi individu. Ungkapan yang sangat terkenal dari individualisme menyatakan: "Kamu datang ke dunia seorang diri, dan meninggalkan dunia seorang diri." Meski kenyataannya tidak ada seorang pun yang lahir ke dunia secara sendirian. Selalu ada ibu dan budaya komunitas yang menyertainya, bahkan mengantarnya hingga ke "tempat peristirahatan yang terakhir".

Berbeda dengan individualisme, Pancasila memandang, bahwa dengan segala kemuliaan eksistensi dan hak asasinya, setiap pribadi manusia tidaklah bisa berdiri sendiri terkucil dari keberadaan yang lain. Setiap pribadi membentuk dan dibentuk oleh jaringan relasi sosial. Semua

manusia, kecuali mereka yang hidup di bawah keadaan yang sangat luar biasa, tergantung pada bentuk-bentuk kerjasama dan kolaborasi dengan sesama yang memungkinkan manusia dapat mengembangkan potensi kemanusiaannya dan dalam mengamankan kondisi-kondisi material dasar untuk melanjutkan kehidupan dan keturunannya .

Kebajikan individu hanya mencapai pertumbuhannya yang optimum dalam kolektivitas yang baik. Oleh karena itu, pengembangan jatidiri bukan saja harus memberi wahana kepada setiap individu untuk mengenali siapa dirinya sebagai "perwujudan khusus" ("diferensiasi") dari alam. Pengembangan jatidiri juga harus memberi wahana setiap orang untuk mengenali dan mengembangkan kebudayaan sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem prilaku bersama yang terkristalisasi dalam Pancasila. Pancasila sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem prilaku ini secara keseluruhan membentuk lingkungan sosial yang dapat menentukan apakah disposisi karakter perseorangan berkembang menjadi lebih baik atau lebih buruk.

Maka dari itu, pengembangan "kecerdasan kewargaan" berbasis Pancasila merupakan kunci integrasi dan kemajuan bangsa. Namun, justru pada titik itulah simpul terlemah dari proses pendidikan dan pembangunan selama ini.[]

Catatan Kaki:

1 Kata *"sacred"* itu sendiri, berasal dari kata Latin *"sacer"*, maknanya ambigu: bisa berarti karunia atau kutukan, suci atau cercaan. Dalam peradaban purba, memang terdapat afinitas yang kuat antara teror dan kesucian, karena fungsi gandanya: kreatif dan destruktif, pemberi kehidupan dan kematian. Alhasil, agama menyangkut kekuatan yang ambivalen: menakjubkan *(enrapture)* dan menghancurkan *(annihilate)*. Untuk penjelasan yang lebih rinci tentang hal ini, lihat Terry Eagleton (2005).

2 Pada sidang PPKI, 18 Agustus 1945, I Goesti Ketoet Poedja (wakil dari wilayah Sunda Kecil/Bali-Nusa Tenggara) mengusulkan agar istilah "Allah" dalam frasa "Atas berkat

rakhmat Allah Yang Maha Kuasa", pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945, diganti menjadi istilah "Tuhan" ("Atas berkat rakhmat Tuhan Yang Maha Kuasa"). Usul tersebut barangkali karena sebutan Allah sangat khas asosiasinya dengan agama-agama abrahamik (Islam, Katolik, Protestan), sehingga dirasakan kurang inklusif bagi pengikut agama-agama di luar itu. Terhadap usul perubahan itu tidak ada keberatan atau sanggahan dari siapapun, termasuk dari golongan Islam. Akan tetapi, kesepakatan soal penggunaan kata "Tuhan" sebagai ganti "Allah" itu tidak muncul dalam Berita Republik Indonesia tahun II no.7, yang diterbitkan pada 15 Februari 1946. Kemungkinan hal ini disebabkan kesalahan teknis dalam suasana revolusi. Meski demikian, dalam Pancasila, sebutan untuk "Yang Mahasuci" itu sejak awal perumusannya telah menggunakan istilah "Ketuhanan", bukan "Keallahan".

3 Rejim negara kesejahteraan Indonesia menghendaki perpaduan antara model universal, model jaminan sosial, dan modal residual.

PANCASILA DALAM
PRAKSIS PENDIDIKAN

I

REAKTUALISASI PENDIDIKAN PANCASILA: Sebuah Pengantar

YUDI LATIF

REAKTUALISASI PENDIDIKAN PANCASILA: Sebuah Pengantar

YUDI LATIF

Negara-bangsa Indonesia didirikan dengan penuh harapan: menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Untuk mewujudkan harapan tersebut diperlukan usaha-usaha pembangunan di bidang fisik dan pembangunan di bidang nilai-kejiwaan secara berkesinambungan. Lagu Indonesia Raya dengan jelas mengingatkan: "bangunlah jiwanya, bangunlah badannya!" Kedua sayap pembangunan itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus bergerak serempak, selaras dan seimbang.

Gerak laju pembangunan Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan yang pelik. Di satu sisi, bangsa Indonesia harus mengejar ketertinggalan di bidang infrastruktur fisik, pertumbuhan ekonomi dan produktivitas nasional. Di sisi lain, bangsa ini juga harus menghadapi kerentanan sosial yang timbulkan oleh krisis nilai dan fragmentasi sosial yang bisa menghambat pembangunan fisik.

Mengejar ketertinggalan di bidang infrastruktur fisik sangat penting mengingat begitu banyaknya pekerjaan rumah yang terbengkalai dalam menata rumah fisik bangsa ini. Dalam era globalisasi dengan lalu lintas modal, barang dan manusia yang makin luas cakupannya dan dalam penetrasinya, betapa banyak karunia potensi kekayaan bangsa ini yang sulit dijangkau untuk mendapatkan akses pasar karena kendala-kendala infrastruktur fisik.

Yang tak kalah pentingnya, bahkan lebih penting lagi, adalah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap pengembangan infrastuktur nilai. Indonesia berkejaran dengan waktu untuk mengatasi degenerasi dalam nilai etis-ideologis dan karakter-jatidiri bangsa. Kita menghadapi gempuran pasar internasional dan ideologi-ideologi trans-nasional dalam situasi ketahanan kejiwaan bangsa ini sedang rapuh.

Tendensi kemerosotan dalam nilai-nilai kebangaan dan ketahanan ideologi bisa dilihat dari berbagai hasil survei dan pengukuran. Indeks Ketahanan Nasional yang disusun Labkurtannas, Lembaga Ketahanan Nasional, mengindikasikan melemahnya ketahanan ideologi dan politik dalam kurun tujuh tahun terakhir (2010-2016). Indeks ketahanan ideologi (meliputi variabel toleransi, kesederajatan dalam hukum, kesamaan hak kehidupan sosial, dan persatuan bangsa), cenderung terus merosot dari skor 2,31 (pada 2010) menjadi 2,06 (pada 2016).

Gambaran yang sama diperlihatkan oleh hasil Survei Nilai-Nilai Kebangsaan (SNK) oleh BPS 2015 (survei pertama kali di Indonesia). Dari setiap 100 orang Indonesia, 18 orang bahkan tidak tau judul lagu kebangsaan Republik Indonesia; 53% orang Indonesia tidak hafal seluruhnya lirik lagu kebangsaan; 24 dari setiap 100 orang Indonesia tidak hafal sila-sila Pancasila; 42 persen orangg Indonesia terbiasa menggunakan barang bajakan; 55 persen orang Indonesia jarang bahkan tidak pernah ikut kerja bakti.

Bila saat ini kehidupan negeri diliputi kabut apatisme dan pesimisme; riuh kegaduhan dengan miskin solusi; banyak gerakan jalanan tanpa kejelasan arah yang benar; rasa saling percaya lenyap dalam pergaulan; hukum disalahgunakan; kebaikan dimusuhi, kejahatan diagungkan; sebab utamanya karena kita mengalami krisis nilai, akibat keterbelakangan di bidang pembangunan nilai.

Kecenderungan untuk menjadikan politik dan ekonomi sebagai panglima menjadikan pembangunan nilai sebagai pelengkap. Padahal, reformasi sosial tidak akan pernah muncul hanya mengandalkan reformasi kelembagaan politik dan ekonomi, melainkan perlu berjejak pada reformasi sosial-budaya. Reformasi sosial merupakan fungsi dari perubahan proses belajar sosial secara kolektif, yang membawa transformasi tata nilai, ide dan jalan hidup *(ways of life)*. Dalam hal ini, terasa penting untuk memperhatikan jalinan erat antara nilai-budaya, politik dan ekonomi, sebagai sesuatu yang tak terpisahkan.

Tanpa nilai, pembangunan apapun kurang bernilai. Seorang cendekiawan Amerika Serikat, John Gardner, pernah mengingatkan, "Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar."

Akutnya krisis yang kita hadapi mengisyaratkan kegagalan sosialisasi nilai-karakter sebagai jiwa bangsa. Untuk memulihkannya kita memerlukan visi politik baru. Peribahasa mengatakan, "Manakala tak ada visi, rakyat akan lenyap" *(Where there is no vision, the people perish)*. Visi ini harus mempertimbangkan kenyataan bahwa krisis nasional ini berakar jauh pada penyakit nilai-ideologis yang melanda jiwa bangsa. Suatu usaha "penyembuhan sosial" perlu dilakukan dengan merevitalisasi dan mengaktualisasikan pembangunan nilai-karakter bangsa dalam wacana dan kehidupan publik.

Perhatian terhadap variabel nilai budaya dan karakter, sebagai bagian yang menentukan bagi perkembangan ekonomi dan politik suatu masyarakat/bangsa sedang mengalami gelombang pasang. Kegagalan pembangunan di sejumlah negara, setelah melewati pelbagai perubahan ekonomi dan politik, menghidupkan kembali minat dalam studi budaya. Pada 1985, Lawrence Horrison dari Harvard Center for International Affairs menerbitkan buku, *Underdevelopment Is a State of Mind: The Latin American Case*, yang menunjukkan bahwa di kebanyakan negara Amerika Latin, budaya merupakan hambatan utama untuk berkembang.

Pentingnya variabel budaya dalam perkembangan ekonomi tampak dalam kasus negara-negara multibudaya. Sekalipun semua kelompok etnis dihadapkan pada hambatan sosial-politik dan krisis ekononomi yang sama, namun sebagian kelompok lebih berhasil dibanding kelompok lainnya. Pentingnya variabel budaya dalam perkembangan politik ditunjukkan antara lain oleh riset yang dilakukan oleh Robert Putnam (1993) dan Ronald Inglehart (2000). Kesimpulan kedua ilmuwan tersebut mewarisi pemikiran rintisan dari Alexis de Tocqueville (1835), yang menyimpulkan bahwa keberhasilan suatu negara mengembangkan demokrasi sangat ditentukan oleh keterpenuhan budaya demokrasi.

Nilai-karakter bukan saja menentukan eksistensi dan kemajuan seseorang, melaikan juga eksistensi dan kemajuan sekelompok orang, seperti sebuah bangsa. Ibarat individu, pada hakekatnya setiap bangsa memiliki karakternya tersendiri yang tumbuh dari pengalaman bersama. Pengertian "bangsa" *(nation)* yang terkenal dari Otto Bauer, menyatakan bahwa, "Bangsa adalah satu persamaan, satu persatuan karakter, watak, yang persatuan karakter atau watak ini tumbuh, lahir, terjadi karena persatuan pengalaman."

Dalam Amanat Proklamasi, 17 agustus 1956, Bung Karno mengingatkan pentingnya bangsa memiliki kekuatan karakter yang

dibangun atas dasar kedalaman penghayatan atas pandangan hidup bangsa. "Bangsa Indonesia harus mempunyai isi-hidup dan arah-hidup. Kita harus mempunyai *levensinhoud* dan l*evensrichting*. Bangsa yang tidak mempunyai isi-hidup dan arah-hidup adalah bangsa yang hidupnya tidak dalam, bangsa yang dangkal, bangsa yang cetek, bangsa yang yang tidak mempunyai *levensdiepte* samasekali. Ia adalah bangsa penggemar emas-sepuhan, dan bukan emasnya batin. Ia mengagumkan kekuasaan pentung, bukan kekuasaan moril. Ia cinta kepada gebyarnya lahir, bukan kepada nurnya kebenaran dan keadilan. Ia kadang-kadang kuat,--tetapi kuatnya adalah kuatnya kulit, padahal ia kosong-mlompong di bagian dalamnya."

Dimensi-dimensi Pendidikan Pancasila

Dalam implementasinya, Pancasila sebagai ideologi yang dikehendaki efektivitasnya dalam memandu usaha-usaha transformasi sosial harus mampu memenuhi tuntutan-tuntutan praksis di segala dimensinya. Paling tidak ada tiga dimensi ideologis yang harus diperhatikan: keyakinan, pengetahuan, tindakan. *Pertama,* ideologi mengandung seperangkat keyakinan berisi tuntunan-tuntunan normatif-preskriptif yang menjadi pedoman hidup. *Kedua*, ideologi mengandung semacam paradigma pengetahuan berisi seperangkat prinsip, doktrin, dan teori, yang menyediakan kerangka interpretasi dalam memahami realitas. *Ketiga*, ideologi mengandung dimensi tindakan yang merupakan level operasional dari keyakinan dan pengetahuan dalam realitas konkret.

Sejak Era Reformasi bergulir, keyakinan warga terhadap relevansi dan adekuasi Pancasila dirasakan semakin berkurang, seiring dengan arus pengaruh dan dinamika perubahan secara internal dan eksternal. Secara internal, penurunan keyakinan itu bisa terjadi manakala terdapat kesenjangan yang lebar antara idealitas Pancasila dengan realitas

kehidupan. Untuk masa yang panjang, ketiga lapis ideologis (keyakinan, pengetahuan, dan tindakan) Pancasila belum diaktualisasikan secara efektif. Kendati keyakinan akan ketepatan Pancasila sebagai landasan normatif kehidupan berbangsa dan bernegara begitu kuat didengungkan, pada kenyataannya Pancasila sebagai kaidah fundamental negara itu tidak selalu konsisten diikuti oleh produk perundang-undangan dan kebijakan publik.

Berbeda pula dengan anggapan umum yang memandang Pancasila sekadar teori. Pada kenyataannya, Pancasila justru belum dikembangkan ke dalam seperangkat teori secara elaboratif dan komprehensif, yang dapat mewarnai konsepsi-konsepsi pengetahuan. Padahal, proses objektivikasi dari Pancasila sebagai keyakinan menjadi Pancasila sebagai ilmu sangat penting, karena ilmu merupakan jembatan antara idealitas-ideologis dan realitas-kebijakan. Setiap rancangan perundang-undangan seyogiayanya didahului oleh naskah akademik. Jika pasokan teoretis atas naskah ini diambil dari teori-teori pengetahuan yang bersumber dari paradigma-ideologis yang lain, besar peluang lahirnya kebijakan perundang-undangan yang tak sejalan dengan imperatif moral Pancasila.

Yang lebih memprihatinkan terjadi dalam kerangka operatif Pancasila. Dimensi tindakan dalam penyelenggaraan negara masih jauh panggang dari tuntutan keyakinan normatif dan pengetahuan Pancasila. Pancasila belum begitu konsisten dan efektif diimplementasikan ke dalam level operasional kebijakan dan tindakan penyelengga dan warga negara.

Kelemahan dalam mewujudkan imperatif keyakinan, pengetahuan dan tindakan ideologi Pancasila itu membuat kesaktian Pancasila berhenti sebagai klaim seremonial, kurang mampu dibumikan dalam realitas kehidupan. Pancasila diajarkan dengan bahan dan metodologi deliveri yang kurang menarik. Pancasila direduksi sekadar pengetahuan hapalan, kurang mampu diinternalisasikan sebagai pendangan hidup

yang mewujud dalam pendirian dan laku hidup. Sosialisasi Pancasila dijalankan secara vertikal: negara yang mengambil inisiatif, negara yang menafsir, negara pula yang menatar; kurang memberdayakan partisipasi masyarakat dalam usaha pengisiaan dan pembudayaan Pancasila; membuat Pancasila menjadi ideologi tertutup.

Pancasila sering diseru sebatas resep "pemadam kebakaran" konflik sosial. Sering dilupakan bahwa Pancasila bukan sekadar alat persatuan, namun juga harus menjadi praksis-ideologis yang memiliki kekuatan riil dalam melakukan perombakan mendasar pada ranah material-mental-politikal sebagai katalis bagi perwujudan keadilan sosial. Untuk itu, harus ada ikhtiar perubahan mendasar pada sistem sosial (meliputi ranah material, mental, politikal), berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila, dalam usaha mewujudkan perikehidupan kebangsaan dan kewargaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (material dan spiritual).

Tatkala ketahanan ideologi Pancasila dalam dimensi keyakinan, pengetahuan dan tindakan mengalami kerapuhan, bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan-tantangan baru secara eksternal dan internal yang dapat menimbulkan retakan dalam pandangan dunia bangsa Indonesia. Keretakan dalam pandangan dunia ini diperburuk oleh distorsi komunikatif dalam ruang publik akibat penaklukan rasionalitas nilai kebajikan hidup bersama oleh rasionalitas instrumental dari dunia sistem kapitalisme. Distorsi komunikatif ini menimbulkan keterasingan (alienasi) sosial, yang melemahkan hubungan-hubungan permusyawatan dengan hikmat-kebijaksanaan dalam kehidupan bersama.

Meluasnya gejala deprivasi dan alienasi sosial membawa dampak yang serius pada corak kehidupan kebangsaan di Indonesia. Arus pengaruh penyebaran teknologi baru bersama seni dan konsekuensi nilai-etis dan gaya hidup yang ditimbulkannya membuka jalan bagi revivalisme

identitas primordial. Lewat politisasi identitas, manusia yang pada dasarnya bersifat multi-identitas dicoba direduksi habis-habisan ke dalam satu identitas.

Singkat kata, ketahanan ideologi Pancasila dihadapkan pada dua kekuatan besar: di satu pihak adanya tarikan ke arah universalisasi lewat globalisasi, di pihak lain tekanan ke arah partikularisasi politik identitas. Dalam situasi tegangan antara universalisasi dan partikularisasi seperti itu, eksistensi Indonesia sebagai republik dituntut untuk berdiri kokoh di atas konsepsi (ide) negara dan konsepsi hukum Pancasila. Proses pengakaran Pancasila harus dilakukan dengan jalan: memantapkan keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara; mengembangkan Pancasila sebagai ideologi menjadi Pancasila sebagai ilmu; mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial; membuat Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal (negara) menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horisontal (masyarakat); dan menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan publik (Kuntowidjojo, 2001).

Tantangan pertama dalam pembudayaan Pancasila adalah bagaimana meyakinkan segenap warga negara bahwa nilai-nilai ideologi Pancasila itu cocok, relevan dan ampuh sebagai titik temu, titik tumpu dan titik tuju dalam kehidupan kebangsaan yang meajemuk. Dalam urusan keyakinan ini, seperti dalam keyakinan keagamaan, bahwa kendati tidak ada seorang pun di antara pemeluk agama (yang masih hidup), yang sudah memasuki sorga atau pun neraka, namun mereka yakin bahwa sorga dan neraka itu ada. Meyakinkan pemeluk agama akan adanya sorga dan neraka itu tidak mengadalkan penjelasan-penjelasan rasional, melainkan oleh pendekatan-pendekatan emotif (penghayatan) dengan mengandal daya pukau dan daya imajinasi dari kekuatan "mitos" (dalam arti positif).

Pemupukan keyakinan dengan kekuatan mitos itu menggabungkan antara kekuaran narasi (kisah), daya-daya estetik, permainan, ritual dan simbol.

Pengaruh kisah (sejarah, sastra dan film) terhadap kehidupan tak bisa diremehkan. Tokoh-tokoh dalam karya fiksi kerapkali mempengaruhi hidup, standar moral masyarakat, mengobarkan revolusi, dan bahkan merubah dunia. Kisah *Rosie the Riveter*, yang melukiskan sepak terjang seorang pekerja pabarik kerah-biru menjadi pengungkit bagi *Women's Liberation Movement*. Kisah Siegfried, ksatria-pahlawan legendaris dari nasionalisme Teutonik, bertanggung jawab mengantarkan Jerman pada dua perang dunia. Kisah *Barbie*, boneka molek, yang menjadi *role model* bagi jutaan gadis-gadis cilik, dengan memberikan standar gaya dan kecantikan (Lazar, et.al. 2006). Belum lagi kalau kita bicara pengaruh yang ditimbulkan oleh karya-karya Homer, Goethe hingga Ronggo Warsito, yang memberi dampak yang luas bagi *lifeword* masyarakatnya masing-masing.

Penggunaan film sebagai sarana yang efektif untuk menumbuhkan keyakinan akan kehebatan nilai-nilai kebangsaan dan kewargaan ditunjukan secara baik oleh negara Amerika Serikat. Film-film superhero seperti Captain Amerika, Superman, Batman Spiderman, Antman dan lain-lain berhasil meyakinkan anak-anak di negara tersebut bahkan jutaan anak-anak di negara-negara lain akan kehebatan dan kepahlawanan Amerika Serikat.

Dalam konteks pembentukan nasionalisme Indonesia sendiri, Bung Karno pernah menunjukan secara canggih bagaimana mengembangkan berbagai mitos integrasi nasional dengan menautkan keindonesiaan dengan epos kebesaran Majapahit dan Sriwijaya. Dia juga acapkali mencuplik kisah-kisah pewayangan sebagai sumber teladan dalam menumbuhkan keyakinan kepada rakyatnya akan kemampuan bangsa

Indonesia melalui berbagai tantangan.

Dimensi estetik dan simbolik dalam menumbuhkan kayakinan terhadap Pancasila itu kian penting dalam menjawab pertumbuhan generasi milineal. Suatu generasi yang lebih terbiasa menafsir dan merespon realitas melalui sarana-sarana simbolik dan ikonik. Dan Indonesia dengan kakayaan kulturalnya yang luar biasa bisa menjadi tambang emas untuk mengembangkan berbagai mitos berbasis ekspresi simbolik, estetik dan permainan dalam menumbuhkan dimensi keyakinan terhadap nilai-nilai Pancasila.

Tantangan kedua dalam pembudayaan Pancasila adalah bagaimana menjelaskan nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan keilmuan secara multidisiplin, antar-disiplin dan trans-disiplin. Tujuannya agar setiap warga negara memahami keluasan dan kedalaman wawasan Pancasila serta konsekuensi-konsekuensi turutunannya ke dalam berbagai bentuk pranata dan lembaga sosial. Dalam kaitan ini, Pancasila juga harus mewarnai segala aspek pendidikan kewargaan. Berbagai teori bisa digunakan untuk menjelaskan perspektif Pancasila mengenai hubungan manusia dengan kosmos, agama dan negara, hak-hak asasi manusia, konsepsi kebangsaan, demokrasi, sistem hukum nasional, keadilan sosial-ekonomi dan seterusnya. Dalam usaha ini, selain kita harus menggali khasanah pengetahuan-kearifan bangsa sendiri, perlu juga dilakukan berbagai studi komparatif dengan pengalaman sejenis di negara-negara lain, karena bagaimana pun juga nilai-nilai Pancasila memiliki dimensi-dimensi yang bersifat universal.

Tantangan ketiga dalam pembudayaan Pancasila adalah bagaimana mendorong warga negara (khususnya peserta didik) untuk dapat mengembangkan laku hidup berdasarkan nilai dan konsepsi Pancasila. Pancasila tidak berhenti sekadar butir-butir hafalan, melainkan menjelma menjadi karakter yang mendarah-daging dalam perilaku

warga dalam kehidupan publik. Selama ini, banyak guru mengajarkan pendidikan moral Pancasila seperti dokter yang memberi resep kepada orang sakit. Namun, petunjuk resep itu tak diamalkan oleh sang pasien dengan meminum obatnya; bahkan berusaha membeli obatnya pun tak sudi. Pendidikan karakter adalah ilmu amal (terapan) yang tidak diberikan kecuali untuk diamalkan. Guru mendidik (membudayakan) karakter dengan praktik keteladanan, murid mempelajari ilmu itu dengan mempraktikkan langsung laku terpuji. Pembelajaran Pancasila bisa dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok terbatas yang terdiri dari ragam identitias, lalu mendorong mereka untuk mengembangkan berbagai kegiatan dalam rangka pengamalan langsung sila-sila Pancasila.

Prioritas dalam Pembudayaan Pancasila

Proses pengakaran dan pertumbuhan keyakinan, pengetahuan dan tindakan Pancasila itu ibarat pohon yang tidak dengan sendirinya akan berakar kuat dan bertumbuh subur tanpa kesengajaan memberikan pemupukan, perawatan dan pencahayaan yang cukup. Dengan kata lain, perlu usaha-usaha sengaja untuk melakukan pembudayaan ideologi Pancasila bagi segenap penyelenggara negara dan warga negara secara terencana, sistematis, terpadu, terukur dan berkesinambungan, dengan pedoman direktif yang jelas.

Dalam membudayakan Pancasila, yang pertama-tama harus disadari adalah dasar ontologis Pancasila sebagai titik-temu, titik tumpu, dan titik tuju kehidupan bangsa yang mejemuk. Pada 1 Juni 1945, dalam mengawali urainnya tentang dasar negara, Soekarno menyerukan "bahwa kita harus mencari persetujuan, mencari persetujuan faham". Lantas ia katakan, "Kita bersama-sama mencari persatuan *Philosophische grondslag*, mencari satu '*Weltanschauung*' yang kita semuanya setuju. Saya katakan lagi setuju! Yang saudara Yamin setujui, yang Ki Bagoes setujui, yang Ki

Hadjar setujui, yang saudara Sanoesi setujui, yang saudara Abikoesno setujui, yang saudara Lim Koen Hian setujui, pendeknya kita semua mencari satu *modus*."

Kemudian, ia mengajukan lima prinsip yang menjadi titik "persetujuan" (titik temu, titik tumpu, titik tuju) segenap elemen bangsa. Kelima prinsip tersebut bernama Pancasila. Demikianlah, dasar ontologis (struktur makna terdalam) dari keberadaan Pancasila adalah kehendak mencari "persetujuan" dalam menghadirkan kemaslahatan-kebahagiaan bersama (*al-masalahah al-ammah, bonnum comune*) dalam kehidupan kebangsaan Indonesia yang mejemuk.

Dalam konteks Indonesia hari ini, bagaimana kita bisa mencari persetujuan bagi kemaslahatan umum di tengah penumpulan kecerdasan kewargaan. Persetujuan memerlukan kemampuan merumuskan substansi dan argumentasi. Adapun kita sekarang hidup di tengah buih keterapungan. Saat ucapan bergelembung tanpa isi yang bisa ditangkap. Kritik teringkus sebatas caci-maki tanpa solusi. Makna menguap dalam keriuhan viral maya. Di seantero negeri, kedalaman dihindari, kedangkalan dirayakan.

Persetujuan memerlukan rasa saling percaya, yang tumbuh dari keadaban publik. Adapun yang berkembang di sini adalah kesalingtidakpercayaan secara paripurna, baik dalam relasi antar elit, antar elit dan rakyat, maupun antar sesama rakyat. Semuanya itu terjadi karena menurunnya nalar etis dalam kehidupan politik. Setelah 20 tahun demokrasi reformasi digulirkan, politik sebagai teknik mengalami pencanggihan, namun politik sebagai etik mengalami kemunduran. Banjir uang yang mengalir ke dunia politik hari ini membawa polusi pada demokrasi dan kehidupan publik. Segala nilai dikonversikan jadi nilai uang. Relasi publik menjadi hubungan konsumtif. Politik mengalami konsumerisasi dan privatisasi. Pengibaran citra-diri menggantikan

kualitas jati-diri.

Sihir moneter ini bahkan menembus jantung pertahanan sipil. Masyarakat madani sebagai reservoir nilai sipilitas dan kesukarelaan jebol ketika uang menjadi penentu, bahkan dalam pemilihan pemimpin ormas keagamaan. Dalam kehidupan publik yang sehat, ada banyak hal yang tak bisa dibeli dengan uang. Namun, kini, cuma sedikit yang masih tersisa. Rasa saling percaya lenyap, karena sumpah dan keimanan disalahgunakan, hukum dan dan institusi lumpuh karena "diperjualbelikan"; keteladanan kemarau karena kebaikan dimusuhi, kejahatan diagungkan.

Persetujuan memerlukan kecerdasan empati, yakni kesanggupan *tepa salira* untuk bisa menempatkan diri dalam situasi orang lain. Tapi mana mungkin kepekaan bisa diasah bila proses pendidikan lebih mengutamakan kecerdasan dalam "kedirian yang bersifat privat" *(private self)*, seperti penekanan pada pelajaran yang bersifat *hard skill*. Kecerdasan empati memerlukan perhatian pada kecerdasan dalam "kedirian yang bersifat publik" *(public self)* yang mengarah pada "kecerdasan kewargaan" *(civic intelligence)*. Pendidikan harus menumbuhkan kompetensi warga untuk mengemban tugas kewargaan *(civic duty)*, memahami kewajiban dan hak warga, mampu menempatkan keunggulan pribadi dalam harmoni-kemajuan bersama, bisa mencari titik-temu dalam perbedaan, dan memenuhi panggilan keterlibatan dalam urusan publik secara suka cita *(civic joy)*.

Persetujuan memerlukan keyakinan bahwa dengan bersatu kita bisa meraih kemajuan dan persemakmuran bersama. Bangsa yang tidak bisa menunjukan prestasi dalam peradaban dan kemakmuran tidak memberi kebanggaan pada anak-anak bangsanya. Bangsa yang tidak merasa bangga pada dirinya cenderung mengembangkan sikap nyinyir, saling menjatuhkan dan saling tidak percaya pada apapun dan siapapun. Bangsa yang tidak mampu meningkatkan kemakmuran secara merata

cenderung mengarah pada eksklusivisme primordial yang mengarah pada disintegrasi bangsa.

Berdiri di awal milenium baru, menyaksian arus globalisasi yang makin luas cakupannya, dalam penetrasinya dan instan kecepatannya mengusik rasa hirau kita, apa kebanggaan Indonesia di pentas dunia? Untuk itu, kita perlu "senjata" baru, cara pengucapan baru, dan kharisma pengubah sejarah yang baru. Ilmu dan teknologi, daya kreasi yang berbasis etos dan etis-estetis yang mewujud ke dalam kualitas manusia unggul adalah senjata, bahasa, dan kharisma baru kita untuk memenangkan masa depan.

Persetujuan akan kemaslahatan bersama juga mengalami tantangan dari peruncingan konflik nilai yang ditimbulkan oleh pluralisasi ideologi sebagai imbas globalisasi. Selain menimbulkan gejala ketercerabutan (deprivasi) sosial, hidup dalam era globalisasi juga diwarnai oleh kesenjangan kemakmuran antara "the winners" dan "the losers" bersamaan dengan gerak interpenetrasi berbagai ideologi-budaya yang menyebabkan terjadinya diferensiasi dan fragmentasi dalam pandangan dunia. Bagi Indonesia, intensitas arus globalisasi yang berbarengan dengan demokratisasi era reformasi juga ditandai oleh situasi paradoks: tatkala Pancasila "ditinggalkan", ideologi lain merebak di ruang publik.

Gelombang pasang militansi ideologi-ideologi divergen di tengah surutnya ideologi kovengen (Pancasila) meledakkan ekstrimisme di ruang publik. Di tilik dari sudut ini, ekstrimisme dan terorisme bangkit sebagai cerminan dari kelalaian dan kelemahan kita dalam membumikan Pancasila sebagai ideologi kerja *(working ideology)*.

Bila Pancasila dikehendaki kesaktiannya sebagai ideologi kerja, ada lima jalur yang harus ditempuh. Pertama, melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pemahaman terhadap Pancasila dengan melakukan penyegaran materi sosialisasi, pelurusan sejarah Pancasila, hingga

penyegaran metode sosialisasi dan pedagogi Pancasila. Kedua, mengembangkan kerukunan (inklusi sosial) di tengah msayarakat melalui penumbuhan budaya kewargaan (*civic culture*) berbasis nilai-nilai Pancasila, serta penguatan dialog lintas agama, suku, ras dan golongan. Ketiga, mendorong terwujudnya keadilan sosial melalui perumusan sistem ekonomi dan pembangunan berbasis nilai-nilai Pancasila, serta perajutan kemitraan ekonomi demi terbangunnya praktik ekonomi berkeadilan sosial. Keempat, menguatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam produk perundang-undangan, kebijakan publik serta lembaga kenegaraan dan kemasyarakatan. Kelima, menumbuhkan, mempromosikan dan mengapresiasi keteladanan agen-agen kenegaraan dan kemasyarakatan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Dari jalur pemahaman diharapkan bisa mengarah pada Indonesia cerdas kewargaan. Jalur kerukunan (inklusi sosial) mengarah pada Indonesia bersatu. Jalur keadilan mengarah pada Indonesia berbagi sejahtera. Jalur pelembagaan mengarah pada Indonesia tertata-terlembaga. Jalur keteladanan mengarah pada Indonesia terpuji. Itulah lima jalur utama menuju persetujuan bangsa dalam kerangka kemaslahatan-kebahagiaan hidup bersama.

Titik kritikalnya terletak pada kesanggupan untuk menggelorakan semangat bersatu, berbagi, dan berprestasi. Bersatu artinya kita kembangkan kembali spirit Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman yang terbentang sepanjang garis katulistiwa, tidak boleh menjadi alasan untuk saling membenci, tetapi justru menjadi daya perekat bangsa. "Bersatu dalam keragaman dan beragam dalam persatuan". Untuk itu, kita harus memperkuat kecerdasan kewargaan dengan mengasah nalar etis dan belarasa dalam wujud "kebajikan kewargaan" *(the virtue of civility)*, yakni rasa pertautan dan kemitraan di antara ragam perbedaan serta kesediaan untuk berbagi substansi bersama, melampaui kepentingan kelompok,

untuk kemudian melunakkan dan menyerahkannya secara toleran kepada tertib sipil.

Berbagi artinya kita kembangkan etos kepedulian, welas asih. Satu sama lain menjadi saudara dari keluarga besar keindonesiaan. Berbagi sejatinya merupakan saripati nilai-nilai Pancasila itu sendiri, yakni gotong-royong. Dalam berbagi ada semangat saling memberi dan menerima; berat sama dipikul, ringan sama dijinjing; menyelesaikan persoalan dengan jalan musyawarah dan mufakat. Di dalamnya tersimpan pula makna yang senantiasa harus kita aktifkan: menebarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa setiap warga negara dijamin hak hidup, hak milik dan kehormatannya, dengan pelayanan publik yang setara.

Berpestasi merupakan wujud aktualisasi kebebasan positif, dalam rangka mengembangkan potensi insani dan potensi kolektif bangsa, dalam usaha mencapai cita-cita nasional. Berprestasi menjadi hal penting bagi semangat kita sebagai bangsa untuk terus memberikan karya dan pelayanan terbaik bagi masyarakat, bangsa bahkan kemanusiaan secara global.

Di tengah kondisi bangsa yang sedang diuji oleh letupan konflik akibat benturan kepentingan dan pemahaman; seruan untuk bersatu, berbagi dan berprestasi, menjadi ajakan yang tidak hanya mendamaikan, tetapi juga mengajak kita keluar dari kemelut pertikaian menuju prestasi positif bagi kemajuan bangsa.

Pembudayaan Pancasila memerlukan perhatian secara simultan terhadap masalah persatuan dan keadilan melalui pengerahan daya-daya terbaik prestasi dan pelayanan segenap elemen bangsa di berbagai bidang. Kita tidak bisa memperjuangkan persatuan dengan mengorbankan keadilan; sebaliknya, tak bisa memperjuangkan keadilan dengan mengorbankan persatuan. Keduanya ibarat sepasang sayap garuda yang

harus bergerak secara serempak.

Kebijakan *affirmative action* sebagai ikhtiar mengatasi kesenjangan sosial memang bisa dibenarkan. Menutu John Raws, dalam rangka keadilan, setiap orang pada dasarnya memang harus diperlakukan setara *(the principle of equal liberty).* Kecuali, bila dengan perlakuan setara itu justru melahirkan ketidakadilan yang lebih lebar, maka perlu diberikan perlakuan khusus bagi kalangan yang termarjinalkan (*the principle of difference).* Meski demikian, perlakuan khusus tersebut seyogyanya tidak diletakkan dalam kerangka perbedaan identitas etnis-keagamaan yang bisa mengoyak persatuan, melainkan diberikan pada siapapun yang termiskinkan tanpa membedakan asal-usul primordialnya.

Di dalam kata "adil" itu sendiri sesungguhnya sudah terkandung imperatif menjaga persatuan. Berasal dari kata *'al-adl'* (adil), yang secara harfiah berarti 'lurus', 'seimbang', keadilan berarti memperlakukan setiap orang secara fair, tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif, perbedaan keturunan, keagamaan, dan status sosial. Dalam Al-Qur'an (Surat Al-Maidah, ayat 8) diingatkan, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Tepatlah kiranya bila pokok pikiran pertama Pembukaan Konstitusi Proklamasi menggariskan misi (fungsi) negara untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia". Dalam Pancasila, sila kerakyatan didahului dengan sila persatuan, dan diakhiri oleh sila keadilan. Itu berarti, tanpa prasyarat integrasi nasional, mengembangkan demokrasi ibarat menegakkan

benang basah. Saat yang sama, demokrasi yang tidak mendorong keadilan sosial, malah memperluas kesenjangan sosial, bisa melahirkan frustrasi sosial yang bisa bebalik menikam demokrasi.

Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan kehilangan makna substantifnya sejauh tidak dapat mendekati perwujudan "negara persatuan" (negara yang bisa mengatasi paham perseorangan dan golongan) serta "negara keadilan" yang dapat mewujudkan kesejahteraan umum.

Dalam kaitan dengan negara persatuan, untuk masa yang panjang, politik segregasi telah mengantarkan Indonesia sebagai masyarakat plural yang terkunci dalam situasi "plural monokultralisme"; terdiri dari banyak etnis-agama yang hidup dalam kepompong budayanya masing-masing, tanpa kerapatan interaksi. *Political correctness* dituntut untuk mentrasformasikan situasi "plural-monokulturalisme" menuju situasi "plural-multikulturalisme" lewat berbagai kebijakan yang dapat mencegah berbagai bentuk segregasi sosial (dalam dunia persekolahan, pemukiman, pekerjaan dan perkumpulan), seraya membuka ruang-ruang komunikatif bagi proses-proses interaktif, pertukaran pemikiran dan penyerbukan silang budaya.

Masyarakat multikultural hanya bisa dipertahankan oleh suatu budaya politik jika kewargaan demokratis *(democratic citizenship)* bisa menjamin bukan saja hak-hak sipil dan politik setiap individu *(individual rights),* tetapi juga hak-hak sosial-budaya kelompok masyarakat *(communitarian rights).* Seperti kata Habermas, "Warga bangsa harus dapat mengalami nilai keadilan yang berkaitan dengan hak-haknya juga dalam bentuk keamanan sosial serta pengakuan timbal balik dalam perbedaan bentuk-bentuk budaya kehidupan (Habermas, 1999: 119).

Upaya negara untuk memberi ruang bagi koeksistensi dengan kesetaraan hak bagi berbagai kelompok etnis, badaya dan agama

juga tidak boleh dibayar oleh ongkos yang mahal berupa fragmentasi masyarakat. Oleh karena itu, setiap kelompok dituntut untuk memiliki komitmen kebangsaan dengan menjunjung tinggi konsensus nasional seperti yang tertuang dalam Pancasila dan konsitusi negara, serta unsur-unsur pemersatu bangsa lainnya, seperti bahasa Indonesia.

Seiring dengan itu, kesenjangan ekonomi yang kerap menyulut sentimen primordial harus diatasi oleh negara dengan mengembangkan negara kesejahteraan dan pasar kesejahteraan yang mendorong ke arah perekonomian yang lebih inklusif. *Affirmative action* bisa diberlakukan dengan catatan tidak berlandaskan pada perbedaan kelompok etnis atau agama, melainkan bagi siapa saja yang mengalami nasib kurang beruntung.

Pada akhirnya, seperti diingatkan oleh John Raws (1980: 540), sumber persatuan dari negeri multikultural adalah apa yang disebutnya sebagai "konsepsi keadilan bersama" *(a shared conception of justice):* "Kendatipun suatu masyarakat terbelah dan pluralistik...persetujuan publik akan masalah keadilan sosial dan politik dapat mendukung persaudaraan kewargaan dan ikatan perkumpulan."

Hanya dengan menguatkan semangat bersatu dan berbagi kita bisa meraih prestasi kehidupan bangsa di berbagai bidang. Prestasi dalam mewujudkan cita-cita nasional menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Prestasi dalam kerangka persetujuan menghadirkan kemaslahatan-kebahagiaan hidup bersama. Inilah impian kita bersama, sebagaimana diwakili oleh tekad Bung Hatta, "Aku ingin membangun dunia di mana semua orang merasa bahagia di dalamnya."

Penutup

Semuanya itu memerlukan pergeseran atau penyesuaian pada pendekatan dan metodologi dalam pendidikan karakter. Dalam

pendidikan karakter, komunitas sekolah mengidentifikasi nilai-nilai inti sekolah dan pekerjaan untuk mendidik dan meneguhkan nilai-nilai bersama dalam kehidupan siswa. Konsensus mesti dicapai untuk mengembangkan visi bersama tentang sifat-sifat karakter yang harus dipelihara. Sifat-sifat karakter ini harus merembesi lingkungan belajar siswa baik dalam kelas, jalan masuk, gimnasium, kafetaria, lapangan olah raga dan tempat-tempat lainnya. Sifat-sifat karakter merupakan bagian dari tatanan komunitas secara keseluruhan dan *stakeholders* menyusun model dari perlaku yang diharapkan.

Pendidikan karakter seringkali diintroduksikan ke dalam kelas lewat medium kesusateraan dan studi kepahlawanan. Siswa memeriksa sifat-sifat karakter yang menjelma dalam diri para pahlawan itu. Studi seperti itu hanyalah bagian dari keseluruhan pendidikan karakter yang ditransformasikan menjadi ethos komunitas sekolah. Pada intinya, untuk menanamkan nilai-nilai dasar, siswa harus bisa menemukan teladan yang baik dalam semua aspek kehidupan sekolah.

Rushworth Kidder memerikan tujuk kualitas yang diperlukan untuk suatu program pendidikan karakter yang berhasil, yang ia sebut sebagai "seven E's".

- *Empowered* (pemberdayaan). Guru-guru harus diberdayakan untuk mengajar pendidikan karakter, karena masyarakat kita menghendakinya. Opini publik menunjukkan dukungan yang luas bagi pendidikan karakter di sekolah dan kita harus meyakinkan para guru bahwa mereka sanggup melakukannya.
- *Effective* (efektif). Adalah mungkin untuk mengajarkan pendidikan karakter secara efektif. Kidder menyatakan, "Kita memiliki segala bukti bahwa ketika kita melakukan intervensi dalam proses pendidikan karakter, siswa menjadi mengerti tentang banyak hal yang sebelumnya tak mereka pahami. Proses pendidikan yang

diberikan benar-benar meningkatkan kemampuan penalaran moral mereka."

- *Extended into the community* (diperluas ke komunitas). Komunitas harus menolong sekolah untuk memahami nilai-nilai yang penting lantas mendukung program-programnya. "Jangan pernah mencoba menyusun program pendidikan karakter tanpa melibatkan komunitas terlebih dahulu, karena tatkala anda mulai menjalankan progam akan ada suara yang mempertanyakan, nilai-nilai siapa yang diajarkan?
- *Embedded* (melekat). "Jangan memberikan pendidikan karakter secara terpisah; jangan menciptakan semacam ghetto etik yang menempatkan pendidikan karakter pada suatu sudut kurikulum. Integrasikan hal itu ke dalam seluruh rangkaian kurikulum dan proses pembelajaran. Guru tidak punya kemewahan waktu untuk mengajar matapelajaran etik tersendiri, tetapi mereka bisa memberikan pesan etik pada setiap matapelajaran.
- *Engaged* (terlibat). "Buatlah komunitas terlibat dengan menyodorkan topik-topik yang mereka rasa sangat penting. Publik saat ini amat peduli pada soal-soal seperti *sportsmanship*, penipuan dan teknologi. Tatkala guru mengajarkan keterampilan komputer pada anak-anak, pertama-tama bicarakanlah segi-segi etik dalam menggunakan komputer, dan seterusnya.
- *Epistemological* (Epistemologis). "Kembangkan kerangka konseptual, suatu cara untuk membicarakan soal etika. Berbuat lebih banyak ketimbang mengumpulkan anak-anak untuk membicangkan soal ide-ide moral. Mesti ada koherensi antara cara berfikir tentang makna etik dengan upaya menolong siswa untuk mampu menerapkannya secara baik.
- *Evaluative* (evaluatif). Buatlah beberapa struktur, seperti *pre-tests*

dan *post-tests*, yang memungkinkan guru memetakan kemajuan siswa. Kidder menawarkan 'skala lima poin' yang bermula dari (1) kesadaran etik, lantas (2) kepercayaan diri untuk berpikir tentang, dan membuat keputusan etik, lantas (3) kapasitas untuk menggunakan kepercayaan diri itu secara praktis dalam kehidupan seseorang, lantas (4) kapasitas untuk menggunakan pengalaman praktis itu dalam komunitas, dan akhirnya (5) kapasistas untuk menjadi agen perubahan—untuk merealisasikan ide-ide etik ini dan menciptakan dunia yang berbeda. Guru bisa membawa siswa mengarungi tahap-tahap itu dan mengevaluasi di mana posisi mereka dalam tahapan tersebut.

Hal penting yang ditekankan di sini adalah pentingnya pertautan pengetahuan moral (*moral judgement*) dengan perilaku aktual *(actual conduct) dalam* situasi konkrit *(moral situations).* Adalah benar bahwa pengetahuan dan pemahaman moral adalah prasyarat bagi tindakan moral. Masalahnya, keputusan moral sebagai tindakan aktual ditentukan dalam konteks situasi yang konkrit. Situasi moral yang berbeda bisa mempengaruhi keputusan tindakan moral yang berbeda.

"Cacat terbesar dari pendidikan moral secara tradisional," kata Norman J. Bull (1973), "adalah penekanannya pada pengajaran prinsip-prinsip moral secara tertutup, dengan sedikit rujukan pada situasi-situasi yang konkrit." Hal ini mengabaikan kenyataan bahwa terdapat keumuman dan kekhususan dalam kehidupan moral. Oleh karena itu, siswa harus diperkenalkan dengan pengalaman konkrit tentang bagaimana mengaplikasikan prinsip-prinsip moralitas yang umum itu ke dalam situasi yang spesifik, agar mereka tidak terjebak ke dalam keputusan dan tindakan moral yang bersifat hitam-putih.

Akhirnya, patut dihayati nasihat Kidder yang menekankan

pentingnya para pendidik untuk meyakini bahwa mereka, sebagai individu, sanggup membuat perbedaan. Beberapa orang yang pernah bangkit dari keterpurukan hidup seringkali menyebut perang penting seseorang, dan itu seringkali guru. Kekuatan dari keteladanan seseorang sungguh fenomenal.

Keseluruhan tulisan pada buku ini merupakan suatu hasil dari proses induktif dan deduktif. Proses induktif dilalui melalui hasil pengamatan dan penelitian lapangan tentang praktik pendidikan Pancasila di berbagai sekolah dan komunitas. Adapun proses deduktif duturunkan sebagai hasil studi kepustakaan dan hasil pembelajaran dari kisah keberhasilan (success stories) praktik pendidikan Pancasila, yang kemudian disodorkan sebagai alternatif pendidikan Pancasila di masa depan. []

PANCASILA DALAM
PRAKSIS PENDIDIKAN

II

DISKURSUS PENDIDIKAN PANCASILA

DWI SISWOYO

DISKURSUS PENDIDIKAN PANCASILA

DWI SISWOYO

Kemerdekaan dan Kepribadian Nasional adalah laksana dua anak-kembar yang melengket satu sama lain, yang tak dapat dipisahkan tanpa membawa bencana kepada masing-masing (Pidato Bung Karno, 17 Agustus, 1961).

Aku bersemboyan: Biar melati dan mawar dan kenanga dan cempaka dan semua bunga mekar bersama di taman sari Indonesia (Pidato Bung Karno, 17 Agustus 1964).

Dalam lingkungan garis semboyan negara "Bhinneka tunggal ika", yaitu "persatuan dalam pusparagam, dapat kita hidupkan hubungan harmoni itu (Pidato Muhammad Hatta, pada Konggres Kebudayaan ke II, 7 Oktober 1951).

Dimensi historis, dimensi filosofis, dimensi psikologis, dimensi sosiologis merupakan komponen-komponen esensial dari fondasi-fondasi pendidikan (Van Cleve Morris, 1963). Fondasi pendidikan adalah sebuah studi tentang fakta-fakta dan prinsip-prinsip dasar yang melandasi pencarian kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik pendidikan yang berharga dan efektif. Prinsip-prinsip ini adalah dasar dibangunnya rumah pendidikan. Jika dasar itu substansial, sandaran dari struktur akan kuat, dan sebaliknya (Stanford W. Reitman, 1977).

Tulisan ini difokuskan pada tinjauan dimensi historis, dan filosofis, yang kedua hal itu tidak lepas dari dimensi ideologis, kultural dan pedagogis. Oleh karena itu kelima dimensi ini secara interkoneksitas dikaji dalam tulisan ini. Dimensi-dimensi ini penting dipahami dan dihayati oleh pendidik dan subjek didik khususnya dan manusia Indonesia umumnya. Namun dengan keterbatasan waktu penulis belum dapat mengkaji secara komprehensif sesuai dengan judul tulisan termaksud.

Dimensi Historis

Sejarah ditulis berdasarkan kesadaran mengenai hubungan yang tidak dapat diretakkan antara idam-idaman *keakanan*, hari depan, dengan *kekinian*, waktu sekarang, dan *kelampauan* (Soedjatmoko, 1985). Sejarah masa lampau harus dipelajari dengan berpijak kepada kenyataan-kenyataan perkembangan situasi sekarang, serta dengan menancapkan perkiraan-perkiraan dan harapan-harapan yang berperspektif ke masa yang akan datang (Roeslan Abdulgani, 1963). Belajar sejarah bukan hanya memahami kehidupan, melainkan juga sekaigus menghayati kehidupan. Makin mendalam penghayatan orang perihal kehidupan akan semakin bermaknalah kehidupannya.

Ilmu sejarah meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau, beserta segala kejadian-kejadiannya, dengan maksud untuk kemudian menilai secara kritis seluruh hasil penelitin dan penyelidikan tersebut, untuk akhirnya dijadikan perbendaharaan-pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang dan arah kemajuan masa depan (Roeslan Abdulgani, 1963) yang diidealkan.

Idealitas dan realitas, dalam perkembangannya sangat bersangkut paut, maupun dalam perkembangan yang sejalan maupun dalam hubungan keadaan dan reaksi. Realitas yang dihadapi dengan pahit

sekali, seringkali menimbulkan dalam qalbu suatu ideal sebagai pengobat jiwa yang luka (Mohammad Hatta, 1956). Idealitas yang memberikan harapan bagi masa datang dan menjadi pendorong dalam pemikiran dan perjuangan para pemuda bangsa dalam menentukan nasib bangsanya.

Sebagai pengganti Hindia Belanda yang zalim, tumbuh secara berangsur-angsur di dalam diri kaum muda Indonesia, sejak ia memperoleh keinsyafan tentang kewajiban sebagai putera bangsa (Mohammad Hatta, 1956). Pembelaan Bung Hatta (1976) di muka Mahkamah Belanda di Den Haag dalam bulan Maret 1928, menegaskan antara lain:

> "Indonesia Merdeka telah menjadi suara pelajar Indonesia Muda. Mungkin suara ini belum terdengar oleh pihak penguasa, tetapi pada suatu waktu, suara itu pastai akan tertangkap. Suara itu tidak dapat diabaikan begitu saja, karena dibelakangnya berdiri suatu kemauan keras untuk merebut kembali dan mempertahankan hak-hak tertentu, yakni agar dapat dibentuk suatu Negara Indonesia Merdeka, cepat atau lambat!".

Sejalan dengan Bung Hatta, pidato pembelaan Bung Karno di muka Hakim Kolonial Belanda, 22 Desember 1930 di Bandung, berjudul Indonesia Menggugat, memuat kupasan yang tajam dan luas mengenai keadaan politik internasional dan kerusakan masyarakat Indonesia di bawah penjjajahan asing, dibentangkan pula sebagai azas pangkal partai yang dipimpinny dua pokok yang terpenting, yaitu massa aksi dan non-kooperasi/*selfhelp* sebagai strategi politik untuk melenyapkan kolonialisme dan imperalisme. Bung Karno antara lain menegaskan bahwa

> "Putusan Tuan-tuan Hakim atas usaha kami orang, adalah putusan atas usaha rakyat Indonesia sendiri, atas usaha Ibu Indonesia sendiri. Putusan bebas, rakyat Indonesia akan bersyukur, putusan tidak bebas, rakyat Indonesia akan tafakur".

Buku Indonesia Menggugat tersebar ke seluruh pengadilan Eropa dan banyak prptes resmi dari para ahli hukum, baik dari dalam maupun luar negeri, sehinggaGubernur Jendral mengubah hukuman terhadap Soekarno menjadi dua tahun. Di pagi hari setelah selesai menjalani hukuman, Direktur Penjara mengiringkannya ke pintu keluar sambil bertanya, *"Ir Soekarno, Apakah tuan betul-betul akan memulai kehidupan baru?"*. Sambil berjabat tangan , Soekarno menjawab, *"Seorang pemimpin tak berubah karena hukuman. Saya masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan, dan saya meninggalkan penjara untuk pikiran yang sama".*

Oleh karena itu maka kemerdekaan adalah syarat yang maha penting untuk menghilangkan kapitalisme dan kapitalisme (Bung Karno, 1933). Pidato-pidato Bung Hataa dan Bung Hatta tersebut mencerminkan amanat penderitaan rakyat pada waktu itu dan sekaligus mempunyai maknna mengilhami jalannya perjuangan kemerdekaan selanjutnya.

Oleh karena itulah Bung Karno juga pernah mengingatkan dalam pidato pembukaan **Konferensi Asia-Afrika** di Bandung tahun 1955 (Roeslan Abdulgani, 1980), bahwa janganlah hendaknya melihat kolonialisme dalam bentuk klasiknya saja. Kolonialisme mempunyai juga baju modern, dalam bentuk penguasaan ekonomi, penguasaan intelektual atau penguasaan material yang dilakukan sekumpulan kecil orang-orang asing di negeri ini. Namun optimisme Bung Karno dalam Konferensi Asia-Afrika itu dikemukakan: janganlah mengutuki pahit-getirnya masa silam, pandanganlah dengan tegas ke masa depan. Kenangkan, bahawa tujuan manusia yang tertinggi adalah pembebasan manusia dari belenggu

ketakutan, dari belenggu yang menurunkan derajatnya, dari belenggu kesengsaraan dan kemiskinan. Pembebasan manusia dari ikatan-ikatan jasmani, rohani akal-pikiran, yang menghalang-halangi kemajuan mayoritas umat manusia dapat diwujudkan dengan kemerdekaan.

Secara historis, para pemimimpin bangsa, dari segala golongan memiliki keinginan dalam hati, supaya di dalam Indonesia Merdeka tidak saja berlaku kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya masing, tetapi juga perdamaian agama (Mohammad Hatta, 1956). Oleh karena itu, atas anjuran Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945 yang dikenal dengan **Lahirnya Pancasila** diterimalah **"Ketuhanan Yang Maha Esa"** sebagai sila ke lima.

Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPKI, Bung Karno mengupas ke lima mutiara berharga dari Pancasila, yaitu:

1. Kebangsaan,
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan,
3. Mufakat atau Demokrasi,
4. Keadilan Sosial,
5. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bung Karno menjelaskan, hari depan bangsa harus berdasar pada Kebangsaan, karena "orang dan tempat tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya.

Namun Bung Karno, di awal pidatonya menyatakan bahwa:

> Paduka tuan Ketua yang mulia! Sesudah tiga hari berturut-turut anggota-anggota Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya.

> Maaf, beribu maaf! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan d-a-s-a-r-nya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: *P-h-i-l-o-s-o-f-i-s-c-h-e g-r-o-n-d-s-l-a-g* dari pada Indonesia Merdeka.

"Philosofische grondslag" menurut Bung Karno adalah pondamen, filsafat, pikiran-yang-sedalam-dalamnya, jiwa, hasyat-yang-sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Jadi, Bung Karno yang pertama kali berpidato tentang Pancasila, bukan Muh. Yamin.

Dalam sidang 1 Panitia Lima (Mohammad Hatta Ahmad Subardjo Djojoadisurjo, A.A. Maramis, Sunario, A. G. Pringgodigdo) pada tanggal 10 Januari 1975, Prof. Mr. Sunario menanyakan kepada Bung Hatta, apakah Moh. Yamin mengucapkan pidato tanggal 29 Mei 1945 yang antara lain **isinya mirip dengan Pancasila?** Jawab Bung Hatta: Tidak benar; Bung Yamin agak licik; sebenarnya pidato itu adalah yang diucapkan dalam sidang panitia kecil. Bung Karno lah satu-satunya yang tegas-tegas mengusulkan *filosofishe gronslag* untuk negara yang akan dibentuk: yaitu lima sila yang disebut Pancasila; hanya urutannya sila Ketuhanan ada di bawah (Panitia Lima, 1978).

Arsip BPUPKI yang disimpan oleh Mr. A.G. Pringgodigdo, dan kemudian dipinjam oleh Mr. M. Yamin dinyatakan hilang. Pada tahun 1991, A.B. Kusuma berupaya mencari Arsip BPUPK, PPKI dan arsip sekitar Proklamasi ke Nederland dan Amerika Serikat. Waktu di Nederland A.B. Kusama mendapat keterangan bahwa arsip BPUPK dengan kode *"Pringgodigdo Archief"* telah dikembalikan ke Indonesia. Kenyataannya benar, bahwa "Koleksi Yamin", yakni arsip yang dipinjam M. Yamin dari AG. Pringgodigdo dan dinyatakan hilang telah ditemukan kembali di

Pura Mangkunegaran, Surakarta, yang selanjutnya oleh petugas Arsip Nasional disimpan di Arsip Nasional (A.B. Kusuma, 1994).

Muh. Yamin, yang oleh Nugroho Notosusanto dipandang sebagai orang yang pertama kali mengemukakan Pancasila, secara akademik **ada kesalahan,** karena tidak didukung oleh dokumen yang ada di "Arsip Pringgodigdo" dan "Koleksi Yamin". Nugroho Notosusanto (1979) dalam bukunya "Naskah Proklamasi Yang Otentik dan Rumusan Pancasila Yang Otentik" menyebutkan dalam pidatonya lima azas atau dasar negara kebangsaan Republik Indonesia, yakni:

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat.

Berdasarkan pernyataan Bung Hatta (Panitia Lima, 1978), lima azas atau dasar negara kebangsaan Republik Indonesia tersebut, disampaikan oleh Muh. Yamin pada sidang panitia kecil tanggal 22 Juni 1945, yang diketuai oleh Ir. Sukarno, bukan pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, yang seakan-akan mendahului pidato Bung Karno. Jadi satu-satunya tokoh bangsa yang pertama kali berpidato tentang dasar negara adalah Bung Karno pada tanggal 1 juni 1945, yang dikenal dengan Lahirnya Pancasila.

Pancasila yang dipidatokan Bung Karno, pada tanggal 1 Juni sudah direnungkan ketika Bung Karno di tahan di Ende, Flores dari 14 Januari 1934 sd 18 Oktober 1938. Di bawah pohon di halaman rumah di Ende itu Bung Karno menghabiskan waktu berjam-jam merenungkan ilham dari Tuhan, cyang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Bung Karno mengatakan bahwa ia tidak menciptakan Pancasila. Ia hanya menggalinya

jauh ke dalam bumi pertiwi sehingga menemukan lima butir mutiara yang indah itu (Cindy Adams, 2007).

Notonagoro pada tanggal 19 September 1951 pada penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa kepada Bung Karno, menyatakan: Sungguh kami tidak hanya berbicara atas nama Senat dan Universitas Gadjah Mada, tetapi juga sesuai dengan yang terkandung dalam sanubari bangsa Indonesia, bahwa Bung Karno berjasa amat besar sebagai pencipta Pancasila. Bukannya Pancasila dalam bentuknya yang berturut-turut terjelma dalam perkataan-perkataan yang tertentu, yang satu sama lainya agak mengandung perbedaan, sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, Mukadimah Konstitusi Sementara dari Republik Indonesia Serikat, Mukadimah Undang-Undang Sementara Negara Kesatuan kita, akan tetapi Pancasila dalam asas dan pengertiaannya yang tetap, sebagai dasar filosofi negara Republik Indonesia, bukannya bentuk yang formal, akan tetapi sifat materialnyalah yang dimaksudkan (Notonagoro, 1983).

Pernyataan Notonagoro di atas, melihat Pancasila dari sudut yang hakiki, dari sudut filosofi tentang asal mula Pancasila. Ki Hadjar Dewantara juga menyatakan bahwa pencipta Pancasila kita itu tidak lain dari pada Bung Karno sendiri, yang menurut Dr. Radjiman Wedyodiningrat, seolah-olah ucapannya itu adalah ilham yang langsung timbul dari ujung sanubarinya. Bagaimanapun juga, kita menerima ucapan-ucapan itu sebagai kenyataan yang kita benarkan, kita akui dan kita sahkan secara yakin dan ikhlas (Ki Hadjar Dewantara, 1950).

Pancasila adalah *"Philosofische grondslag"* dari pada Indonesia Merdeka. *"Philosofische grondslag"* itulah pundamen, filsafat, pikiran-yang-sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat-yang-sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi (Sukarno, 1964). Oleh karena itu Pancasila bukan hanya ideologi saja, tetapi juga filosofi negara Indonesia. Secara heuristik, lahirnya filosofi

Pancasila sebagai asas atau prinsip yang tetap, sebagai dasar filosofi negara adalah pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato Bung Karno yang lamanya kira-kira 1 jam pada sidang BPUPKI dalam menjawab pertanyaan ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wedyodiningrat tentang negara yang akan kita bentuk *apa dasarnya*. Pidato itu disambut hampir semua anggota dengan tepuk tangan riuh.

Pandangan-pandangan Bung Karno tentang negara dan bangsa (Pancasila) sangat furistik. Alfian menyatakan bahwa, di antara para pemikir modern Indonesia, Sukarno adalah yang terpenting dan terbesar (Alfian, 1982). Hal ini bukan saja karena kualitas pemikiran-pemikirannya yang orisinal dan brilian, melainkan juga karena pemikiran-pemikirannya berhasil menjangkau jauh ke dalam masyarakat. Ini bukan berarti bahwa pemikiran-pemikiran tokoh lain tidak mampu bersaing, namun dalam keluasan dan pengaruhnya pemikiran-pemikiran Sukarno memang tiada duanya.

Bung Karno ketika mendapat gelar doctor honoris causa dalam Ilmu Hukum dari UGM pada tanggal 19 September tahun 1951 menyampaikan pidato yang berjudul "Ilmu dan Amal". Notonagoro sebagai promotor Bung Karno menyatakan bahwa Paduka Yang Mulia Ir. Sukarno adalah yang untuk pertama kalinya melahirkan dan mengusulkan Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Di malam sebelum Bung Karno akan berbicara di Badan Penyelidik, ia pergi ke luar rumah. Seorang diri, ia memandang bintang-bintang di langit. Dalam kekaguman pada ciptaan yang sempurna itu, ia meratap pelan-pelan. Disampaikan kepada Tuhan, ia menangis karena besok nya menghadapi saat bersejarah dalam hidupnya. Dan Bung Karno memerlukan bantuan Tuhan. Bung Karno berdoa kepada Tuhan Yang

Maha Kuasa:

> "Aku tahu, pemikiran yang akan kusampaikan bukanlah milikku. Engkaulah yang membukakannya kepadaku. Hanya Engkaulah yang Maha Pencipta. Engkaulah yang selalu memberi petunjuk pada setiap napas hidupku. Ya Allah, berikan kembali petunjuk serta ilham-Mu kepadaku" (Cindy Adam, 2007).

Akhirnya Pancasila yang ditentukan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang diketuai oleh Bung Karno, jadi setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan dan Negara Indonesia berdiri, berbunyi:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengingat pentingnya sejarah, maka Bung Karno (1960), selain setuju dengan ungkapan Abraham Lincoln, *"one cannot escape history"* (orang tidak dapat melepaskan diri dari sejarah), beliau juga menambahkan *"Never leave history"* (Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah). Meutia Hatta, Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia, putri proklamator Indonesia, Mohammad Hatta, menegaskan pentingnya mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Salah satunya dengan selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dengan mengenal sejarah. Melalui sejarah, kita bisa tahu mana yang jelek untuk tidak ditiru, sementara yang baik harus diteladani (Kompas, 2013).

Thomas Carlyle, mengatakan : Pelajarilah sejarah, untuk tidak tergelincir di hari depan Jikalau engkau meninggalkan sejarah, engkau akan berdiri di atas kekosongan, dan perjuanganmu nanti akan paling-paling bersifat amuk saja, seperti kera di gelap gulita (Sukarno, 2001). Seorang manusia normal dan siuman tidak mungkin melepaskan dirinya dari kelampauan, dan itulah sejarah. Seorang yang mau maju tidak mungkin melompat dari sebuah kekosongan masa lampau, sejarahlah mengisi kekosongan itu. Sebagai laboratorium kemanusiaan, sejarah menyediakan bahan-bahan yang sangat kaya bagi seseorang untuk tampil sebagai si bijak yang sebenarnya, baik dalam teori mau pun dalam praktik (Ahmad Syafi'i Ma'arif, 2005).

Sejarah menjelaskan kondisi dan situasi yang tepat bagi seorang negarawan untuk melaksanakan tugas kenegaraannya secara tepat pula. Tanpa mengenal sejarah seorang negarawan ataupun siapa saja yang memiliki tanggung jawab umum akan kehilangan arah dan acuan dalam melaksanakan kebijakannya (Ahmad Syafi'i Ma'arif, 2009).

Seorang sejarawan Belanda, P. Geyl, menyatakan bahwa sejarah adalah dialog, tetapi bukan sembarang dialog, melainkan dialog yang tiada henti (Roeslan Abdulgani, 1987). Dialog dimaksud untuk mendapai "fusi horison makna" (Gadamer, 1977) yang lebih mendekati kebenaran. Sejarawan pendidikan ingin mengetahui bagaimana pemikiran dan tindakan para pendahulu dalam berjuang untuk bangsa dan negara dalam mencapai kemerdekaan. Nilai-nilai edukatif apa yang penting untuk ditransformasikan kepada generasi penerus? Nilai studi sejarah antara lain (Elmer Harrisson Wilds, 1957):

1. Sebagai bahan untuk pemikiran pendidikan secara kreatif, menstimulasi untuk melengkapi karya para tokoh besar dan melaksanakan ide-ide mereka sesuai dengan kondisi sekarang, mengembangkan sikap yang berharga seperti kerendahan hati dan

kesabaran,
2. Memberikan pengetahuan yang berharga tentang perkembangan peradaban,
3. Sebagai pendekatan yang baik untuk studi tentang prinsip-prinsip pembaharuan sosial, industri dan politik.

Barang siapa -- juga dalam lapangan pendidikan -- ingin menyelami waktu yang diinjak, dan mengabdi kepada hari kemudian, harus mengenal waktu yang telah lampau (Sutedjo Brodjonagoro, 1956). Maka sejarah masa lampau harus dipelajari dengan berpijak kepada kenyataan dinamika situasi masa kini dengan menancapkan perkiraan-perkiraan dan harapan-harapan berperspektif ke masa depan. Tanpa tancapan berperspektif ke masa depan, sejarah seakan-akan bukan suatu proses yang terus berjalan, melainkan suatu keadaan beku, terisolasi dari masa kini dan masa depan (Roeslan Abdulgani, 1963).

Perubahan kondisi masa kini bukan hanya sekedar perubahan, melainkan harus tertuju ke arah kesempurnaan. Bangsa Indonesia memang sedang gandrung untuk membangun, tumbuh dan berubah, namun bukan dengan harga setinggi penghancuran eksistensi dan jati diri kita sendiri. Arah cita-cita yang dirindukan segenap bangas Indonesia adalah "Negara yang merdeka bersatu berdaulat dil dan makmur".

Dimensi Filosofis

Manfaat Filsafat Pancasila ada bagi setiap bidang kehidupan bangsa dan negara (Notonagoro, 1976). Filsafat Pancasila bermanfaat bagi penentuan sikap terhadap sistem-sistem dan aliran-aliran filsafat. Filsafat Pancasila bermanfaat bagi kemungkinan pembangunan sistem filsafat Indonesia yang terperinci atas bahan-bahan yang perlu digali dari kekayaan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang terdapat dalam adat-

istiadat, kebudayaan, kesosialan, kerokhanian, keagamaan, kepercayaan, bahasa, kesusasteraan, dan sejarah.

Filsafat Pancasila memungkinkan orang tidak suka lagi atau tidak merasa puas lagi dengan penyelesaian atau jawaban yang tergesa-gesa dan sembarangan atas persoalan-persoalan kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Filsafat Pancasila dapat memberi kejelasan dan kemurnian dalam hal menanggapi nilai-nilai hidup kemanusiaan dan memberi pembuktian tentang sifat universalnya atau berlakunya bagi seluruh kemanusiaan. Filsafat Pancasila dapat menjadikan orang menghargai kemerdekaan berpikir orang lain dan menimbulkan kesediaan untuk berusaha mencapai toleransi, saling pengertian antara manusia. Filsafat Pancasila dapat membantu orang menyusun cita-cita yang sesuai dengan kepribadian bangsa, dalam hidup bersama umat manusia.

Filsafat Pancasila bermanfaat bagi terpeliharanya dan berkembangnya keadaban kemanusiaan berdasarkan atas kemerdekaan dan kedewasaan berpikiir. Filsafat Pancasila bermanfaat juga untuk memperdalam keinsyafan dan kesadaran mempererat persatuan Indonesia khususnya dan umat manusia dan dunia umumnya, yang memungkinkan dimiliki filsafat hidup dalam satu kesatuan yang bulat, harmonis, dinamis. Esensi nilai-nilai Pancasila ialah: Religius (sila pertama), humanis (sila kedua), nasionalis (sila ketiga), demokratis (sila keempat), dan adil (sila kelima) (Dwi Siswoyo, 2013).

Filsafat Pancasila memungkinkan orang menjadi manusia bijaksana, yang mengamalkan filsafat hidup, pandangan hidup, tujuan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup, sikap hidup, untuk hidup bahagia, di dunia dan akhirat. Sila-sila Pancasila yang telah diterima selama-lamanya dimiliki sebagai inti kehidupan bangsa Indonesia, maka perlu senantiasa dilakukan penelitian ilmiah tentang keadaan dalam segala aspek kehidupan bangsa dalam mewujudkan visi bangsa Indonesia.

Visi bangsa Indonesia adalah: "Negara yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur" (alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945). Visi bangsa ini mempunyai fungsi tiga saling berkoneksitas: pertama sebagai cita-cita yang ingin dicapai bangsa dan negara Indonesia, kedua akan memotivasi segenap komponen bangsa melakukan ke arah tindakan yang benar, ketiga membantu untuuk mengorganisasikan tindakan-tindakan bangsa yang berbhinneka dalam mewujudkan tujuan yang dirindukannya.

Merdeka tidak hanya berarti (Ki Hadjar Dewantara, 1952), *bebas* dari perintah paksaan orang lain, tetapi berati pula siap-sedia, sanggup serta mampu untuk mewujudkan hidup sendiri lahir dan batin dengan kekuatan sendiri. Merdeka juga menuntut *tertib* serta *damai*-nya hidup lahir dan batin yang diatur sendiri itu, sesuai dengan adap perikemanusiaan. Merdeka berarti pula memberi kewajiban *menghormati kemerdekaan orang lain*, serta kesanggupan untuk mewujudkan *keselamatan dan kebahagiaan bersama*. Merdeka sejati hanya dapat sehat, kuat dan abadi, bila timbul dari *jiwa merdeka*, dalam arti yang suci dan murni.

Bangsa Indonesia yang merdeka, ber-"Pancasila" dalam tri-prakara (Notonagoro, 1980) dalam tiga jenis yang bersama-sama dimiliki bangsa Indonesia, sehingga tidak ada pertentangan antara Pancasila Negara, "Pancasila" adat-kebudayaan dan "Pancasila"-religius. Ketiga-tiganya saling memperkuat, Negara ber-Pancasila berarti memperkuat dan memperkembagkan bangsa Indonesia beragama dan berkebudayaan, bangsa Indonesia beragama dan berkebudayaan berarti memperkuat dan memperkembangkan Pancasila Negara dan Negara, jadi juga bangsa Indonesia sendiri.

Pidato 17 Agustus 1957 tentang **"Suatu Tahun Ketentuan"**, Bung Karno, menyatakan bahwa *Nationbuilding* lebih sulit dan

lebih "berpenyakit" daripada *liberation,* tetapi Mau apa? Mau hidup langsungkah sebagai Negara atau mau tenggelamkah? Kalau Mau tenggelam? Umbarkanlah segala kebebasan zonder memasang batas, umbarkanlah segala ego-mu zonder memasang penciri ideal kesatuan nasional, umbarkanlah segala yang negatif zonder yang positif. Maka negeri ini akan tenggelam ke dasar samodra laksana perahu-lumpur yang lepas segala bagian-bagiannya.

Mau hidup langsung? Kembalilah kepada isi Proklamasi, kembalilah kepada keutuhan Negara, dan sebagai Bangsa dan Negara akan hidup langsung buat selama-lamanya, -- Insya Allah, samapai keakhir-zaman. Karena itu maka untuk keselamatan Bangsa dan Negara, terutama dalam taraf *nationbuilding* dengan segala bahaya-bahayanya dan segala godaan-godaannya itu, diperlukan satu **Revolusi Mental.** Revolusi Mental merupakan *"pensucian kembali jiwa", "rejuvenasi", "pembangkitan kembali"*, dan *"penggeloraan kembali"* watak-watak dan kebiasaan-kebiasaan yang baik.

Mengingat gejala-gejala dan keburukan-keburukan dalam masyarakat, memang perlu Pembaharuan Jiwa. **Gerakan Revolusi Mental** ini bukan *business* satu hari atau dua hari, melainkan adalah suatu hal yang berlangsung bertahun tahun. Gerakan hidup baru, **Revolusi Mental** ini sebagai perombakan cara berpikir, cara kerja, cara hidup, yang merintangi kemajuan, peningkatan dan pembangunan jiwa cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup yang baik, tegas Bung Karno. Untuk meghadapi segala tantangan itu, dibutuhkan suatu transformasi total, bukan hanya dalam cara berpikir, melainkan juga dalam sistem politis

Pidato tanggal 17 Agustus 1958 berjudul **"Tahun Tantangan",** Bung Karno, menyatakan antara lain: Tantangan **Nasional:** untuk menjadi satu bangsa yang besar dan kompak dengan mempunyai kepribadian sendiri, memiliki satu Negara-Kesatuan yang kuat, sebagai alat dan jembatan kea

rah satu masyarakat adil dan makmur yang mmberi kebahagiaan kepada semua rakyatnya, atau: menjadi satu bangsa yang sebenarnya bukan bangsa, melainkan sekadar gundukan dari pada berpuluh-puluh suku, tanpa kepribadian nasional yang kuat, dan karenanya tidak memiliki satu Negara yang kuat, dan membiarkan timbulnya satu masyarakat *"free-fight"*, di mana sikatlah yang menang dan silemah ditindas, diperkuda, dieksploitir?

Internasional: di tengah-tengah dua blok raksasa yang bertentangan satu-sama lain, power-politics dijadikan moraliteit yang tertinggi, semangat kepruk menjiwai pemerintahan-pemerintahan, senjata-senjata atom dan hydrogen direken seperti kacang goring, kapitalisme dan imperalisme mengaut-aut kekanan dan kekiri, mempraktikkan *"exploitation de l'homme par l'homme" dan "exploitation de pays par pays"*, atau ikut mempertahankan susunan dunia semacam ini, yang jika tidak dirobah niscaya menuju kebinasaan-total dari pada kemanusiaan, ataukah ikut melaksanakan Dunia Baru yang berkeadilan sosial, berdasarkan persamaan, kemerdekaan, persahabatan, kerja-sama, ko-eksistensi, dan toleransi?

Dimensi Ideologis

Ideologi berasal dari kata Yunani (Greek) eidos dan logos. Eidos yang berasal dari kata yang artinya melihat, memandang, berarti gambaran pandangan. Karena memikir itu juga mirip dengan memandang, maka eidos juga berarti pikiran (idea). Logos di sini berubah menjadi logia, berarti kata, pengertian, ucapan.

Kata logi dalam istilah ideologi, tidak menunjuk ilmu. Ideologi adalah suatu kompleks idea-idea asasi tentang manusia dan dunia yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup (Driyarkara, 1976). Pengertian ideologi ini terkait pandangan tentang Tuhan, manusia sesama, hidup

dan mati, masyarakat, negara dan sebagainya. Istilah "manusia dan dunia" mengandung arti, manusia itu mempunyai tempat tertentu, kedudukan tertentu, dan hubungan-hubungan atau relasi. Sesuai dengan sifat hubungan-hubungan itu, suatu ideologi bersifat hanya ***"diesseitig"*** (merembug kehidupan dunia, dan tidak mengakui adanya Tuhan), contohnya ideologi Komunis. Adapun ideologi yang bersifat ***"diesseitig*** sekaligus juga ***yenseitig***"(merembug kehidupan akhirat, mengakui adanya Tuhan), contohnya ideologi Pancasila.

Dalam makna diatas, ideologi bukan hanya pengertian. Ideologi juga prinsip dinamika, pedoman (pola dan norma hidup) dan sekaligus juga ideal atau cita-cita. Realisasi dari idea-idea yang menjadi ideologi itu dipandang sebagai kebesaran, kemuliaan manusia dalam menjalani dan menjalankan kehidupannya dalam pertemuan dan pergaulannya dengan alam, dengan sesama dan dunia serta dalam hubungannya dengan Tuhan.

Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki tiga dimensi yaitu realitas, idealitas dan fleksibilitas (Alfian, 1982; Koento Wibisono, 1989). Secara konsepsional, Pancasila sebagai ideologi tahan banting yang kian relevan dengan perkembangan kekinian, namun secar operasional, terdapat jurang yang kian lebar antara idealitas Pancasila dan realiitas pembumiannya (Yudi Latif, 2018).

Realitas, semestinya mencerminkan kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga daya tahan suatu ideologi antara lain ditentukan oleh atau tergantung pada tinggi-rendahnya masyarakat memahami, menghayati dan mengamalkannya. **Idealitas**, semestinya menumbuhkan optimisme dan mampu menggugah motivasi masyarakat dalam mewujudkan apa yang dirundukanya. Pancasila sebagai idealitas oleh Bung Karno disebut sebagai Leidstar dinamis, dalam menjadikan arti Rakyat tertarik, Rakyat memiliki rasa bisa mencapai, dan bukan saja

rasa mampu, dan memang mampu untuk mencapainya (Sukarno, 1986).

Fleksibilitas, Pancasila mampu di samping sesuai dengan tantangan zaman, juga sekaligus mampu memberi arah, melalui dinamika interpretasi-interpretasi baru yang kosisten dan relevan dengan pengembangan kepribadian bangsa Indonesia. Dimensi fleksibilitas ini (Alfian, 1982) menuntut suasana kemerdekaan berpikir sehingga masyarakat dapat mengembangkan intelektualitasnya seoptimal mungkin, yang memungkinkannya mengembangkan diri secara wajar .

Pengembangan Pancasila sebagai ideologi pendidikan nasional, yang mengacu Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang memiliki dimensi *realitas, idealitas* dan *fleksibilitas* menghendaki adanya dialog yang tiada henti dengan tantangan-tantangan pendidikan masa kini dan masa depan, berorientasi pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Peringatan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, 7 Mei 1951, Bung Karno menegaskan selain dari contoh-contoh kebesaran Pribadi Nabi Muhammad SAW, agar bangsa Indonesia berjuang menegakkan Negara dalam persatuan yang kokoh dan jangan bercerai-berai dan jadikan Pancasila menjadi dasar perjuangan menegakkan Negara. Rukun Pancasila menurut Bung Karno serupa juga dengan Rukun Islam, yang tidak boleh hanya dikerjakan hanya satu rukun saja. Sari pidato Bung Karno telah disiarkan di radio, surat-surat kabar dan telah dibawa oleh udara ke seluruh dunia. Namun Hamka (1952), menegaskan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah urat tunggang Pancasila, sumber segala sila dan kesusilaan.

Bung Hatta, juga menyatakan bahwa, semua kegiatan kenegaraan harus berlangsung di bawah sinar Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana sila pertama itu menyinari empat sila lain dalam Pancasila. Notonagoro juga menyatakan"Ke-Tuhanan Yang Maha Esa adalah meliputi dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" (Notonagoro, 1967).

Dimensi Kultural

Filsafat sebagai suatu bagian dari kebudayaan . Filsafat adalah sistem pemikiran manusia yang dibentuk oleh kebudayaan, namun filsafat lebih dari pada itu. Filsafat juga harus memotong tebing kemajuan, mata pisau dari kebudayaan itu sendiri. Filsafat dibentuk dan pembentuk kebudayaan (F. Bruce Rosen, 1968). Kebudayan selamanya berarti sosio-budaya, sehingga perubahannya senantiasa berarti perubahan sosio-budaya. Jika manusia itu memanusiakan dirinya, berarti ia membudaya, maka membudaya berati pula membudaya bersama, karena cara manusia berada tidak bisa lain berada bersama (Driyarkara, 1980).

Kebudayaan pada umumnya adalah totalitas "*way of life*" yang telah berkembang melaului sejarah. Suatu kebudayaan khusus adalah bagian kehidupan total dari sekelompok orang tertentu ---- cara-cara mereka berpikir, merasa, dan bertindak, sebagaimana diekspresikan dalam agama, hukum, bahasa, seni, teknologi, pengasuhan anak, dan tentu saja , pendidikan (George F. Kneller, 1971), sehingga kebudayaan itu sebagai "*a symbolic, continous, cumulative, and progressive process*" (Merril & Wentworth, 1953).

Pendidik (Guru) hendaknya senantiasa memelihara, membina dan mengembangkan budaya nasional pada umumnya, dan budaya sekolah khususnya yang kondusif bagi transmisi dan transformasi nilai-nilai yang dijunjung tinggi masyarakat bangsa dan negara. Pendidik yang baik, adalah vital bagi dinamika dan keselamatan bangsa, karena ia menjadi penjaga peradaban dan pelindung kemajuan (Dwi siswoyo, 2017).

Gelombang globalisasi telah menghapuskan batas-batas ruang karena ditopang oleh teknologi informasi yang menghilangkan batas-

batas waktu, dan telah mengubah tata pergaulan umat manusia. Pengertian mengenai negara-bangsa mulai berubah, dengan lahirnya bentuk nasionalisme baru yang dikenal sebagai etnonasionalisme atau bentu negara *"post nation state"* . Ada kecenderungan, kata Tilaar (2002), berkembangnya sentimen nasional beralih kepada sentimen primordial baik dalam bentuk budaya, ras, agama. Perkembangan yang baru ini tentunya memberi pengaruh terhadap sistem pendidikan yang dikenal dewasa ini (HAR. Tilaar, 2002). Sebagaimana dinyatakan oleh R. Robertson, globalisasi adalah menciutnya dunia dan intensifikasi kesadaran akan dunia sebagai keseluruhan (M. Sastrapratedja, 2001). Globalisasi merupakan proses yang dinamis dan kontektual dari berbagai aktor dalam kehidupan manusia.

Globalisasi merupakan perubahan dalam setiap relung kehidupan manusia Indonesia. Globalisasi adalah suatu realita yang tidak dapat dibantah dan dicegah. Persoalan kita adalah bagaimana terjun dalam arus globalisasi secara cerdas, sehingga tidak menjadi korban? Terjun ke dalam globalisasi tanpa filosofi dan identitas kultural yang jelas akan membuat orang larut dalam arus globalisasi, tanpa tindakan cerdas yang dapat turut mengarahkan globalisasi itu sendiri.

Hakikat kebudayaan Indonesia akan ditentukan baik bentuk maupun isinya, oleh jawaban-jawaban bangsa atas masalah-masalah pokok bangsa sekarang, yaitu masalah *"penyesuaian yang kreatif"*. Akhirnya dari jawaban-jawaban inilah akan terjelma manusia Indonesia yang baru, sebab pada asasnya persoalan bangsa adalah bagaimana menciptakan manusia Indonesia yang baru (Soedjatmoko, 2001).

Pancasila adalah *"a way of life"* yang akarnya pada identitas bangsa Indonesia, dan yang mngandung esensi dari ribuan tahun budaya masyarakat Indonesia (Roeslan Abdulgani, 1955). Pandangan para tokoh tentang Pancasila dapat dijadikan sebagai bahan dialog secara

kritis dialektis untuk menyusun konstruk Sistem Filsafat Pancasila yang harmonis dinamis, yang dirindukan bangsa dan negara Indonesia, yang tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa. Dalam menghadapi filsafat dari luar, untuk mendapatkan kemanfaatan, telah dipikirkan dan diketemukan oleh Notonagoro yaitu modus eklektik inkorporatif (Notonagoro, 1973). Penulis menambahkan menjadi *eklektik inkorporatif harmonis dinamis* (Dwi Siswoyo, 2013).

Eklektik inkorporatif ialah bersifat memilih unsur terbaik dari berbagai sistem atau aliran filsafat asing, selanjutnya dipadukan dalam struktur Filsafat Pancasila. **Harmonis** artinya sebuah keseluruhan kebulatan kesatuan yang konsisten. **Dinamis** berarti kekuatan yang menghasilkan gerak khas yang penuh energi yang cepat dan dengan mudah menyesuaikan diri dan mengantisipasi tantangan keadaan.. Modus ***eklektik inkorporatif harmonis dinamis*** *ini* dilakukan dengan pendekatan ***dialektik-reflektif-rejuvenatif*** . **Dialektik** ialah sebuah usaha untuk menemukan atau mengungkap realitas atau kebenaran tentang sesuatu secara kritis. **Reflektif**, artinya pemikiran yang memegang teguh kejernihan intelektual dan tanggung jawab moral tentang sesuatu. **Rejuvenatif**, artinya peremajan kembali secara fleksibel sesuai dengan tantangan zaman. Modus ***eklektik inkorporatif harmonis dinamis*** *ini* dilakukan dengan pendekatan ***dialektik-reflektif-rejuvenatif*** ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepribadian nasional.

Kepribadian nasional, kepribadian Indonesia sebagai sesuatu yang masih harus dibangun (Driyarkara, 2006) atau dikembangkan. Kepribadian sesuatu bangsa untuk sebagian diwujudkan oleh pengalaman-pengalamannya (sejarahnya). Akan tetapi kepribadian juga ditentukan oleh cita-cita bangsa itu . Secara konkrit kepribadian nasional Indonesia tidak saja ditentukan sejarah bangsa Indonesia, melainkan juga oleh jawaban-jawaban yang telah dan akan diberikan atas soal-soal yang

timbul dalam hubungan pembangunan bangsa Indonesia. Maka dalam hal ini ada tiga pendekatan (Soedjatmoko, 1986): *pertama*, sifat dinamis dari paham kepribadian nasional, dan *kedua,* pentingnya unsur kemauan di dalam suatu bangsa memahami dirinya, dan *ketiga* membangkitkan dan mengembangkan sebesar-besarnya daya kreatif sebagai bangsa.

Penegasan kepribadian nasional di dalam usaha membina masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, pada hakikatnya merupakan refleksi dan tekad bangsa untuk mencari jalan sendiri, dan mencerminkan penolakan subjektif atas pola pembangunan negara-negara dan sistem politik dan ekonomi lain yang telah ada di dunia (Soedjatmoko, 1986).

Maka dari itu kalau menyebut kepribadian Indonesia adalah kepribadian Pancasila, yang sebenarnya berarti, tetap dalam hakikat pribadi bangsa Indonesia, kendati di dalam perwujudannya selalu dinamis, dalam membentuk perwujudan baru kepribadian Indonesia sesuai dengan tantangan zaman.

Oleh karena itu, yang dinamakan kepribadian bangsa, bukanlah sesuatu yang statis atau tidak saja diwujudkan oleh pengalaman-pengalaman di masa lampau, melainkan juga diwujudkan dalam kontinuitas sejarah yang dinamis, yang ditentukan oleh cita-cita di masa depan serta kesanggupannya memberi jawaban baru atas persoalan-persoalan baru yang menantang. Berkat sesanggupan inilah kebudayaan suatu bangsa dapat senantiasa berkembang dan memperbaiki diri.

Dimensi Pedagogis

Seorang Guru Besar Belanda, J.H. Gunning (1923) membedakan antara *"paedagogiek" (opvoedingsleer)* = ilmu pendidikan, dan *"paedagogie" (opvoeding)* = pendidikan. Para sarjana negara-negara yang yang berbahasa Jerman yakin bahwa "ilmu pendidikan yang otonom adalah

tepat dan penting". Namun demikian, bagaimana seharusnya bentuk ilmu ini masih senantiasa dalam kajian. Orang dapat membedakan sekurang-kurangnya ada tiga konsepsi dasar pedagogik (Brenzinka, 1992), yaitu: (1) "*pedagogics as a mixed normative-descriptive discipline*", (2) "*pedagogics as a philosophical discipline*", dan (3) "*pedagogics as a purely empirical discipline*".

Pedagogik atau ilmu pendidikan adalah teori pendidikan, perenungan tentang pendidikan; dalam arti luas pedagogik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari soal-soal yang timbul dalam praktik pendidikan (Sutedjo Brodjonagoro, 1966). Lebih luas, Brezinka (1992) memaknai ilmu pendidikan atau pedagogik adalah ilmu yang mengkaji fenomena pendidikan dan semua fenomena yang ada hubungannya dengan pendidikan (Wolfgang Brezinka, 1992) dalam perspektif yang luas dan integratif.

Pedagogik mempunyai sifat teoritis sedangkan pedagogi bersifat praktis (Imam Barnadib, 1982). Pedagogi, bagi Henry A. Giroux (2011), adalah bagian dari sebuah projek tiada henti yang dimaksudkan untuk pengembangan sebuah kehidupan yang bermakna bagi semua subjek didik. Istilah pedagogi oleh Ki Hadjar Dewantara (2013) disamakan dengan pendidikan, begitu pula jstilah pedagogik disamakan dengan ilmu pendidikan.

Pendidikan nasional Indonesia sebagai *"academic enterprise"* dan sekaligus sebagai *"moral enterprise",* secara nasional memiliki posisi strategis dalam mewujudkan manusia Indonesia yang berkeahlian dan berkepribadian Pancasilais sejati. Namun dua sisi upaya esensial ini nampak tidak merupakan kesatuan yang harmonis dinamis.

Pendidikan nasional Indonesia perlu senantiasa mengelorakan pengembangan *"Indonesian spirit"* serta ilmu dan teknologi yang tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Pendidikan nasional

Indonesia perlu senantiasa direjuvenasi agar proses pembentukan yang tiada henti mewujudkan bangsa yang maju, bermartabat, dan memiliki jati diri yang kokoh dinamis dalam menjawab tantangan zaman. Keprihatinan dalam pendidikan nasional dewasa ini adalah baru lebih berfokus menumbuhkan menjadi orang ***"pintar"*** **(yang didukung dengan hadirnya Taman-taman Pintar**) dari pada menumbuhkan menjadi orang yang berbudi pekerti luhur ***("baik")*** **(dengan hadirnya Taman Baik).**

Untuk membangun **Taman Baik**, yang muatannya sesuai yang dirindukan bangsa, dapat diadakan berbagai lomba atau festival yang isinya mengenai orang atau benda, yang dapat berwujud ornamen-ornamen; esensi kilasan kisah singkat dalam film atau video dari para tokoh daerah, nasional dan internasional terpilih yang dapat dijadikan teladan; ceritera (dongeng) yang unik-menarik (baik langsung atau rekaman) dari para pendongeng terkenal; buku-buku, dan lain-lain. Semua yang dipilih menjadi muatan **Taman Baik**, diharapkan dapat menginspirasi dan mengimajinasi para pengunjung untuk menjadi orang yang baik. ***"More importent than knowledge is imagination".*** Ini pernyataan yang dibuat oleh satu dari ilmuan terbesar dunia dan genius matematis, Albert Einstein (Robert Anthony, 1986). **Imaginasi** adalah: **I** Inquairing Mind, **M** Motivation, **A** Action, **G** Goal Setting, **I** Inspiration, **N** Navigation, **A** Achievement, **T** Truth about Yourself, **I** Intent to Improve, **O** Orientation for Progress, **N** Nucleus for Desire. Taman-taman pintar yang sudah dibangun perlu diintergrasikan menjadi **Taman Baik dan Pintar** dalam kesatuan organis harmonis dinamis dalam upaya membangun Manusia Indonesia Seutuhnya.

Memandang kondisi persoalan pendidikan nasional Indonesia, M. Sastrapratedja (2001) memandang pentingnya *pendidikan sebagai humanisasi*, dan Tilaar (2005) memandang perlunya *manifesto pendidikan nasional*, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mencapai

cita-cita nasional. Untuk itu, ilmu pendidikan atau pedagogik sebagai ilmu humaniora yang mengkaji fenomena pendidikan dan semua fenomena yang ada hubungannya dengan pendidikan perlu dirumuskan kembali.

Pendidikan sebagai fenomena insani (Driyarkara, 2006), sehingga pendidikan nasional sebagai fenomena insani bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan, adalah *"to improve man as a man"* (M. Hutchins, 1953), sehingga menjadikan manusia yang dapat melaksanakan hidupnya dalam pertemuan dan pergaulannya dengan sesama dan dunia, serta dalam hubungannya dengan Tuhan. Sudah sangat mendesak diperlukannya pemikiran-pemikiran yang mendasar, sistematis dan komprehensif tentang ilmu pendidikan, sehingga berbagai upaya pembaharuan pendidikan tidak cenderung bersifat tambal sulam dan parsial tanpa bingkai keilmuan pendidikan yang jelas.

Ilmu-ilmu pengetahuan yang dianggap bertujuan membuat manusia lebih manusiawi, dalam pengertian membuat manusia lebih manusiawi,disebut Humaniora (KBBI, 1988). Adalah Wilhelm Dilthey (1833-1911) yang membagi ilmu menjadi dua, yaitu *"Naturwissenschaften"* (ilmu-ilmu alam) dan *"Geisteswissenschaften"* (ilmu-ilmu keruhanian/budaya). Bagi Dilthey, yang termasuk bagian dari humaniora adalah studi sejarah, ekonomi, hukum, politik, psikologi, agama, sastra, puisi, arsitektur, musik dan filsafat. Hal yang harus dicari dalam Humaniora sebagai sebuah disiplin ilmu adalah *"inner world"*-nya (dunia dalam), bukan seluruh bangunan keilmuan ilmu tunggal (Kuntowijoyo, 2003).

Kata Jerman untuk *human studies, "wissenschaften"*, menunjuk baik humaniora (misalnya, sejarah, filsafat, kritik sastra) dan ilmu-ilmu manusia (misalnya, psikologi, sosiologi, antropologi) (George F. Kneller, 1984). Ilmu yang sekaligus juga mendidik itu dapat kita temukan dalam Humaniora. Humaniora (Budi Darma, 2002), adalah ilmu yang mengacu

kepada hati manusia.

Soedjatmoko, memandang *humaniora sebagai jendela menuju kedalaman hati manusia.* Dengan kedalaman hatinya manusia bisa menyikapi berbagai perubahan mendasar yang terjadi dalam dinamika pembangunan (Idi Subandy Ibrahim, 2004). Soedjatmoko menekankan arti penting humaniora dalam pendidikan. Humaniora adalah cabang ilmu yang bertujuan mencapai kemanusiaan sesungguhnya atau manusia yang lebih berbudaya (Siswanto Masruri, 2004). Pengertian klasik humaniora (Soedjatmoko), adalah ilmu bahasa dan sastra Latin dan Yunani, yang dalam perkembangnya, meliputi ilmu agama, filsafat, bahasa, sastra, pendidikan, sejarah, dan seni. Sistem pendidikan humaniora bertujuan untuk meluruskan cara berpikir cendekiawan agar mereka tidak hanya menguasai bidang sains dan teknologi, melainkan juga berbudaya dan berkarakter baik .

Humaniora ialah "ilmu-ilmu pengetahuan yang bertujuan membuat manusia lebih manusiawi (Latin, humanior), dalam pengertian membuat manusia lebih berbudaya (Drost, 1997). Istilah humaniora berasal dari program pendidikan yang dikembangkan Cicero (106-43 SM), yang disebutnya "*humanitas*", yaitu sebuah corak pendidikan untuk menjadikan manusia lebih menjadi manusiawi (*humanior*).

Pada abad 20 seluruh sistem pendidikan di Barat mengalami perubahan yang mendalam. Hal ini membawa kesadaran baru bahwa pendidikan humaniora harus ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Humaniora lebih menekankan (Sastrapratedja, 2007): kreativitas, kebaharuan, originalitas, dan keunikan; penemuan makna dan nilai; penumbuhan kekaguman yang bersifat normatif dan deskriptif; pemahaman rasional dan imaginasi.

Tujuan humaniora adalah (Harold H. Titus, 1959): (1). Melatih manusia berpikir secara kritis dan konstruktif, (2). Memberi pandangan

wawasan nilai-nilai moral, estetik dan religius dan membantu manusia menjernihkan nilai-nilai tersebut, (3) Membantu orang menjadi warga negara yang dapat berpartisipasi secara bijaksana dalam masyarakat yang terus berkembang, (4) Memberi latar belakang intelektual (*yang bersifat fundamental*) yang diperlukan agar sukses dalam bidang-bidang usaha dan profesional, dan bukan hnya yang secara langsung bertujuan pada perolehan ketrampilan-ketrampilan khusus atau teknis (*bersifat "know-how"*).

Oleh karena itu, hiruk pikuk gerakan perbaikan pendidikan di Indonesia jangan hanya menekankan *kemapuan teknis (know-how)* yang tidak ditanamkan *yang fundamental,* jangan bermimpi akan mengahasilakan pribadi-pribadi profesional, tetapi hanya menghasilkan *"tukang-tukang" termasuk tukang-tukang menagajar.* Di samping itu, pendidikan nasional Indonesia oleh Notonagoro (1974) ditegaskan *bersifat dwi tunggal, yaitu pengembangan kepribadian dan kemampuan/ keahlian dalam kesatuan organis harmonis dinamis,* sehingga mendukung upaya mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya.

Kekuatan motivasi suatu bangsa, tekad dan daya tahannya dalam pembangunan sangat erat hubungannya dengan kejernihan dalam persepsinya mengenai subjektivitas dan kepribadian sendiri (Soedjatmoko, 1984). Oleh karena kepribadian nasional senantiasa bersifat dinamis. Hal ini dipengaruhi oleh interaksi dalam bangsa sendiri maupun interaksi yang bersifat internasional dengan bangsa-bangsa lain.

Pedagogik kebhinnekaan bukan hanya memperhatikan usaha pendidik dalam pengembangan kemampuan/keahlian subjek didik, melainkan juga sekaligus memperhatikan bagaimana pengembangan kepribadian subjek didik yang sangat mendukung upaya pencerahan dan pemandirian bangsa. Pencerahan kemanusiaan dan pemandirian bangsa adalah adalah sebagai *"the human ideal"* dan kata Petersen, *"The*

human ideal, the so-called ideal of education, is gained through the science of education".

Pedagogik mempunyai mempunyai peran penting dalam menghadapi fenomena-fenomena pendidikan dan semua fenomena yang ada hubungannya dengan pendidikan (Brezinka, 1992). Fenomena-fenomena itu terkait anatara lain dengan bagaimana agar etika dan toleransi yang sejati dapat duwujudkan, dan bagaimana agar masyarakat cerdas dan berkeadaban dalam berdemokrasi, Bung Hatta menyatakan (P. Swantoro, 2017), ada tiga jenis nilai dasar yang harus menopang usaha pelaksanaan demokrai, yaitu: sikap sportif, rasa tanggung jawab dan toleransi.

Kendati ada orang yang pernah menyatakan bahwa ***"LONCENG KEMATIAN" ILMU PENDIDIKAN*** telah dibunyikan di Indonesia (Kompas, 9 September 1985). Namun Mochtar Buchori yang diwaduli pada waktu itu menegaskan bahwa, ilmu pendidikan tidak akan mati di negeri tercinta ini, selama masih ada permintaan jasa pendidikan, masih ada pihak-pihak yang ingin memberikan jasa pendidikan yang bermutu, dan pelayanan pendidikan yang memuaskan. Ilmu pendidikan bukan ***"grave yard"*** (kuburan) tetapi *"grape yard"* (kebun anggur) (Mochtar Buchori,1991). Ilmu pendidikan memiliki dampak positif dalam upaya revitalisasi, rekonstruksi dan rejuvenasi kehidupan pendidikan nasional.

Bagi penulis perlu di susun I**lmu Pendidikan (Pedagogik) Kebhinnekaan,** yang **lebih bermakna keindonesiaan,** dan bukan Pendidikan Multikultural yang lebih berfokus pada persoalan multibudaya di Amerika. Empu Tantular dengan tegas menyatakan sebuah konsep di zaman Majapahit pada abad ke 14 dalam kitab Sutasoma yaitu: "***Binneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharmma Mangrva***": ***Berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang bermuka dua*** (Edi Sedyawati dan Subroto, 1993). Ramuan kerukunan yang telah hadir ratusan tahun sejak abad ke-17 dari warga Muslim di Desa Pengayaman, Buleleng Bali.

Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna ***berbeda-beda, tetapi tetap satu***, meskipun Indonesia memiliki suku bangsa, bahasa, adat istiadat, agama serta pulau yang berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya tetap satu. Bagi bangsa dan negara Indonesia semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* pengertiannya dapat diperluas, mencakup pula pada perbedaan politik, gender, abilitas, wilayah atau daerah. ***Tan Hana Dharmma Mangrva*** yang bermakna ***tidak ada kebenaran yang bermuka dua***, dijadikan motto Lemhannas, yang kalimat tersebut kemudian diartikan ***bertahan karena benar.***

Kematangan hidup bangsa ini, kata Yudi Latif (Kompas, Selasa 14 Maret 2017), memijarkan kesanggupan menghargai perbedaan seraya merajut kebersamaan. Kearifan nusantara dimuliakannya dalam sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Sejauh berjalan di atas jalan kebenaran selalu ada titik temu. Sebab tidak kebenaran yang mendua. Sekalipun Indonesia bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, gangguan dan bahkan ancaman terhadap kesatuan dan integrasi nasional telah terjadi berulang-ulang. Faktor agama sering dijadikkan pemicu untuk mencabik-cabik Republik ini, kendati barangkali sekadar untuk menggalang solidaritas massa (Ahmad Syafii Maarif, 2019).

Imam Besar al-Azhar, Ahmad Muhammad Ahmad ath-Thayyib mengajak umat Islam Indonesia menempuh jalan persatuan dan menghindari fanatisme antar mahzab. At-Thayyib mengimbau umat agar tidak mengklaim diri sebagai pihak yang paling benar sambil menganggap salah kelompok-kelompok di luar kelompoknya. Menurut At-Thayyib, monopoli kebenaran bukan tindakan yang tepat. Islam melarang memvonis kafir sesama ahli kiblat (sesama umat Islam). Tidak boleh mengatakan hanya kelompoknya yang paling benar, sementara yang lain salah. Menurutnya, kelompok Sufi, Salafi, Ahlussunah, Syiah, dan yang lainnya disarankan berfokus pada titik persamaan alih-alih

mencari perbedaan. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita agar betul-betul memahami akidah Ahlissunah wal Jamaah (Republika, Kamis 3 Mei 2018).

Islam merupakan agama *wasathiyah* (moderat) dan *i'tidal* (adil atau proporsional. Oleh karena itu, Islam tidak mengenal ekstremisme, termasuk untuk tujuan-tujuan yang mengatasnamakan agama (Said Agil Siroj, Republika, Kamis 3 Mei 2018). Islam wasathiyah adalah Islam yang dalam beragama menampilkan sikap tidak ekstrem, sehingga membentuk Muslim yang berakhlak mulia, damai, toleran, dan bermuamalah dengan siapapun secara makruf, dengan tetap memiliki keteguhan prinsip dalam berakidah, beribadah, berakhlak sebagaimana akhlak Nabi (Haedar Nashir, Republika, Rabu 2 Mei 2018).

Ilmu yang sekaligus juga mendidik dapat ditemukan dalam Humaniora. Soedjatmoko seorang intelektual Indonesia, merupakkan penganjur utama Humaniora (Kuntowijoyo, 2003). Upaya mengkaji sifat-sifat manusia, mengandung unsur-unsur yang lebih dari sekedar aplikasi metode-metode analitik dan eksperimental yang terdapat dalam ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial. Berbagai kebutuhan, ambisi, rasa frustrasi manusia, dan lain-lain, tidak diamati secara empiris, tidak dapat direduksi ke dalam angka-angka persamaan. Semua itu hanya dipahami melalui proyeksi imajinatif, dan ini merupakan yang dibina oleh kajian humaniora kata Soedjatmoko (1994).

Sebuah lembaga pendidikan tinggi layak disebut Perguruan Tinggi (PT) karena tidak **"mendewasakan pribadi"** mahasiswanya sebagai manusia dan warga negara. PT yang didirikan hanya mempersiapkan mahasiswanya mencari pekerjaan, tidak layak disebut PT, tetapi hanya sebagai ***Sekolah Kejuruan.*** Perguruan Tinggi harus menjadi pusat Humaniora (Drost, Kompas 22 April 1999). Perguruan Tinggi atau Universitas adalah sekolah untuk pendidikan dan sekolah untuk

penyelidikan (A.N. Whitehead, 1955). Fungsi universitas ini bersifat interkoneksitas dalam menumbuhkan tanggung jawab moral dan tanggung jawab ilmiah yang tidak dapat lepas dari proyeksi imajinasi.

Kemampuan mengarahkan proyeksi imajinasi kepada pengalaman hidup orang lain memupuk kesadaran akan persamaan dan aspirasi manusia ini kata Soedjatmoko (1994), awal dari rasa empati dan toleransi. Nilai-nilai tersebut sangat penting untuk dimiliki segenap bangsa Indonesia. Empati adalah kemampuan untuk sepenuhnya mengidentifikasi diri dengan orang lain, dan melalui proses itu dipahamilah orang tersebut. Toleransi adalah pengakuan akan keniscayaan hadirnya berbagai perbedaan, yang merupakan dasar hubungan damai dalam dan di antara bebagai komunitas dan bangsa. Satu peran kunci dari Humaniora adalah pengembangan kemampuan empati dan toleransi. Dua pilar akhlak itu sangat kondusif dalam menghayati dan sekaligus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kesatuan harmonis, dinamis.

Para pendahulu negeri ini sangat merindukan terwijudnya Manusia Pancasilais Sejati yaitu manusia yang Religius-Humanis-Nasionalis-Demokratis-Adil dalam kesatuan organis, harmonis, dinamis (Dwi Siswoyo, 2013). Pancasila, kata Buya Syafii Maarif (2009), yang hanya dimuliakan dalam kata, tetapi dikhianati dalam laku, hanyalah akan memperpanjang derita bangsa ini. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pertama (UU No. 4 Tahun 1950 Uncto UU No. 12 Tahun 1954, secara esensial menyebutkan tujuan pendidikan nasional adalah **"Membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air"**. Tujuan ini meliputi tiga sisi yang terpadu, yaitu **"susila"** (dalam arti vertikal - horisontal), **"cakap"** (pintar) dan **"demokratis"** (etis-berkeadaban), yang pada hakikatnya untuk menjadi orang yang **"Baik dan Pintar".** Setiap

orang merindukan hidupnya lapang dan bahagia. Namun banyak orang yang pintar tetapi tidak baik, yang di masa tuanya hidupnya tidak lapang (di dalam jeruji besi yang sempit) dan sengsara.

Nilai itu dirindukan dimiliki setiap orang. Nilai itu tak terceraikan dari diri seseorang, terpadu pada diri sesorang, atau mengejawantah dalam diri seseorang. Penanaman nilai tak mungkin akan berhasil kalau sang pendidik tak bernilai atau tidak menjadi teladan. Bung Karno, berdasarkan petuah Nabi SAW, bahwa setiap orang pemimpin, maka Bung Karno menyatakan setiap orang itu harus menjadi pemimpin atau harus menjadi guru. **Guru tidak bisa hanya Main Komedi (sandiwara).** Guru kata Bung Karno ***"hanyalah bisa mengasishkan apa dia itu sebenarnya"*** (Sukarno, 1965). Maka dari itu bagi pemimpin (Guru, Dosen) menjadi teladan adalah suatu keniscayaan, apalagi dalam tarnsformasi nilai-nilai. Pemimpin (Guru) tidak akan berhasil dalam transformasi nilai kalau tidak menjadi teladan, atau secara metafor sang pemimpin (guru) bukan menanamkan "*soft skill*", tatapi hanya "*menjajakan sop kikil*" semata.

Namun dalam perkembangannya pedagogik bukan hanya mengkaji fenomena pendidikan, yang mengkaji antara lain permasalahan "pembelajaran yang mendidik", melainkan juga mengkaji semua fenomena yang ada hubungannya dengan pendidikan, anatara lain urgensi keceradaasan dalam literasi digital, bertindak jujur, sabar, rendah hati, empati dan toleran dalam kehidupan masyarakat yang semakin demokratis, bencana moral dan sebagainya.

Bencana moral yang melanda negeri ini antara lain: diterpa banjir korupsi, erosi dan longsornya etika, kebakaran disiplin, gempa adat istiadat, ledakan kerusuhan dan letusan emosi primer yang erat terkait pada egoisma dan survival, badai kejahatan, kemarau iman, hama narkotik dan wabah suap, dan hilangnya sopan santun. Kegagalan pendidikan dengan dramatis dipamerkan oleh anggota-anggota badan

perwakilan kita, yang nyata terlihat bukanlah wakil rakyat, melainkan wakil partai (Prof. Dr. T. Jacob, KR, 5 Februar 2004).

Bagaimana peran **Pedagogik Kebhinnekaan** berkontribusi dalam menjawab permasalah nasional dan global yang lebih luas? Hal ini memerlukan pengkajian tersendiri, yang memerlukan dialog dalam mencapai fusi horison makna dalam mendekati kebenaran. Hasil fusi itu bersifat dinamis, yang senantiasa mengundang dialog yang tiada henti dalam menghadapi tantangan perkembangan ilmu dan teknologi yang spektakuler. Persoalan perkembangan industri memang harus direspon. Namun yang juga perlu diingat adalah pernyataan futurolog, John Naisbitt & Patricia Aburdence (1990), yang hampir tiga dasa warsa yang lalu, bahwa pemecahan persoalan yang paling menggairahkan pada Abad ke-21 akan terjadi bukan karena teknologi yang spektakuler, melainkan karena suatu konsep yang berkembang mengenai apa maknanya menjadi manusia. Sampai saat ini (Ali Syariati, 1984), manusia merupakan masalah yang paling rumit di alam semesta. Manusia itu sendiri yang tetap menjadi tragedi terbesar dalam abad ilmu dan teknologi.

PANCASILA DALAM
PRAKSIS PENDIDIKAN

III

DESAIN
PENDIDIKAN PANCASILA

SAMSURI

DESAIN PENDIDIKAN PANCASILA

SAMSURI

...jikalau bangsa Indonesia ingin supaya Pancasila yang saya usulkan itu, menjadi suatu realiteit, ...janganlah lupa akan syarat untuk menyelenggarakannya, ialah perjuangan, perjuangan, dan sekali lagi perjuangan.
Jangan mengira bahwa dengan berdirinya Negara Indonesia Merdeka itu perjuangan kita telah berakhir. Tidak! Bahkan saya berkata: Di dalam Indonesia Merdeka itu perjoangan kita harus berjalan terus, hanya lain sifatnya dengan perjoangan sekarang, lain coraknya. Kemerdekaan hanyalah diperdapat dan dimiliki oleh bangsa, yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad "Merdeka,--merdeka atau mati!"
(Pidato Ir. Soekarno di Sidang Pertama BPUPK, 1 Juni 1945, dalam Sekretariat Negara RI, 1995:84)

Perhatian besar terhadap pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara agar terejawantahkan dalam segenap kehidupan nasional di Indonesia acapkali dipengaruhi perubahan suasana politik. Kondisi ini tidak bisa sepenuhnya dianggap sebagai kekeliruan, karena di tiap-tiap rezim politik sebenarnya memiliki iktikad yang sama untuk bagaimana supaya Pancasila teraktualisasikan secara baik di segenap kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, hal itu juga

membawa kepada kerentanan Pancasila untuk ditafsirkan sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan suatu periode rezim yang berkuasa. Dalam sejarah kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia, pada gilirannya pelabelan Pancasila dalam masing-masing periode –sangat kental dengan pergantian rezim itu sendiri, baik sebelum, selama, maupun sesudah Orde Baru.

Dalam sejumlah forum yang diikuti penulis, ada banyak kegelisahan dan kerisauan tentang kehidupan kebangsaan Indonesia setelah melewati satu dekade. Pancasila seolah lenyap ditelan gelombang reformasi. Di bidang pendidikan, misalnya, kerisauan muncul bagi elemen pegiat Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang menyatakan bahwa tanpa menyebut eksplisit Pancasila dalam PKn pun, maka lazimnya sebagai mata pelajaran yang bertanggung jawab membentuk karakter warga negara yang baik, maka mustahil PKn bertolak belakang dengan maksud dan tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila itu sendiri, kendatipun tidak melabeli sebagai "Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan" seperti era sebelumnya.

Melalui paparan ini, refleksi pengalaman "ber-Pancasila" sebelum, selama dan sesudah Orde Baru. Orde Baru menurut penulis menarik dan penting sebagai pijakan untuk mengaca bangsa ini dalam ber-Pancasila. Di masa rezim Orde Baru-lah Pancasila dalam kebijakan Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) secara masif dan intensif diinternalisasikan ke dalam segenap elemen kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, usaha keras memasyarakatkan P4 harus berujung kepada kehendak politik gerakan reformasi yang elitis di panggung Sidang Istimewa MPR bulan November 1998. P4 dihakimi sebagai bentuk "kegagalan" Orde Baru untuk ber-Pancasila.

Pengalaman "kegagalan" pembentukan watak bangsa melalui gerakan masif penataran P4, seyogianya menjadi pelajaran ke depan

tentang bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila. Ada kesenjangan, dimana nilai-nilai yang sangat mulia terasa jauh dari kenyataan hidup seorang warga negara, jika melihat praksis kehidupan bernegara dari para elite kekuasaan. Bagaimana bisa menerima seruan "tidak bergaya hidup mewah" dan "hidup boros", jika anak-anak pejabat atau para pejabat negara itu sendiri, yang kebanyakan di antaranya ialah para manggala justru mencontohkan gaya hidup sebaliknya. Demikian pula di era pasca-1998, kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami persoalan mendasar. Ancaman disintegrasi nasional, anarkhis sosial, minimnya kesadaran budaya kompetisi yang sehat di antara sesama elit maupun pejabat publik, serta masif dan permisifnya komponen-komponen utama bangsa terhadap bahaya nasional seperti korupsi, merupakan beberapa contoh masalah-masalah serius yang tengah dihadapi negeri ini.

Gerakan nasional menegakkan empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika) oleh elit pimpinan lembaga negara semacam MPR tampaknya masih sebatas slogan. Meskipun maksudnya ialah mempertegas identitas nasional di tengah keterpurukan bangsa lantaran begitu lambat keluar dari krisis nasional pasca-1998, namun kebijakan pemerintah belum menunjukkan bagaimana penegakan keempat pilar tersebut secara kongkrit. Terlebih lagi dengan persoalan "peminggiran" Pancasila dalam ranah publik Indonesia yang menghangat dalam panggung politik nasional pertengahan 2011, penulis pikir seakan banyak kesalahan ditimpakan kepada rakyat. Rakyat seperti tertuduh makin tidak Pancasilais. Sebenarnya itu bukanlah kesalahan rakyat. Justru yang "memarjinalkan" Pancasila dari arena kehidupan berbangsa ialah elite politik dan pejabat publik. Bagaimana bisa menyalahkan rakyat yang mencari jati dirinya di tengah himpitan kerasnya kehidupan, sementara

elite politik dan pejabat negara memamerkan keserakahan dan monopoli kebenaran atas nama undang-undang, yang entah didasari oleh nilai-nilai Pancasila atau tidak. Sungguh ironis!

Dari sini tepat kiranya pesan pedagogis dari Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, Ki Hajar Dewantara, yang memandang perlu karakter keteladanan seorang pemimpin, sebagai model *Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani*. Dengan demikian, keteladanan pemimpin penting untuk mewujudkannya dalam segenap kehidupan berbangsa dan bernegara. Keteladanan pemimpin nasional dalam ranah publik maupun privat merupakan prasyarat keberhasilan membangun karakter warga negara yang santun dan beradab.

Studi David Bourchier (2007) menjelaskan bagaimana akibat dominannya tafsir rezim Orde Baru atas pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang seyogianya bersifat publik menjadi kebajikan privat dalam butir-butir P4. Implikasinya ialah selain bersifat monolitik, penafsiran pengamalan Pancasila diidentikkan dengan figur rezim (Samsuri, 2011).

Suasana eforia setelah keluar dari suasana politik otoriter tidak bisa dinilai sebagai satusatunya penyebab utama kenapa sebagian besar politisi di MPR "gelap mata" sehingga mencabut P4. Pertanyaan yang diajukan sejumlah kalangan akademisi maupun aktivis gerakan masyarakat kewargaan cenderung sama, apakah pendidikan P4 gagal atau berhasil? Dalam kajian Daniel Dhakidae (2001), pendidikan P4 tergolong menyita anggaran biaya yang tidak kecil untuk program ideologisasi masyarakat di semua kelas dan golongan ke segenap penjuru daerah di Indonesia.

Dalam taraf tertentu program ideologisasi (berbentuk penataran P4) tersebut tampaknya hanya bisa dibandingkan dengan program Departemen Ideologi Uni Soviet yang hendak mengontrol masyarakat dengan tafsir ideologi tunggal rezim. Dari sini penilaian yang bijak adalah

bukan masalah berhasil atau gagalnya pendidikan P4, tetapi sejauh mana Pancasila dimaknai oleh segenap warga negara.

Setelah pencabutan P4 oleh MPR pada Sidang Istimewa MPR November 1998, diakui atau tidak, forum nasional cenderung tidak lazim menyebut-nyebut Pancasila. Sebagai contoh, MPR hasil Pemilu 1999 telah membuat satu ketetapan tentang etika kehidupan berbangsa dalam Ketetapan MPR No.VI/MPR/2001. Salah satu pertimbangan lahirnya keputusan politik itu ialah krisis multidimensi yang melanda kehidupan bangsa. Krisis nasional multidimensi tidak menyebutkan karena bangsa ini telah menanggalkan kemurnian pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah kenegaraan Indonesia. Namun, krisis multidimensi ditandai oleh makin pudarnya integrasi nasional, "...konflik sosial yang berkepanjangan, berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan" (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2001).

Pengarusutamaan Pancasila

Model pengarusutamaan Pancasila sebagai dasar negara yakni dengan menjadikannya landasan para penyelenggara negara, baik di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Dari sudut ini maka perlu objektivikasi Pancasila. Perihal objektivasi Pancasila, Kuntowijoyo menyarankan dua hal. *Pertama*, Pancasila secara historis, sering ditegaskan telah mengalami periode "mitos" dan "ideologi." Pancasila mengalami "pembusukan" makna ketika ia menjadi narasi "ideologi" sejak periode awal kita belajar berdemokrasi hingga figur utama Orde Baru mundur dari kekuasaan. Menurut Kuntowijoyo, seharusnya Pancasila sebagai pelayan kepentingan horizontal bukan vertikal. Dicontohkannya, selama era Orde Baru Pancasila dipakai untuk mengikat kesetiaan

warga negara kepada negara. Berbagai cara ditempuh menuju kesetiaan misalnya dengan penataran P4.

Kedua, objektivikasi Pancasila memberikan ruang besar bagi publik (warga negara) dalam memaknai Pancasila. Dalam istilah Kuntowijoyo sendiri, Pancasila seharusnya menjadi *common denominator*, rujukan bersama semua warga negara dari berbagai agama, ras, suku dan kelompok kepentingan (Kuntowijoyo, dalam Samsuri, 2009).

Bagian naskah ini hendak memperkuat pengarusutamaan Pancasila melalui suatu "desain" pembumian nilai-nilai luhurnya melalui program pendidikan Pancasila. Secara ringkas, desain pendidikan Pancasila dikelompokkan ke dalam model kultural dan kurikuler.

Model Kultural Negara

Bagaimanakah sistem penjelas dasar kehidupan kebangsaan Indonesia pasca kemerdekaan? Pertanyaan ini perlu dikemukakan mengingat bahwa Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana maksud para *founding fathers*, dalam perjalanannya sangat elastis untuk dimanipulasi sedemikian rupa baik oleh penguasa maupun kelompok masyarakat yang tidak sepakat dengan cara-cara dan materi penafsiran terhadap Pancasila oleh pemangku kekuasaan negara (pemerintah). Elastisitas tafsir terhadap Pancasila di satu sisi menjadikannya tetap relevan dan diperlukan untuk menjaga keutuhan identitas dan keberadaan negara-bangsa yang majemuk. Pidato Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945 di hadapan sidang pertama BPUPK membawa pesan bahwa Pancasila diharapkan menjadi *common denominator* bagi segenap elemen bangsa Indonesia, tanpa membedakan asal-usul ras, bahasa, agama, dan golongan. Dengan demikian, jika disepakati bahwa Pancasila adalah *civil religion*, maka keanekaragaman bangsa Indonesia dipayungi dan diikat oleh kesadaran kolektif nasional dalam keutuhan sebagai bangsa yang ber-ketuhanan,

menghormati dan menjunjung tinggi kemanusiaan, menjaga persatuan, menghormati hak dan kedaulatan rakyat, serta mewujudkan keadilan sosial.

Di sisi lain, elastisitas Pancasila menjadikannya cenderung sering "dilemahkan," baik oleh penafsiran hegemonik rezim maupun oleh kelompok masyarakat yang berseberangan dengan rezim penguasa. Sejarah perdebatan tentang dasar negara dalam Majelis Konstituante pasca pemilu 1955 menunjukkan bagaimana kelompok politik yang setuju dan yang menolak Pancasila sebagai dasar negara. Selain karena idealisme politik masing-masing kelompok partai politik (Maarif, 1985), sistem pemerintahan parlementer 1950-an memberikan ruang bebas tafsir terhadap Pancasila untuk mempertahankan citra partai di hadapan rakyat pasca-revolusi fisik. "Penunggangan" Pancasila oleh kepentingan politik pragmatis –sebagaimana ditunjukkan oleh akomodatifnya kelompok komunis ketika menerima Pancasila hanya sebagai alat politiknya saja, adalah contoh lain yang selalu diargumentasikan kelompok Islam (terutama Fraksi Masyumi di Majelis Konstituante) sebagai alasan menolak Pancasila sebagai dasar negara (Samsuri, 2004).

Demikian pula di masa Orde Baru, alasan pengalaman perpolitikan nasional era multipartai sebelumnya yang melahirkan politik aliran (ideologis) di luar Pancasila sehingga dianggap menjadi sebab perpecahan nasional, oleh pemerintah Orde Baru dipandang perlu dilakukan penyeragaman asas perjuangan partai. Kebijakan semula hanya menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi partai politik dan golongan karya, namun dalam perkembangannya semua kelompok organisasi kemasyarakatan bahkan organisasi keagamaan pun dipaksa menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas. Penyeragaman ini telah menghancurkan keanekaragaman identitas kelompok masyarakat sehingga, penolakan terhadap penyeragaman asas dianggap sebagai

subversif dan merongrong kewibawaan negara (pemerintah).

Persoalannya, kenapa setelah lewat satu dekade gerakan reformasi, upaya "mem-Pancasila-kan" kembali Indonesia seperti menjadi sebuah gerakan baru? Di awal periode reformasi nasional bergulir, sebenarnya oleh Pemerintahan B. J. Habibie telah direkonstruksi ulang pemaknaan terhadap Pancasila. Tim Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (selanjutnya Tim Pendidikan) sebagai bagian Tim Nasional Reformasi yang dibentuk Presiden Habibie menjelaskan karakter Pancasila dalam kepribadian masyarakat madani. Karakter tersebut, *pertama*, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. *Kedua*, demokratis dan beradab yang menghargai adanya perbedaan pendapat. *Ketiga*, mengakui hak-hak asasi manusia sebagaimana yang digariskan dalam UUD 1945. *Keempat*, tertib dan sadar hukum. *Kelima*, percaya pada diri sendiri, memiliki kemandirian dan kreatif terhadap pemecahan masalah yang dihadapi serta memiliki orientasi yang kuat pada penguasaan ilmu dan teknologi. *Keenam*, memiliki semangat kompetitif dalam suasana kooperatif, penuh persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain dengan semangat kemanusiaan secara universal. *Ketujuh*, suatu tatanan kehidupan masyarakat beradab yang menjunjung tinggi nilai-nilai budi luhur yang telah mengakar dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. *Kedelapan*, masyarakat belajar yang tumbuh dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat (Tim Nasional Reformasi, 1999: 119-124).

Dari kedelapan ciri itu, menurut Tim Nasional Reformasi ada nilai-nilai moral yang penting untuk dimiliki sebagai upaya mewujudkan masyarakat madani, yaitu (1) *bersilaturrahmi*, (2) *persaudaraan (ukhuwwah)*,(3) *persamaan*, (4) *adil*, (5) *baik sangka*, (6) *rendah hati (tawadlu)*, (7) *tepat janji*, (8) *lapang dada*, (9) *dapat dipercaya*, (10) *harga diri*, (11) *hemat*, (12) *dermawan*. (Tim Nasional Reformasi, 1999: 123-124).

Jika dicermati, nilai-nilai moral tersebut sebagian besar sudah diungkap dalam butir-butir pengamalan nilai moral Pancasila sebagaimana disebut-sebut dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Nilai-nilai moral Pancasila dalam tafsiran P4, diakui atau tidak, sesungguhnya telah merujuk kepada nilai-nilai moral universal. Karena kondisi politik gerakan reformasi waktu itu cenderung menegasikan diri dengan rezim sebelumnya (Orde Baru), sehingga timbul semacam "alergi" menggunakan istilah-istilah yang lazim didengar semasa Orde Baru, seperti P4 tadi.

Catatan penting dari reformasi pada masa Pemerintahan Habibie ialah tentang visi reformasi pendidikan dan sumber daya manusia yang hendak diwujudkan. Tim Pendidikan dalam Tim Nasional Reformasi itu menjelaskan bahwa visi reformasi pendidikan ialah untuk:

> ...terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang sesuai dengan amanat Proklamasi Kemerdekaan 1945 yang bertekad untuk mewujudkan masyarakat madani Indonesia sebagai suatu ***masyarakat Pancasilais*** yang memiliki cita-cita dan harapan masa depan, demokratis dan beradab, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, berakhlak mulia, tertib dan sadar hukum, dan kooperatif dan kompetitif serta memiliki kesadaran dan solidaritas antargenerasi dan antarbangsa. Manusia Indonesia yang hidup di dalam masyarakat madani itu menuntut setiap individu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maju dan mandiri, berakhlak mulia, cakap dan cerdas, demokratis dan bertanggung jawab serta berwawasan budaya (Tim Nasional Reformasi, 1999: 285, huruf miring dan tebal oleh penulis).

Setelah pencabutan P4 oleh MPR pada Sidang Istimewa MPR November 1998, diakui atau tidak, forum nasional cenderung tidak lazim menyebut-nyebut Pancasila. Sebagai contoh, MPR hasil Pemilu 1999 telah membuat

satu ketetapan tentang etika kehidupan berbangsa (Ketetapan MPR No.VI/MPR/2001). Salah satu pertimbangan lahirnya keputusan politik itu ialah krisis multidimensi yang melanda kehidupan bangsa. Krisis nasional multidimensi tidak menyebutkan karena bangsa ini telah menanggalkan kemurnian pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah kenegaraan Indonesia. Namun, krisis multidimensi ditandai oleh makin pudarnya integrasi nasional, "...konflik sosial yang berkepanjangan, berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan" (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2001).

Etika Kehidupan Berbangsa memuat macam-macam etika dalam kehidupan sosial dan budaya, politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, penegakan hukum yang berkeadilan, keilmuan, dan lingkungan. Tujuan penetapan *Etika Kehidupan Berbangsa* oleh lembaga tertinggi negara (MPR) ketika itu ialah agar menjadi acuan dasar untuk "meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa." Untuk menjabarkan *Etika Kehidupan Berbangsa* itu, MPR membuat lima kaidah pelaksanaannya dengan *harapan* diamalkan oleh seluruh warga bangsa.

Dokumen *Etika Kehidupan Berbangsa* itu diperkuat oleh ketetapan MPR berikutnya tentang visi Indonesia masa depan (Ketetapan MPR No. VII/MPR/2001). MPR menyebut ada tiga visi: ideal, antara, dan Lima Tahunan. Visi Ideal tergambar dalam cita-cita nasional dalam Pembukaan UUD 1945. Visi Antara tergambar dalam ketetapan MPR tersebut sebagai Visi Indonesia 2020 yang "mewajibkan" berlaku sampai dengan 2020. Visi Lima Tahunan tergambar dalam dokumen politik semacam garis-garis besar haluan negara.

Visi Indonesia 2020 memuat idealitas perwujudan masyarakat Indonesia yang memiliki karakter relijius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Berbeda dengan *Etika Kehidupan Berbangsa* yang implementasinya untuk seluruh warga bangsa, Visi Indonesia 2020 ditekankan implementasinya kepada para penyelenggara negara. Baik *Etika Kehidupan Berbangsa* maupun Visi Indonesia 2020, pada gilirannya keduanya hanyalah semacam "pepesan kosong." Kedua dokumen politik tersebut, sebagaimana "ajaran kebajikan" dalam P4, hanya indah di teks sedangkan dalam kehidupan publik nasional yang kongkrit amat jauh jaraknya bagai langit dan bumi.

Di luar pendapat yang saling bertolak-belakang di antara wakil-wakil fraksi di MPR tentang P4 tersebut, pandangan moderat dari Eki Syachruddin (F-KP) penting dikemukakan di sini. Menurut Eki Syachruddin, setiap gagasan dan kebijakan mewakili dan tepat menurut zamannya. Di zamannya Orde Baru adalah bagus, dan tidak ada yang lebih hebat dibandingkan dengan Presiden Soeharto itu sendiri. Demikian pula dengan gagasan NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis), di zamannya adalah bagus. "Siapa bilang (Nasakom) tidak bagus pada waktunya, karena Komunis adalah realitas, kenyataan kalau Demokrasi mesti diakui.... Manipol[1] siapa bilang tidak bagus. Pada waktunya bagus," kata Eki Syachruddin. Demikian pula dengan P4, menurut Eki Syachruddin, kegagalan Orde Baru antara lain karena P4 bukan Pancasila. Pendapat Eki Syachruddin ini sejalan dengan pernyataan Prof. Lilik Hendradjaja (F-UD) yang menyatakan bahwa pengamalan P4 menjadi dipaksakan secara birokratis terutama setelah dibentuk BP-7, meskipun Ketetapan MPR tentang P4 itu memuat nilai-nilai moral bangsa yang baik. Metode penghayatan dan pengamalan nilai-nilai moral itu di lapangan mengalami distorsi, sehingga menjadi tidak efektif. Penataran

P4, menjadi manggala, seakan-akan menjadi sebuah mata pencaharian, sehingga dalam prakteknya sosialisasi nilai-nilai Pancasila dalam P4 mengalami pemborosan uang negara (Risalah Rapat Ke-3 PAH BP MPR, 18 September 1998).

Kesan umum pandangan para anggota fraksi di Panitia *Ad-Hoc* (PAH) II BP MPR seputar P4 dikemukakan oleh Ketua PAH II BP MPR, Widodo A.S., dalam Rapat Ke-3 PAH BP MPR (18 September 1998). Menurut Widodo A.S., PAH tidak merasa mempersoalkan Pancasila sebagai dasar negara seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Namun masalahnya terletak dalam P4 sebagai pedoman, yang dalam pengamalannya terdapat ketidaksesuaian baik substansi maupun metodologi sosialisasinya, sehingga timbul keinginan untuk mencabut, merubah dan meninjau P4. Widodo A.S. juga menambahkan bahwa karena sifat Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka penjabaran nilai-nilai Pancasila harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan masyarakat yang selalu mengalami perubahan dan kemajuan (Risalah Rapat Ke-3 PAH BP MPR, 18 September 1998).

Rapat Sub Komisi II Panitia Ad Hoc II MPR setelah melalui konsultasi intern fraksi dan konsultasi antar fraksi, kelima fraksi akhirnya menyetujui pencabutan Tap MPR No. II/MPR/1978 (Risalah Rapat Ke-2 Komisi Sidang Istimewa MPR 12 Nopember 1998). Persetujuan itu berkaitan dengan penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Penafsiran tunggal nilai-nilai Pancasila dalam P4 dicabut berdasarkan Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998 dalam rapat paripurna Sidang Istimewa MPR, 13 Nopember 1998 (Risalah Rapat Paripurna Ke-5 PAH II Badan Pekerja SI MPR 1998).

Suasana eforia setelah keluar dari suasana politik otoriter tidak bisa dinilai sebagai satu-satunya penyebab utama kenapa sebagian besar politisi di MPR "gelap mata" sehingga mencabut P4. Pertanyaan

yang diajukan sejumlah kalangan akademisi maupun aktivis gerakan masyarakat kewargaan cenderung sama, apakah pendidikan P4 gagal atau berhasil? Dalam amatan Daniel Dhakidae (2001: 24-25), pendidikan P4 tergolong menyita anggaran biaya yang tidak kecil untuk program ideologisasi masyarakat di semua kelas dan golongan ke segenap penjuru daerah di Indonesia. Dalam taraf tertentu program ideologisasi (berbentuk penataran P4) tersebut tampaknya hanya bisa dibandingkan dengan program Departemen Ideologi Uni Soviet yang hendak mengontrol masyarakat dengan tafsir ideologi tunggal rezim. Dari sini penilaian yang bijak adalah bukan masalah berhasil atau gagalnya pendidikan P4, tetapi sejauh mana Pancasila dimaknai oleh segenap warga negara. Dalam hal ini penulis sependapat dengan Dhakidae yang menyatakan bahwa:

> Pancasila menjadi suatu makhluk di langit dan tidak tersentuh oleh proses normal kehidupan masyarakat warga di bumi sehingga korupsi tetap diakui sebagai korupsi, tetapi korupsi dilakukan oleh *oknum* yang tidak ada hubungannya dengan Pancasila. Pancasila tetap *bersih* meskipun yang memujanya adalah kaum koruptor dan yang menyembahnya adalah para pembunuh (Dhakidae, 2001: 26).

Dari pernyataan tersebut, masalah pokoknya adalah bagaimana mendudukan Pancasila kembali kepada fungsinya sebagai dasar negara yang merupakan suatu *gentlemen agreement*, sebagaimana dikukuhkan oleh para pendiri negara. "Membumikan" Pancasila agar tetap relevan dan memiliki makna sebagai panduan berbangsa dan bernegara agar Pancasila adalah lebih utama daripada menyanjung-nyanjungnya sebagai warisan leluhur yang sangat tinggi nilainya dalam setiap pidato kenegaraan ataupun upacara-upacara. Namun, di pihak lain, justru Pancasila diperalat oleh kepentingan politik rezim untuk membungkam suara kritis masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Pengalaman sebelum dan selama Orde Baru terhadap tafsir pengamalan Pancasila menjadi pelajaran penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan.

Model Kurikuler

Pembangunan karakter bangsa melalui instrumen politik pendidikan nasional di Indonesia sudah dimulai sebelum kritik terhadap model Pendidikan Pancasila era Orde Baru. Pada masa sebelumnya, Presiden Soekarno selalu menekankan pentingnya *nation and character building* dalam rangka membentuk manusia sosialis Indonesia yang berdasarkan Pancasila, melalui proses edukatif yang bersifat revolusioner. Di masa Orde Baru, karakter manusia Indonesia sebagai manusia pembangunan tercermin dalam sejumlah Garis-garis Besar Haluan Negara. ***Manusia-manusia pembangunan*** memiliki karakter sebagai sebagai berikut: *sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, cerdas, berbudi pekerti yang luhur, mencintai Bangsanya dan mencintai sesama manusia, beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, setia kawan, percaya pada diri sendiri, sikap menghargai jasa para pahlawan, inovatif dan kreatif, serta berorientasi ke masa depan* (diolah dalam Samsuri, 2010). Ciri-ciri karakter tersebut secara normatif dapat diterima oleh semua kalangan. Persoalannya, bagaimana mengukur keberhasilan pencapaian ciri-ciri positif karakter tersebut, tampaknya tidak terselesaikan hingga gerakan reformasi bergulir. Pembentukan karakter warga negara cenderung sebagai retorika pembangunan seperti dalam jargon membangun manusia Indonesia seutuhnya sebagai bentuk pengamalan Pancasila dan UUD 1945.

Adagium "Ganti Menteri, Ganti Kurikulum" dalam dunia pendidikan

di Indonesia, agaknya kurang tepat diarahkan terhadap Pancasila sebagai bidang kajian model pendidikan selama era Orde Baru. Jika dicermati dalam kebijakan nasional di bidang pendidikan, penekanan "pendidikan Pancasila" model Orde Baru diperkuat dalam dokumen politik yang dikenal sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai produk ketetapan MPR – lembaga tertinggi negara menurut UUD 1945 ketika itu. Pada GBHN pertama Orde Baru, yaitu GBHN 1973, diperkenalkan bidang kajian baru dengan nama Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Label PMP yang diharuskan ada dalam kurikulum di semua tingkat pendidikan sejak Taman Kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi, meski tidak secara khusus menunjuk pada satu bidang studi, namun telah ditafsirkan sebagai satu mata pelajaran tersendiri. Penamaan mata pelajaran menurut pesan GBHN dalam dunia pendidikan Indonesia selama Orde Baru, dirasakan "istimewa" untuk bidang studi PMP, hingga GBHN 1998 – yakni GBHN terakhir produk MPR rezim Orde Baru.

Besarnya kepentingan rezim kekuasaan terhadap PMP tersebut, mengakibatkan terjadinya reduksionisme misi mata kajian itu dalam kerangka membentuk warga negara yang baik. Reduksi itu nampak ketika pendidikan Pancasila yang dieksplisitkan dengan label PMP, seakan-akan menjadi satu-satunya mata pelajaran yang harus bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter warga negara, khususnya kepada generasi muda.

Dalam kasus rezim Orde Baru di Indonesia, pembentukan karakter warga negara secara eksplisit dimuat dalam produk politik tertinggi lembaga negara, MPR, berupa GBHN. Dokumen politik ini pada gilirannya diterjemahkan ke dalam produk kebijakan operasional bidang pendidikan oleh kementerian pendidikan dalam setiap Kabinet Pembangunan di bawah Presiden Soeharto.

Secara formal, Pasal 39 UU RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ketika itu mendeskripsikan pendidikan kewarganegaraan sebagai "...usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara." Implikasi pesan pasal ini dalam Kurikulum 1994 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah ialah dengan memberlakukan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Peran negara menafsirkan ideologi nasional melalui arena pendidikan tidak hanya dilakukan rezim Orde Baru. Sebelumnya, di tahun 1959/1960an ketika gegap gempita Demokrasi Terpimpin begitu kuat di panggung politik ketika itu, telah diperkenalkan mata pelajaran *Civics* dalam dunia pendidikan Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya satu buku terbitan Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP & K) yang berjudul "*Civics, Masyarakat dan Manusia Indonesia Baru,*" karangan Mr. Soepardo, dan kawan-kawan. Materi buku itu berisi tentang Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia; Pancasila; UUD 1945; Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin; Konferensi Asia-Afrika, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Manifesto Politik; Laksana Malaikat; dan lampiran-lampiran Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Pidato Lahirnya Pancasila, Panca Wardana, dan *Declaration of Human Rights;* serta pidato-pidato lainnya dari Presiden Sukarno dalam "Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi" (Tubapi) dan UDHR dan kebijakan *Panca Wardhana* dari Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Prijono. (Jakarta: Balai Pustaka, 1962, cet.2). Buku "Civics" dan Tubapi tersebut kemudian menjadi sumber utama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah, dengan corak indoktrinatif yang sangat dominan.

Pada bagian lain, buku *Civics, Masyarakat dan Manusia Indonesia Baru*

tersebut memuat penjelasan idealitas masyarakat yang dibentuk, yakni *Masyarakat Baru: Masyarakat Sosialis Indonesia* di dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buku ini lahir sesuai konteks kebutuhan politik pada jamannya yang mengusung secara besar-besaran gagasan-gagasan Presiden Sukarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan pada masa Pemerintahan Sukarno, berkembang dengan nomenklatur mata pelajaran: *Kewarganegaraan* (1957), dan *Civics* (1961). Mata pelajaran *Kewarganegaraan* (1957) membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan, sedangkan *Civics* (1961) lebih banyak membahas sejarah kebangkitan nasional, UUD 1945, pidato-pidato politik kenegaraan, terutama untuk "nation and character building" bangsa Indonesia seperti pelajaran *Civics* di Amerika Serikat pada tahun-tahun setelah Deklarasi Kemerdekaan Amerika.

Perkembangan berikutnya, mata pelajaran "Civics" yang kemudian diganti menjadi "Kewargaan Negara" pada 1962, pada Kurikulum 1968 ditetapkan secara resmi menjadi "Pendidikan Kewargaan Negara." Di dalam kurikulum ini, penjabaran ideologi Pancasila sebagai pokok bahasan dianggap mengedepankan kajian tata negara dan sejarah perjuangan bangsa, sedangkan aspek moralnya belum nampak (Aman, *dkk.*, 1982: 11). Kajian Pendidikan Kewargaan Negara untuk masing-masing jenjang berbeda-beda kekomplekannya. Untuk jenjang sekolah dasar Mata Pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara meliputi program pembelajaran Sejarah Indonesia, Civics, dan Ilmu Bumi. Untuk jenjang SMP, Mata Pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara meliputi program pembelajaran isinya Sejarah Kebangsaan (30%), Kejadian setelah Indonesia merdeka (30%), dan UUD 1945 (40%). Untuk jenjang SMA, Mata Pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara meliputi program pembelajaran sebagian besar terdiri atas UUD 1945 (Somantri, 2001: 284-285).

Penanaman nilai-nilai moral yang cenderung hegemonik dari negara melalui proses pendidikan pada era Orde Baru mulai menampakkan kekuatannya ketika secara formal Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1973 menyebut perlunya: "Kurikulum di semua tingkat pendidikan ...berisikan Pendidikan Moral Pancasila." Meskipun sebutan "Moral Pancasila" dilekatkan untuk pendidikan kewarganegaran di jenjang pendidikan dasar dan menengah, namun materi-materi dalam masing-masing pokok bahasan, nampak bernuansa Civics seperti dalam Kurikulum 1968. Hal ini tampak dari susunan materi PMP yang dikembangkan dengan pendekatan tujuan dalam Kurikulum 1975. Sebagai gambaran penjabaran materi PMP dalam butir-butir pokok bahasan pada Kurikulum 1975 memperlihatkan bahwa materi Civics selain berupa *Sejarah Kebangsaan*, *Kejadian setelah Indonesia merdeka*, dan *UUD 1945*, secara eksplisit memasukan nilai-nilai dari masing-masing sila Pancasila dan pesan-pesan pentingnya pembangunan (seperti Rencana Pembangunan Lima Tahun dan GBHN) bagi bangsa Indonesia.

Tidak keliru apabila dikatakan bahwa terdapat hubungan penting antara pendidikan dengan kurikulum dan masyarakat yang melatarinya, sebagaimana diungkap Cogan (1998:5). Hal ini menimpa pula dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, khususnya selama Orde Baru. Periode tersebut menunjukkan bahwa sepanjang politik pendidikan rezim Orde Baru, arti penting pendidikan kewarganegaraan dalam berbagai nomenklatur untuk berbagai jenjang pendidikan formal selalu ditekankan dalam produk politik MPR bernama GBHN. Pencapaian tujuan pendidikan nasional dalam setiap lima tahunan di GBHN paralel dengan tujuan Pendidikan Pancasila yang mencerminkan upaya pembentukan warga negara yang baik, yakni warga negara Pancasilais.

Sejak GBHN 1973 hingga terakhir GBHN 1998 pada era Orde Baru, bagaimana penjelasan pendidikan untuk membentuk karakter warga

negara yang baik dibebankan kepada sejumlah nama mata pelajaran, di samping pendidikan kewarganegaraan dalam formulasi Pendidikan Pancasila. Meskipun terdapat ragam derivasi dari Pendidikan Pancasila dalam nama-nama mata pelajaran seperti *Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, Pendidikan Pendahuluan Bela Negara, Pendidikan Kewarganegaraan*, dan *Pendidikan P4*, pada akhirnya bermuara kepada model pendidikan yang bersifat *top-down*. Artinya kategori warga negara yang baik merupakan kategorisasi negara terhadap warga negara berdasarkan tafsir negara mengenai apa yang baik dan buruk sebagai warga negara, bukan sebaliknya warga negara yang menentukan kategorinya sendiri. Warga negara seolah-olah tidak berwenang membuat pengertiannya sendiri sebagai anggota dari sebuah sistem kehidupan politik bernama negara.

Dari penelusuran terhadap proses penyusunan Ketetapan MPR tentang P4 tersebut, penulis belum berhasil melacak argumentasi baik dari pemerintah maupun MPR sendiri tentang penjabaran P4 menjadi 36 butir nilai Pancasila. Hanya saja ada satu pandangan dari Fraksi Utusan Daerah (FUD) MPR, yang ditemukan dalam Darmodihardjo (1980: 109-115), tentang pentingnya P4. Ada empat alasan pentingnya P4 menurut FUD, yaitu alasan filosofis, historis, yuridis-konstitusional, dan pedagogis-psikologis. Dari keempat alasan tersebut, alasan pedagogis-psikologis menjadikan P4 relevan untuk dijadikan materi pembelajaran PMP di sekolah.

Selama periode Orde Baru, pendidikan sebagai instrumen pembentukan karakter warga negara menampakkan wujudnya dalam standardisasi karakter warga negara. Standardisasi itu mencerminkan *civic virtues* (kebajikan-kebajikan warga negara) yang disajikan dalam mata pelajaran PMP dan PPKn dengan memasukan materi pembelajaran Pancasila yang dijabarkan dari butir-butir P4. *Civic virtues* itu masing-

masing dijabarkan dari nilai-nilai moral Pancasila menjadi 36 butir pengamalan. P4 inilah yang kemudian menjadi keharusan pedoman atau arah petunjuk tingkah laku setiap warga negara. Meskipun Pasal 1 Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 menjelaskan bahwa "Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila tidak merupakan tafsir Pancasila sebagai Dasar Negara sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh dan Penjelasannya," tetapi P4 menjadi kelihatan lebih penting dari Pancasila itu sendiri. Lebih jauh, P4 dan Pancasila menjadi "kata sakti" dalam segenap kesempatan pejabat dari tingkat pusat hingga lokal dalam forum-forum formal maupun non formal.

Di bidang pendidikan, konsekuensi P4 sebagai keharusan pedoman atau arah tingkah laku warga negara sangat membebani misi pendidikan kewarganegaraan dalam PMP maupun PPKn. Pada gilirannya, unsur normatif dan anti konflik terhadap perbedaan-perbedaan kehidupan di masyarakat cenderung dihindari bahkan dianggap tabu, karena P4 selalu menekankan keharmonisan, keseimbangan hidup dalam format kehidupan kekeluargaan yang menjadi gagasan pokok (*main ideas*) kekuasaan Rezim Orde Baru.

Memasuki era reformasi, pembaharuan pendidikan kewarganegaraan dari era Orde Baru ke masa transisi era reformasi pun tidak luput dari pengaruh perubahan percaturan politik nasional. Pencabutan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P4, yang selama Orde Baru menjadi materi pokok PMP dan PPKn, telah menjadi salah satu faktor penting perubahan paradigma pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Faktor lainnya, pergeseran orientasi pendidikan berbasis *subject matters* kepada pendidikan berbasis kompetensi pun turut mempengaruhi arah kebijakan pendidikan kewarganegaraan. Pengalaman selama Orde Baru menumbuhkan kesadaran arti penting pendidikan kewarganegaraan yang tidak hanya memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang

baik terhadap hak dan kewajiban siswa sebagai warga negara. Tetapi, pendidikan kewarganegaraan pasca Orde Baru diharapkan mampu membangun warga negara muda yang memiliki kecapakan dan karakter kewargaan yang ideal, yang diperlukan dalam sistem politik demokratis di Indonesia.

Setelah pencabutan Ketetapan MPR tentang P4, kajian Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia telah menimbulkan persoalan. Kajian Pancasila yang "kering" sejak awal tampaknya sudah disadari, meski sudah ada dalam Standar Isi (SI) Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. Kritik yang acapkali muncul terhadap SI Pendidikan Kewarganegaraan antara lain bagian kajian Pancasila secara eksplisit. Dari delapan ruang lingkup kajian PKn, materi Pancasila merupakan salah topik yang dibahas tersendiri mulai sejak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas.

Upaya menghilangkan kajian Pancasila dalam SI Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sesuatu yang mustahil, hal yang absurd. Persoalannya bukan kepada seberapa eksplisit Pancasila ditonjol-tonjolkan sebagai materi Pendidikan Kewarganegaraan. Namun, seberapa fungsional Pancasila sebagai *great ought* kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi ruh dan jiwa pendidikan kewarganegaraan itu sendiri di Indonesia, untuk membedakannya dengan model sebelumnya di masa Orde Baru. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara betul-betul bermakna. Dari sinilah, pengembangan SI Pendidikan Kewarganegaraan menjadikan Pancasila sebagai pancaran nilai yang aktual dan fungsional, tidak semata-mata menjadi rumusan normatif, dalam berbagai topik, meskipun ada satu topik khusus tentang Pancasila itu sendiri.

Perihal kajian Pancasila sebagai standar kompetensi untuk jenjang pendidikan dasar hingga menengah pernah dibuatkan naskah buramnya

oleh Puskur Balitbang (2002, dalam Samsuri 2010). Tetapi entah kenapa pada akhirnya naskah tersebut dalam penelusuran penelitian oleh penulis tidak terdengar disebut-sebut kembali dalam pembahasan SI maupun SKL Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Ada persoalan penting lainnya antara SI dan SKL Mata Pelajaran yang perlu dibahas di sini. Rumusan-rumusan SI Pendidikan Kewarganegaraan ada yang tidak tercakup dalam SKL Pendidikan Kewarganegaraan. Penuturan salah satu Tim *Ad Hoc* SI Pendidikan Kewarganegaraan menyatakan bahwa penyusunan SI dan SKL Pendidikan Kewarganegaraan dilakukan oleh Tim yang berbeda. Akibatnya, standardisasi yang dibuat terdapat ketidak-sinkronan dalam pembahasan antara kedua tim. Idealnya SI mengacu kepada SKL, sehingga ada keruntutan logika berpikir bahwa standar isi merupakan penjabaran dari standar kompetensi lulusan, karena dari kompetensi sebagai tujuannya itulah baru kemudian dibuat materinya (isi). Ini juga merupakan konsekuensi dari pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis *subject matters* kepada pendekatan berbasis kompetensi (*competence based*). Artinya, rumusan SKL baik SKL untuk keseluruhan satuan pendidikan rumpun Kewarganegaraan dan Kepribadian maupun SKL untuk Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan masing-masing merupakan satu mata rantai bagi SI Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. Akan tetapi, logika ini tidak berlaku karena pembuat kebijakan standar nasional pendidikan, yakni BSNP, mendasarkan diri kepada rumusan yuridis dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Dalam Pasal 35 UU RI No. 20 Tahun 2003 disebutkan secara berurutan bahwa standar pendidikan meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Pada gilirannya SKL mendasarkan diri kepada SI, bukannya SI yang merujuk kepada SKL.

Catatan Lanjutan

"Penataan ulang kurikulum" sebagai terminologi yang diperkenalkan dalam *draft* keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah (mulai dari SD hingga SMA dan SMK) (versi Juli 2012) merupakan salah satu langkah penyempurnaan kurikulum Indonesia saat ini ke depan. Penataan struktur kurikulum dalam kebijakan pendidikan nasional Indonesia, acapkali mengundang polemik dan energi besar di kalangan pendidik dan pengamat pendidikan, serta pelaku pembuatan kebijakan pendidikan itu sendiri. Ketika Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) diperkenalkan awal 2000-an, tidak sedikit yang sinis dan skeptis. Kehadiran "Kurikulum 2006" yang merupakan penjabaran lain dari Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah pun tidak luput dari kritik, meskipun Standar Isi sebenarnya memperkuat aktualisasi KBK.

Penataan ulang kurikulum di beberapa kelompok masyarakat mengundang kekhawatiran, misal, seputar pengintegrasian kajian IPA dan IPS menjadi satu mata pelajaran. Namun, bagi penulis yang perlu dipertegas di sini ialah dengan pemunculan kembali nomenklatur "Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan" dalam rancangan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang sedang dibahas oleh tim Balitbang Kemdikbud dan BSNP. Dalam komunikasi personal dengan salah satu tim perumus naskah akademik Kurikulum PPKn, penulis mendapati kenyataan bahwa meskipun kurikulum sudah sewajarnya berubah seiring perubahan zaman dan tuntutan kebutuhan masyarakat, namun wacana penataan kurikulum itu sendiri seyogianya melibatkan publik. Dari sini deliberasi publik terutama komunitas pendidikan PPKn/PKn sangat perlu.

Perihal penataan ulang kurikulum nasional, terutama PKn menjadi PPKn, maka penulis berpendirian bahwa Pancasila sebagai dasar negara tidak sepatutnya lagi direduksi dalam berbagai kebijakan nasional, terutama dalam pembangunan karakter bangsa melalui PPKn yang kelak diberlakukan. Perlu diingat bahwa pendidikan kewarganegaraan di Indonesia selama ini sebenarnya telah menerjemahkan sedemikian rupa Pancasila sebagai cara untuk membangun karakter warga negara yang ideal. Dengan demikian, meskipun terjadi perubahan berkali-kali nomenklatur dan haluan kebijakan pendidikan kewarganegaraan tersebut, jati diri pendidikan kewarganegaraan yang berdasarkan politik negara (konstitusi) tidak bergantung kepada politik rezim pemerintah yang sedang berkuasa, seyogianya menjadi pijakan perumusan kebijakan penataan kurikulum nasional.

Kompleksitas kehidupan berbangsa dan bernegara di era globalisasi sekarang, menuntut kebijakan PPKn yang sejalan dengan zamannya. PPKn selain memperkokoh identitas kebangsaan dan tanggung jawab kewargaan *ke dalam* sebagai warga negara Indonesia, di sisi lain juga harus memperkuat peran dan kemampuan berperan *ke luar* sebagai bentuk tanggung jawab menjadi anggota warga dunia. Dari sini arti penting penataan PKn menjadi PPKn bukan sekadar membubuhkan pilar-pilar kebangsaan ke dalam nomenklatur PPKn sekarang, namun sebagai haluan politik negara untuk membangun karakter warga negara NEGARAWAN yang sejalan dengan cita-cita nasional, sekaligus berwawasan mendunia.

Reformasi pendidikan yang tengah berlangsung, khususnya dalam penataan kurikulum PKn menjadi PPKn tentu tidak akan punya arti apa-apa dalam kerangka pembentukan modal sosial warga negara, jika ia merasa cukup puas dengan perubahan yang ada tanpa diringi perubahan secara sistemik (seperti profesionalisme guru dan model pembelajaran dan penilaian, iklim politik dan sosial). Bagaimana Pancasila menjadi

modal sosial terutama untuk membentuk warga negara demokratis dalam pembelajaran PKn, maka ada baiknya melihat kembali pikiran-pikiran pokok Kuntowijoyo perihal objektivikasi Pancasila dikaitkan dengan kajian Pancasila dalam PKn.

Pertama, Pancasila secara historis, oleh Kuntowijoyo sering ditegaskan, telah mengalami periode "mitos" dan "ideologi." Pancasila mengalami "pembusukan" makna ketika ia menjadi narasi "ideologi" sejak periode awal kita belajar berdemokrasi hingga figur utama Orde Baru mundur dari kekuasaan. Menurut Kuntowijoyo, seharusnya Pancasila sebagai pelayan kepentingan horizontal bukan vertikal. Dicontohkannya, selama ini Pancasila dipakai untuk mengikat kesetiaan warga negara kepada negara. Berbagai cara ditempuh menuju kesetiaan misalnya dengan penataran P4 (*Suara Merdeka,* 25 Januari 2001).

Kedua, objektivikasi Pancasila memberikan ruang besar bagi publik (warga negara) dalam memaknai Pancasila. Dalam istilah Kuntowijoyo sendiri, Pancasila seharusnya menjadi *common denominator*, rujukan bersama semua warga negara dari berbagai agama, ras, suku dan kelompok kepentingan (Kuntowijoyo, 1996).

Objektivikasi ini sebagian telah dilakukan para pengembang PKn/PPKn persekolahan di Indonesia dengan berusaha meletakkan Pancasila pada posisi aslinya sebagai dasar negara, sehingga kajian Pancasila dalam PKn/PPKn ialah "semata-mata" bersandar pada ilmu. Konsekuensinya, Pancasila tidak lagi diposisikan secara ideologis (apalagi sebagai mitos), namun diposisikan sebagai basis nilai keilmuan PKn/PPkn yang ada dalam kawasan kajian PKn/PPKn itu sendiri (*civic knowledge, civic skills, dan civic dispositions*).

Penyajian objektivikasi nilai-nilai Pancasila dalam buku teks pelajaran PKn/PPKn sangat strategis dimulai sejak pendidikan dasar. Pandangan ini didasarkan kepada pendapat bahwa peserta didik sejak dini seyogianya

dibiasakan untuk mengkaji dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila tidak sekadar sebuah *kebenaran sejarah* yang harus diterima dan dijabarkan dalam pengalaman hidup siswa, tetapi menjadikan Pancasila fungsional dan sangat bermakna di kehidupan sehari-hari mereka.

Pengalaman selama era buku *Civics* di era sebelum Orde Baru, sampai dengan era buku-buku teks yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan maupun BP-7 selama Orde Baru, cenderung menampilkan nilai-nilai Pancasila yang syarat dengan tafsir rezim di zamannya. Agen negara seperti Depdikbud dan BP-7 bersama-sama Penerbit Balai Pustaka mendominasi pengadaan buku teks pelajaran seperti PMP mapun PPKn.

Bagaimana dengan kondisi buku teks PKn/PPkn sekarang? Sebagaimana mata pelajaran lainnya, tidak ada satu pun buku teks pelajaran yang secara formal ditulis mengatasnamakan "suara resmi" pemerintah. Demokratisasi pendidikan dengan lahirnya kebijakan standar nasional pendidikan menjadikan sumber belajar seperti buku teks pelajaran pun tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah. Sebagaimana model pemerintahan liberal – politik standardisasi pun sebenarnya mengacu kepada mekanisme pasar yang berkembang di pemerintahan liberal—buku-buku teks juga mengalami "liberalisasi". Masyarakat diberi kesempatan untuk menyajikan buku-buku teks bermutu yang diterbitkan oleh penerbit swasta.

Persoalannya, bagaimana "liberalisasi" pengadaan buku teks pelajaran ini tidak meruntuhkan visi dan misi serta substansi pendidikan Pancasila di persekolahan? Rambu-rambu dan pedoman penilaian buku teks mata pelajaran di sekolah sebagaimana disusun oleh BSNP maupun Pusat Kurikulum dan Perbukuan sudah sedemikian rupa mengatur aspek teknis maupun substansi sebuah buku teks. Dengan merujuk kepada sejumlah standardisasi (SI, SKL, panduan penilaian buku teks BSNP), penyajian nilai-nilai Pancasila mencapai sasaran yang diharapkan, tidak

terdistorsi oleh kepentingan sesaat.

Di akhir pembahasan ini, penulis hendak menegaskan bahwa Pancasila dalam kebijakan pendidikan dalam nomenklatur apapun, memiliki tanggung jawab besar untuk melahirkan warga negara muda masa depan yang handal, bertanggung jawab. Kelahiran seorang warga negara yang handal tidak mungkin dibentuk secara *sim salabim*. Garda depan pembentukan pribadi ber-Pancasila ini, terutama terletak kepada para pendidik itu sendiri, baik di sekolah, perguruan tinggi dan masyarakat.

Catatan Kaki:

1 Lihat Pidato Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1960 yang menyatakan :
Ada orang menanja: "Kenapa Manifesto Politik?" "Kan kita sudah mempunjai Pantja Sila;" Manifesto Politik adalah *pemantjaran daripada Pantja Sila/USDEK adalah pemantjaran daripada Pantja Sila.* Manifesto Politik, USDEK dan Pantja Sila adalah terdjalin satu sama lain, -- Manifesto Politik, USDEK dan Pantja Sila ta' dapat dipisahkan sama lain. ....Ketjuali daripada itu, sebagai akibat daripada dualisme jang mendatangkan segala matjam kompromis dan kelembekan dan kekurang tegasan dan uler-kambangan dan kechianatan dan ke-Togogan itu tadi, maka Pantja Sila makin lama makin didjadikan perkataan dibibir sadja, tanpa isi jang membakar tjinta, tanpa arti jang menghidup-hidupkan semangat dan kejakinan, tanpa *bezieling* jang membakar-menggempa-meledak-ledak dalam kalbu dan dalam djiwa.

PANCASILA DALAM
PRAKSIS PENDIDIKAN

IV

PRAKSIS PENDIDIKAN PANCASILA

PRAKSIS PENDIDIKAN PANCASILA

SUYATO; LUSILA ANDRIYANI

Refleksi akan pentingnya pengarusutamaan moral sebagai fokus utama dalam dunia pendidikan semakin mendapatkan momentum yang tepat ketika akhir-akhir ini kita disuguhi beragam fenomena yang sangat memprihatinkan, yang mencoreng dunia pendidikan, baik dunia maupun nasional. Sebut saja penembakan membabi buta yang dilakukan seorang warga negara Australia terhadap jamaah sholat jumat di sebuah masjid di New Zealand atau penganiayaan yang dilakukan seorang siswa terhadap gurunya sampai meninggal dunia di Madura. Konon, di balik kemajuan dalam bidang teknologi yang begitu mengagumkan, angka bunuh diri di Jepang dan Koreaa Selatan yang paling tinggi di dunia. Penekanan yang terlalu berlebihan pada aspek ekonomi sebagai bahan pertimbangan dalam praksis pendidikan menambah pentingnya kegiatan reflektif untuk dilakukan. Buku berjudul "*Changes in Teachers' Moral Role From Passive Observers to Moral and Democratic Leaders*" yang diedit Dorit Alt and Roni Reingold (2012) menegaskan pentingnya pergeseran peran guru berkaitan dengan pendidikan moral. Pendidikan moral dalam koteks Indonesia bersumber

pada Pancasila. Yudi Latif (2018) mengatakan ada tiga tantangan pembudayaan Pancasila. **Pertama**, bagaimana meyakinkan segenap warga negara bahwa nilai-nilai Pancasila cocok dan ampuh sebagai titik temu, titik tumpu, dan titik tuju dalam kehidupan kebangsaan yang majemuk. **Kedua,** bagaimana menjelaskan nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan keilmuan secara multidisiplin, antardisiplin, dan transdisiplin. **Ketiga,** bagaimana mendorong warga negara (khususnya peserta didik) untuk dapat mengembangkan laku hidup berdasarkan nilai dan konsep Pancasila. Memang, sebagai sebuah ideologi, Pancasila idealnya harus mampu memadukan tiga unsur: keyakinan, pengetahuan, dan tindakan (Yudi Latif, 2013:XV). Untuk itu perlu disadarkan petingnya Nilai-nilai Pancasila dalam praksis pendidikan Indonesia. Dengan kata lain, pendidikan jangan hanya merupakan kegiatan transmisi atau transaksi, tetapi bersifat transformtif.

Beragam tulisan yang disarikan dari hasil penelitian yang terhimpun di dalam bab ini dimaksudkan untuk menyadarkan kepada pembaca bahwa dalam arus pendidikan yang deras ini, kita bisa mendayung dan mengarahkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai. Memang secara teori hubungan antara akademik dan moral ada lima kategori: terpisah, berurutan (akademik yang pertama atau moral yang pertama), dominan (akademik mendominasi moral), transformatif (transformatif akademik atau transformatif moral), dan terintegrasi (Stengel, 2006). Sementara itu Halstead dan Pike (2006) membagi cara siswa belajar nilai menjadi: pengajaran langsung, observasi, partisipasi dan tindakan terbimbing, dan melalui refleksi. Beragam kategori pendekatan tersebut secara tersirat dan atau tersurat berusaha dipaparkan para penyumbang tulisan yang terhimpun di dalam Bab ini.

Secara kategoris, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praksis pendidikan dibagi menjadi dua: sekolah dan perguruan tinggi. Untuk

kategori sekolah ada 10 tulisan yang dihasilkan dari penelitian pada tingkat taman kanak-kanak sampai dengan SMA/K. Sedangkan untuk kategori perguruan tinggi terdapat 9 tulisan dari beragam program studi yang ada di UNY. Bisa dikatakan tulisan ini merupakan contoh *best pracices* yang dilakukan UNY sebagai langkah awal untuk sebuah proyek besar nan mulia, menjadikan UNY sebagai *leading in character education.*

PRAKSIS PENDIDIKAN PANCASILA DI LINGKUP PRASEKOLAH DAN SEKOLAH DASAR

Outbond sebagai Media Pengenalan Nilai-nilai Pancasila di Taman Kanak-kanak

LUSILA ANDRIANI PURWASTUTI;
L.HENDROWIBOWO;
SUDARYANTI

Pertanyaan menggelitik dari judul tulisan ini yaitu: apakah nilai-nilai Pancasila perlu diperkenalkan kepada anak TK? Dengan kata lain apakah di TK perlu dilakukan praksis tentang Pancasila? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan tegas ya perlu. Justru pengenalan Pancasila sebagai dasar negara seharusnya dilakukan sejak dini. Anak usia TK sering disebut dengan masa emas (*golden age)*. Masa yang terjadi satu kali dalam perjalanan kehidupan manusia. Masa dimana synapse2 otak manusia berkembang dengan sangat pesat, sehingga semua pengetahuan dan pengalaman akan diingat seumur hidupnya. Oleh karena itu, menjadi sebuah upaya strategis yang dilakukan unutk pengenalan tentang sesuatu hal termasuk pengenalan tentng Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Memang secara esensial tujuan pendidikan di TK tidak sama dengan pendidikan di tingkat SD sd Perguruan Tinggi. Tujuan pendidikan di TK baru pada tahap pengenalan. Walaupun baru tahap pengenalan,

tetapi pendidikan di TK perlu didesain dengan seksama, mengingat aspek kognitif anak TK belum berkembang secara optimal. Piaget mengatakan bahwa perkembangan kognitif anak TK masih dalam tahap pra operasional konkrit, oleh karena guru sebagai fasilitaor perlu mendesain pembelajaran dengan menggunakan prinsip belajar sambil bermain.

Salah satu implementasi pengenalan Pancasila sebagai dasar negara dapat dilakukan menggunakan outbond sebagai model pembelajaran di luar kelas. Outbond menjadi sarana belajar yang sangat efektif dan menyenangkan. Outbond menjadi sarana memadukan pembelajaran nilai-nilai hidup pribadi maupun hidup kolektif bagi anak-anak. Kegiatan outbond bagi anak TK merupakan sarana pembelajaran yang memadukan berbagai macam pengembangan; kognitif, motorik, sosial emosional, nilai moral-agama, bahasa. Dalam satu kegiatan outbond dapat didesain untuk mengintegrasikan penanaman nilai-nilai moral dan agama pribadi dan juga moral kolektif yang sangat penting dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Kesemua kegiatan, media dan sarana pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik anak TK beserta karakteristik pembelajaraan anak TK. Sedangkan prinsip-prinsip yang digunakan dalam model ini yaitu: aman, nyaman, sederhana dan menyenangkan. Model ini diasumsikan menjadi model yang sangat efektif untuk pembelajaran nilai-nilai Pancasila sebagai nilai kolektif bangsa. Model ini juga akan disertai dengan perangkat pembelajaran dan evaluasinya. Rubrik penilaian akan dibuat untuk mengevaluasi keberhasilan integrasi nilai-nila Pancasila dalam pembelajaran outbond tersebut.

Tulisan ini merupakan sebuah inovasi dalam pembelajaran di TK yang tematik integratif. Pembelajaran di luar kelas (outbond) yang didesain untuk mengenalkan Pancasila sebagai dasar negara melalui kegiatan-kegiatan yang mengadopsi kegiatan outbond. Outbond merupakan

sebuah permainan yang kompetetif, berkelompok, dan penuh tantangan, sehingga menjadi sebuah aktivitas pembelajaran anak TK berdasar atas pengalaman. Pengembangan Implementasi Pancasila melalui Outbond untuk anak TK di Kawasan Pesisir memiliki 4 asumsi yang dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Membuka wawasan untuk guru dan anak TK bahwa pendidikan tidak harus dilakukan di dalam kelas. Pendidikan anak TK merupakan pendidikan yang kontekstual, artinya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan lingkungan yang ada di sekitar anak, sehingga pendidikan tidak tercerabut dari lingkungan hidup anak.
2. Mengembangkan prinsip belajar sambil bermain. Berdasarkan FGD dengan guru-guru di kawasan pesisir jarang dilakukan kegiatan belajar sambil bermain di kawasan pesisir pantai. Padahal alam di pesisir memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai sumber belajar dan media pembelajaran yang efektif untuk aspek pengembangan anak: nilai-nilai agama dan moral, kognitif, bahasa, motorik kasar dan halus, sosial-emosional, seni.
3. Model integrasi nilai Pancasila dapat dilakukan sejak dini. Hal ini dilakukan karena pada saat ini terjadi degradasi moral (mis: korupsi, nglitih), berbagai konflik bernuansa Sara yang akan memecah persatuan dan kesatuan bangsa, dan khususnya untuk anak TK sudah tidak mengenal lagi figure pahlawan nasional, permainan-permainan tradisional yang kaya akan nilai-nilai, penggunaan alat-alat permainan pabrikan yang menghilangkan nilai-nilai mencintai produk dalam negeri dan nilai kreativitas. Atau dengan kata lain sejak dini sebenarnya perilaku masyarakat dan bangsa) Indonesia sudah menjauh dari nilai-nilai yang dipakai sebagai acuan hidup kelompok, yaitu Pancasila.

4. Menjadi salah satu alternatif model pembelajaran yang terpadu (integratif) untuk aspek pengembangan anak TK. Artinya satu kegiatan pembelajaran out bond di kawasan pesisir ini dapat dipakai untuk mengembangkan 6 aspek sebagaimana peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. ...tentang Standar Pendidikan di PAUD sekaligus sebagai salah satu model pendidikan penguatan karakter di anak usia dini (TK) sebagaimana Peraturan Presiden No... yang secara esensial berisi pendidikan nilai-nilai Pancasila.

Luaran inovasi Produk ini adalah sebuah CD pembelajaran yang berisi model pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila pada kegiatan outbond. Inovasi dari model ini yaitu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam permainan outbond yang selama ini belum ada. Selain itu permainan outbond yang dekat dengan pengembangan motorik kasar juga digunakan untuk pengembangan aspek sosial emosional (empati, simpati, kerjasama, kekeluargaan), moral dan agama (nilai religious, kemanusiaan, nationalisme, demokratif, kesejahteraan Sosial), kognitif, bahasa, dan seni. CD Pembelajaran ini berisi kegiatan awal, inti, dan akhir yang terkait dengan integrasi nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan outbond. Pembelajaran ini dikembangkan dengan mengunakan prinsip-prinsip pembelajaran belajar sambil bermain, *experience learning*, memanfaatkan sumber belajar dan media pembelajaran lingkungan pantai. CD pembelajaran ini juga disertai dengan perangkat pembelajaran berupa Rencana Persiapan Kegiatan Harian dan Rubrik penilaian untuk akhir pembelajaran. Nilai-nilai Pancasila ditampilkan dalam tema dan sub tema dalam pembelajaran. Dalam payung tema ini integrasi aspek pengembangan dilakukan. Kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila didesain dalam kegiatan outbond

di kawasan Pantai Selatan dalam bentuk permainan yang penuh dengan tantangan, kompetisi antar kelompok. CD ini digunakan untuk guru TK

Inovasi pembelajaran ini merujuk pada pendapat beberapa tokoh pendidikan anak usia dini. Rocmah (2012: 320) mengatakan bahwa bermain dilakukan secara sukarela, tanpa paksaaan atau tekanan dari luar. Hal ini didukung dengan pendapat Piaget yang mengatakan bermain merupakan tanggapan yang berulang atau sekedar kesenangan yang fungsional. Sudomo (2000: 1) menjelaskan bahwa bermain memberikan kesenangan dan mengembangkan imajinasi anak. Oleh karena itu kegiatan outbond yang terdiri bermain, memberi tantangan menjadi relevan untuk belajar Anak TK tentang nilai-nilai Pancasila.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian pengembangan Thiagarajan yang meliputi 4 D (*define, desain, development, dan desiminasi*). Penelitian ini belum sampai pada tahap desiminasi. Data diperoleh melalui: FGD, Wawancara, Observasi, dokumentasi. Analisis data meliputi pengumpulan data, display data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulkan. Penelitian baru sampai tahap define, desain, belum sampai pada tahap development dan desiminasi.

Langkah-langkah desain model implementasi Pancasila di pendidikan pra sekolah ini diawali dengan mencari referensi konsep dan teori yang terkait dengan penelitian ini. Konsep dan teori ini meliputi bermain, outbond sebagai pembelajaran out door., karaakteristik anak TK, serta implementasi Pancasila di sekolah TK. Penelitian Smith, Garvey, Rubin, Fein dan Vanderberg (Andang Ismail, 2006: 20) menunjukkan ciri kegiatan bermain yang terkait dengan penelitian pengembangan ini yaitu: a) menekankan pada proses yang berlangsung dibandingkan hasil akhir. Saat bermain berlangsung anak akan fokus pada kegiatan yang sedang dilakukannya bukan pada tujuannya; b) mempunyai kualitas pura-pura yang mempisahkan dengan dunia nyata sehari-hari. Sedangkan Swart

(Hartati, 2005) mengemukakan karakteristik bermain yaitu: a) interaktif, kebebasan, spontanitas, tanpa paksaan, menarik, terbuka (tidak terbatas) imajinatif, ekspresif, kreatif dan berlainan. Pendidikan anak TK termasuk dalam pendidikan anak usia dini. Pengertian pendidikan anak usia dini di dalam UU No.20 tentang Sistem Pendidikan dinyatakan pada Pasal 1 angka 14 yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa pendidikan anak usia dini berbeda dengan pendidika dasar, menengah, dan itu. Oleh karena itu, upaya pembinaan anak sampai umur enam tahun ini memiliki kekhasan dalam model pembelajarannya, Dalam pendekatan pembelajaran di TK adalah pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik di TK pada hakikatnya merupakan pembelajaran integratif. Pembelajaran yang memadukan 6 aspek pengembangan anak TK yang meliputi: pengembangan kognitif, sosial-emosional, moral dan nilai-nilai agama, bahasa. Motorik, seni dalam payung tema. Selanjutnya terpadu dalam aspek pengembangan, misalnya ketika pembelajaran pengembangan motorik dilakukan dapat dipadukan dengan 5 aspek pengembangan yang lainnya. Outbond secara implisit juga memuat tujuan mengembangan *soft skill* anak. Adapun tujuan outbound menurut Adrianus dan Yufiartiantara lain (1) mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan siswa (2) berekspresi sesuai dengan caranya sendiri yang masih dapat diterima lingkungan (3) mengetahui dan memahami perasaan, pendapat orang lain dan memahami perbedaan (4) membangkitkan semangat dan motivasi untuk terus terlibat dalam kegiatankegiatan (5) lebih mandiri dan bertindak sesuai keinginan (6) lebih empati dan sensitive dengan perasaan orang

lain (7) mampu berkomunikasi dengan baik (8) mengetahui cara belajar yang efektif dan kreatif (9) memberikan pemahaman terhadap sesuatu tentang pentingnya karakter yang baik (10) menanamkan nilai-nilai positif sehingga terbentuk karakter siswa melalui berbagai contoh nyata dalam pengalaman hidup (11) membangun kualitas hidup siswa yang berkarakter (12) menerapkan dan memberi contoh karakter yang baik kepada lingkungan (Rocmah, 2012: 183).

Langkah kedua melakukan FGD dengan kepala sekolah dan guru TK di daerah pesisir untuk mengidentifkasi kebutuhan mereka tentang sebuah model outbond sebagai media pengenalan Pancasila. Selajutnya disusunlah desain model integrasi tematik pengenalan Pancasila di TK yang terdiri dari 5 macam tema tanah air, dengan sub tema masing-masing sila Pancasila. Setiap tema dan sub tema diberi nama yaitu:

Rancangan permainan/*Outbound*: Mencapai Bintang

Pemain: tiap regu 6 anak, 1 pembimbing.

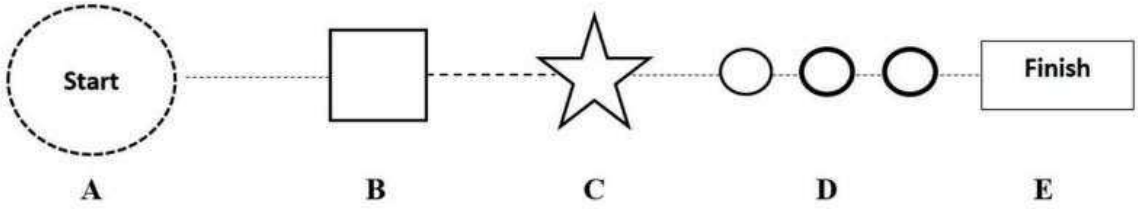

Nilai-nilai Sila I yang terkandung dalam permainan ini adalah:

1. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, meyakini bahwa Tuhan itu ada dan memiliki sifat yang sempurna.
2. Tuhan Yang Maha Esa adalah Pencipta alam semesta
3. Tuhan memiliki sifat Maha Kuasa, Pencipta benda-benda di alam semesta yang tidak dapat dibuat oleh manusia

4. Ciptaan Tuhan Sangat Indah, unik dan berbagai macam wujud
5. Hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama.
6. Bekerjasama diantara sesama Ciptaan Tuhan
7. Menjalankan semua perintahNya dan Menjauhi semua larangan-Nya.
8. Beribadah menurut agama dan keyakinanNya.

Rancangan permainan/Outbound: Rantai Cinta

Pemain: tiap regu 8 anak

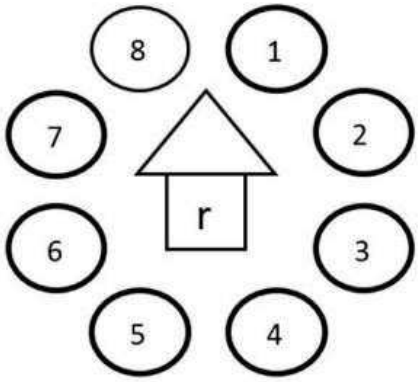

Nilai-nilai Sila II yang terkandung di dalam permainan ini adalah:

1. Manusia memiliki hak dan martabat yang sama dan sejajar.
2. Manusia merupakan makhluk sosial, sudah sepatutnya peduli terhadap orang lain.
3. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berlaku adil terhadap sesama.
4. Memiliki rasa solidaritas dan tenggang rasa yang tinggi terhadap sesama.
5. Bersama sesamanya yang berbeda membangun kemanusiaan

Rancangan permainan/Outbound: Benteng Pertahanan

Pemain: tiap regu 5 anak

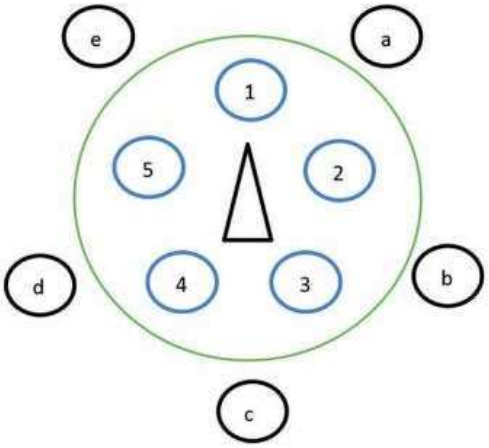

Nilai-nilai Sila III yang terkandung dalam permainan ini adalah:

1. Menempatkan kepentingan, keselamatan, persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan diri sendiri dan golongan.
2. Mempunyai rasa cinta tanah air, bangsa serta negara dengan cara rela berkorban demi kepentingan bangsanya sendiri.
3. Mengakui keanekaragaman budaya suku bangsa dan mendorong bangsa Indonesia menuju persatuan dan kesatuan.
4. Kerjasama untuk mempertahankan negara-bangsa dari serangan pihak luar
5. Mencintai dan membela tanah airnya
6. Membangun secara bersama tanah tumpah darahnya

Rancangan permainan/Outbound: Membangun Mercusuar

Pemain: tiap regu 5 anak.

Aturan Permainan:

1. Permainan diawali dengan membentuk dua regu.
2. Dengan aba-aba "1,2,3...mulai!" kedua regu yang masing-masing beranggotakan 5 orang tersebut langsung berlari mencari benda

yang bisa dimanfaatkan untuk membuat mercusuar. Benda-benda tersebut disusun tinggi dan tak boleh roboh.

3. Merencanakan secara musyawarah strategi mendirikan mercusuar. Baik terkait bahan yang akan digunakan dan cara supaya tujuan pendirian mercusuar yang kokoh bias terwujud.
4. Tugas mereka adalah membangun mercusuar setinggi mungkin dari benda apapun yang ditemui di tepi pantai.
5. Kedua Regu harus menyelesaikannya dalam waktu 15 menit.
6. Regu yang membangun mercusuar lebih tinggi dan tidak roboh akan dinyatakan sebagai pemenang.

Nilai-nilai Sila IV yang terkandung dalam permainan ini adalah:

1. Rakyat Indonesia merupakan warga negara yang memiliki hak, kewajiban dan kedudukan yang sama.
2. Asas kekeluargaan digunakan untuk melakukan musyawarah serta mufakat.
3. Mengutamakan segala kepentingan bersama dan kepentingan bangsa melebihi kepentingan diri sendiri dan golongan.
4. Melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut banyak orang.
5. Gotong royong dalam menyelesaikan semua persoalan bersama
6. Legowo menerima keputusan bersama.

Rancangan permainan/Outbound: Maze Sosial

Pemain: tiap regu 5 anak

Aturan Permainan:

1. Permainan ini tidak ditandingkan antar regu.
2. Pembentukan regu bertujuan untuk membangun kerjasama antar anggota.

3. Permainan diawali dengan membentuk regu beranggotakan 5 anak.
4. Pemain pertama merupakan pemain yang berjalan dari garis *start*. Ia harus menyusuri jalan (maze di atas pasir) untuk mencapai bendera. Ia dibekali dengan sepotong roti. Di tengah perjalanan, ia akan bertemu dengan pemain 2 yang berperan sebagai orang yang sedang mendapatkan musibah gempa dan rumahnya roboh menghalangi jalan. Pemain 1 harus membantu membangun rumah agar bisa melanjutkan perjalanannya.
5. Setelah rumah selesai dibangun, pemain 1 melanjutkan perjalanan, bila bertemu jalan yang terputus, maka ia harus berputar dan mencari jalan lain.
6. Pemain 1 akan bertemu dengan pemain 3 dan 4 yang tergeletak di tengah jalan. Mereka adalah para pengungsi yang kelaparan. Jika pemain 1 memberikan rotinya dan dibagi 2 sama besar, maka pemain 3 dan 4 akan bangun dan jalan bisa dilalui. Jika pemain 1 membagi rotinya tidak sama besar, maka pemain yang mendapatkan potongan roti yang kecil masih kelaparan dan tidak bangun sehingga jalan tidak bisa dilalui.
7. Setelah bisa melalui pemain 3 dan 4, pemain 1 masih harus melanjutkan perjalanan. Selanjutnya ia akan bertemu dengan pemain 5 yakni nelayan yang baru saja memanen kerang, namun kerangnya berhamburan terserak di jalan. Pemain 1 harus membantu memungut kerang-kerang sambil menghitungnya dan dimasukkan ke dalam keranjang.
8. Setelah mampu melewati pemain 5 maka pemain 1 boleh berlari untuk mencapai bendera merah putih, semua anggota regu datang dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Nilai-nilai Sila V yang terkandung dalam permainan ini adalah:

1. Semua manusia memiliki derajat yang sama di mata hukum.
2. Mencintai segala jenis pembangunan demi kemajuan bangsa.
3. Tidak membeda bedakan manusia berdasarkan derajat dan golongan.
4. Adil dan bijaksana dalam segala tindakan.
5. Berbuat baik, saling membantu dan gotong royong.
6. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
7. Menghormati hak-hak orang lain.
8. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.

Langkah berikutnya adalah melakukan uji coba desain model kepada anak TK Janti dan dilakukan di laguna pesisir pantai Glagah Kulon Progo. Revisi desain dilakukan antara peneliti dan kepala sekolah dan guru. Salah satu contoh perbaikan seperti ada di gambar ini:

Outbond dipercaya dapat dijadikan media sosialisasi Pancasila yang pas bagi anak-anak. Permainan dan perlombaan dalam outboud tersebut disisipi nilai-nilai Pancasila. Dengan outbound ini para pelajar yang

sebelumnya tidak kenal saling bisa tumbuh kebersamaan dan persatuan. Metode outbound ini adalah salah satu metode sosialisasi pemahaman Pancasila untuk menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan, kesatuan, gotong royong, di tengah kemajemukan dan perbedaan-perbedaan.

Model evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran outbond berupa observasi atau pengamatan, unjuk kerja dan ada catatan-catatan tersendiri yang dicantumkan di RPS-nya. Di akhir kegiatan, guru mengevaluasi, menanyakan kepada anak, apa yang dipelajari hari ini dari outbond tersebut dan bagaimana kesan anak-anak terhadap outbond tersebut sebagai bentuk klarifikasi nilai sederhana untuk anak TK.

Desain integrasi nilai-nilai Pancasila pada out bond merupakan adaptasi dari outbond yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak usia dini dengan penggunakan area laguna di tepi pantai. Integrasi setiap sila Pancasila didesain dalam permainan Meraih Bintang (sila pertama), Rantai Cinta (sila kedua), Mempertahankan Benteng (sila ketiga), Membuat Mercusuar (sila keempat), Maze Sosial (sila kelima). Melalui outbond diharapkan peserta didik mampu secara mandiri mengenal, meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya dan menginternalisasi Pancasila dalam kehidupan sehari yang kontekstual dengan kehidupan anak.

Saran atau rekomendasi yang diberikan yaitu: 1) Kerjasama dengan institusi atau lembaga pendidikan luar sekolah yang melakukan outbond, sehingga bisa "dijual" untuk umum (TK); 2) Dibuat instrument evaluasi efektivitas pembelajaran ini untuk pengembangan motorik, sosial emosional, nilai moral dan agama; 3) Kerjasama dengan ahli keolahragaan untuk menguji kesesuaikan pembelajaran outbond ini dengan tingkat pengembangan motorik.

Karakter Kebangsaan & Gamelan Bocah: *Learning by Doing* Anak Usia Dini

JOKO PAMUNGKAS;
AMIR SYAMSUDIN

Kekerasan merupakan penyaluran kekuatan untuk merusak terhadap orang, benda, atau bahkan dirinya sendiri, baik perusakan yang menggunakan alat-alat bawaan lahir manusia seperti tangan dan kaki, maupun alat-alat hasil pemikiran manusia seperti senjata manual dan senjata otomatis (Cornelis Lay, 2009: 2). Penyebab kekerasan dapat berasal dari dorongan batin manusia yang sangat dinamis untuk merusak atau merawat kehidupan. Dorongan batin bergolak karena pengaruh interaksi sosial diantara manusia yang tidak adil secara ekonomi maupun politik atau karena terinspirasi oleh cita-cita agama untuk mewujudkan tatanan dunia yang aman, damai, dan tanpa kriminalitas.

Kekerasan atas nama agama merupakan dampak dari perbedaan pandangan tentang nilai dan identitas keagamaan yang diyakini. Ekspresi perbedaan pandangan tersebut diungkapkan dalam tindakan damai atau kekerasan. Contoh tindakan damai adalah protes terhadap wacana

keagamaan, dukungan terhadap wacana keagamaan, atau mencari solusi atas perbedaan wacana keagamaan. Contoh tindakan kekerasan adalah perkelahian, atau perusakan barang yang memiliki dampak psikologis maupun sosial bagi para korbannya (Ihsan Ali Fauzi, dkk., 2009: 8).

Contoh penyebab tindak kekerasan atas nama agama diantaranya adalah ketimpangan penguasaan asset ekonomi yang melimpah oleh minoritas pemeluk agama di tengah-tengah kemiskinan mayoritas pemeluk agama; pengabaian terhadap aturan hukum oleh kelompok agama dan lemahnya penegakan hukum oleh aparatur negara seperti pendirian tempat ibadah tanpa izin pihak terkait; warisan konflik politik sejak zaman penjajahan yang berpihak pada kelompok agama tertentu dan anti pada kelompok agama tertentu lainnya seperti di Poso; perasaan saling curiga diantara para pemeluk atau tokoh agama; pengetahuan agama minimalis tetapi semangat mengamalkan agama maksimalis; dan keterlambatan antisipiasi dari aparatur negara terhadap potensi konflik. Solusi yang dapat ditempuh ialah dialog antar umat beragama atau pemuka agama, cara berdakwah dari masing-masing agama secara santun, dan melalui institusi pendidikan sejak usia dini (Bashori A. Hakim, 2010: 60).

Kekerasan atas nama agama dapat dikelompokkan berdasarkan masalah moral seperti perjudian, pelacuran, minuman keras; perbedaan hasil penafsiran atas sumber ajaran agama dalam satu agama, seperti masalah Ahmadiyah; hubungan tidak harmonis antara komunitas agama mayoritas dan minoritas, terorisme yang dilakukan oleh penganut agama tertentu; politik-keagamaan seperti penerapan Syariah Islam; dan masalah mistis seperti santet, pesugihan, dan jenis sihir lainnya (Ihsan Ali-Fauzi dkk., 2009: 10).

Berdasarkan latar belakang di atas, diidentifikasi masalah sebagai berikut. Pertama, tindak kekerasan atas nama agama masih dipilih

oleh para pelaku sebagai cara menunjukkan ketidaksetujuan atas suatu kebijakan publik, atau perilaku kelompok agama lain. Kedua, konflik horizontal atas nama agama dipicu oleh masalah moral atau hukum yang ditegakkan secara tidak konsisten. Ketiga, akar masalah konflik seperti tata nilai yang berbeda dan cara penyelesaiannya belum optimal dibelajarkan dalam lembaga pendidikan. Batasan masalah penelitian ini *focus* pada proses pembelajaran tata nilai yang berbeda dari setiap kelompok masyarakat yang disatukan dalam kegiatan permainan gamelan bocah sebagai media pembelajaran toleransi kebhinekaan. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan media gamelan bocah dalam meningkatkan capaian perkembangan motorik kasar, motorik halus, kognitif, dan seni anak usia dini, serta menumbuhkan nilai-nilak karakter kebangsaan seperti toleran, tanggung jawab, mandiri, adaptasi, santun, dan disiplin guna mengurangi tindak kekerasan atas perbedaan tata nilai kelompok masyarakat melalui proses pembelajaran anak usia dini.

Nilai-nilai Pancasila dan Pendidikan Anak Usia Dini

Nilai-nilai Pancasila merupakan saripati dari pandangan para pendiri bangsa. Inti pandangan mereka adalah tertuang dalam sila pertama sampai dengan sila kelima. Sila pertama berisi tata nilai percaya kepada Tuhan YME, toleransi agama, dan takwa. Sila kedua berisi tata nilai saling menghargai, adil, dan keteguhan hati. Sila ketiga berisi tata nilai setia janji, setia tanah air, dan setia kawan. Sila keempat berisi tata nilai tanggungjawab, dan cinta damai. Sila kelima berisi tata nilai persahabatan, suka menolong, dan kesantunan (Eko A. Meinarno, & Sri Fatmawati Mashoedi, 2016: 2).

Struktur kurikulum pendidikan anak usia dini terdiri dari enam aspek perkembangan. Aspek perkembangan tersebut secara berurutan adalah nilai-nilai agama dan moral, motoric dan kesehatan, kognitif,

bahasa, sosial-emosional, dan seni (Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 Lampiran 1). Nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan ke dalam kompetensi dasar nilai-nilai agama dan moral yang termuat dalam kompetensi inti pengetahuan dan keterampilan, maupun kompetensi inti sikap social. Oleh karena itu tata nilai seperti percaya kepada Tuhan, berperilaku baik sesuai norma agama dan hukum, toleransi, saling menghargai perbedaan, setia kawan, cinta tanah air, persahabatan, dan kesantunan merupakan substansi yang dapat dibelajarkan kepada anak usia dini. Pembelajaran dapat dilakukan secara tersurat dan direncanakan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harian, maupun tersirat seperti melalui permainan selama proses pembelajaran.

Model Pembelajaran Nilai Moral Anak Usia Dini

Pembelajaran anak usia dini memerlukan *setting* yang sesuai dengan tahapan perkembangan usianya. Ciri-ciri anak usia 4-6 tahun misalnya, mempersyaratkan *setting* kelas yang memiliki keleluasaan pandangan, mudah dijangkau, luwes, dan aman. Persyaratan tersebut untuk melayani tahapan perkembangan anak usia 4-6 tahun yang memiliki ciri rasa ingin tahu tinggi, egois, suka berfantasi, dan suka menjelajah meskipun durasi konsentrasinya pendek (Dwi Prapsiwi, 2012: 13).

Model pembelajaran nilai moral anak usia dini ada dua pendekatan. Pertama, pendekatan anak melakukan langsung seperti kegiatan bermain, dan kedua pendekatan anak tidak melakukan secara langsung seperti mendengarkan kehebatan tokoh cerita pahlawan, tokoh agama, maupun tokoh fiktif. Pendekatan model pembelajaran nilai moral yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan pertama, yaitu anak langsung terlibat dalam memainkan gamelan cilik. Berdasarkan pengalaman langsung tersebut dan dilakukan secara berulang-ulang sampai anak mahir main gamelan cilik, maka selama proses belajar melakukan langsung tersebut

pula diobservasi perilaku karakter kebangsaan yang ditunjukkan oleh anak-anak.

Gambar 1. Seperangkat gamelan anak (dok j.pam 2018)

Gamelan Bocah sebagai *Learning by Doing* Penumbuhan Nilai Moral Anak Usia Dini

Gamelan adalah sebuah kumpulan alat musik tradisional yang terdiri dari colotomik, balungan, penerusan, instrumen tak memiliki nada Gamelan adalah ensembel musik yang biasanya menonjolkan metalofon, gambang, gendang, dan gong. Istilah gamelan merujuk pada instrumennya atau alatnya, yang mana merupakan satu kesatuan utuh yang diwujudkan dan dibunyikan bersama. Kata Gamelan sendiri berasal dari bahasa Jawa *gamel* yang berarti memukul atau menabuh, diikuti akhiran *an* yang menjadikannya kata benda. Orkes gamelan kebanyakan terdapat di pulau Jawa, Madura, Bali, dan Lombok di Indonesia dalam berbagai jenis ukuran dan bentuk ensembel. (wikipedia.org) Untuk nada gamelan yang digunakan adalah Tangga Nada Pentatonis Pelog dan

Slendro. Pelog dengan susunan nada 1,2,3,4,5,6,7 sedangkan slendro dengan susunan nada 1, 2, 3, 5, 6. Tangga nada seperti itulah yang digunakan dalam musik tradisional gamelan.

Ada kelompok instrumen yang digolongkan ke dalam instrumen ***balungan***, ada kelompok instrumen *garap*, Instrumen ***balungan*** adalah instrumen-instrumen yang permainannya sangat dekat dengan lagu *balungan gêndhing*, seperti instrumen *sarong barung, dêmung, saron pênêrus, slênthêm, dan bonang pênêmbung*. Sedangkan instrumen struktural adalah instrumen yang fungsinya membangun jalinan permainan dengan membentuk struktur berdasarkan dan menentukan bentuk *gêndhing*. Yang termasuk kategori instrumen ini adalah *kêthuk, kêmpyang, êngkuk, kêmong, kênong, kêmpul, gong, kêcèr, kêmanak, dan kêndhang. (http://bsunarto.blogspot.co.id/)*

Karawitan merupakan seni musik yang adi luhung. Dapat disajikan dalam nuansa gembira, sedih, jenaka, marah, bahkan dapat disajikan secara khusus pada acara sakral dalam kegiatan ritual. Oleh karena itu penampilan dalam penyajian Karawitan perlu diperhatikan pula etika dan tata krama yang berlaku. Pada penyajian karawitan, para penabuh tidak dibenarkan menabuh sesuka hati, tanpa metoda maupun posisi menabuh yang tidak semestnya.

Pada penyajian Karawitan, para penabuh harus berpedoman pada metode Karawitan dan cara menabuh Gamelan yang berlaku secara umum. Etika Penyajian Karawitan dan cara menabuh gamelan yang baik adalah sebagai berikut. Pertama, waktu akan masuk dan keluar tempat gamelan, tidak diperkenankan melangkahi ricikan. Kedua, menabuh ricikan dengan cara/teori yang benar. Ketiga, menabuh dengan bersikap tenang, posisi duduk bersila, menghadap ke ricikan yang sedang ditabuh. Keempat, pada saat menabuh tidak boleh sambil merokok atau makan. Kelima, tidak berpindah tempat pada waktu menabuh gemelan. Keenam,

pada saat menabuh tidak diperkenankan sambil bercakap-cakap dengan orang diluar tempat Karawitan.

Lagu yang biasa disajikan dalam Karawitan terbagi menjadi beberapa bentuk lagu yaitu: Lancaran, baik lancaran mlampah, maupun lancaran tiban; Ketawang; Ladrang; Gending, baik ketawang gending maupun gending ageng; Jineman (tenang); dan Srepegan (marah).

Laras merupakan satu satuan jenis nada dalam Gamelan pada Gamelan Jawa ini mempunyai 2 (dua) macam laras yang berlainan, yaitu laras Slendro dan laras Pelog. Laras Slendro setiap oktaf dibagi menjadi 5 nada, yaitu 1, 2, 3, 5, 6, sedangkan laras Pelog dibagi menjadi 7 nada, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pada satu unit Gamelan bisa hanya berlaras Slendro atau berlaras Pelog saja. Tetapi pada Gamelan yang lengkap tersedia Gamelan berlaras Slendro dan Pelog. Karena Gamelan laras Slendro tidak sama dengan yang berlaras Pelog, maka agar kedua laras tersebut dapat digunakan sebagai satu satuan musik yang saling melengkapi, maka salah satu nadanya dibuat sama. Misalnya 6 slendro dibuat sama dengan 6 pelog. Pada perangkat, Gamelan seperti ini disebut Gamelan tumbuk 6. Ada pula Gamelan yang dibuat dengan tumbuk 5, tetapi yang umum dipakai sekarang adalah tumbuk 6.

Stimulasi Perkembangan Moral Anak dengan Media Gamelan Bocah

Stimulasi pada uji coba pertama adalah untuk mengetahui reaksi anak terhadap alat-alat Gamelan. Gamelan sudah ditata rapi, kemudian anak-anak di persilahkan untuk masuk ke dalam ruangan dan melihat gamelan. Terdapat satu anak yang langsung menuju ke gong, bernama Rio yang merupakan anak hiperaktif. Anak laki-laki jauh lebih aktif langsung memukul gamelan. Anak laki-laki menyimpan banyak rasa penasarannya sehingga di coba satu-satu. Anak perempuan sedikit malu-

malu untuk memukul gamelan. Untuk memukul kempul dan gong, anak harus berdiri. Terdapat anak yang selalu tutup telinga. Pemukul saron untuk memukul kempul, pemukul saron untuk memukul gendang. Setelah bermain-main dengan gamelan anak-anak mulai bosan.

Gambar 2. Anak binggung dalam memeukul gong (dok j.pam 2018)

Stimulasi pada uji coba kedua anak sudah mulai dapat dikondiskan untuk mncoba not gamelan secara langsung, pada saat awal pengondisian mereka tertarik dan mulai menyesuaikan diri untuk mengikuti arahan memainkan gamelan, pengenalan not dimulai dari not dibunyikan satu persatu, lalu dua, 4, 6 dan 8, rata-rata kendala yang dimiliki oleh anak-anak adalah koordinasi mata dan tangan dan belum bisa memperhatikan tulisan not di depan dan berusaha menabuh gamelan, dan angka yang tertera pada gamelan juga terletak diatas, jadi anak nampak kesulitan saat pikirannya terbagi menjadi 3, yaitu melihat kearah depan di gamelan, lalu melihat kearah tengah saron dan melihat kearah angka, jika gamelan dibunyikan satu atau dua not anak bisa mengikuti, anak akan mulai tidak stabil pada saat not dibunyikan 4 atau 8 sehngga anak nampak bingung.

Umpan balik dari anak memainkan gamelan adalah tulisan di papan tulis kurang jelas terlihat oleh anak sehingga diperlukan papan tulis biasa dengan alat tulis kapur putih. Anak hanya memukul berulang kali pada bagian angka yang sudah diketahui. Anak juga kurang memahami makna ketukan. Alat pemukul gamelan kebesaran untuk ukuran anak usia dini sehingga perlu diperkecil. Bentuk alat pemukul sebaiknya sama untuk kedua ujungnya sehingga ketika anak memegang alat pukul terbalikpun nada yang dihasilkan sama. Ukuran bonang kepanjangan. Ukuran kendang juga kepanjangan. Tali kempul kurang Panjang.

Pada uji coba ketiga, anak-anak memainkan gamelan per baris notasi lagu "Suwe ora jamu". Anak sudah mulai mengerti cara memainkannya namun notasinya lupa lagi. Pada awal bermain gamelan, anak belum dapat menyamakan tempo. Namun karena sering diulang-ulang, anak-anak akhirnya dapat menyamakan tempo, meskipun angka yang dipukul tidak sesuai notasi. Pada proses pembelajaran bermain gamelan, sebaiknya setiap jenis gamelan harus ada satu pendamping orang dewasa supaya tidak bingung karena ada beberapa gamelan yang cara memukulnya berbeda.

Gambar 3. Bermain gamelan perbaris notasi (dok j.pam 2018)

Nilai-nilai karakter yang distimulasi "GACAH" meliputi kemandirian anak, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, berdisiplin dalam latihan, bertanggungjawab atas alat-alat "GACAH", santun dalam bermain, dan toleran terhadap keterbatasan anak lain dalam bermain "GACAH". Indikator kemandirian terdiri dari mengerjakan tugas tanpa bantuan siapa pun, tugas dikerjakan sampai tuntas, fokus mengerjakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya, makan, minum, cuci tangan, dan buang air kecil dilakukan secara mandiri, merapikan mainan, bermain tanpa ditunggu orang tua dan atau pengasuhnya, mengambil dan mengembalikan pemukul gamelan sendiri, dan merapikan alat-alat gamelan setelah permainan usai dilakukan. Berdasarkan hasil perlakuan GACAH sebanyak tiga kali diperoleh data bahwa mayoritas kemandirian anak masuk dalam kategori baik.

Kemampuan anak beradaptasi dengan lingkungan ditandai dengan anak bertegur sapa dengan teman, guru, mau berteman tanpa pilih-pilih, menghargai pendapat orang lain, mau meminta maaf ketika melakukan kesalahan, membuat kesepakatan bermain dengan anak lain, dan mau memaafkan kesalahan teman. Berdasarkan hasil perlakuan GACAH sebanyak tiga kali diperoleh data bahwa mayoritas kemampuan adaptasi anak dengan lingkungan masuk dalam kategori cukup.

Disiplin ditandai dengan perilaku anak dapat menyelesaikan tugas dengan tuntas, menyelesaikan masalah dalam permainan, menunjukkan hasil karyanya didepan kelas, mau mengambil peran sebagai pemimpin kegiatan, mengungkapkan pendapat, menyatakan ketidaksetujuan, berani bercerita didepan kelas, berani bertanya, dan berani menjawab pertanyaan. Berdasarkan hasil perlakuan GACAH sebanyak tiga kali diperoleh data bahwa mayoritas anak berdisiplin dengan kategori cukup.

Tanggungjawab anak ditandai dengan kesediaan anak mengembalikan mainan (gamelan) yang telah digunakan, menyelesaikan tugas dari guru (memainkan gamelan hingga selesai 1 *ulian*), menempatkan diri

di gamelannya masing-masing, menaruh/mengembalikan pemukul di tempatnya (tempat yang disediakan), dan menggunakan seragam sekolah. Berdasarkan hasil perlakuan GACAH sebanyak tiga kali diperoleh data bahwa semua anak bertanggungjawab dengan kategori baik.

Santun ditandai dengan ucapan dan atau perbuatan seperti berkata 'terimakasih' ketika diberi sesuatu, berkata 'bolehkah saya bermain gamelan ini?' ketika ingin memainkan gamelan, berkata 'selamat siang' ketika mau pulang, berkata 'assalamualaikum' pada saat masuk ruangan karawitan, memanggil nama teman dengan nama sebenarnya, berbaris rapi ketika mau masuk ruangan karawitan, berbagi alat pemukul gamelan, mendengarkan ketika orang lain berbicara, mengetuk pintu ketika masuk ruang karawitan, dan ringan tangan untuk membantu ketika dimintai tolong menyimpan gamelan. Berdasarkan hasil perlakuan GACAH sebanyak tiga kali diperoleh data bahwa semua anak berperilaku santun dengan kategori cukup.

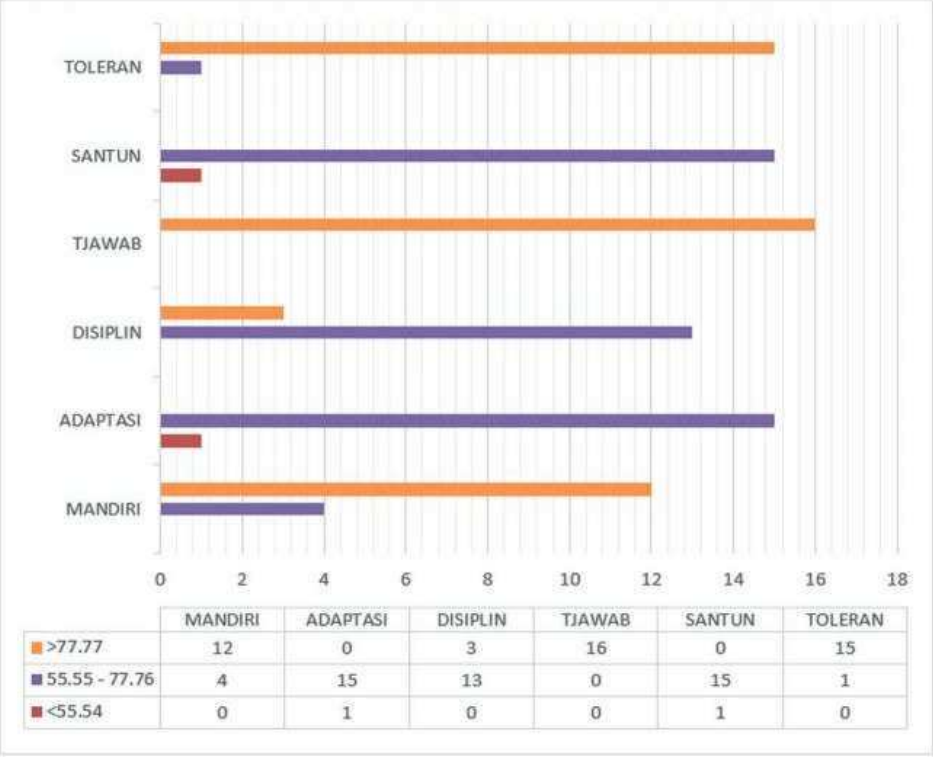

	MANDIRI	ADAPTASI	DISIPLIN	TJAWAB	SANTUN	TOLERAN
>77.77	12	0	3	16	0	15
55.55 - 77.76	4	15	13	0	15	1
<55.54	0	1	0	0	1	0

Diagram 1. Hasil Stimulasi GACAH terhadap Nilai Karakter Anak Usia Dini

Toleransi ditandai dengan perilaku menghargai perbedaan jenis kelamin, menghargai bentuk keadaan fisik yang berbeda, menghargai tim pengrawit, menjawab salam kepada tim pengrawit dan mau mengikuti aturan kegiatan karawitan. Berdasarkan hasil perlakuan GACAH sebanyak tiga kali diperoleh data bahwa semua anak berperilaku toleran dengan kategori baik.

Hasil tiga kali perlakuan permainan "GACAH" dapat disimpulkan bahwa mayoritas anak mencapai kemandirian, tanggung jawab, dan toleransi masuk dalam kategori baik, sedangkan capaian santun, disiplin, dan adaptasi masuk dalam kategori cukup seperti pada Diagram 1.

Perkembangan yang distimulasi "GACAH" adalah motorik kasar, motorik halus, kognitif, dan seni. Motorik kasar ditandai dengan indikator anak melakukan gerakan senam fantasi bentuk meniru (ice breaking), berjalan ke berbagai arah dengan berbagai cara, memegang alat pemukul gamelan dengan satu tangan ataupun dengan dua tangan, mengayunkan tangan sambil memegang alat pemukul gamelan, berjalan dengan membawa beban, mengangkat alat gamelan, meletakan alat gamelan, dan meletakan alat pemukul gamelan. Motorik halus ditandai dengan indikator keluwesan jari jemari anak dalam memainkan gamelan, serta akurasi memegang tutuk gamelan. Berdasarkan hasil perlakuan GACAH sebanyak tiga kali diperoleh data bahwa mayoritas anak memperoleh capaian perkembangan motorik kasar dan motorik halus dengan kategori baik.

Perkembangan kognitif anak ditandai dengan indikator mampu mengklasifikasikan gamelan dengan alat pemukulnya, mengenal nama-nama gamelan, menunjukkan rasa ingin tahu terhadap gamelan, kemampuan menghafal notasi, ketepatan memukul not gamelan dengan notasi, dan menunjukkan inisiatif dalam memilih alat gamelan. Berdasarkan hasil perlakuan GACAH sebanyak tiga kali diperoleh data

bahwa mayoritas anak memperoleh capaian perkembangan kognitif dengan kategori baik.

Gambar 1. stimulasi melalui bermain gamelan (dok j.pam 2018)

Perkembangan seni anak ditandai dengan indikator anak senang mendengarkan berbagai macam jenis musik kesukaannya, memainkan alat musik dengan irama yang beraturan, bersenandung sambal mengerjakan sesuatu, memainkan alat musik bersama teman, memilih jenis lagu yang disukai, bernyanyi sendiri, menggunakan imajinasi untuk mencerminkan perasaan dalam sebuah peran, membedakan peran pantasi dan kenyataan, menggunakan dialog dan berbagai materi dalam menceritakan berbagai cerita, mengekspresikan gerakan dengan irama yang bervariasi, menggambar objek disekitarnya, membentuk berdasarkan objek yang dilihat, mendeskripsikan sesuatu dengan ekspresif yang berirama, mengombinasikan berbagai warna ketika menggambar dan mewarnai, menyanyikan lagu dengan sikap yang benar, menggunakan berbagai alat music untuk menirukan suatu irama,

bermain drama sederhana, menggambar berbagai macam bentuk yang beragam, melukis dengan berbagai cara dan objek, dan membuat karya seperti bentuk sesungguhnya dengan berbagai bahan. Berdasarkan hasil perlakuan GACAH sebanyak tiga kali diperoleh data bahwa sebagian anak memperoleh capaian perkembangan seni dengan kategori cukup, dan sebagian lainnya dengan kategori baik seperti pada Diagram 2.

	SENI	KOGNITIF	MOTLUS	MOTSAR
>77.77	8	15	10	15
55.55 - 77.76	8	1	6	1
<55.54	0	0	0	0

Diagram 2. Hasil Stimulasi GACAH terhadap Perkembangan Anak Usia Dini

Simpulan

Anak antusias memainkan gamelan bocah dengan cara mereka sendiri. Stimulasi perkembangan nilai-nilai agama dan moral, motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni melalui tindakan langsung

anak memainkan alat-alat gamelan bocah sangat bermakna dalam proses internalisasi nilai-nilai karakter kebangsaan. Nilai karakter kebangsaan yang terstimulasi optimal oleh kegiatan memainkan gamelan bocah diantaranya toleransi, tanggungjawab, dan kemandirian. Nilai karakter kebangsaan yang terstimulasi belum optimal oleh kegiatan memainkan gamelan bocah diantaranya santun, adaptasi, dan disiplin.

Capaian perkembangan yang terstimulasi optimal oleh kegiatan permainan gamelan bocah ialah kognitif dan motorik kasar. Capaian perkembangan yang terstimulasi belum optimal oleh kegiatan permainan gamelan bocah ialah motorik halus dan seni. Umpan balik dari anak untuk perbaikan alat-alat gamelan bocah diantaranya ukuran gamelan, bentuk alat pemukul, dan daya jangkau tangan anak terhadap gamelan.

Membelajarkan Nilai-nilai Pancasila Melalui Media *Big Book* Kepada Siswa Sekolah Dasar

WURI WURYANDANI;
E. KUS EDI SARTONO;
FATHURROHMAN

Pancasila sebagai pedoman hidup bagi bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai yang harus dibelajarkan kepada siswa agar mampu terinternalisasi secara optimal dalam diri masing-masing individu. Proses internalisasi nilai Pancasila dilakukan sejak usia dini, pun termasuk di sekolah dasar. Memiliki nilai-nilai Pancasila dalam dirinya tentunya akan membedakan siswa dengan warga Negara lain di muka bumi ini.

Menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila untuk dapat menjadi penuntun siswa dalam berperilaku tentunya harus sampai pada tahap *action*. Tokoh pendidikan karakter, Lickona (1994) menjelaskan bahwa untuk dapat membentuk manusia yang berkarakter baik ada tiga komponen yang harus dikembangkan yaitu *moral knowing, moral feeling,* dan *moral action*. Pengetahuan terhadap nilai-nilai Pancasila akan mendasari tumbuhnya perasaan dan perilaku siswa yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai aksi atas hal ini di sekolah dasar kelas rendah khususnya sudah ada muatan pembelajaran PPKn yang sebagian

kompetensi dasarnya berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Harapannya kompetensi ini diajarkan secara baik oleh guru agar pemahaman nilai-nilai Pancasila benar-benar dimiliki oleh siswa.

Masalah yang kemudian muncul adalah manakala dibenturkan dengan tingkat perkembangan siswa SD yang berada pada tahap operasional kongkrit, sementara nilai-nilai Pancasila bersifat abstrak. Oleh karena itu perlu dihadirkan media pembelajaran untuk mengkongkritkan nilai-nilai Pancasila yang bersifat abstrak tersebut. Salah satu media yang digunakan adalah *big book*. Media ini merupakan media yang cocok digunakan untuk siswa kelas awal sekolah dasar karena ukurannya yang tidak terlalu kecil, disertai gambar dan tulisan yang menarik. Melalui penggunaan media *big book* harapannya siswa termotivasi untuk belajar, sehingga informasi yang disampaikan guru dalam proses pembelajaran dapat diterimanya secara optimal. Artikel yang pernah ditulis oleh Rahim dan Harun (2010: 47) menjelaskan bahwa penggunaan *big book* menimbulkan perasaan senang dan pembelajaran bermakna bagi siswa dalam pembelajaran di kelas. Hal ini ditunjukkan dengan siswa termotivasi untuk membaca dan menikmati pembelajaran. Peneliti berasumsi bahwa dengan pembelajaran yang menyenangkan akan menjadi perantara bagi siswa untuk dapat memahami pesan pembelajaran secara baik.

Big Book untuk Mengajarkan Nilai-nilai Pancasila Siswa Sekolah Dasar

Big book meupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila. Zein (2002: 136) mendefiniskan media dari kata *medium* yang didefinisikan sebagai perantara. Dalam konteks pembelajaran tentunya media pembelajaran akan menjadi sebuah perantara sampainya pesan pembelajaran dari guru kepada siswa. Peran media di sini akan meminimalkan kesalahan siswa dalam menerima

pesan pebelajaran. *Big book* merupakan salah satu media yang dapat digunakan guru untuk menyampaikan pesan pembelajaran kepada sekelompok siswa menjadi lebih mudah (Jackman, 2009: 122).

Penggunaan *big book* sebagai media pembelajaran cocok untuk siswa sekolah dasar karena disenangi anak-anak dan dapat dikembangkan oleh guru (Suyanto, 2007:104). *Big book* adalah buku berukuran besar yang biasanya digunakan untuk anak kelas rendah. Di dalam *big book* akan disajikan bacaan dan ilustrasi sederhana yang sesui dengan tingkat perkembangan bahasa dan kognitif anak. Dalam penggunaannya anak-anak dapat membaca dengan sendirinya atau mendengarkan guru membacakan isi buku tersebut dengan sesekali menunjukkan gambar ilustrasinya kepada siswa. Tujuan penggunaan *big book* adalah agar siswa mampu memaknai cerita atau ilustrasi dalam buku itu secara baik sehingga pesan yang ada di dalamnya bisa sampai kepada siswa secara maksimal.

Penggunaan buku dalam proses pembelajaran, terutama bagi anak-anak sangat baik. Buku yang relevan dengan topik pembelajaran akan mampu mendukung siswa dalam belajar di kelas. Ilustrasi yang ada di dalam buku dengan berbagai variasi latar belakang budaya akan mampu menciptakan masyarakat kelas yang beragam (Essa, 2014: 318). Selanjutnya Essa (2014: 319) menjelaskan bahwa kriteria buku yang baik adalah dari sisi teks, tampilan secara umum, dan ilustrasi.

Keuntungan penggunaan *big book* untuk anak-anak adalah sebagai berikut.

a. Anak-anak mudah mengingat deskripsi yang ada di dalamnya.
b. Siswa tertarik terhadap model buku tersebut.
c. Terbentuknya interaksi aktif antara guru dengan siswa.
d. Siswa meniru gaya guru dalam membaca buku.
e. Meningkat frekuensi siswa untuk bertanya tentang isi buku (Loughrey, 2001: 85)

Nilai-nilai Pancasila yang diajarkan guru melalui *big mook* untuk siswa sekolah dasar meliputi nilai sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk perilaku nyata yang kehadirannya diwujudkan dalam bentuk cerita di dalam media *big book* yang dikembangkan.

Model Pengembangan Media *Big Book* untuk Membelajarkan Nilai-nilai Pancasila di Sekolah Dasar

Pengembangan *big book* untuk membelajarkan nilai Pancasila ini menggunakan model penelitian *Research and Development* (R & D) dengan mengadopsi model R & D yang dikembangkan oleh Borg & Gall (1983). Alasan penggunaan model penelitian R & D karena penelitian ini bermaksud mengembangkan media *big book* untuk meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai pancasila untuk siswa kelas awal sekolah dasar. Secara lebih rinci langkah-langkah penelitian & pengembangan ini yaitu: a) melakukan penelitian pendahuluan yang mencakup kegiatan studi pustaka dan observasi lapangan sebagai dasar dalam mengembangkan produk media *big book* untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang nilai-nilai Pancasila untuk kelas awal sekolah dasar, b) mengadakan perencanaan, mencakup kegiatan analisis nilai-nilai Pancasila yang akan diinternalisasikan, membuat teks atau gambar yang sesuai dengan nilai yang akan dikembangkan, c) mengembangkan prototipe model media *big book* untuk meningkatkan pemahan siswa tentang nilai-nilai Pancasila di kelas awal sekolah dasar, d) uji ahli yaitu 1 orang ahli materi, dan 1 orang ahli media, e) uji coba lapangan skala kecil dan revisi (f) uji coba lapangan utama dan revisi, g) Uji coba lapangan operasional dan revisi produk akhir

(50 siswa), dan h) desiminasi produk. Dalam penelitian ini dibatasi pada uji validasi ahli terhadap media yang dikembangkan.

Hasil Pengembangan Produk Awal

Pengembangan produk awal didahului dengan studi pendahulan mellaui wawancara, dan observasi. Kegiatan studi pendahuluan menunjukkan data bahwa guru mengajarkan nilai-nilai Pancasila sebatas menggunakan gambar-gambar yang ada dalam buku siswa. Media yang digunakan terbatas pada gambar, atau miniatur lambing Negara unuk mengajarkan simbol-simbol sila Pancasila. Demikian pula ketia dilakukan observasi tentang buku-buku yang digunakan untuk pembelajaran nilai-nilai Pancasila belum banyak yang muatannya khusus nilai-nilai Pancasila. Banyak tersedia buku cerita tentang karakter, akan tetapi isinya karakter secara umum. Muatan buku yang di dalamnya terkait dengan pengamalan sila-sila Pancasila masih minim sekali.

Penggunaan media yang terbatas ternyata menyulitkan siswa untuk memahami tentang nilai-nilai Pancasila. Sebagian siswa paham ketika diajar, namun kesulitan ketika harus menjawab pertanyaan soal ulangan. Hal ini berarti pesan pembelajaran yang tersimpan di memori otak siswa sangat terbatas. Penyebabnya didiagnosa karena siswa merasa tidak tertarik menggunakan sumber belajar yang terbatas.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, siswa lebih menyukai pembelajaran dengan menggunakan media yang di dalamnya memuat cerita. Hal ini ditandai pada kegiatan membaca, siswa sangat antusias. Hanya tidak jarang siswa merasa cepat bosan jika dukungan bahan bacaan kurang menarik baik dari sisi tampilan gambar maupun tulisan. Oleh karena itu dibuat media pembelajaran yang di dalamnya memuat cerita, tetapi juga didukung dengan gambar, dan dilengkapi dengan warna-warna yang menarik. Guru juga menyampaikan bahwa ukura media

yang dibuat tidak terlalu kecil agar bisa diamati siswa dengan seksama Media pembelajaran diharapkan dapat menggambarkan berbagai contoh kongkrit tentang nilai-nilai sila Pancasila.

Atas dasar temuan pada studi pendahuluan tersebut, memperkuat alasan untuk dikembangkannya *big book* tentang nilai-nilai Pancasila. Hadirnya *big book* tentang nilai-nilai Pancasila akan mempermudah siswa belajar tentang materi tersebut. *Big book* yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa buku besar yang di dalamnya memuat cerita, dan gambar. Cerita yang disusun tidak terlalu panjang, dan didukung dengan gambar-gambar ilustrasi dengan berbagai warna yang menarik bagi siswa. *Big book* yang dikembangkan berjumlah 5 buah, yaitu untuk masing-masing sila Pancasila.

Perencanaan dan Pengembangan Produk

Tahapperencanaanprodukdilakukandengan*pertama,*mengidentifikasi muatan nilai-nilai Pancasila dalam produk *big book* yang akan disusun. Muatan nilai-nilai sila Pancasila yang dikembangkan menjadi *big book* dalam penelitian ini meliputi lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pada sila pertama didapat nilai tentang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa yang dicerminkan dengan perilaku berdoa sebelum melakukan aktivitas, menjalankan kewajiban beribadah, tidak boleh memaksakan kehendak antar pemeluk agama yang berbeda, dan harus menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadah. Pada sila kedua diidentifikasi nilai tentang suka menolong lain yang diwujudkan dengan menolong teman yang terjatuh, peduli kepada orang lain yang diimplementasikan dalam bentuk menengok teman yang sakit. Pada sila ketiga diidentifikasi

nilai cinta tanah air yang diwujudkan dalam kegiatan upacara bendera, serta perasaan senasib sepenanggungan yang diwujudkan dengan bersatu membersihkan kelas bersama. Hasil identifikasi nilai sila keempat adalah musyawarah, yang diwujudkan dengan kegiatan musyawarah mufakat menyusun jadwal piket. Adapun untuk sila kelima adalah pelaksanaan hak bermain bersama, diwujudkan dengan perilaku berbagi mainan bersama antara kakak dan adik.

*Kedua, m*enentukan isi cerita dalam *big book* yang sesuai dengan nilai sila Pancasila. Setelah diidentifikasi nilai sila pertama hingga ke lima, selanjutnya disusun naskah *big book* untuk pengamalan sila pertama hingga kelima, masing-masing satu buku. Pada *big book* yang pertama diangkat judul cerita "Andi dan Rafa". Cerita ini mengangkat tema tentang sekolah Andi dan Rafa. Setiap harinya saat akan memulai dan mengakhiri belajar di sekolah Andi dan Rafa memulainya dengan berdoa bersama teman-teman. Meskipun mereka berdua berbeda agama, namun saling berteman dengan baik. Bahkan ketika ada kegiatan les di sekolah, Rafa mengingatkan Andi untuk melaksanakan sholat dhuhur terlebih dahulu saat suara adzan terdengar. Pelaksanaan Ibadan, dan berdoa merupakan perwujudan pengakuan terhadap adanya Tuhan. Adapun Rafa mengingatkan Andi untuk melaksanakan ibadah sholat serta tidak mengganggu adalah wujud perilaku toleransi.

Buku kedua diberi judul "Menjenguk Ani". Dalam cerita ini diangkat cerita tentang Ani yang sedang sakit. Saat ibu guru menyampaikan kepada teman-teman ani, selanjutnya mereka bersepakat untuk menengok Ani sepulang sekolah. Akan tetapi saat hendak menengok Ani, Ema salah seorang teman Ani terjatuh di perjalanan. Bu Guru dan teman yang lain bergegas menolong Ema. Perilaku menengok teman yang sakit dan menolong teman yang jatuh adalah perwujudan pengamalan sila kedua.

Buku ketiga berjudul "Bersih Kelasku". Cerita ini dimulai dari kegiatan

siswa di hari pertama sekolah, yaitu mengikuti upacara bendera. Dalam kegiatan upacara bendera disampaikan oleh kepala sekolah untuk menjaga kebersihan kelas. Agar kelas bersih diharapkan siswa bersatu untuk membersihkannya bersama-sama, karena mereka memiliki perasaan senasib dan sepenanggungan terhadap kebersihan kelas mereka.

Buku keempat berjudul "Mari Bermusyawarah". Cerita dalam buku keempat ini tentang kegiatan musyawarah untuk menyusun jadwal piket kelas. Dalam cerita ini digambarkan tentang Ito dengan Toni yang saling berebut hari piket. Keadaan ini ditenangkan oleh Gea. Pada akhirnya keduanya damai dan menerima hasil keputusan musyawrah untuk dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Buku kelima berjudul "Rajin Menabung". Cerita ini berisi tentang Beri yang berebut mainan dengan adiknya. Selanjutnya Beri dinasehati kedua orang tuanya untuk berbagi mainan baru dengan adiknya, dan bermain bersama, karena adik juga punya hak bermain. Berbagi mainan dan gemar menabung adalah perwujudan sila kelima Pancasila.

Produk *big book* yang berhasil disusun dan dikembangkan selanjutnya diuji kelayakannya sebelum digunakan pada uji coba lapangan. Kelayakan produk *big book* dalam penelitian ini ditinjau dari dua hal yaitu layak menurut ahli materi, dan ahli media. Uji kelayakan oleh ahli materi dilakukan dengan cara menilai produk dari sisi kelayakan isi dan kelayakan bahasa. Uji validasi dilakukan sebanyak dua kali dengan mempertimbangkan hasil penilaian dari validator. Hasil uji validasi ahli materi dalam penelitian ini menghasilkan data bahwa *big book* tentang nilai-nilai Pancasila secara keseluruhan dinyatakan sangat layak. Tingkat kelayakannya untuk *big book* pertama adalah 98, 1% (Sangat Layak), kedua 98, 1% (Sangat Layak), ketiga 98, 1% (Sangat Layak), , keempat 96,4% (Sangat Layak), dan kelima 98, 1% (Sangat Layak).

Beberapa revisi dari ahli materi meliputi: 1) Kesesuaian isi cerita

tentang pesan nilai-nilai Pancasila, 2) Konsistensi penggunaan istilah tentang nilai-nilai Pancasila, 3) Kemudahan penyebutan tokoh cerita, dan 4) Kesesuaian pemilihan kata atau istilah.

Validasi kelayakan produk dari ahli media dilakukan terhadap tampilan fisik, desain grafis, dan bahasa. Hasil validasi ahli media menunjukkan data bahwa *big book* pertama mendapat hasil 83,75% (Sangat Layak), kedua 85% (sangat layak), ketiga 83,75% (sangat layak), ketiga 82,5% (sangat layak), dan kelima 88,75% (sangat layak). Secara umum saran dari ahli media terhadap produk *big book* yang dikembangkan meliputi: 1) tampilan cover (logo, bentuk tulisan), 2) peletakan kata pengantar, 3) kesesuaian ilustrasi dengan *setting* cerita, 4) pemilihan warna, 5) *layout* dan pemilihan jenis *font*, dan 6) teknik pembuatan gambar ilustrasi agar tidak pecah.

Kajian Produk

Tahap pengembangan produk media *big book* tentang nilai-nilai Pancasila ini didasrkan pada hasil studi pendahuluan tentang ketersediaan media pembelajaran tersebut di sekolah. Data hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa belum adanya media pembelajaran yang berupa *big book* terkait dengan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Media pembelajaran materi tersebut juga masih jarang diemukan di sekolah. Guru sebatas menggunakan gambar-gambar yang ada di dalam buku siswa. Hal ini menjadi salah satu penyebab siswa ketika mengerjakan soal ulangan banyak yang salah.

Tidak tersedianya media pembelajaran yang materinya terkait dengan materi yang akan diajarkan memang menjadi salah satu kendala sampainya pesan pembelajaran kepada siswa secara optimal. Hal ini sesuai dengan pendapat Zein (2002: 136) bahwa media yang didefinisikan sebagai perantara. Dalam hal ini adalah perantara antara guru dengan siswa dalam proses belajar mengajar memiliki peran untuk

meminimalkan kesalahan siswa dalam menerima pesan pembelajaran.

Media pembelajaran yang dimaksudkan guru di sini adalah berupa *big book* yang mengandung materi tentang nilai-nilai sila Pancasila. Keberadaan media *big book* menjadi alat bantu mengajar guru. Dengan demikian materi pembelajaran akan menjadi lebih kongkrit dan dapat dipahami siswa secara lebih mudah. Hadirnya media pembelajaran sebagai alat bantu, sehingga masih diperlukan hadirnya guru. Keberadaan media pembelajaran sebagai alat bantu mengajar ini sesuai dengan pendapat Sudjana dan Rifai (2005: 1) yang menjelaskan bahwa media pengajaran merupakan alat bantu mengajar.

Big book yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan jenis media visual yang akan dipakai guru untuk mengajarkan materi tentang nilai-nilai sila Pancasila. Penggunaan media ini nantinya secara berkelompok. Hal ini sesuai dengan pendapat Jackman (2009: 122), bahwa *big book* merupakan media digunakan guru untuk menyampaikan pesan pembelajaran kepada sekelompok siswa. Melalui penggunaan media *big book* ini diharapkan pemahaman siswa tentang nilai-nilai Pancasila menjadi lebih mudah.

Pengembangan media *big book* untuk siswa kelas rendah di sekolah dasar didasarkan pada pertimbangan bahwa anak-abak sekolah dasar menyukai bahan bacaan yang disertai dengan ilustrasi sederhana sesuai dengan tingkat perkembangan kognitifnya. Dasar pengembangan media *big book* dalam penelitian ini didukung dengan pendapat Suyanto (2007:104) bahwa *big book* merupakan salah satu media pembelajaran yang disenangi anak-anak terutama anak kelas rendah.

Dalam proses pengembangannya media *big book* dalam penelitian ini telah diuji kelayakannya melalui validasi ahli media dan materi. Hasil validasi ahli media menunjukkan data bahwa *big book* pertama mendapat

hasil 83,75% (Sangat Layak), kedua 85% (sangat layak), ketiga 83,75% (sangat layak), ketiga 82,5% (sangat layak), dan kelima 88,75% (sangat layak). Kelayakan ini tentunya diperoleh kaena dalam pengembangan *big book* sudah memperhatikan aspek-aspek media yang baik. Essa (2014: 319) menjelaskan bahwa kriteria buku yang baik adalah dari sisi teks, tampilan secara umum, dan ilustrasi. Kesemuanya telah dipenuhi dalam pengembangan media *big book* yang memuat materi tentang nilai-nilai Pancasila.

Selanjutnya kriteria kelayakan dari ahli materi diperoleh data bahwa *big book* pertama adalah 98, 1% (Sangat Layak), kedua 98, 1% (Sangat Layak), ketiga 98, 1% (Sangat Layak), , keempat 96,4% (Sangat Layak), dan kelima 98, 1% (Sangat Layak). Hal tersesbut dapat dimaknai bahwa muatan materi yang terdapat dalam media *big book* sudah sesuai dengan kompetensi tentang nilai-nilai Pancasila untuk kelas rendah.

Penutup

Berdasarkan hasil pengembangan diperoleh data bahwa media *big book* tentang nilai-nilai Pancasila dalam penelitian ini memenuhi aspek kelayakan dari validator ahli media maupun materi. Kriteria kelayakan dari ahli materi diperoleh data bahwa *big book* pertama adalah 98, 1% (Sangat Layak), kedua 98, 1% (Sangat Layak), ketiga 98, 1% (Sangat Layak),, keempat 96,4% (Sangat Layak), dan kelima 98, 1% (Sangat Layak). Adapun kriteria kelayakan dari ahli media bahwa *big book* pertama mendapat hasil 83,75% (Sangat Layak), kedua 85% (sangat layak), ketiga 83,75% (sangat layak), ketiga 82,5% (sangat layak), dan kelima 88,75% (sangat layak).

Selanjutnya disampaikan saran bahwa: a) guru perlu menggunakan media pembelajaran yang memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran, b) media yang dikembangkan harus memuat materi yang sesuai, dan c) pengembangan media didasarkan pada tingkat perkembangan siswa.

PRAKSIS PENDIDIKAN PANCASILA DI LINGKUP SEKOLAH MENENGAH

Pengembangan Media Pembelajaran "Roda Tebak Pancasila (Rotela)" dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Pertama

MUKHAMAD MURDIONO;
PUJI WULANDARI KUNCOROWATI;
IQBAL ARPANNUDIN

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berperan penting dalam membangun karakter peserta didik agar menjadi warga negara muda yang memiliki karakter cerdas, terampil, bertanggungjawab, dan demokratis. Pancasila sebagai dasar dan falsafah bangsa Indonesia seharusnya dijadikan sebagai pedoman dan landasan dalam pengembangan karakter warga negara. Pancasila memuat nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai luhur itu merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia sejak lama. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya terinternalisasi dalam setiap diri warga negara Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi praktis yang dinamis dan terbuka menunjukkan bahwa keberadaan Pancasila akan tetap relevan dengan tuntutan perkembangan zaman. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan nyata sehari-hari menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Apabila Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata dan tidak kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, maka lambat laun pengertiannya akan kabur. Oleh karena itu, Pancasila perlu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Pancasila bukan hanya sebagai simbol atau hanya diucapkan saja, sementara dalam perbuatan Pancasila seringkali dikhianati. Sikap hidup yang perlu ditumbuhkembangkan sebagai warga negara Indonesia adalah sikap manusia Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa perlu dibangun dan dikembangkan, baik melalui jalur pendidikan informal maupun pendidikan formal. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki peran penting dalam pembentukan karakter, khususnya karakter Pancasila. Pentingnya sekolah menekankan pendidikan karakter sesuai dengan pendapat Johanson *et. all* (2011: 109) yang menyatakan bahwa sekolah merupakan lembaga pendidikan yang dipandang sebagai lembaga untuk mempersiapkan siswa hidup dan berkembang, baik secara akademis dan sebagai agen moral dalam masyarakat. Sekolah tidak hanya berfokus pada pengembangan kemampuan akademik siswa, tetapi juga perlu memperhatikan pengembangan moral peserta didik agar kelak dapat dengan mudah diterima oleh lingkungan sosial tempat hidup mereka dan mampu menjadi agen moral di masyarakat.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan salah satu lembaga yang memiliki tugas menanamkam nilai-nilai Pancasila dalam diri peserta didik. Proses penanaman nilai-nilai Pancasila di sekolah dapat dilakukan melalui kegiatan yang dikembangkan di sekolah, dapat berupa pembiasaan kepada peserta didik untuk berperilaku sesuai

dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Salah satu cara yang dapat ditempuh sekolah dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila ke dalam diri peserta didik adalah melalui penciptaan pembelajaran yang dapat dijadikan laboratorium bagi peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Suasana pembelajaran di kelas perlu diciptakan sedemikian rupa untuk memberi kesempatan kepada siswa melakukan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Membentuk karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila peserta didik di tingkat satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dapat dilakukan melalui mata pelajaran PPKn. Guru PPKn perlu menghadirkan pembelajaran PPKn yang menarik dan menyenangkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru PPKn yakni melalui pengembangan media pembelajaran PPKn. Media pembelajaran yang dikembangkan oleh guru PPKn diharapkan mampu menciptaan kondisi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Melalui pembelajaran PPKn yang menyenangkan peserta didik dapat memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

Pembelajaran PPKn di Sekolah Menengah Pertama

Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan *(civic education)*, terutama di dunia persekolahan, mengalami berbagai macam perubahan baik dilihat dari nomenklatur mata pelajaran, struktur materi maupun tujuan dan metode pengajaran. Perubahan terhadap Pendidikan Kewarganegaraan mengikuti perubahan kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Setelah reformasi, ada tuntutan bahwa pengetahuan yang didapatkan di sekolah harus dapat menopang kebutuhan *skill* yang terus bertambah, dan lahirlah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Dalam KBK tampak bahwa PKn telah mengarah pada tiga komponen paradigma baru seperti yang diajukan oleh *Centre for Civic Education*

pada tahun 1999 dalam *National Standard for Civics and Government.* Ketiga komponen tersebut, yaitu *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skill* (keterampilan kewarganegaraan), dan *civic disposition* (karakter kewarganegaraan) (Branson, 1999: 8-25). Visi pendidikan kewarganegaraan paradigma baru memberikan penekanan yang lebih kuat pada *nation and character*, pemberdayaan warganegara *(citizen empowerment),* dan memperkuat berkembangnya masyarakat kewargaan *(civil society).* Sedangkan misi pendidikan kewarganegaraan paradigma baru adalah pembentukan warganegara yang baik *(good citizen),* yang memiliki ciri-ciri: aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berbudaya politik kewarganegaraan *(civil culture),* dan berpikir kritis dan kreatif (Cholisin, 2003: 1).

Strategi pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut adalah strategi yang bersifat dialogis-kritis, pengalaman langsung *(direct experiences),* kolaboratif, dan kooperatif. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan Kirschenbaum (1995: 24-26) bahwa aspek *citizenship education* meliputi: *knowledge, appreciation, critical thinking skills, communication skills, cooperation skills, and conflict resolution skills.* Aspek-aspek tersebut lebih lanjut dinyatakan Kirschenbaum dalam pelaksanaannya diperlukan pendekatan secara komprehensif yang meliputi inkulkasi *(inculcaty)*, pemodelan *(modeling)*, fasilitasi *(facilitaty)*, dan pengembangan keterampilan *(skills development).*

Selain menerapkan strategi pembelajaran yang tepat, perlu dikembangkan perangkat media pembelajaran untuk memudahkan peserta didik dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang akan dipelajari peserta didik di SMP merupakan sesuatu yang abstrak. Sementara peserta didik usia SMP belum sepenuhnya mampu menerima materi pembelajaran yang abstrak. Perlu ada upaya untuk mengkongkritkan

nilai-nilai yang abstrak agar mudah dipelajari oleh peserta didik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan mengembangkan media "Rotela (Roda Tebak Pancasila)". Media pembelajaran PPKn selama ini masih relatif langka dan tidak semua guru mampu mengembangkan media pembelajaran PPKn dengan baik. Melalui pengembangan media pembelajaran PPKn diharapkan akan memudahkan guru PPKn dalam menyampaikan materi tentang Pancasila.

Pengembangan Media Pembelajaran "Rotela"

Pengembangan media pembelajaran "Rotela" dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah penelitian pengembangan melalui beberapa tahap, yakni: studi literatur dan pendahuluan, studi lapangan untuk melihat dan merumuskan kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan produk, dan pengumpulan berbagai bahan untuk pengembangan produk. Pada studi pendahuluan dilakukan dengan mengumpulkan data awal sebagai dasar pengembangan produk media yang akan dikembangkan. Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa media pembelajaran PPKn yang selama ini digunakan oleh guru PPKn untuk mengajarkan materi pembelajaran tentang nilai-nilai Pancasila masih terbatas pada media pembelajaran gambar berbasis *powerpoint.* Keterbatasan media yang digunakan guru PPKn dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila membuat peserta didik kurang tertarik dan tidak dapat memahami dengan baik nilai-nilai Pancasila. Hal ini sangat bertolak belakang dengan tujuan pembelajaran PPKn yang seharusnya mampu memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang nilai-nilai Pancasila.

Selain media yang terbatas pada gambar berbasis *powerpoint,* metode pembelajaran yang dikembangkan juga masih terbatas pada ceramah. Metode ceramah yang digunakan oleh guru menjadikan pembelajaran kurang menyenangkan bagi peserta didik. Ceramah kurang sesuai untuk

menyampaikan atau mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran PPKn seharusnya dikembangkan menjadi pembelajaran yang dapat melibatkan secara aktif peserta didik dalam pembelajaran. Observasi yang dilakukan di lapangan menguatkan data yang didapat melalui wawancara. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa partisipasi peserta didik dalam pembelajaran masih sangat rendah.

Studi literatur yang dilakukan, menunjukkan bahwa belum ada pengembangan media pembelajaran PPKn yang secara khusus digunakan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Padahal nilai-nilai Pancasila merupakan sesuatu yang abstrak dan perlu untuk dikonkritkan agar mudah diterima dan dipahami peserta didik. Apalagi peserta didik di Sekolah Menengah Pertama yang belum mampu menerima materi pelajaran yang bersifat abstrak. Media pembelajaran PPKn yang dikembangkan dan digunakan guru PPKn di sekolah memang masih terbatas dan belum banyak.

Dari hasil studi pendahauluan yang peneliti lakukan di lapangan, baik melalui wawancara, observasi, dan studi literatur menunjukkan bahwa guru memerlukan media pembelajaran dalam pembelajaran PPKn, khususnya untuk menjelaskan materi tentang nilai-nilai Pancasila. Media pembelajaran PPKn yang dikembangkan diharapkan mampu membantu guru PPKn dalam menjelaskan materi tentang nilai-nilai Pancasila. Media pembelajaran untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran PPKn perlu juga dimodifikasi dengan menambah *games* agar partisipasi peserta didik meningkat.

Setelah melakukan studi pendahuluann, langkah berikutnya yaitu merencanakan dan mengembangkan produk. Media yang dikembangkan merupakan perpaduan antara media gambar dengan permainan *(games)* yang diberi nama "Roda Tebak Pancasila (Rotela)". Media "Rotela" dikembangkan melalui tahap-tahap (1) merancang disain media, (2)

menentukan materi, (3) memilih alat dan bahan yang akan digunakan, dan (4) merancang penggunaan media. Pada tahap merancang disain, media yang dirancang berupa kotak berbentuk kubus dan sebuah lingkaran yang berfungsi sebagai roda putar. Pada bagian kotak berupa kubus, dipilih ukuran 50 x 50 centimeter. Sementara lingkaran yang berfungsi sebagai roda dipilih lingkaran dengan diameter 40 centimeter. Media kotak berupa kubus ini dirancang terdiri dari enam (6) sisi, yakni: sisi bawah sebagai alas atau tumpuan dan sisi atas sebagai tempat untuk memberi nama media. Selain dua sisi, di bagian atas dan bawah, ada empat (4) sisi lain yang masing-masing mempunyai fungsi berbeda. Setelah menentukan isi dari setiap sisi bangun kubus yang sudah disiapkan, langkah berikutnya adalah merancang desain komposisi warna kertas dan bahan-bahan lain yang diperlukan. Kertas yang dibuat menyesuaikan dengan warna dasar bangun kubus di setiap sisi. Agar menghasilkan tampilan yang menarik kertas dipilih yang memiliki warna cerah. Selain memilih warna kertas, dipilih juga tempat untuk pegangan agar media dapat dengan mudah dibawa/dipegang.

Pada tahap menentukan materi, dipilih dan ditentukan materi yang akan dikembangkan ke dalam media pembelajaran. Materi yang dipilih terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Materi ini disampaikan di kelas VIII SMP semester gasal. Kompetensi dasar ini kemudian dikembangkan lagi menjadi indikator-indikator pencapaian kompetensi untuk memudahkan dalam mengukur ketercapaian kompetensi. Materi yang dikembangkan dibagi menjadi dua sub topik, yakni Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pada materi tentang Pancasila sebagai dasar negara diuraikan dalam berbagai butir materi tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang termaktub dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pembukaan UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sementara materi yang menjelaskan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia diuraikan dan dijelaskan dalam rumusan butir-butir materi bahwa Pancasila dijadikan sebagai *way of life,* pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk hidup bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila.

Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat rancangan media "Rotela" terdiri dari berbagai jenis alat dan bahan antara lain: triplek, kertas kartoon, kertas kado, kertas lipas, lem, mur/baut, *double tape,* kertas manila, gunting, *cutter,* spidol, *ballpoint,* penggaris, jangkar, dan bor kecil. Masing-masing alat dan bahan digunakan sesuai fungsinya, dan digunakan seperlunya. Selain alat dan bahan tersebut, digunakan juga gergaji kecil untuk memotong triplek yang akan digunakan untuk membentuk media kubus. Setelah media dikembangkan, tahap pengembangan berikutnya yaitu merancang penggunaan media yang berupa uraian rencana pemanfaatan atau cara kerja media yang dikembangkan.

Sebelum digunakan dalam pembelajaran PPKn di sekolah, media yang dikembangkan perlu diuji kelayakan. Uji kelayakan media dilihat dari dua hal, yakni kelayakan menurut ahli media dan ahli materi dengan menggunakan indikator-indikator yang dikembangkan dari aspek media dan materi. Uji kelayakan produk dari aspek materi dilakukan dengan menilai produk dari aspek isi materi, penyajian materi, bahasa yang digunakan, dan penuangan materi dalam pembelajaran. Dari hasil analisis data terhadap kelayakan materi, menunjukkan bahwa media "Rotela" dari aspek materi dinilai "sangat layak" dengan penilaian 90 %. Saran yang diberikan dari ahli materi antara lain: perlu membedakan dengan

jelas antara konsep Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, perlu diberikan contoh-contoh implementasi secara riil dalam kehidupan nyata di masyarakat dari Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa, dan penulisan materi perlu mengikuti kaidah penulisan ilmiah.

Sementara uji kelayakan produk dari aspek media dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator antara lain; disain media, relevansi dengan topik yang diajarkan, kesesuaian dengan sasaran, kualitas media, ekonomis, kerapian, kepraktisan media, kesesuaian ukuran, dan tampilan media. Dari hasil analisis terhadap kelayakan media "Rotela" ditinjau dari aspek media pembelajaran menunjukkan bahwa media "sangat layak" dengan penilaian 96,6 %. Saran dari ahli media antara lain: perlu penyesuaian warna agar tampilan lebih menarik, amplop soal sebaiknya jangan dilipat terlalu kuat, *font* yang dipilih jangan terlalu kecil agar muda dibaca, dan amplop soal dengan warna gelap ditulis dengan spidol warna terang agar terlihat jelas. Tampilan media setelah melalui uji kelayakan dari ahli media dan materi dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Media "Rotela" setelah uji kelayakan ahli materi dan media

Dari hasil analisis terhadap media yang telah dikembangkan, menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn di SMP, khususnya tentang materi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, perlu menggunakan media "Rotela" agar pembelajaran menjadi berkualitas. Pembelajaran yang menggunakan media diharapkan akan berkembang menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan lebih bermakna. Penggunaan media gambar dikombinasikan dengan permainan *(games)* akan menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Selama ini pembelajaran PPKn didominasi pembelajaran yang masih terpusat pada guru *(teacher centered),* sehingga pembelajaran kurang mengaktifkan peserta didik dan materi yang dipelajari mudah untuk dilupakan.

Pembelajaran PPKn yang dikembangkan di sekolah seharusnya mampu mewujudkan peserta didik menjadi warga negara yang cerdas dan baik *(smart and good citizen)*. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Cholisin (2003) bahwa pendidikan kewarganegaraan perlu memberikan penekanan yang kuat pada *nation and character building,* pemberdayaan warga negara *(civic empowerment),* dan memperkuat berkembangnya masyarakat kewargaan *(civil society).* Pendidikan kewarganegaraan membawa misi sebagai mata pelajaran yang membentuk warga negara yang baik *(good citizen).* Warga negara yang baik dapat dilihat dari ciri-ciri: (1) aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, (2) berbudaya politik kewarganegaraan *(civic culture)*, dan (3) berpikir kritis dan kreatif.

Pembelajaran PPKn yang dikembangkan di sekolah memuat nilai-nilai Pancasila yang perlu dijabarkan dalam pembelajaran yang mudah dipahami oleh peserta didik. Nilai-nilai Pancasila menjadi penting ditanamkan dengan baik kepada peserta didik usia SMP mengingat peserta didik usia SMP rentan dengan pengaruh yang datang dari luar.

Pada usia remaja sebagai masa pencarian jati diri, peserta didik perlu diberikan pemahaman dengan benar tentang nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangann hidup bangsa yang sangat abstrak perlu dikongkritkan dengan menggunakan media pembelajaran.

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia sangat penting untuk ditanamkan sejak usia dini. Pancasila tidak hanya sebagai jargon dan penghias ruang-ruang kelas, melainkan sebagai nilai dasar yang harus dipahami oleh peserta didik. Somantri (2006: 2) menyatakan bahwa Pancasila bukanlah jargon kosong yang muncul di tengah-tengah suasana *"malaise-spritual"* bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia meruapkan karya luhur para pendiri bangsa *(founding fathers)* yang perumusannya dilakukan melalui proses sejarah yang panjang. Pancasila benar-benar sebagai ideologi yang lahir dari nilai-nilai dan kultur budaya asli yang berkembang sejak dulu di bumi Indonesia.

Penutup dan Rekomendasi

Pengembangan media pembelajaran menjadi salah satu alternatif bagi guru PPKn untuk dapat menghadirkan pembelajaran PPKn yang berkualitas dan menyenangkan. Melalui pembelajaran yang menyenangkan peserta didik akan tertarik mempelajari PPKn, termasuk di dalamnya mempelajari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Selain itu, media dapat berfungsi mengkongkritkan nilai-nilai Pancasila yang sangat abstrak. Melalui pembelajaran yang kongkrit peserta didik akan lebih mudah dalam memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya dipahami untuk dihafal saja, melainkan bagaimana peserta didik diupayakan untuk dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam

kehidupan nyata di masyarakat.

Media pembelajaran "Rotela" yang sudah dikembangkan sebaiknya dapat diujicobakan untuk mengetahuai efektifitas penggunaan media terhadap peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa. Guru PPKn di SMP sebaiknya dapat menggunakan media pembelajaran "Rotela" agar pembelajaran PPKn menjadi pembelajaran yang berkualitas dan menyenangkan bagi peserta didik. Media pembelajaran "Rotela" dapat dikembangkan lagi dalam pembelajaran PPKn untuk topik atau materi yang lain.

Pengamalan Pancasila Melalui Budaya Sekolah di SMP Negeri 10 Yogyakarta

SUNARSO

Rasional Perlunya Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya memiliki tingkat kemajemukan yang tinggi. Kemajemukan ini ditandai dengan banyaknya suku bangsa budaya, bahasa daerah, agama, serta berbagai kemajemukan lainnya. Sebagai negara multikultur, Indonesia merupakan masyarakat paling pluralistik di dunia. Memiliki sedikitnya 250 kelompok suku dengan 250-an lebih bahasa lokal. Negara besar ini terdiri lebih dari 17.000 pulau, 34 provinsi, 500 lebih kabupaten dan kota, 7000 lebih kecamatan, serta 70.000 lebih desa. Berpenduduk lebih dari 250 juta jiwa, menempatkan Indonesia sebagai negara nomor empat berpenduduk terbesar di dunia. Indonesia juga memiliki sekurang-kurangnya 6 agama besar: Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghuchu.

Lima tahun terakhir, indeks demokrasi Indonesia turun. Salah satu faktor penyebabnya adalah menurunnya kebebasan sipil. Terkait hal ini,

negara diharapkan lebih serius untuk melindungi kebebasan sipil warga. (Kompas 16 Mei 2018). Kemunduran demokrasi itu paling kuat dipengaruhi oleh meningkatnya intoleransi dalam bermasyarakat, sehingga berdampak pada kebebasan demokrasi sipil. Berdasar data *Freedom In The World, Freedom House*, Indonesia pernah mencapai titik terendah dalam berdemokrasi, yakni skor 5 (skala 0-7, makin kecil skor makin baik). Indeks tersebut dipengaruhi dua faktor, yakni partisipasi politik dan kebebasan sipil. Indeks demokrasi Indonesia perlahan meningkat pasca-Orde Baru. Sejak 2006-2013, Indonesia berada pada skor 2,5. Namun sejak 2014 hingga kini, indeks demokrasi Indonesia menurun pada angka 3. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya skor kebebasan sipil. Saiful Mujani dalam Saiful Mujani *Research and Consulting* menyatakan penurunan itu menunjukkan negara belum serius menjamin kebebasan sipil sebagai bagian dari negara berdemokrasi (Kompas 16 Mei 2018).

Salah satu penyebab penurunan kebebasan sipil, adalah meningkatnya jumlah orang yang tidak disukai karena perbedaan identitas baik suku, agama, ras, maupun antargolongan. Indonesia masih belum selesai dalam toleransi berpolitik. Menurut data Lembaga Suvei Indonesia, pada 2017 sebanyak 69,1 persen masyarakat yang menyatakan memiliki kelompok yang tidak disukai. Persentase itu meningkat dari sebelumnya sebesar 51,9 persen. Beberapa kelompok yang tidak disukai diantaranya komunis, LGBT, Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Yahudi. Peneliti LIPI Syamsuddin Haris, menilai negara harus konsisten dalam penegakkan supremasi hukum untuk menjamin hak dan kebebasan sipil. Sementara menurut direktur eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraeni mengatakan, tantangan pemilu dan demokrasi di Indonesia saat ini adalah kabar bohong atau hoaks. Apalagi di era pascakebenaran, fakta menjadi tidak lebih penting daripada emosi yang memengaruhi penentuan kebijakan.

Sementara penerapan desentralisasi selama hampi 17 tahun juga belum berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Desentralisasi yang diharapkan mampu memudahkan setiap daerah untuk berinovasi justru memunculkan permasalahan pada sistem pemerintahan yang buruk, terutama dinasti oligarki (Kompas 16 Mei 2018).

Beberapa ahli menengarai bahwa pendidikan di Indonesia belum sanggup melahirkan generasi yang utuh jati dirinya. Mereka memang cerdas secara intelektual akan tetapi kehilangan sikap jujur dan rendah hati. Mereka terampil, tetapi kurang menghargai sikap tenggang rasa dan toleransi (Juwono Sudarsono, 2008: xx). Pendidikan yang berdasar Pancasila hendaknya merupakan pendidikan yang dirancang untuk melahirkan generasi muda yang cerdas kehidupannya, yang mampu membangun negara kebangsaan yang demokratis, berkeadilan sosial, berperikemanusiaan, dan berketuhanan Yang Maha Esa (Sudijarto, 2008:1). Pembangunan peradaban bangsa harus didasari dengan pembangunan nilai-nilai moral di kalangan warganya baik sebagai individu maupun kelompok. Nilai-nilai moral yang kokoh dan kuat sangat diperlukan bagi warga bangsa untuk menghadapi tantangan-tantangan masa depan. Nilai-nilai moral suatu bangsa sangat berkaitan erat dengan kekuatan bangsa itu sendiri. Sebab nilai-nilai moral inilah yang menggerakkan warga bangsa tersebut dalam menjalani kehidupan secara dinamis dan kontekstual. Nilai-nilai moral dasar bagi bangsa Indonesia terkandung dalam agama dan Pancasila (Zamroni, 2002: 33).

Mengembalikan regulasi pendidikan yang senafas dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 menjadi hal yang penting. Tujuan pendidikan nasional mencakup pengembangan manusia Indonesia seutuhnya sesuai amanat UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang mencakup pengembangan kualitas dasar (daya pikir, daya hati, daya fisik), kualitas instrumen (penguasaan ilmu, teknologi, seni,

dan olah raga untuk memenuhi kepentingan Indonesia), kualitas ke-Indonesiaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika), serta kualitas global (Slamet P.H, 2013: 8).

Sekolah dalam pembuatan kebijakan pendidikan dilevel satuan pendidikan tidak menjabarkannya dari ideologi pendidikan yang berdasar Pancasila. Setiap sekolah tidak menjabarkan ideologi pendidikan Pancasila secara langsung, tetapi secara bertingkat mengikuti birokrasi yang ada di atasnya. Visi dan misi, tujuan pendidikan yang dirumuskan oleh sekolah jarang yang secara eksplisit mengacu pada nilai-nilai Pancasila (Purwastuti, 2017:6). Sekolah sebagai lembaga paling bawah dalam tingkatan birokrasi tidak dapat berbuat banyak untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum. Fakta paling nyata yaitu hilangnya mata pelajaran Pancasila dalam UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini semakin diperkuat dengan berbagai hasil survei yang menunjukkan semakin minimnya peserta didik mengenal Pancasila. Mengenal saja tidak, bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa diimplementasikan di sekolah. Merujuk hasil penelitian dari Litbang PDI dalam rangka peringatan Bulan Bung Karno di Klaten, Jawa Tengah yang menunjukkan hampir 50 persen kalangan pelajar Klaten tak bisa menghafal sila-sila Pancasila (Purwastuti, 2017:7). Habibie (2011) mengatakan hilangnya pendidikan Pancasila di sekolah merupakan salah satu sebab munculnya berbagai tindakan radikalisme dan kekerasan atas nama suku, agama, ras, budaya, dan afiliasi politik. Menurut Habibie, kekerasan atas nama agama yang paling sering terjadi, sebagai akibat sikap melupakan Pancasila sebagai dasar negara (Purwastuti, 2017:7). Setelah hilang dari sekolah sekian lama, Pancasila memang harus kembali diajarkan sebagai ideologi negara. Sejalan dengan hasil survei Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa sekitar 80 persen masyarakat melihat Pancsila sebagai sesuatu yang dibutuhkan.

Mereka menyadari Pancasila merupakan pilar kehidupan berbangsa dan bernegara (Purwastuti, 2017:8). Oleh karena itu, banyak orang sepakat jika akhirnya pemerintah mengembalikan Pancasila ke sekolah, agar Pancasila tak tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu bangsa.

Hal yang perlu diperhatikan dalam mengembalikan Pancasila ke sekolah adalah perlu dihindarinya inkulkasi ideologi Pancasila yang tidak sejalan dengan hakikat pendidikan. Nilai-nilai Pancasila ditanamkan secara menghafal atau dijadikan mata pelajaran yang wajib diujikan saja (Tilar, 2009: 174). Keterkaitan antara ideologi Pancasila dan pendidikan terletak pada permasalahan menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Orde Lama dan Orde Baru sebagai representasi negara dan pemerintah telah menjadikan Pancasila sebagai ideologi tertutup. Mereka merupakan penafsir tunggal Pancasila dan menutup peluang masyarakat pada umumnya serta kalangan pendidikan untuk memberikan kritik kepada pemerintah terkait dengan intepretasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Upaya menjabarkan Pancasila sebagai ideologi pernah dilakukan, yaitu dengan rumusan 45 butir Pancasila pada Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) pada masa Orde Baru, tetapi justru politik Orde Baru yang bersifat sentralistik berdampak negatif pada kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila yang seungguhnya ideologi terbuka dipakai oleh Orde Baru sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan.

Pada tataran konsep Pancasila telah dinyatakan secara formal dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memuat dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Permasalahan utamanya bukan pada tataran konseptualnya tetapi dalam tataran interpretasi dan implementasi. Pancasila menjadi slogan indah, tetapi belum menjadi *way of life*. Laporan dari *The Fund for Peace* menyatakan bahwa semakin meningkatnya intoleransi khususnya yang berkaitan dengan agama dan

kepercayaan di Indonesia. Konflik telah dianggap sebagai modus untuk menunjukkan segala kekesalan dan kekecewaan yang terjadi dalam masyarakat. Konflik antar kelompok masyarakat di Indonesia, baik secara vertikal maupun horisontal sering terjadi di beberapa daerah. Secara faktual di Indonesia mempunyai 34 provinsi, namun sayangnya sebanyak 14 provinsi merupakan daerah yang sering dilanda konflik (Herman Somantrie, 2011: 498).

Kebijakan sekolah yang dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila semestinya tampak dalam praktik persekolahan. Misalnya dalam berbagai program sekolah baik yang akademik maupun yang nonakademik. Etika Pancasila sudah menjadi orientasi pembuatan kebijakan sekolah, maka nilai-nilai Pancasila tentunya akan ditransformasikan dalam kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam seluruh aktivitas sekolah baik yang akademik maupun nonakademik, sehingga seluruh perilaku sehari-hari masyarakat sekolah dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Pancasila yang berisi nilai-nilai yang bersifat abstrak umum universal dikaji implementasinya dalam kultursekolah. Penelitian ini ingin mengkaji penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik hidup di sekolah, sehingga ditemukan potret sekolah yang mngimplementasikan Pancasila dalam kultur sekolah.

Era globalisasi menuntut adanya berbagai perubahan. Demikian juga bangsa Indonesia pada saat ini terjadi perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh pengaruh dari luar maupun dari dalam negeri. Perubahan-perubahan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlangsung cepat serta untuk menghadapi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat, disertai pola kehidupan mengglobal menuntut semua pihak untuk mengantisipasinya, khususnya yang mempunyai kewenangan untuk pembenahan proses pendidikan yang ditujukan untuk membentuk kepribadian peserta didik sebagai warga negara Indonesia yang baik *(good citizen)*

SMP Negeri 10 Yogyakarta termasuk SMP yang telah mencoba mengamalkan nilai-nilai Pancasila melalui budaya sekolah. Sebagai contoh dari pengamalan tersebut adalah budaya mengaji di setiap pagi hari bagi yang beragama Islam. Program senyum, sapa, dan salam di setiap pagi antara guru dan siswa. Menyanyikan Indonesia Raya setiap awal pelajaran, dan lagu Bagimu Negeri setiap mengakiri pelajaran dan sebagainya.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengkaji model pengamalan Sila pertama, Sila kedua, Sila ketiga, Sila keempat, dan Sila kelima melalui budaya sekolah di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 10 Yogyakarta dari bulan April sampai September 2018. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Pengamalan Pancasila Melalui Budaya Sekolah

Pengamalan Sila Pertama

Pendidikan nasional Indonesia berdasar sila pertama ingin membentuk manusia Indonesia yang religius.

Visi SMP Negeri 10 Yogyakarta adalah: "Takwa, cerdas, berbudaya, dan peduli lingkungan". Takwa adalah istilah yang merujuk kepada kepercayaan akan adanya Tuhan, membenarkannya, dan takut kepadaNya. Pengertian takwa menurut istilah yaitu melaksanakan semua perintah Tuhan, mejauhi larangan-Nya, dan menjaga diri agar terhindar dari siksa-Nya.

Gambar 1. Tadarus Setiap Pagi Sebelum Dimulainya Jam Pelajaran

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi "taqwa" tersebut antara lain: (1) Doa bersama setiap memulai dan mengakhiri pembelajaran; (2) Kegiatan tadarus dilaksanakan pagi hari setelah berdoa, sebelum memulai pelajaran. Dalam kegiatan ini guru yang beragama Islam dan mengajar jam pertama sudah harus berada di kelas sesuai jadwalnya untuk tadarus bersama; (3) Siswa yang beragama Nasrani membaca Al Kitab bersama guru yang beragama Nasrani; (4) Pada saat shalat dzuhur semua warga sekolah yang beragama Islam melaksanakan shalat berjamaah; (5) Bagi siswi yang sedang berhalangan/menstruasi mengisi buku catatan yang telah disediakan. (6) Kegiatan lain yang terkait dengan peningkatan ketakwaan antara lain: mengikuti lomba terkait dengan keagamaan, mengadakan kegiatan lomba antarkelas, dan mengadaan pesantren pada bulan Ramadan.

Pengamalan Sila Kedua

Pendidikan nasional Indonesia berdasar sila kedua ingin membentuk manusia yang humanis. Manusia dibekali dengan akal dan pikiran,

manusia adalah makhluk etis dan moral, perbuatan baik dan buruknya harus dapat dipertanggungjawabkan, baik di dunia kepada sesama manusia, maupun di akhirat di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan di dunia ini setiap pribadi manusia mempunyai hak dasar untuk memilih dan menentukan sendiri perilaku moral dan etisnya, sehingga harus mempertanggungjawabkan yang dipilihnya itu. Inilah yang dimaksud bahwa manusia itu merdeka dan bebas tapi bertanggungjawab.

Pengamalan sila kedua di SMP Negeri 10 Yogyakarta dilaksanakan melalui: (a) Program senyum, sapa, dan salam di setiap pagi ketika masuk pintu gerbang antara guru dan siswa. (b) Pembiasaan untuk saling senyum, sapa dan salam, antarwarga sekolah, serta hormat kepada yang lebih tua. (c) Pertemuan dan konsultasi rutin antara sekolah dan orang tua siswa. (d) SMP Negeri 10 ditetapkan sebagai sekolah inkulsi.

Visi "berbudaya", dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut: (1) Pembiasaan senyum, salam, sapa, santun; (2) Pembiasaan salaman pagi. Dalam rangka menagmalkan sila kemanusian ini juga dilakukan kegiatan sosial/kekeluargaan sebagai berikut: (1) iuran rutin untuk dana sosial; (2) menengok warga sekolah yang sakit; (3) takziah; (4) menengok warga yang terkena bencana.

Gambar 2. Senyum, Sapa, dan Salam, Guru menyambut Siswa di Setiap Pagi

Pengamalan Sila Ketiga

Pendidikan nasional Indonesia berdasar sila ketiga bertujuan membentuk manusia yang berjiwa nasionalis. Seorang nasionalis memiliki prinsip cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak yang melampaui batas-batas negaranya. Ini menafikan adanya penjajahan dalam bentuk apapun yang merugikan suatu bangsa, karena penjajahan di atas dunia tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Pancasila sebagai *"philosophical commitment"* untuk menyadarkan dan mengarahkan perkembangan nasionalisme kita, mutlak dibutuhkan sebagai tali pengikat persatuan dan kesatuan bangsa dalam jiwa dan semangat Bhinneka Tunggal Ika . Rasa cinta tanah air dan bangsa baik secara eksplisit maupun implisit harus senantiasa dijabarkan dalam dunia pendidikan (Koento Wibisono, 1998:11).

Pengamalan sila ketiga di SMP Negeri 10 Yogyakarta dilaksanakan melalui: (1) Upacara bendera pada setiap hari Senin dan hari besar nasional; (2) Pembentukan karakter nasionalisme melalui kegiatan Tonti dan Pramuka; (3) Menyanyikan Indonesia Raya setiap awal pelajaran; (4) Menyanyikan Bagimu Negeri setiap mengakiri pelajaran; (5) Memasang gambar lambang negara pada setiap kelas; (6) Memasang gambar presiden dan wakil presiden di setiap ruang kelas.

Gambar 3. Anggota Tonti dan Pengibar Bendera SMP Negeri 10 Yogyakarta

Pengamalan Sila Keempat

Pendidikan nasional Indonesia berdasar sila keempat bertujuan untuk membentuk manusia demokratis. Demokrasi adalah pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara (KBBI, 1988:195). Demokrasi adalah prinsip yang menyebabkan para warga masyarakat saling memandang, menghormati, menerima, dan kerjasama dalam kesatuan sehingga masyarakat dapat bertindak sebagai satu subjek, yang menyelenggarakan kepentingan bersama (Driyarkara, 2006: 844). Demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan berkeadilan dalam mewujudkan cita-cita nasional yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.

Pengamalan sila keempat di SMP Negeri 10 Yogyakarta dilaksanakan melalui: (1) Penerimaan peserta didik baru secara demokratis, sesuai peraturan yang berlaku; (2) Pemilihan pengurus OSIS secara demokratis; (3) Pembentukan komite sekolah secara demokratis; (4) Sosialisasi program sekolah secara demokratis kepada komite sekolah dan orang tua siswa; (5) Kebebasan memilih ekstrakurikuler sesuai minat; (6) Pemilihan siswa berprestasi secara demoratis dan transparan; (7) Pemilihan guru dan karyawan berprestasi secara demokratis dan transparan; (8) Penentuan tujuan wisata secara demokratis dan transparan; (9) Rapat anggota tahunan koperasi secara demokratis; (10) Pemilihan pengurus koperasi secara demokratis.

Gambar 4 Kegiatan Ekstra Kurikuler Pramuka

Pengamalan Sila Kelima

Pendidikan nasional Indonesia berdasar sila kelima ingin membentuk manusia Indonesia yang selalu menegakkan kreadilan di manapun mereka berada. Pengamalan Sila kelima di SMP Negeri 10 Yogyakarta dilaksanakan melalui: (1) Bakti sosial ke daerah yang membutuhkan dalam rangka ulang tahun sekolah; (2) Pengumpulan dana peduli setiap terjadi bencana alam; (3) Pemberian bantuan untuk membeli seragam dan perlengkapan sekolah bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu; (4) Pemberian remidial bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan minimal dalam pembelajaran; (5) Setiap siswa berhak menggunakan fasilitas belajar, laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran, buku referensi, dan buku perpustakaan; (6) Setiap siswa berhak mendapatkan layanan konsultasi dari guru mata pelajaran, wali kelas, dan konselor.

Gambar 5. Bakti Sosial dalam Rangka Ulang Tahun SMP Negeri 10 Yogyakarta

Hasil dan Temuan

Hasil penelitian sebagai berikut: (1) **Pengamalan Sila pertama** melalui budaya sekolah di SMP Negeri 10 Yogyakarta, dilaksanakan sebagai berikut: (a) Pembiasaan kepada seluruh warga sekolah untuk membaca dan memahami kitab suci sesuai agama yang dianut, setiap pagi sebelum pelajaran. (b) Doa bersama setiap memulai dan mengakhiri pembelajaran. (c) Pada saat shalat dzuhur semua warga sekolah yang beragama Islam melaksanakan shalat berjamaah. (d) Pesantren kilat pada setiap bulan Ramadan. (e) Perayaan hari besar keagamaan. (f) Diselenggarakannya ekstra kurikuler qiroah. (2) **Pengamalan Sila kedua** melalui: (a) Program senyum, sapa, dan salam di setiap pagi ketika masuk pintu gerbang antara guru dan siswa. (b) Pembiasaan untuk saling senyum, sapa dan salam, antarwarga sekolah, serta hormat kepada yang lebih tua. (c) Pertemuan

dan konsultasi rutin antara sekolah dan orang tua siswa. (d) SMP Negeri 10 ditetapkan sebagai sekolah inkulsi. (3) **Pengamalan Sila ketiga** melalui: (a) Upacara bendera pada setiap hari Senin dan hari besar nasional. (b) Pembentukan karakter nasionalisme melalui kegiatan Tonti dan Pramuka. (c) Menyanyikan Indonesia Raya setiap awal pelajaran. (d) Menyanyikan Bagimu Negeri setiap mengakiri pelajaran. (e) Memasang gambar lambang negara pada setiap kelas. (f) Memasang gambar presiden dan wakil presiden di setiap ruang kelas. (4) **Pengamalan Sila keempat** melalui: (a) Penerimaan peserta didik baru secara demokratis, sesuai peraturan yang berlaku. (b) Pemilihan pengurus OSIS secara demokratis. (c) Pembentukan komite sekolah secara demokratis. (d) Sosialisasi program sekolah secara demokratis kepada komite sekolah dan orang tua siswa. (e) Kebebasan memilih ekstrakurikuler sesuai minat. (f) Pemilihan siswa berprestasi secara demoratis dan transparan. (g) Pemilihan guru dan karyawan berprestasi secara demokratis dan transparan. (h) Penentuan tujuan wisata secara demokratis dan transparan. (i) Rapat anggota tahunan koperasi secara demokratis. (j) Pemilihan pengurus koperasi secara demokratis. (5) **Pengamalan Sila kelima** melalui: (a) Bakti sosial ke daerah yang membutuhkan dalam rangka ulang tahun sekolah.(b) Pengumpulan dana peduli setiap terjadi bencana alam. (c) Pemberian bantuan untuk membeli seragam dan perlengkapan sekolah bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu. (d) Pemberian remidial bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan minimal dalam pembelajaran. (e) Setiap siswa berhak menggunakan fasilitas belajar, laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran, buku referensi, dan buku perpustakaan. (f) Setiap siswa berhak mendapatkan layanan konsultasi dari guru mata pelajaran, wali kelas, dan konselor.

Penutup

Berdasar paparan di atas selanjutnya bisa direkomendasikan sebagai berikut: (1) Pengamalan nilai-nilai Pancasila lewat budaya sekolah seperti yang telah dilaksanakan SMP Negeri 10 Yogyakarta ini bisa menjadi contoh dan model bagi sekolah lain untuk diterapkan. (2) Mengingat kondisi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara masih jauh dari nilai-nilai Pancasila, maka pemerintah sebagai pengemban amanah, perlu untuk merevitalisasi, merekonstruksi, dan mereaktualisasi Pendidikan Pancasila agar lebih aplikatif. (3) Para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, orang tua, guru dan para pendidik harus sungguh-sungguh menjadi teladan bagi peserta didik dalam pengamalan Pancasila.

Penanaman Nilai-nilai Pancasila bagi Siswa SMA melalui *Reflective Teaching*

SUYATO;
IFFAH NURHAYATI;
BUDI MULYONO

Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian yag kami lakukan di beberapa Sekolah Menengah Atas di beberapa wilayah di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada bagian awal akan dipaparkan beberapa fenomena yang menurut penulis patut menjadi bahan renungan untuk melakukan refleksi Pada bagian kedua akan dikemukakan kerangka teoretis yang menjadi panduan dalam mendeskripsikan dan menganalisis hasil penelitian yang disajian dalam bab ini. Selanjutnya akan dipaparkan beberapa temuan penting yang menurut penulis bisa dijadikan bahan renungan bagi para pengambil kebijakan pendidikan dan para guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada umumnya, dan PPKn SMA pada khususnya. Sebuah Model Pembelajaran Reflektif penulis tawarkan sebagai salah satu upaya menemukan model pembelajaran yang efektif dalam rangka

penanaman nilai-nilai Pancasila. Pada bagian akhir akan dikemukakan beberapa fenomena yang menjadi tantangan bagi para guru PPKn dalam mengajarkan nilai-nilai, khususnya nilai-nilai Pancasila.

Fenomena Global

Tantangan yang dihadapi para guru PPKn dalam rangka penanaman nilai-nilai Pancasila bukan hanya dalam konteks pusaran arus global yang didominasi ideologi neoliberal tetapi juga tantangan lokal-nasional, khususnya wacana hubungan Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia dengan Agama, khususnya Islam. Pada tataran pedagogis, tantangan yang dihadapi guru PPKn dalam upaya meyakinkan kepada para peserta didik bukan hanya tentang relevansi nilai-nilai Pancasila terkait dengan fenomena global dan nasional, tetapi juga bagaimana menumbuhkan perasaan *self-efficacy*, baik sebagai pribadi maupun warga negara. Sebagaimana dikemukakan Al Khanif (2017: 113), bahwa sebagai negaara Muslim terbesar dan negara Demokrasi terbesar kedua, Indonesia menyimpan permasalahan kebangsaan yang kompleks terkait dengan keberagaman kita. Hal ini diperkuat Latif (2015, 2018) yang menyatakan bahwa tugas kita adalah bagaimana menjadikan Pancasila sebagai titik temu, titik tumpu, dan titik tuju dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kerangka Teoretis Pengembangan Model

Ada beberapa teori yang bisa digunakan sebagai acuan dalam merancang model pembelajaran reflektif dalam rangka penanaman nilai-nilai Pancasila kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). Beberapa di antaranya *Holistic Curriculum* (Miller, 2007); *Holistic Pedagogy* (Ricci and Pritscher, 2015); *The Taming of Education* (Creasy, 2018); *Learnification* (Biesta, 2011) esensi pendidikan: qualification, socialization, and

subjectification); *Re-engineering education* (Cheng, 2005); *Reflective Teaching* (Ghey, 2004); *Building democratic citizens* (Print and Lange, 2012). Beberapa pendapat tersebut memiliki rentang mulai dari tataran filosofis sampai dengan praktis. Dengan meramu bahan-bahan yang ditawarkan para ahli tersebut, seorang guru bisa menentukan sendiri strategi penanaman nilai-nilai Pancasila, baik di dalam kelas maupun di luar kelas;

Reflektive Teaching sebagai Model Penanaman Nilai-nilai Pancasila

Penanaman nilai-nilai Pancasila melalui bisa dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pada tataran filosofis, pendapat Miller (2007) tentang *Holistic Curriculum* yang menyatakan bahwa pada dasarnya pendidikan itu bersifat holistik, dalam arti bahwa aktivitas bernama pendidikan itu nmerupakan satu-kesatuan yang tidak bisa dipisahkan kecuali dalam rangka kebutuhan analisis. Mengutip pendapat Halstead and Pike (2006:142-148) yang menjelaskan cara anak belajar tentang nilai-nilai, yaitu *learning through direct instruction, learning through observation, learning through participation and giuded action, learning through reflection.*

Sebagaimana telah dipaparkan di bagian awal dari tulisan ini bahwa pembentukan warga negara ideal tidak bisa dilakukan di era yang sangat didominasi ideologi neoliberal. Oleh karena itu, para guru PKn harus melakukan refleksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Mereka, baik secara sadar maupun tidak, telah mengubah orientasi pendidikan selama ini. Pendidikan telah mengalami pendangkalan dan penyempitan makna. Pendidikan telah berubah menjadi sekadar pengajaran. Bahkan pengajaran yang berorientasi pada nilai atau hasil ujian berupa angka-angka. Meminjam istilah Taubman, pendidikan didominasi praktik *teaching by numbers* (2009). Telah terjadi proses dehumanisasi dalam proses

dan orientasi pendidikan. Oleh karena itu perlu dilakukan re-orientasi pendidikan yang lebih humanis, untuk kasus Indonesia yaitu menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan, baik proses maupun orientasinya.

Salah satu strategi yang bisa ditempuh oleh para guru dalam pembelajaran PPKn yang humanis adalah dengan menerapkan *Reflective Teaching. Reflective Teaching* mendasarkan diri pada beberapa gagasan utama. Menurut Ghaye, setidaknya ada enam logika terkait dengan *Reflective Teaching.* Empat pertanyaan kunci dalam tindakan reflektif adalah (1) *What is working well?* ; (2) *What needs changing?* (3) *What are we learning?* dan (4) *Where do we go from here?* (Ghaye, 2011, p.1).

Enam gagasan kunci mengajar reflektif tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut (Ghaye, 2011, p. 1):

1. *Reflective practices* membantu kita memahami hubungan antara apa yang kita lakukan dengan bagaimana kita bisa meningkatkan efektivitasnya (dengan mengembangkan praktik kita).
2. *Reflective practices* juga membantu kita memahami hubungan antara perasaan, pikiran, dan tindakan. Bagaimana kita merasakan memengaruhi pikiran kita. Pikiran kita memengaruhi tindakan nyata kita.
3. *Reflection* sering dideskripsikan sebagai berpikir secara terstruktur atau terkendali *('structured' or organized thinking).*
4. Anda dapat memahami praktik anda dengan 'melihat ke belakang' tetapi harus dijalani ke depan *(by looking backwards – but work needs to be lived forwards).*
5. Sangat penting untuk menggunakan kekuatan atau potensi dari refleksi untuk membantu anda mengidentiifikasikan, mengembangkan, dan memperkuat apa yang bisa anda lakukan, bukan hanya apa yang tidak bisa anda lakukan.
6. Refleksi dapat dipicu oleh beragam hal.

Lebih lanjut, Ghaye (2011, pp.2-3) mendasarkan *reflective teaching* pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Individu atau kelompok kerja memiliki tingkat komitmen, kemampuan, dan melihat pentingnya untuk melakukan refleksi tentang apa yang mereka kerjakan.
2. Individu atau kelompok kerja mampu untuk bertindak untuk meningkatkan apa yang mereka lakukan meskipun dalam beberapa situasi mungkin sangat terbatas.
3. Individu atau kelompok kerja mampu (kadang-kadang dengan bantuan) untuk mengartikulasikan pilihan yang akan dilakukan atau tidak dilakukan. Sebagaimana telah diketahui, setidaknya ada lima jenis tindakan: *(1) Informed action; (2) Committed action; (3) Intentional action; (4) Sustainable action;* dan *(5) Positive action.*
4. Individu atau kelompok kerja dapat menjelaskan (kadang-kadang dengan bantuan pihak lain) dan menjelaskan tujuan atau dampak lanjutan dari tindakan mereka.
5. Jika dampak atau luaran diyakini baik, maka individu atau kelompok kerja bisa mengembangkannya menjadi kebiasaan atau rutinitas yang berkelanjutan.

Berikut ini adalah sepuluh pertanyaan reflektif yang bisa digunakan untuk memikirkan asumsi-asumsi yang membuat kita terlibat di dalam praktik reflektif.

1. *Values*: bagaimana seharusnya saya bertindak?
2. *Expectations*: Apa yang seharusnya saya lakukan?
3. *Context*: Apa yang secara aktual memungkinkan di sini?
4. *Decisions*: Apakah tindakan saya bisa dibenarkan?
5. *Options*: Dapatkah saya melakukan hal lain secara lebih baik atau berbeda?

6. *Judgement*: Sejauh mana tingkat keberhasilannya?
7. *Strength*: Apa yang bisa memperkuat pada tindakan berikutnya?
8. *Learning*: Siapa telah belajar apa?
9. *Voice*: Suara atau pendapat siapa yang telah didengar dan yang tidak didengar?
10. *Knowledge*: Pegetahuan siapa yang paling dihargai dan mengapa?

Dengan demikian praktik reflektif dapat membantu kita dengan empat macam belajar, yaitu:

1. *affective learning* – membantu kita belajar melalui perasaan dan emosi;
2. *cognitive learning* – membantu kita berpikir tentang sesuatu hal secara berbeda, dan mungkin lebih kreatif;
3. *positive action learning* – membantu kita mewujudkan ke tindakan apa yang kita pikirkan dan rasakan, yaitu yang bersifat etis, bermoral, dan memperkuat;
4. *Social learning* – membantu kita belajar dari dan dengan orang lain.

Berikut ini adalah enam pertanyaan reflektif yang bisa digunakan untuk membantu belajar melakukan praktik reflektif.

1. Apakah kelebihan dan kelemahan dari praktik yang anda lakukan saat ini?
2. Apakah yang anda butuhkan untuk memperahankan praktik anda yang sudah baik ?
3. Hal apa yang perlu anda ubah?
4. Dengan apa cara terbaik untuk melakukan perubahan?
5. Bagaimana anda dapat belajar dari kesuksesan sekecil apapun?
6. Bukti apakah yang menunjukkan akan terjadi perkembagan yang positif dan sejauh mana bukti itu meyakinkan?

Ghaye and Lillyman (2006) meringkas ciri-ciri umum dari model-model reflektif dengan menyatakan bahwa model-model itu dapat dilihat dari satu atau lebih perspektif berikut:

1) *a competency- based perspective*, bahwa mereka berusaha untuk mengembangkan keterampilan atau kompetensi tertentu;
2) *a personalistic perspective*, bahwa mereka bekerja dengan agenda pribadi, emosionalitas, pengembangan belajar mandiri *(self-study)* melalui kepercayaan yang lebih tinggi tentang identitas dan harga diri *(a greater sense of self- worth and identity);*
3) *an experiential perspective*, bahwa mereka menekankan pada eksplorasi aktif tentang *'lived experience'*, baik pengalaman diri sendiri maupun orang lain; hal ini menuntut pembelajar menghargai pengalaman sendiri dan bersifat terbuka terhadap kemungkinan belajar dari orang lain;
4) *a transformatory perspective*, bahwa mereka bekerja terkait dengan pertanyaan yang dapat menantang status quo, menantang konteks tempat bekerja yang menindas dan melemahkan, dan memfokuskan pada peniadaan rintangan demi peningkatan (transformasi).

Peran Guru sebagai Fasilitator dalam Pembelajaran Reflektif

Fasilitasi secara lateral bermakna "memudahkan". Asumsinya, sebagaimana diyakini oleh penganut pendidikan humanis dan konstruktivisme pragmatis adalah bahwa belajar pada hakikatnya sebuah *'recovery'* atau mengingat kembali apa yang telah kita ketahui. Beberapa orang meyakini bahwa *'inner knowledge'* ini tenggelam atau terlupakan karena begitu banyak yang kita ketahui. Dengan demikian, fasilitasi sesungguhnya membangkitkan bakat terpendam kita dan kearifan bawah sadar kita. Membantu peserta didik akan kapasitas mereka untuk

belajar adalah ciri khas dari fasilitator, mengganti pendidikan dari sekadar menyampaikan materi atau pengetahuan yang bersifat statis menuju sebuah hubungan dialogis di mana pengetahuan adalah kreasi bersama (*co-created).*

Menurut Gregory (2006, p. 112) faktor-faktor utama yang memengaruhi fasilitasi adalah lingkungan budaya internal atau konteks kelompok, kontrak psikologis dan sosial, budaya yang lebih luas, baik lingkungan maupun kelembagaan, gaya fasilitator dan model fasilitasi. Heron, sebagaimana dikutip Gregory (2006, p. 105), menyatakan seorang fasilitator perlu memiliki: otoritas, konfontrasi, kepedulian, beragam metode, orientasi, hormat kepada orang lain, dan fleksibilitas gaya. Sedangkan dimensi dari gaya fasilitator mencakup: dimensi perencanaan, dimensi makna, dimensi konfrontasi, dimensi perasaan, dimensi membangun, dan dimensi menilai.

Secara singkat, belajar tentang nilai harus dimaknai bukan merupakan proses yang linier, artinya merupakan proses yang menyangkut aspek – aspek pengalaman positif maupun negatif, sehingga bersifat fluktuatif, sehingga membutuhkan kegiatan refleksi. Belajar nilai-nilai demokrasi misalnya, bukan semata-mata hasil dari pengalaman di sekolah tetapi juga yang diperoleh dalam konteks kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, tempat kerja dan lain-lain. Meskipun bukan merupakan proses yang bersifat linier, belajar nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai lainnya bersifat *cummulative,* karena berbagai pengalaman masa lalu, baik yang positif maupun negatif terbawa terus ketika belajar sesuatu yang baru dengan sifat fluktuatifnya. Belajar nilai-nilai demokrasi juga bersifat *recursive* karena melibatkan proses me-*recall* pengalaman masa lalu. Dengan kata lain, belajar demokrasi melibatkan proses reflektif. Proses refleksi difasilitasi dan dikembangkan di dalam model pembelaran reflektif *(reflective teaching).*

Peran Media dalam Pembelajaran Reflektif

Peran media sangat signifikan dalam pembelajaran reflektif, khususnya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Media yang bisa digunakan bisa berupa kisah narasi atau dongeng-dongeng dan mitos-mitos, *audio-visual* seperti film atau video yang berisi kisah-kisah inspiratif, gambar-gambar. Beberapa Film dan video singkat yang berhasil diidentifikasi dalam FGD yang diyakini bisa digunakan sebagai media dalam penanaman nilai-nilai Pancasila melalui Pembelajaran Reflektif dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel. 1. Penanaman Nilai-nilai Pancasila dan Media yang relevan (hasil FGD, perlu validasi)

Penanaman Nilai-nilai dalam Sila-sila Pancasila	Media yang Relevan
Religiusitas	Video Konflik antaragama; Bedah Mushola; Film "Sang Pencerah"
Kemanusiaan	Reportase Penyaluran Bantuan bagi Korban Bencana Alam; Orang Pinggiran; *From Zero to Hero;*
Nasionalisme	Tanah Surga Katanya; Reportase Kehidupan di Daerah Perbatasan; Pahlawan tanpa Tanda Jasa (Acara TV)
Demokrasi	Video tentang Pelaksanaan Pemilu; Reportase Kericuhan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; Indonesia Lawyer Club (dengan tema yang relevan).
Keadilan Sosial	Bedah Rumah (Acara TV), Laskar Pelangi, Tanah Surga Katanya.

Berikut ini adalah contoh sintak Pembelajaran Reflektif untuk menanamkan nilai Keadilan dengan bantuan film berjudul "Tanah Surga Katanya."

SINTAKS PEMBELAJARAN REFLEKTIF *(REFLECTIVE TEACHING)*
NILAI YANG DIREFLEKSIKAN: SILA ke-5
MEDIA PEMBELAJARAN: Film "Tanah Surga Katanya" (masih perlu divalidasi).

KEGIATAN PENDAHULUAN

REFLEKSI UNTUK KEGIATAN	PERAN GURU	KEGIATAN SISWA
1. Refleksi praktik 2. Rencana kegiatan 3. Tujuan (Fokus): Menyadarkan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	Menyadarkan/ Memotivasi Mengondisikan Membimbing Dst.	Merefleksi diri Merefleksi kondisi masyarakat/negara tentang keadilan

KEGIATAN INTI

REFLEKSI DALAM KEGIATAN	PERAN GURU	KEGIATAN SISWA
Pemutaran Film	Membimbing	Menonton Menemukan pesan Melakukan refleksi

KEGIATAN PENUTUP

REFLEKSI TENTANG KEGIATAN	PERAN GURU	KEGIATAN SISWA
1. Apa yang telah dipelajari 2. Menemukan Kelebihan 3. Menemukan Kelemahan 4. Rencana tindak lanjut	Membimbing siswa menuliskan refleksi dan tindak lanjut.	Melakukan refleksi dan merencanakan tindak lanjut dengan bimbingan guru.

Beberapa Temuan Penting

Dari hasil pencermatan terhadap hasil penelitian dan dilanjutkan dengan *focus group discusion (FGD)* dapat diperoleh beberapa temuan penting berkaitan dengan penanaman nilai-nilai Pancasila melalui *Reflective Teaching*. **Pertama,** kegiatan refleksi untuk menanamkan

nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dari sudut pandang atau perspektif kekuatan atau kelebihan. Siswa dibimbing untuk melakukan kegiatan refleksi dengan melihat dari sisi positif dari pelaksanaan atau tindakan berdasarkan pada nilai-nilai tertentu. Sebagai contoh, dengan menggali sisi positif atau manfaat dengan adanya nilai-nilai religius sebagai pembimbing *(guiding value)* dalam penyelenggaraan negara, misalnya dalam penegakan hukum, maka tidak akan ada korupsi atau tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN). Dengan dibimbing oleh nilai-nilai kemanusiaan, tidak akan ada aparat yang semena-mena menggusur pedagang kaki lima tanpa memberikan solusi berusaha bagi pedagang terdampak. Singkat kata, dengan menggali sisi positif dari suatu nilai sebagai pembimbing berperilaku, siswa memiliki keyakinan akan pentingnya sebuah nilai. Semakin banyak keuntungan atau manfaat yang berhasil diidentifkasi, semakin kuat keyakinan siswa terhadap nilai-nilai tersebut. **Kedua,** kegiatan refleksi dari sudut pandag atau perspektif kelemahan atau kerugian. Siswa dibimbing untuk melakukan kegiatan refleksi dengan melihat dari sisi negatif dari pelanggaran atau tindakan yang mengabaikan nilai-nilai tertentu. Sebagai contoh, dengan menggali dampak negatif atau mudharat dari absennya nilai-nilai religius sebagai pembimbing *(guiding value)* dalam penyelenggaraan negara, misalnya dalam penegakan hukum, maka korupsi akan meraja lela atau tindakan diskriminatif akan sangat mudah dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN). Dengan pengabaian nilai-nilai kemanusiaan, akan sagat banyak aparat yang semena-mena menggusur pedagang kaki lima tanpa memberikan solusi berusaha bagi pedagang terdampak. Singkat kata, dengan menggali sebanyak mungkin sisi negatif dari absennya nilai sebagai pembimbing berperilaku, siswa memiliki keyakinan akan pentingnya sebuah nilai. Tegasnya, semakin banyak sisi negatif yang bisa diidentifikasi siswa, semakin kuat keyakinan siswa akan pentingnya nilai-nilai tersebut.

Kegiatan refleksi juga bisa dilakukan dengan pendekatan berdasarkan hubungan antara tujuan akademik dengan penanaman nilai-nilai. Berdasarkan pendekatan ini, ada lima kategori yang berhasil diidentifikasikan. **Pertama, *The separate Category*,** memisahkan penanaman nilai dengan prestasi akademik *(integrated approach).* **Kedua, *The sequential Category*,** mengurutkan kan penanaman nilai dengan prestasi akademik. **Ketiga, *The dominant Category*,** pendekatan dominasi, bisa prestasi akademik yang diprioritaskan, atau sebaliknya penanaman nilai-nilai yang diprioritaskan. **Keempat, *The transformative Category*,** dan pendekatan **Kelima, *The integrated Category*.**

Refleksi

Sebagai bahan refleksi, berikut kami sampaikan dua belas fenomena yang disampaikan *Psychotheraphist,* James Guinan, sebagaimana dikutip Ricci and Pritscher (2015: 39-40) berkaitan dengan paradoks *quality learning.*

One, increase the tendency to allow events to happen rather than make them happen.

Two, have frequent attacks of smiling.

Three, have feelings of being connected with others and nature.

Four, have frequent overwhelming episodes of appreciation.

Five, increase the tendency to think and act spontaneously rather than from fears based on past experiences.

Six, have an unmistakable ability to enjoy each moment and to make the best out of each experience.

Seven, a loss of ability to worry.

Eight, lose interest in conflict.

Nine, lose interets in interpreting the action of others.

Ten, lose interest in judging others.

Eleven, lose interest in judging self.

Twelve, increase the tendency to gain the ability to love without expecting anything in return.

Penutup

Berdasarkan temuan penelitian, ada dua hal penting yang perlu ditindaklajuti. Pertama, berkaitan dengan masih sedikitnya guru yang melakukan praktik refleksi baik sebelum, selama, dan sesudah pembelajaran. Untuk ini perlu dikaji lenih lanjut penyebabnya yang kemungkinan sangat beragam, tergantung gurunya. Kedua, Perlu dilakukan uji coba baik secara terbatas maupun secara luas berkaitan dengan sintaks strategi pembelajaran reflektif untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa SMA.

Internalisasi Nilai-nilai Pancasila Melalui Pembelajaran PPKn di Sekolah Menengah Atas Kota Yogyakarta

ANANG PRIYANTO;
SRI HARTINI;
SURIPNO

Pada saat ini setelah 72 tahun Indonesia merdeka masih saja dijumpai sikap, perilaku dan perbuatan yang jauh dari cerminan identitas bangsa Pancasila. Bahkan sikap, perilaku dan perbuatan yang bukan cerminan jiwa bangsa Pancasila telah ditunjukkan oleh para penyelenggara negara yang seharusnya menjadi figur panutan bagi rakyat. Salah satu sikap dan perilaku yang bukan cerminan dari nilai-nilai Pancasila adalah perilaku korupsi yang seolah-olah sudah menjadi kebiasaan hidup para pejabat pemerintahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum merasuk dalam sanubari para penyelenggara negara atau pejabat pemerintah sebagai cerminan identitas bangsa yang Pancasilais. Jika kondisi semacam ini tidak segera diantisipasi akan berakibat melemahnya semangat jiwa bangsa yang Pancasilais dan pada akhirnya akan merusak identitas bangsa.

Antisipasi penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa perlu dan segera untuk dilakukan. Salah satu cara yang paling strategis dapat dilakukan adalah melalui internalisasi atau pelembagaan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda, karena generasi muda merupakan asset bangsa penerus cita-cita perjuangan bangsa menuju pada kehidupan bangsa dan negara yang lebih baik. Generasi muda inilah yang nantinya akan membawa tanggungjawab estafet penyelenggara negara. Generasi muda yang telah menjiwai nilai-nilai Pancasila akan dapat mengharumkan identitas bangsa Pancasila di kancah pergaulan masyarakat global. Melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila dapat menjadikan diri generasi muda bersikap, berperilaku, dan bertutur kata sebagai seseorang yang Pancasilais. Penguatan diri melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi kebutuhan hidup bangsa Indonesia dalam hal ini, dan penguatan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui bangku sekolah, karena sekolah sebagai agen perubahan yang sangat ampuh dalam membentuk watak seseorang kelak. Melalui sekolah inilah harapan menjadi bangsa berkepribadian Pancasila yang kuat akan terwujud.

Terwujudnya bangsa yang mencerminkan perilaku Pancasila akan menjadi kenyataan bilamana nilai-nilai Pancasila benar-benar telah melembaga dalam diri setiap generasi muda penerus perjuangan bangsa dan negara. Kegiatan di sekolah terutama dalam pembelajaran merupakan kegiatan yang sangat strategis untuk membentuk karakter bangsa yang Pancasilais. Melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah merupakan salah satu solusi yang handal dalam melembagakan nilai-nilai Pancasila. Kurikulum mata pelajaran PPKn di sekolah terutama Sekolah Menengah Atas telah memuat berbagai kompetensi yang harus dilakukan oleh guru dalam membentuk warganegara yang baik. Salah satu tujuan khusus PPKn

adalah menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013). Namun kenyataan guru PPKn di sekolah belum optimal dalam menghasilkan anak-anak bangsa yang Pancasilais, terbukti dari hasil didikan yang telah dilakukannya menghasilkan anak bangsa setelah dewasa menjadi pejabat, penyelenggara negara maupun pemimpin pemerintahan berperilaku yang tidak mencerminkan kepribadian Pancasila. Disamping itu masih banyaknya anak-anak sekolah yang telah memperoleh pembelajaran PPKn berperilaku tidak mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila, misalnya banyak anak sekolah yang terlibat tawuran, penyalahgunaan narkoba, melakukan vandalis, dan masih banyak lagi yang pada prinsipnya bukanlah cerminan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini perlu ditemukan solusi terbaik bagaimana internalisasi (pelembagaan) nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui pembelajaran PPKn di sekolah, disamping agar pembelajaran PPKn lebih bermakna sebagai salah satu mata pelajaran yang strategis dalam membentuk watak bangsa yang Pancasilais, juga dapat digunakan untuk tujuan sebagai alternatif sarana memperkuat pembentukan watak bangsa.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menemukan model internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran PPKn di SMA Negeri Kota Yogyakarta. Metode penelitian ini menggunakan metode R & D, selama 3 (tiga) tahun. Pada tahun pertama tujuan penelitian untuk menemukan model melalui penggalian masalah dan potensi yang dapat dilakukan guna menghasilkan model internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran PPKn di SMA. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive*, dengan kriteria informan penelitian yaitu (a) mereka yang

mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, (b) mereka yang terlibat secara langsung dalam pembelajaran PKn di Sekolah Menengah Atas, dan ditemukan 10 orang guru PPKn dari 7 (tujuh) SMA Negeri se kota Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, wawancara, kuesioner, *focus group disscusion* (FGD). Validasi data dilakukan dengan cross chek, yaitu mengecek data yang diperoleh melalui wawancara dengan dokumen maupun dokumentasi dengan kuesioner dan FGD. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode strategi eksploratoris sekuensial, dengan proses dari hasil pengumpulan data kualitatif pada tahap pertama yang diperoleh dari wawancara, dan dokumentasi, kemudian diikuti pengumpulan data melalui angket dan FGD dengan teknik analisis data kualitatif berupa teknik induktif.

Hasil penelitian ini ditemukan berbagai permasalahan dan potensi yang ada untuk disusun sebuah model pelembagaan nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran PPKn di sekolah. Identifikasi masalah yang ditemukan adalah cara yang dapat ditempuh dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila antara lain:

1. menjabarkan nilai-nilai Pancasila menjadi kata-kata atau kalimat yang jelas mudah dipahami dan menarik, sehingga mudah diimplementasikan,
2. menjabarkan nilai-nilai Pancasila menjadi kata-kata atau kalimat yang bisa dijadikan pedoman, jalan, kendaraan dan tujuan kehidupan setiap warganegara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
3. melalui lomba penulisan, kompetisi, lomba cerdas cermat PPKn antar kelas, guru didiklat, workshop, penataran terlebih dahulu tentang nilai-nilai Pancasila, dengan harapan selain guru memiliki

konsep, pemahaman yang benar tentang Pancasila sampai dengan belajar menerapkan nilai dalam kehidupan riil, guru benar-benar menjadi teladan;

4. pendidikan orang tua tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila, sehingga pemahaman orang tua benar tentang Pancasila;
5. pendidikan di masyarakat, dan masyarakat perlu memiliki pemahaman yang benar;
6. memberi gambaran situasi masyarakat, bangsa dan negara saat itu yang sesuai dengan materi pelajaran, bertanya kepada siswa tentang pandangan/pendapatnya terhadap situasi tersebut, nilai-nilai apa yang diabaikan/diingkari oleh masyarakat, bangsa dan negara dalam situasi tersebut;
7. guru dan siswa sama-sama memiliki peran aktif dalam upaya pelembagaan nilai-nilai Pancasila dengan kata lain peran keduanya menentukan supaya terbentuk karakter bangsa yang luhur sesuai Pancasila, dan sebagainya dengan potensi yang ditemukan antara lain bahwa pelembagaan nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan karena hal tersebut mendukūng tujuan dari mata pelalajaran PPKn yaitu "how to be a good citizen", dan *how to be a good citizen* Indonesia ini mengacu pada ideology negara Pancasila;
8. siswa di sekolah merupakan garda terdepan dalam pembentukan karakter bangsa, melalui pelembagaan di sekolah maka nilai-nilai Pancasila akan lebih jelas dan penerapannya bisa dipantau oleh guru.

Dari permasalahan dan potensi tersebut disusunlah sebuah model internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran PPKn di SMA se-Yogyakarta:

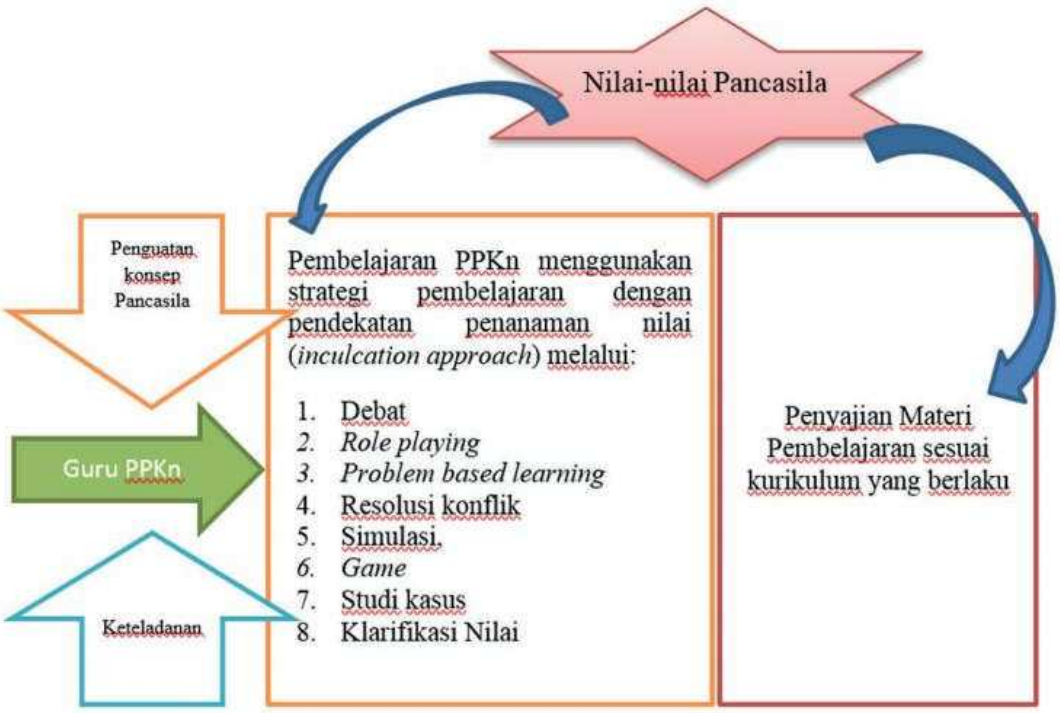

Internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran PPKn di Sekolah Menengah Atas dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan penanaman nilai (*inculcation approach*) yaitu sebagai suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai dalam diri seseorang (siswa) dengan menggunakan metode dalam proses pembelajaran, antara lain: keteladanan, penguatan positif dan negatif, simulasi, permainan peran, *value clarification technic* (*VCT*) dan berbagai metode pembelajaran.

Model internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran PPKn dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penguatan Konsep Pancasila

   Langkah pertama ini diisi dengan kegiatan diskusi dan pendalaman tentang Pancasila yang diikuti oleh guru-guru PPKn minilmal 5 orang guru PPKn dengan menghadirkan nara sumber ahli Pendidikan Pancasila. Dalam kegiatan diskusi didukung dengan modul tentang konsep Pancasila yang benar. Langkah pertama ini dilakukan dengan jangka waktu sehari.

2. Keteladaan

   Langkah kedua dilakukan setelah langkah pertama selesai dilakukan. Namun dapat dilakukan bersamaan dengan langkah pertama dalam jangka waktu sehari. Dalam kegiatan langkah kedua ini dilakukan dengan mendiskuskan macam-macam bentuk sikap dan perilaku yang tergolong teladan yang dipandu dengan modul tentang keteladanan. Diskusi dalam langkah kedua ini dilakukan minimal 5 orang guru PPKn.

3. Pembelajaran PPKn

   Langkah ketiga diisi kegiatan diawali dengan menyusun Rencana Pengembangan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan strategi pembelajaran yang dipilih dengan pendekatan penanaman nilai (*inculcation approach*). Guru saling memberi masukan atas RPP yang disusun untuk penyempurnaan. Setelah RPP disusun dan diberi masukan oleh sesama guru PPKn dilakukan pembelajaran PPKn di kelas sesuai Kurikulum yang berlaku.

Sebelum guru melakukan kegiatan pembelajaran, guru harus dapat bersikap dan berperilaku yang mencerminkan keteladanan yang ditunjukkan di hadapan siswa. Keteladanan dengan menjadi tokoh panutan yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan tulus. Keteladanan diwujudkan melalui pembiasaan di lingkungan sekolah. Namun demikian dalam kegiatan pembelajaran guru juga wajib membekali diri dengan memperluas wawasan konsep Pancasila dalam praktek. Oleh karenanya pendalaman konsep nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan workshop perlu dilakukan secara rutin kepada guru PPKn, dengan panduan modul tentang internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran PPKn.

Membudayakan Pancasila di Ruang Keagamaan Siswa SMK

SYUKRI FATHUDIN ACHMAD WIDODO;
BENNI SETIAWAN

Menyebut Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pasti akan muncul stigma buruk. SMK seringkali dianggap sebagai sekolah nomor dua. Sekolah ini lebih banyak masuk anak-anak nakal dan sulit diatur.

Angkapan tersebut mungkin berlaku sekian tahun lalu. Yaitu saat pemerintah belum mendorong SMK menjadi "sekolah rujukan". Tagline SMK bisa yang terus dikampanyekan sejak medio tahun 2010an mendorong banyak pemerintah daerah membangun sekolah kejuruan yang bagus. Dorongan pemda dan dukungan pemerintah pusat inilah yang kemudian muncul banyak SMK bagus di berbagai wilayah.

Salah satu tumbuh suburnya SMK bagus adalah di Pulau Sumatera. Khususnya di Kota Palembang. Kota yang dikenal dengan makanan khas pekempek itu mempunyai delapan SMK yang menjadi favorit bagi masyarakat. SMK di Palembang rata-rata gemuk. Artinya, SMK di

sana tidak pernah kekuarangan siswa. Bahkan, banyak SMK Negeri di Palembang yang harus membatasi siswa karena ketersediaan ruangan yang terbatas.

Orang tua siswa percaya bahwa dengan menyekolahkan putranya di SMK, mereka berharap agar menambah kreativitas, minat bakat dan hobi dan bakatnya akan tersalurkan. Kepercayaan yang tinggi itulah yang menjadikan SMK semakin dekat di hati masyarakat dan menjadi pilihan utama.

Penelitian ini mengambil sampel di SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 8 Palembang. Dua SMK itu mewakali keberadaaan delapan sekolah kejuruan yang ada di Ibu Kota Sumatera Selatan itu.

SMK yang terstigma negatif luntur saat melihat dua sekolah itu. Dua SMK itu dapat dijadikan model betapa sekolah kejuruan bukanlah tempat anak-anak nakal. Dua SMK itu pun memberi harapan bahwa sekolah kejuruan memang menjadi harapan bagi pemerintah. Sekolah kejuruan menjadi kawah candradimuka bagi mereka yang ingin mendapatkan ilmu dan keterampilan hidup untuk masa depan yang gemilang.

Penilaian positif ini tak lepas dari cara berpakaian dan penerapan disiplin di dua sekolah itu. Dari hasil observasi cara berpakaian siswa SMK di sana menggambarkan kesopanan dan kedisiplinan. Siswa mengenakan seragam dengan rapi. Rambut siswa laki-laki pun tertata rapi. Jika ada siswa laki-laki berambut "gondrong" maka pihak sekolah tak segan untuk menegur atau bahkan memotong rambut mereka di halaman sekolah. Model rambut yang rapi ini juga menjadi tanda siswa SMK dididik untuk menjadi pelajar yang terpelajar.

Demikian pula dengan kerapian seragam sekolah. Siswa di dua SMK itu menunjukkan karakter mulia dengan mengenakan baju sekolah yang rapi. Perempuan menggenakan rok panjang dan berjilbab bagi muslim. Bagi siswa non muslim sekolah juga mensyaratkan menggunakan rok

panjang. Seorang guru Pendidikan Pancasila mengatakan bahwa sekolah melarang siswi menggunakan rok pendek ke sekolah. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi pelecehan seksual.

Cara penggunakan yang rapi dan tertata ini menunjukkan bahwa siswa SMK siap bersaing dan berkompetisi sehat dengan lulusan sekolah menengah atas dan sederajat. Penggunaan seragam yang rapi pun akan menggubur stigma bahwa siswa SMK sulit diatur dan cenderung bebas dalam proses pembelajaran.

SMK di Palembang telah berhasil "mendisiplinkan" siswanya bermula dari cara berpakain. Siswa SMK di sana tidak sekadar mendidik pendidikan keahlian vokasi, namun telah dibekali softskill memasuki dunia kerja yang membutuhkan ikitad baik.

Itikad baik itu perlu pembudayaan. Pembudayaan menurut Driyarkara (A. Sudiarja dkk ed, 2006) adalah proses pengangkatan diri sendiri di atas kodrat alam dan dunia materia. Sudah barang tentu pengangkatan itu membutuhkan pengaturan.

Model Penanaman Nilai Melalui Kegiatan Sekolah

Pengaturan itu dapat bermulai dari pelembagaan sistem pembelajaran yang baik. Bisa juga berupa itikad guru, siswa, pimpinan sekolah, dan masyarakat menyokong pembudayaan dan pendidikan yang baik.

Dalam konteks itu, SMK di Palembang telah mempraktikan kerja keadaban itu. Salah satu pintu masukkan adalah pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Pembelajaran PAI misalnya dengan turunan kegiatan keagamaan yang dilakukan di sekolah menjadi pintu masuk penanaman nilai kebangsaan. Nilai kebangsaan itu termanifestasi dalam Pancasila.

Pancasila tidak sekadar sebagai nilai kebangsaan. Pancasila perlu diwujudkan dalam kehidupan keseharian. Dengan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan maka kebangsaan akan kukuh dan sehat. Pancasila tidak sekadar menjadi ideologi bangsa, namun menjadi spirit kebangsaan yang hidup (*living*) di tengah masyarakat. Menghidupkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pun akan dapat menjamin kebangsaan yang lebih baik. Nilai Pancasila akan menjadi laku seseorang dan bermasyarakat dalam kehidupan yang lebih luas.

"Sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa dan dasar berIndonesia, Pancasila adalah cerminan jati diri bangsa, Pancasila adalah representasi "kebinekaan" yang tersebar di seluruh penjuru persada nusantara. Dengan adanya Pancasila, perbedaan-perbedaan yang kita miliki dapat disinergikan, Pancasila mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut dan menyatukan kita dalam sebuah kebersamaan sebagai sebuah negara bangsa" (Agustinus Edward Tasma dan Heru Santosa, 2006).

Pembekalan nilai Pancasila itu perlu tertanam sejak dini di bangku sekolah. Sekolah menjadi medium yang baik bagi penanaman nilai itu. Pasalnya, di sekolah siswa dan guru berdialog dalam ruang intelektual dan teori. Guru dan siswa dapat mengembangkan dan mempraktikan Pancasila setelah mendapatkan teori yang ada.

Selain itu, praktik keseharian yang dilakukan oleh siswa dan atau masyarakat dapat dibawa ke ruang kelas untuk didiskukan dan memasukkan dalam pembahasan nilai Pancasila. Melalui dua hal tersebut, nilai Pancasila dapat tergali dari teori-teori yang ada sekaligus dari praktik keseharian masyarakat. Dua hal itu juga akan menguatkan nilai Pancasila. Pancasila benar-benar dapat hidup. Pancasila tidak hanya menjadi doktrin namun juga kesadaran masyarakat untuk hidup dalam bingkai keadaban.

Keselarasan tersebut tidak lain sebagai upaya untuk mensinkronkan kehidupan Pancasila dan keagamaan masyarakat. Dua hal tersebut tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Dua hal tersebut seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi satu sama lain.

Mengapa harus dikaitkan? Menurut Nur Kholik Ridwan (2013) "Pancasila menjadi dasar bangsa kita yang telah mempertemukan semua anak bangsa, dan terbukti sampai saat ini mempersatukan, terlepas dari tafsiran dan implementasinya terjadi kekurangan-kekurangan; dan terpenting karena ia menjadi dasar dari pendidikan nasional, dasar negara, dan pada saat yang sama menjadi bagian dari kritik mendasar dari kelompok tertentu, di luar garis Pancasila".

Praktik nilai Pancasila dan keagamaan itu pun terlaksana dengan baik di SMK. Siswa SMK di Palembang tertanam nilai Pancasila melalui kegiatan pembelajaran sehari-hari melalui pembiasaan. Salah satu pembiasaan itu berupa penanaman nilai karakter bangsa melalui upaca bendera hari Senin dan hari-hari besar yang lain, seperti 2 Mei (peringatan hari Pendidikan Nasional) 17 Agustus (peringatan Hari Kemerdekaan) dan 1 Oktober (peringatan hari Kesaktian Pancasila).

Upacara hari Senin dan hari-hari besar lainnya menjadi salah satu pintu masuk nilai Pancasila. Nilai Pancasila masuk ke benak siswa dengan menumbuhkan rasa cinta tanah. Rasa cinta itu tergambar dalam menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, penghormatan terhadap Bendera Merah Putih, dan nilai kedisiplinan. Dalam upacara bendera, siswa mendapat pendidikan untuk datang tepat waktu, dan mengikuti seluruh rangkaian upacara.

Meminjam istilah Y Ch Nany S (2009), upacara bendera dengan segala rangkaiannya, mulai dari baris berbaris, membaca teks Pancasila dan UUD 1945, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan penghormatan bendera adalah salah satu medium untuk menyerap nilai-nilai Pancasila

tanpa adanya rasa tertekan dan terbebani. Siswa mengenal Pancasila tanpa harus dengan teoritasi yang sulit dipahami. Pengenalan Pancasilan melalui praktik inilah yang akan mudah membekas dalam ingatan siswa.

Hal demikian juga dilakukan di SMK N 2 dan SMK N 8 Palembang. Upacara bendera hari Senin menjadi sebuah kebiasaan. Guru dan siswa secara bersama mendedikasikan dirinya dalam penciptaan ruang dialogis bernama upacara. Melalui upacara juga ditanamkan nilai-nilai karakter melalui amanat pembina upacara. Di sinilah siswa dalam belajar tentang Pancasila melalui kegiatan upacara bendera.

Lebih lanjut, penanaman nilai Pancasila itu tidak hanya berlaku bagi siswa, namun juga guru. Guru datang lebih pagi dibandingkan siswa untuk menyambut mereka di pintu gerbang sekolah. Guru dengan senyum merekah menyambut kehadiran siswa. Mereka adalah anak-anak bangsa yang akan menjadi tulang punggung bangsa Indonesia di masa yang akan datang.

Prinsip senyum, sapa, salam, dalam bidang bidang pendidikan di SMK tergambar dengan baik. Guru dan pimpinan sekolah memberi contoh dalam proses itu. Penyambutan di gerbang sekolah menjadi ruang dialog pertama dalam menanamkan nilai kebangsaan. Menyambut dengan kehangatan akan mendorong siswa betah dan nyaman dalam belajar. Beban pelajaran akan menjadi ringan saat guru terus mengembangkan senyum merekah kepada siswanya. Senyum itulah yang juga akan menguatkan rasa antara guru dan siswa.

Guru akan menjadi orang tua siswa di sekolah. Guru akan mewujud menjadi orang yang mampu mengolah segala potensi yang dimiliki oleh seorang siswa. Siswa pun akan berkembang dan mengembangkan potensi lain sebagai bekal kehidupan siswa di masa yang akan datang.

Hal tersebut sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Skourdoumbis (2014). Ia menjelaskan bahwa, apa yang dilakukan oleh guru memiliki

dampak lebih besar terhadap keberhasilan siswa dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya (Vinta Larasati dan Abdul Gafur, 2018).

Kehadiran guru yang lebih pagi dari siswanya, mengajarkan kepada mereka bahwa kehadiran siswa sangat dibutuhkan. Siswa belajar bahwa sekolah menjadi rumah kedua, sebagai tempat belajar bersama teman dan guru (orang tua kedua). Pembelajaran yang didahului dengan sapaan hangat, senyum, berjabat tangan, menempuk pundak, dan seterusnya akan mendorong siswa lebih berprestasi.

Pembinaan karakter kebangsaan tidak hanya dilakukan saat upacara bendera hari Senin. Pembinaan karakter kebangsaan juga dilakukan di hari-hari lain. Misalnya, pada hari Selasa dan Kamis, yaitu pembinaan karakter kebangsaan melalui kegiatan keagamaan, yaitu melalui hafalan surat-surat pendek.

Melalui surat-surat pendek itu siswa diajak untuk mengenal nilai Islam berdasarkan tafsir sederhana dari surat-surat yang ada di dalam juz 30 itu. penanaman ini dilakukan oleh guru PAI bekerjasama dengan guru PPKn dan Bimbingan Konseling.

Tafsir sederhana itu pun dikaitkan dengan etos kehidupan. Sehingga siswa mudah memahami dan mengerti kandungan ayat-ayat al-Quran. Sikap ikhlas dan rela berkorban misalnya, menjadi perbincangan dalam menghafal surat al-Ikhlas. Keikhlasan seseorang untuk menolong tanpa harus diminta itulah yang terus digaungkan agar siswa mempunyai akhlak yang baik dalam kehidupan.

Selanjutnya pada hari Rabu, pelaksanaan nilai kebangsaan (Pancasila) dengan membariskan siswa di depan kelas sebelum masuk kelas. Mereka diminta untuk menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Menyanyikan lagu-lagu nasional tidak hanya bertujuan agar mereka hafal, namun diharapkan mereka dapat meneladani para pahlawan yang telah berjuang membangun bangsa dan negara.

Penanaman karakter melalui lagu-lagu itulah yang akan mendorong siswa semakin cinta terhadap tanah air. Mereka diajak untuk dapat menyanyikan lagu nasional di tengah derasnya lagu-lagu ala anak muda yang sering didengar. Sekolah berharap dengan menyanyikan lagu itu, siswa dapat mengambil pelajaran dari setiap lirik lagu yang heroik.

Sedangkan pada hari Jumat, siswa diajak untuk membaca al-Quran dengan pengeras suara. Membaca Yasin menjadi bagian yang tak dapat dilepaskan dari kegiatan hari Jumat di SMK. Pembacaan ini biasanya dipimpin oleh pengurus Kerohian Islam (Rohis). Secara bergantian siswa diajak untuk berani membaca al-Quran dengan pengeras suara agar kemudian diikuti oleh siswa yang lain.

Model pembiasaan ini sebagai upaya agar siswa mempunyai kecintaan terhadap agama dan ritual keagamaan yang ada. Pembacaraan surat Yasin setiap hari Jumat menjadi semacam cara sekolah menanamkan nilai karakter keagamaan.

"Pada hari Jumat melalui rohis di SMK 8 membiasakan membaca surat yasin melalui TOA yang ada di kantor guru dari pukul 06.40 WIB kadang dilaksanakan pukul 07.00 WIB. Siswa lainnya menyimak di kelas dalam artian boleh mengikuti. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan selang-seling, seperti kegiatan a) hari Senin penanaman karakter bangsa seperti upacara bendera, b) hari Selasa penanaman karakter keagamaan yaitu pembacaan surat-surat pendek untuk saat ini saya bina seperti khataman al-Quran dari surat al-Takasur sampai surat al-Ikhlas, c) hari Rabu kembali lagi kepada penanaman karakter kebangsaan lagi yaitu anak-anak dibariskan di depan kelas masing-masing untuk menyanyikan lagu wajib nasional dan mars SMK 8, d) Hari kamis penanaman karakter keagamaan lagi yaitu membaca surat-surat pendek, e) hari Jumat membaca surat yasin yang dipandu tadi, f) sabtu karakter bangsa lagi" (Wawancara dengan Guru PAI SMK N 8).

Tidak hanya di SMK N 2, praktik serupa juga dilakukan di SMK N 2. SMK N 2 juga memulai kegiatan pada pukul 06.40 WIB. Kedatangan siswa juga disambut hangat oleh dewan guru yang berjejer rapi mulai dari pintu gerbang sekolah hingga halaman sekolah. Setelah bel berbunyi mereka mempersiapkan al-Quran dan memulai tadarus menjelang jam pelajaran.

"Untuk kegiatan keagamaan setiap pagi pukul 06.40 WIB siswa masuk sudah disambut oleh guru. Kemudian mereka memulai tadarus al-Quran. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Senin-Jumat karena kita *full day*" (Wawancara dengan guru PAI SMK N 2 Palembang).

Kegiatan tadarus ini dipandu oleh guru dan menjadi kegiatan rutin sebelum mengikuti jam pembelajaran. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun semangat keagamaan sebelum memulai kegiatan pembelajaran.

Penanaman nilai Pancasila ini melalui tadarus setiap hari juga diakui oleh Guru PPKn SMK N 2 Palembang. Menurutnya salah satu penanaman nilai Pancasila adalah dengan mengaji dan mengajak mereka dewasa.

"Membiasakan mengaji sebelum proses belajar mengajar, selain itu siswa juga ditanya pengalaman-pengalaman yang dijumpai di jalan sebelum masuk pada materi. Bukan hanya sekadar teori di SMP, sikap dan perilaku juga diimplementasikan dan menjadi penilaian guru. Hal ini yang menjadikan berkarakter, jadi siswa memahami dan mengerti. Jika siswa tersebut terlibat dalam tawuran atau berkelahi point sikap mereka akan menjadi bertambah. Jadi mereka secara otomatis berubah".

Apa yang dilakukan oleh guru PPKn di atas sejalan dengan pendapat An Hannum dan Sargent (2008). Mereka berpendapat "memperlakukan peserta didik dengan adil turut menyumbangkan pengaruh terhadap keberhasilan yang akan dicapai oleh peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan persepsi siswa yang diperlakukan adil dan sugestif serta gaya mengajar guru yang interaktif di kelas dapat membantu peserta

didik untuk berprestasi" (Vinta Larasati dan Abdul Gafur, 2018).

Guru yang interaktif menanyakan apa yang terjadi pada diri siswa melalui kegiatan pengamatan kecil akan menguatkan perspektif mereka. Perspetif itulah yang akan membudahkan mereka mengurai permasalahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

Sikap adil dengan memberikan teladan terhadap siswa yang melakukan kesalahan juga menjadi penting. Artinya, dalam praktik yang dilakukan oleh siswa, siswa diajak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah. Kesalahan itu tidak perlu dihukum dengan kekerasan, cukup menyadarkan mereka bahwa perbuatan itu bukanlah karakter seorang siswa. Model pendekatan ini akan lebih efektif menyadarkan siswa daripada memberi hukuman yang kurang mendidik.

Lebih lanjut, guru PPKn SMK N 2 Palembang mengaku bahwa untuk penanaman kejujuran lumayan susah, tetapi perlahan berubah misalnya dari yang semula brutal lambat laut membaik. Perubahan sikap itu ditanamkan sejak awal masuk sekolah.

"Diawal masuk sudah ditegaskan untuk aturan pemakaian seragam semisal yang perempuan baju harus masuk dan pakai dasi. Jika tidak itu tandanya hamil. Dengan kata itu siswa menjadi takut. Tetapi juga ada yang melanggar tetapi hanya 1 atau 2. Dan jika mereka salah kostum mereka harus meminta tanda tangan wali kelas jika sudah baru boleh masuk kelas", ujar guru PPKn SMK N 2 Palembang.

Pada pembelajaran PPKn mewajibkan membawa al-qur'an. Dalam kegiatan tadarus seluruh guru tanpa terkecuali ikut memandu jalannya tadarus al-Quran di kelas. Sedangkan jika ada materi praktek di bengkel diganti menjadi penanaman karakter bangsa di awal sebelum masuk bengkel.

Dalam praktik menerapkan nilai kejujuran, guru PPKn menerapkan dengan bertanya, misalnya kapan terakhir menonton film porno dan

merokok?

"Mereka juga jujur, karena hal ini berkaitan dengan nilai sikap. Jika mereka jujur akan mendapatkan nilai sikap A, dan mereka tidak bisa berbohong jika berhadapan dengan saya. Kalau di kelas PPKn mereka kami suruh untuk menulis janji di kertas, dan surat itu berlaku selama menjadi siswa SMK. Hal seperti ini sudah kami terapkan sejak di kelas X jadi ketika naik kelas mereka sudah begitu mudah dan paham karena pondasi telah dibangun dengan baik", ujarnya.

Praktik pembelajaran yang dilakukan oleh guru PPKn di atas sejalan dengan pendapat Bagus Mustakim (2011). Bagus menyatakan pembelajaran diarahkan pada pencarian etos spiritual yang bersifat universal dari berbagai sumber belajar yang telah disediakan. Etos universal ini kemudian diimplementasikan dalam karakter tertentu yang bersifat khusus.

Etos kerja universal yang tergali dari pengalaman dan praktik keseharian akan menjadi etos khusus yang dapat mengarahkan pada karakter yang lebih baik. Seorang guru sekali lagi perlu kreatif agar siswa dapat mempraktikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut, kegiatan membaca kitab al-Quran tidak hanya wajib bagi siswa muslim. Siswa nonmuslim juga mengikuti kegiatan serupa dengan dipandu oleh guru nonmuslim.

"Jadi siswa muslim melakukan tadarus dan untuk yang nonmuslim mereka juga beribadah menurut agama mereka masing-masing dan juga dipandu oleh pemandu yang nonmuslim. Kami mempunyai dua pemandu satu Katolik satunya Budha. Jadi ketika yang muslim tadarus yang nonmuslim juga ikut di dalam kelas" (Wawancara dengan guru PAI SMK N 2 Palembang).

Apa yang dipraktikan di SMK N 2 Palembang menegaskan bahwa nilai Pancasila telah menjadi laku keseharian. Sekolah memfasilitasi

siswa untuk meneguhkan keyakinan keagamaannya sebagaimana amanat dalam Sila Pertama Pancasila. Fasilitasi itu tidak hanya bagi yang mayoritas saja dalam hal ini Muslim. Namun, bagi siswa nonmuslim juga diharapkan memulai kegiatan dengan membaca kitab sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Model tadarus kitab yang dipandu oleh guru masing-masing ini menegaskan bahwa nilai Pancasila dilaksanakan dengan baik di SMK N 2 Palembang.

Sebagaimana sekolah lain, SMK N 2 Palembang juga memberi jam istirahat lebih saat memasuki waktu salat Dhuhur. Pemberian waktu istirahat lebih ini untuk menjamin hak beragama bagi siswa muslim. Siswa muslim mendapat fasilitas masjid yang cukup memadai di SMK N 2 Palembang. Masjid yang cukup besar, luas, dan bersih ini menjadi tempat bagi siswa untuk melaksanakan salat Dhuhur berjamaah. Salat Dhuhur berjamaah juga menjadi sarana penanama nilai karakter religius bagi siswa. Siswa dilatih untuk salat berjamaah sebagai bekal bagi mereka mengembangkan sikap yang sama di luar sekolah.

Pendidikan salat Dhuhur berjamaah juga menjadi sarana efektif untuk mendisiplinkan mereka. Proses disiplin dengan salat Dhuhur berjamaah bersama guru dan karyawan sekolah akan memudahkan pembentukan karakter siswa SMK. Karakter siswa SMK pun akan jauh dari stigma nakal dan ugal-ugalan. Pasalnya, mereka telah terbiasa hidup tertib dengan menjalankan salat berjamaah, baik di sekolah maupun di rumah.

"Untuk di SMK 2 kami memberikan jam untuk mereka beribadah, jadi kita memberikan 2 waktu istirahat untuk siswa pertama pukul 10.00 WIB dan kedua pukul 12.30-13.00 di waktu istirahat kedua ini siswa mengunakannya untuk beribadah" (Wawancara dengan guru PAI SMK N 2 Palembang).

Pembiasaan karakter religius itu pun menular dalam kegiatan akademis. Artinya, kegiatan akademis selalu diawali dan diakhiri dengan

berdoa. Uniknya, SMK N 2 siswa nonmuslim ikut mengerjakan tugas keagamaan bagi siswa muslim, selain itu anak nonmuslim juga hafal doa hendak belajar.

Hal tersebut bukan paksanaan atau karena perintah dari guru. Siswa nonmuslim menjadi bisa karena mereka setiap hari mendengar dan ikut mempraktikan. Siswa nonmuslim pun tidak keberatan dengan ini. Pasalnya, ia malah semakin tahu bagaimana agama Islam. Ia pun semakin yakin dengan keyakinan yang ia miliki. Pasalnya, teman muslim memberikan pelajaran yang baik dalam berteman. Mereka tidak membedakan ini siswa muslim dan nonmuslim. Inilah praktik nilai Sila Pertama dan Sila Keempat yang telah menjadi kebiasaan siswa di SMK N 2 Palembang.

Penanaman Nilai Melalui Kegiatan Ektrakurikuler

Penanaman nilai Pancasila melalui kegiatan keagamaan juga dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Menurut Permendikbud nomor 62 tahun 2014 tentang Ektrakurikuler menyebutkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik diluar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler dibawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan, bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

Kegiatan ektrakurikuler itu terwujud dalam kegiatan Pramuka, Paskibra, Rohis, dan seterusnya. Kegiatan Rohis menjadi salah satu pintu masuk penanaman nilai Pancasila melalui kegiatan keagamaan.

Ekstrakurikuler yang cukup menonjol dalam penanaman nilai Pancasila dalam kegiatan keagamaan adalah Rohis. Rohis di SMK memang terasa asing dan janggal. Namun itu ada di Palembang. Bahkan guru

mengaku peran Rohis cukup besar dalam penanaman nilai kebangsaan.

"Peran Rohis itu sangat membantu, mau tidak mau SMK punya Rohis itu jadi agak aneh di kalangan SMK, karena minimnya pengetahuan ilmu keagamaan, mereka semangat mencari ilmu sendiri. Malah siswa SMK itu lebih unggul dari siswa SMA", ujar guru PAI SMK N 8 Palembang.

Rohis biasanya memang berkembang di Sekolah Menengah Atas (SMA). Rohis di SMA biasanya menjadi ektra favorit bagi siswa. Kegiatan mereka cukup beragam. Namun, saat Rohis masuk SMK dan menjadi ektra bagi siswanya ini adalah sebuah lompatan dan model yang baik. Apalagi program kerja Rohis di SMK tidak kalah dibandingkan dengan Rohis di SMA.

Program kegiatan Rohis seperti *liqo'* (pertemuan dalam kelompok kecil), tadarus bersama, tausiyah bergilir, dan seterusnya. Rohis yang selama ini identik dengan kegiatan keagamaan yang terindikasi radikal tidak muncul di SMK N 2 dan SMK N 8. Mereka menjalankan program kerja tanpak terjebak pada formalisme agama. Mereka membangun nilai keagamaan yang bersinergi dalam satu tarikan nafas—meminjam istilah Buya Syafii (2009), dengan nilai kebangsaan Pancasila. Walaupun hal ini perlu penelitian mendalam, namun, dalam temuan awal dari penelitian ini aktivis Rohis mampu mengembangkan nilai kebangsaan yang baik.

Hal tersebut tergambar dari inisiatif aktivis Rohis untuk mengumpulkan dana bagi korban bencana alam di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Aktivis Rohis mengumpulkan sumbangan dengan mengedarkan kotak dari kardus dari kelas ke kelas. Kemudian dari hasil uang itu kemudian diserahkan melalui Koran Sumatera Ekspress.

Tidak hanya itu, kegiatan mingguan Rohis juga mengumpulkan dana untuk siswa yang terkena musibah. Dana itu dikumpulkan setiap Jumat melalui kegiatan infaq. Dana itu dikumpulkan dan dikelola dengan baik oleh pengurus Rohis. Jika ada orang tua atau saudara dari siswa

yang meninggal dunia atau mendapat musibah, maka dana itu akan dikeluarkan untuk meringankan beban siswa yang lain.

"...siswa juga dibiasakan infaq setiap hari Jumat. Penyaluran uang infaq SMK N 8 dijadikan kas untuk nantinya diberikan kepada siswa yang walinya meninggal dan juga disalurkan untuk bencana dan sebagainya atau sisa-sisa uang itu nanti d berikan kepada panti asuhan di ujung Ramadan. Siswa juga berinisiatif menggalang dana untuk gempa di Lombok yang disalurkan melalui Sumatera Ekspres (Sumeks)" (Wawancara dengan guru PAI SMK N 8 Palembang).

Apa yang dilakukan oleh siswa dan aktivis Rohis SMK N 8 itu sesuai nilai karakter Pancasila Sila Kedua. Mereka mempraktikan hidup bermartabat dengan saling membantu, meringankan beban orang lain, dan turut serta merasakan penderitaan orang lain dengan membantu membantu meringankan beban.

Dengan demikian, kegiatan Rohis menjadi salah satu pintu masuk menanamkan nilai Pancasila. Mereka bersama belajar Pancasila dengan praktik ringan mingguan dengan mengumpulkan infaq untuk membantu orang lain.

Kegiatan Rohis pun juga ada di SMK N 2 Palembang. Namun, kegiatan Rohis di sini masih belum tertata dengan rapi. Kegiatan Rohis masih bersifat kondisional dan insidental. Pembina Rohis pun dikelola secara langsung oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Berbeda dengan SMK N 8 yang dikelola oleh guru PAI.

Guru PAI di SMK N 2 akan dilibatkan dalam proses pemantauan saja. Namun, kegiatan utama tetap harus sepengetahuan dan mendapat persetujuan dari wakil kepala sekolah.

Guru PAI di sini memang belum banyak diberikan peran. Hal ini dikarenakan mereka rata-rata guru muda dan belum PNS. Mereka adalah guru honorer, sehingga kewenangan mereka dalam proses pembinaan

kesiswaan masih sangat minim.

Selain itu penanaman nilai Pancasila melalui kegiatan keagamaan juga mewujud dalam Baca Tulis Al-Quran (BTA). BTA merupakan ekstrakurikuler untuk menjaring siswa yang belum bisa membaca al-Quran. BTA adalah upaya penguatan nilai Sila Pertama dan bermuara mewujudkan siswa berkarakter dan bermoral.

SMK N 8 misalnya, kini membina 30 siswa yang belum bisa membaca al-Quran. Program ini dilakukan sebagai kelanjutan sistem seleksi siswa. Saat mereka mengaku belum bisa membaca al-Quran, maka sekolah akan menyediakan fasilitas/ektrakurikuler BTA agar mereka dapat membaca al-Quran dengan baik. Sebagai catatan, hampir seluruh SMK di Palembang memasukkan membaca al-Quran dalam proses seleksi siswa. Walaupun ini tidak menjadi penilaian utama, namun sekolah berharap siswanya mampu membaca al-Quran. Saat belum bisa, maka sekolah membuka ruang untuk siswa yang belum membaca dengan ektra BTA.

Membaca al-Quran merupakan salah satu karakter dalam nilai religius. Religius sebagai salah satu nilai dalam pendidikan karakter dideskripsikan oleh Kementerian Pendidikan Nasional (2010) sebagai sebuah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.

Melalui kegiatan ektrakurikuler, siswa diajak untuk hidup toleran dan rukun. Rohis dan BTA menjadi salah satu pintu masuk agar nilai Pancasila mewujud dalam kehidupan sehari-hari. Mereka pun dapat bersikap dan bertindak berdasarkan nilai agama dan Pancasila. Agama dan Pancasila pun tidak perlu dipertentangkan satu sama lain, karena mereka saling berhubungan satu sama lain.

Kegiatan ektrakurikuler juga merupakan salah satu cara menyeimbangkan penanaman karakter nilai-nilai Pancasila dan keagamaan. Pasalnya,

melalui kegiatan ektra, siswa dapat mengembangkan potensinya, yang mungkin belum terwadahi saat jam-jam pelajaran.

Penutup

Kesimpulan dalam penelitian awal ini adalah penanaman nilai Pancasila dilakukan melalui kegiatan keagamaan yang terstruktur. Kegiatan itu dimulai dari masa penerimaan siswa dengan menjaring mereka yang belum bisa membaca al-Quran dan memfasilitasinya dengan BTA; kegiatan senyum, sapa, salam, yang dipraktikan setiap hari; pembiasaan tadarus al-Quran jelang pembelajaran sekolah dan atau mata pelajaran tertentu; dan melalui kegiatan ekstrakulikuler, seperti Rohis.

SMK Negeri di Palembang telah mempraktikan hidup baik dengan mensinergikan kegiatan keagamaan dengan penanaman nilai Pancasila dalam diri siswa. Melalui kegiatan itu SMK tidak pernah sepi penimat karena orang tua percaya kepada sistem pendidikan di sekolah kejuran ini.

SMK Negeri di Palembang juga telah mendorong praktik baik. Bahwa keagamaan tidak perlu dipertentantang nilai Pancasila. Mereka melakukan praktik keagamaan yang kemudian disinergikan dengan nilai Pancasila.

Saran untuk sekolah perlu memberi ruang lebih kepada guru PAI untuk mendampingi kegiatan Rohis dan pengembangan kegiatan keagamaan lainnya. Pengangkatan guru PAI honorer menjadi tenaga tetap atau PNS pun menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah dan pusat. Saat guru PAI telah menjadi PNS atau tenaga tetap, maka mereka akan menjadi inisiator dan penggerak penanaman nilai Pancasila melalui kegiatan keagamaan.

Selanjutnya adalah sinergi semua guru dalam prakti penanaman nilai Pancasila. Selain guru PPKn dan PAI perlu menjadi teladan bagi siswa dalam penanaman nilai Pancasila.

Implementasi Nilai-nilai Pancasila dan Keteladanan Pendidikan Ki Hajar Dewantoro dalam Pendidikan Karakter di Era Revolusi Industri 4.0

SISWANTOYO;
SB. PRANATAHADI;
OKKY INDERA P.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini menyisakan beberapa persoalan yang perlu perhatian. Tidak dipungkiri masyarakat modern telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahun dan teknologi untuk menjadi alternatif penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari (Iptek sebagai produk budaya), namun pada kondisi lain ilmu pengetahuan dan teknologi canggih tersebut kurang mampu menumbuhkan moralitas (akhlak) yang mulia. Perkembangan teknologi saat ini, yang ditandai hadirnya zaman modern, termasuk di Indonesia diikuti oleh gejala dekadensi moral yang benar-benar berada pada taraf yang memprihatinkan. Akhlak mulia seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, tolong menolong, dan *tepo*

seliro (toleransi) sudah mulai terkikis oleh penyelewengan, penipuan, permusuhan, penindasan, saling menjatuhkan, mengambil hak orang lain secara paksa dan sesuka hati, dan perbuatan-perbuatan tercela yang lain. Kemerosotan moral atau yang sering kita dengar dengan istilah 'dekadensi moral' sekarang ini tidak hanya melanda kalangan dewasa, melainkan juga telah menimpa kalangan pelajar yang menjadi generasi penerus bangsa. Orang tua, guru, dan beberapa pihak yang berkecimpung dalam bidang pendidikan, agama dan sosial banyak mengeluhkan terhadap perilaku sebagian pelajar yang berperilaku di luar batas kesopanan dan kesusilaan, semisal: mabuk- mabukan, tawuran, dan penyalahgunaan obat terlarang, bergaya hidup *hedonis* dan *hippies* di Barat, dan sebagainya. Dengan begitu, bukanlah tanpa bukti untuk mengatakan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memiliki konsekuensi logis terciptanya kondisi yang mencerminkan kemerosotan akhlak (dekadensi moral) (Haidar Putra Daulay, 2012:141).

Menurut Zakiah Daradjat (1979:10-20), kejadian sebagaimana dipaparkan di atas disebabkan oleh beberapa faktor yang memengaruhi cara berpikir manusia modern. Faktor-faktor penyebab kejadian tersebut antara lain kebutuhan hidup yang semakin meningkat, rasa individualistis dan egois, persaingan dalam hidup, keadaan yang tidak stabil, dan terlepasnya pengetahuan dari nilai-nilai pancasila. Sedangkan menurut Syed Sajjad Husain dan Syed Ali Ashraf (2000:23) berpendapat bahwa saat ini masyarakat tengah mengalami krisis moral dan kejiwaan sebagai akibat dari gelombang krisis materialisme. Tradisi hidup materialistik tidak menjadikan moralitas sebagai anutan, akan tetapi kekayaan yang dijadikan ukuran kemuliaan dan kehormatan.

Ada dua solusi untuk mengatasi dekadensi moral : (1) nilai-nilai pancasila, dan (2) Keteladanan Pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Konsep pendidikannya Ki Hajar Dewantara menampilkan kekhasan kultural

Indonesia dan menekankan pentingnya pengolahan potensi-potensi siswa/mahasiswa secara terintegratif. Pada titik itu pula, konsep pemikiranya sungguh kontekstual untuk kebutuhan generasi Indonesia pada masa ini. Kini gagasan dan konsep Ki Hadjar Dewantara, yang begitu berharga dan humanis pada masa dulu, menjadi terasa begitu klasik dan nyaris di lupakan. Itu lantaran pendidikan di Indonesia pada masa kini lebih dominasi kognitif dan jauh dari nuansa terintegratif sehingga reduktif terhadap hakekat pendidikan dan kemanusiaan. Karena ada beberapa pihak yang meyakini bahwa hal itu terkait dengan upaya lembaga pendidikan dalam praksisnya yang terlalu terfokus pada upaya untuk menyiasati ujian sekolah ataupun Ujian Nasional (UN), dan bukan untuk membentuk manusia yang otentik, berkepribadian dan peka terhadap dunia di luar sekolah.

Dengan mengetahui keadaan dan permasalahan generasi muda yang rendah nilai-nilai budaya serta menimbulkan sikap-sikap negatif, oleh karena itu kiranya perlu diadakanya penelitian lebih lanjut serta pembuatan edukasi terkait keteladanan untuk menjadi solusi dari permasalahan generasi muda. Berawal dari hal tersebut, maka implementasi nilai-nilai pancasila dan keteladanan pendidikan Ki Hajar dewantoro dalam pendidikan karakter perlu diungkap lebih jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap berbagai macam implementasi nilai-nilai pancasila dan keteladanan pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Dengan demikian hasil kajian ini akan bermanfaat untuk referensi keilmuan dan kajian ilmiah mengenai implementasi Pancasila dan Pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Disamping itu juga dapat digunakan tenaga pendidik, sebagai acuan untuk meningkatkan, memperbaiki kualitas moral generasi muda sesuai dengan nilai pancasila. Bagi siswa, dapat digunakan sebagai referensi dan informasi untuk refleksi diri.

Implementasi Nilai-nilai Pancasila

Dalam Pancasila terkandung berbagai makna yang perlu dipahami setiap warga negara Indonesia, adapun makna yang dimaksud adalah :

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa: Bangsa Indonesia percaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan adalah pencipta alam semesta beserta segala isinya baik benda mati maupun benda hidup.
2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab: Bangsa Indonesia adalah manusia yang memiliki martabat yang tinggi. Sehingga keputusan yang di ambil harus berdasarkan norma yang obyektif.
3. Sila Persatuan Indonesia: Bersatunya bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan merupakan wujud paham kebangsaan.
4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan: Kerakyatan berarti sekelompok orang mendiami wilayah Indonesia Kerakyatan berarti juga kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat Hikmat Kebijaksanaan berarti sikap yang dilandasi dengan penggunaan akal pikiran yang sehat selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan, Permusyawaratan berarti tata cara yang khas Indonesia untuk merumuskan dan memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan berdasarkan mufakat.
5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan dan lapisan masyarakat seperti halnya dalam politik, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial–budaya. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia baik yang berdiam di wilayah Indonesia maupun yang berdiam diluar wilayah Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia ialah

pencapaian masyarakat adil dan makmur.

Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Adapun pengamalan nilai-nilai Pancasila dijelaskan sebagai berikut.

1. Bersikap Sopan dan Menghormati: Kesopanan, mengedepankan saling pengertian, keharmonisan, kedamaian, kerendah-hatian, kerjasama, hormat-menghormati, dan rasa keadilan. Kesopanan dapat terlihat pada sikap dan perilaku: a). untuk mengucapkan "tolong" dan "terimakasih", membuka /menutup pintu bagi orang lain, dan meminta tolong dari pada menyuruh. b). Mampu membawa diri dalam kehidupan sosial: cara kita berbicara atau bertindak kepada orang yang lebih tua, orang tua atau Guru. c). Memikirkan orang lain : Selalu berusaha untuk peduli bagaimana perasaan orang lain atau bagaimana pendapat orang lain dalam ucapan maupun tindakan kita. Dan memperlakukan orang lain dengan baik dan sopan. d). Memberi pujian atau menghormati orang lain
2. Integritas

   Dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan harus mempunyai kesadaran akan kedua hal tersebut. Harus selalu mengikuti kata hati dan nilai-nilai yang ada dalam diri dan juga dalam lingkungan tempat tinggal kita dengan tindakan yang konsisten. Jika seseorang menerapkan integritas dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pergaulan dengan orang lain, orang-orang akan belajar menghargai diri, seseorang tersebut sebagai orang yang dapat diandalkan, bertanggungjawab, dan jujur. Integritas dapat dilihat pada sikap dan perilaku: a). Kejujuran: Jujur pada

diri sendiri dan orang lain; b). Konsisten: Konsisten dalam ucapan maupun tindakan dalam kehidupan sehari-hari; c). Taat kepada nilai-nilai yang berlaku: Selalu membedakan mana yang benar dan mana yang salah; d). Belajar dari kesalahan (Learning from mistakes) : Menggunakan kesalahan yang telah kita buat sebagai alat untuk tidak melakukan kesalahan yang sama

3. Pengendalian Diri

   Hilangnya pengendalian diri didalam kehidupan sosial dapat mengakibatkan hal negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Kemampuan untuk beradaptasi terhadap lingkungan dan mengenali kemampuan diri sendiri juga dapat disebut pengendalian diri. *Self Control* dapat dilihat pada sikap dan perilaku: a). Pengendalian: cara kita mengontrol tindakan kita ketika kesal atau marah; b). Disiplin: kemampuan untuk tetap focus dan konsisten pada tujuan, dan konsisten dengan tindakan dalam mencapai tujuan; c). Penguasaan Diri: Kontrol terhadap kata-kata dan tindakan; d). Kebijaksanaan: Tidak berbicara atau bertindak yang dapat menyakiti orang lain; e).Kekuatan Kemauan: mempunyai kekuatan, keinginan dan sikap untuk melakukan sesuatu bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun; f). Martabat / Kehormatan: Menjaga Martabat diri sendiri.

4. Semangat Pantang Menyerah

   Semangat pantang menyerah juga dapat berarti berani menegakkan keadilan, tanpa mempedulikan apa kata orang lain. Dapat juga berarti mempunyai keberanian untuk menjadi diri sendiri setiap waktu, dan melakukan apa yang menurut kita benar dengan mengabaikan tekanan dari orang lain yang berusaha menghalangi.

Keteladanan Pendidikan Ki Hajar Dewantoro

Ki Hajar Dewantoro dengan nama asli R.M. Suwardi Suryaningrat merupakan tokoh pendidikan nasional. Tokoh yang memiliki pandangan bahwa melalui pendidikan akan terbentuk kader yang berpikir, berperasaan, dan berjasad merdeka serta percaya akan kemampuan sendiri. Arah pendidikannya bernafaskan kebangsaan dan berlanggam kebudayaan. Lebih ditegaskan lagi bahwa Ki Hajar Dewantoro juga sangat dekat dengan rakyat, cinta kemerdekaan dan bangga atas budaya bangsanya sendiri. Sejalan dengan yang diungkap Sukarno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai budayanya sendiri.

Dalam kontekk pendidikan karakter, pendidikan merupakan unsur pendukung yang sangat berpengaruh dalam merubah karakter seseorang. Sehingga pendidikan harus di awali dari persamaan persepsi para pemamngku kebijakan pendidikan. Menurut Ki Hajar dewantoro mendidik dalam arti yaang sesungguhnya adalah proses memanusiakan manusia (humanisasi), yang ditujukan untuk peningkatan manusia ke taraf insani, untuk membawa manusia indonesia keluar dari kebodohan, dengan membuka tabir aktual-transsenden dari sifat alami manusia yang humanis. Disamping yang diurikan diatas, pendidikan juga dimaknai sebagai "penguasaan diri", dimana pendidikan memanusiawikan manusia (humanisasi). Ketika setiap peserta didik mampu menguasai dirinya, mereka akan mampu juga menentukan sikapnya. Dengan demikian akan tumbuh sikap yang mandiri dan dewasa. Pendidikan lebih memerdekakan manusia dari aspek hidup batin (otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, mentalitas demokratik).

Metode yang digunakan dalam proses pendidikan Ki Hajar Dewantoro dikenal dengan **sistem among** yaitu metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah dan asuh. Metode ini secara teknik pengajaran meliputi 'kepala, hati dan panca indera' (educate the head,

the heart, and the hand). Educate the head, the heart, and the hand merupakan sebuah integrasi konsep yang menyatu dalam sebuah sistem. Kepala akan memaksimalkan kemampuan otak untuk mempelajari berbagai ipteks, hati akan memproses kesesuaian antara yang dipelajari dengan dasar akhlak dan landasan ketuhanan serta nilai-nilai yang telah dipelajari, panca indera akan mewujudkan dari apa yang telah dipelajari, kesesuaian dengan hati nurani dan di implementasikan dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari. Lebih ditegaskan lagi oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa dalam sebuah proses belajar, sadar atau tidak maka 'perilaku' seorang guru akan menjadi komunikasi (penyampaian pesan) paling efektif dan pengaruhnya sangat besar (90%) pada peserta didik. Perilaku inilah yang akan menjadi 'teladan' bagi kehidupan sosial peserta didik. Secara psikologis pengaruh 'perilaku' tersebut adalah pengaruh bawah sadar peserta didik, yang akan muncul kembali saat ia melakukan aktifitas dalam 'bersikap', 'bertindak' atau 'menilai sesuatu' pada dirinya maupun orang lain. Dengan demikian melalui pendidikan akan terbentuk kader yang berpikir, berperasaan, dan berjasad merdeka serta percaya akan kemampuan sendiri. Arah pendidikannya bernafaskan kebangsaan dan berlanggam kebudayaan.

Untuk mencapai hal tersebut, maka para guru sangat perlu dikembangkan profesionalismenya sebagai guru. Profesional dimaknai bukan professional **'to have'** tetapi professional **'to be'**. Bukan professional disebabkan kebendaan (materi) tetapi professional bersumber dari 'penguasaan diri', 'pengabdian' dan 'kehormatan' diri dan bangsanya. Sehingga dalam prosesnya 'mengajar' akan menjadi cara hidup seorang guru untuk mencapai kemanfaatan sebanyak-banyaknya melalui 'pengabdiannya' dan proses menebarkan 'kehormatan' tersebut pada hati, kepala dan pancaindera peserta didiknya. Diharapkan peserta didik akan dapat memiliki budi pekerti, dan memajukan kesempurnaan hidup,

dengan menerapkan falsafah pendidikan TRINGA yang meiputi ngerti, ngrasa, nglakoni. Pesan dalam amalan tringa antara lain "Ilmu tanpa amal seperti pohon kayu yang tidak berbuah", "Ngelmu tanpa laku kothong", laku tanpa ngelmu cupet". Ilmu tanpa perbuatan adalah kosong, perbuatan tanpa ilmu pincang.

Pendidikan Karakter

Dalam kontek pendidikan karakter, ebih lanjut Suyanto (2010) menjelaskan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action). Menurut Thomas Lickona tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Dengan pendidikan karakter yang diterapakan secara sistematis, dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Sebab kecerdasan emosi ini menjadi bekal penting dalam mempersiapkan anak masa depan dan mampu menghadapi segala macam tantangan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis.

Ada sembilan pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu (1) karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya; (2) kemandirian dan tanggung jawab; (3) kejujuran/amanah, diplomatis; (4) hormat dan santun; (5) dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong/kerjasama; (6) percaya diri dan pekerja keras; (7) kepemimpinan dan keadilan; (8) baik dan rendah hati; (9) karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan.

Untuk mencapai tujuan dalam pembentukan karakter maka sangat erat hubungannya dengan pusat pendidikan. Sesuai dengan konsep tri pusat pendidikan Ki Hajar Dewantoro dijelaskan bahwa pendidikan ditujukan untuk membangun konstruksi fisik, mental, dan spiritual yang handal dan tangguh dimulai dari; (i) lingkungan keluarga; (ii) lingkungan

sekolah; dan (iii) lingkungan masyarakat. Ketika pendidikan di lingkungan keluarga mulai sedikit diabaikan dan dipercayakan pada lingkungan sekolah, serta lingkungan social yang semakin kehilangan kesadaran bahwa aksi mereka pada dasarnya memberikan pengaruh yang cukup besar pada pendidikan seorang individu. Ajaran filosofi Panca Dharma ini terdiri dari azas Kodrat Alam, Kemerdekaan, Kebudayaan, Kebangsaan dan Kemanusiaan. Filosofi yang terkandung dalam azas kodrat alam dimaknai dalam perspektif yang luas, bahwa setiap anakk akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkatan tumbuh kembangnya, baik dalam aspek fisik, fisiologis, maupun psikologis. Sehingga pendidikan dilakukan sesuai dengan tahap perkembangannya, dengan penuh kemerdekaan, tidak ada unsur pemaksaan, dikenalkan dengan budaya bangsa, integritas kebangsaan, dan nilai-nilai kemanusiaannya. Menurut Laksono (2016), pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya, yang meliputi jiwa, yaitu cipta, karsa dan karya secara seimbang. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka, akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Pendidikan saat ini lebih mengembangkan daya cipta, kurang memperhatikan olah rasa dan karsa. Untuk menjembatani keseimbangan pengembangan daya ini, di perguruan Tamansiswa, pendidikan seni diberikan seiring dengan pendidikan akademis. Pendidikan seni bertujuan membentuk kepribadian siswa dan pengembangan diri, baik kognitif, afektif (olah rasa) dan psikomotorik (keterampilan).

Disinilah kunci dari urgensi dilaksanakannya pendidikan karakter untuk membentengi dari krisis multidimensi pada era globalisasi ini. Krisis multidimensi dan keterpurukan bangsa, pada hakekatnya bersumber dari jati diri, dan kegagalan dalam mengembangkan pendidikan karakter bangsa. Dalam konteks pendidikan formal di

sekolah, salah satu penyebabnya karena pendidikan di Indonesia lebih menitikberatkan pada pengembangan intelektual atau kognitif dan kurang memperhatikan aspek afektif, sehingga hanya tercetak generasi yang pintar, tetapi tidak memiliki karakter yang dibutuhkan bangsa. Selain itu, sistem pendidikan yang top-down, dengan menempatkan guru untuk mentransfer bahan ajar ke subjek didik, dan subjek didik hanya menampung apa yang disampaikan guru tanpa mencoba berpikir lebih jauh, minimal terjadi proses seleksi secara kritis (Hamengkubuwon, 2010:3).

Pembelajaran Sejarah Berbasis Nilai-nilai Pancasila

SARDIMAN;
DYAH KUMALASARI;
DIANA TRISNAWATI

Sudah bukan menjadi hal yang baru dan asing lagi di telinga jika mendengar tentang etnisitas dan nilai-nilai budaya yang beragam di Indonesia. Ratusan suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia sejak dahulu memiliki nilai-nilai dan adat yang beranekaragam. Keberagaman tersebut kemudian dapat dipersatukan menjadi satu masyarakat dan bangsa dalam sebuah negara kesatuan yang disebut Indonesia. Studi atau kajian mengenai sisi positif dan negatif terkait keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia juga bukan baru-baru ini dilakukan. Namun, pada masa sebelumnya, seperti yang pernah ditulis oleh Willem Marsdem dalam bukunya "Sejarah Sumatera", maupun yang ditulis oleh Sir Thomas Stanford Raffles dalam bukunya "History of Java", menyatakan bahwa memang masyarakat Indonesia sangat beragam.

Gusdur juga pernah mengatakan bahwa "keberagaman di Indonesia adalah rahmat". Dari pernyataan tersebut tentunya kita dapat mengetahui

dan memahami bahwa ada banyak sisi positif dari keberagaman. Hal ini seharusnya sangat jelas dan dapat dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa dengan keberagaman tersebut, akan menjadikan kekuatan pemersatu yang besar bagi bangsa Indonesia, bukan sebaliknya keberagaman menjadi alasan untuk saling menyerang dan terjerumus dalam arus disintegrasi. Persoalan yang tidak tuntas di Indonesia adalah bagaimana meramu *diversitas cultural* yang *incommensurable* antara satu dengan yang lain ke dalam satu nuansa politik demokrasi dengan level toleransi tingkat tinggi. Namun dalam kenyataannya, Keberagaman yang kaya perbedaan identitas, budaya, nilai dan agama tidak selamanya dialami sebagai rahmat atau berkat, tetapi sering menjadi laknat yang berkepanjangan. Ini terjadi baik di Indonesia maupun di negara-negara lain yang multicultural (Felix Baghi, 2012:14). Hal ini pertanda bahwa rasa toleransi di antara komunitas sangat rendah.

Menurut Ben Anderson, bangsa adalah sesuatu yang terbayang, karena para anggotanya terkecil sekalipun tidak bakal tahu dan takkan kenal sebagian besar anggota lainnya, tidak akan bertatap muka dengan mereka itu, bahkan mungkin pula tidak pernah mendengar tentang mereka, namun toh di setiap orang yang menjadi anggota bangsa itu hidup sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka (2008:8). Keanekaragaman suku bangsa di Indonesia juga seharusnya mampu membangun bayangan dan pemahaman tentang kebersamaan sehingga melahirkan atau kekuatan dalam pembangunan nasional. Namun, saat ni yang terjadi justru perbedaan menjadi jurang pemisah masing-masing kelompok dalam masyarakat. Berbagai wilayah di nusantara saling mengklaim bahwa wilayahnya paling subur, paling potensial, dan paling kaya sumber daya alamnya. Perbedaan suku bangsa yang tersebar di bumi Indonesia juga semakin menjadi penghalang untuk bersatu. Akibatnya, banyak terjadi kekacauan dan koflik yang berakar dari perbedaan di

hampir semua penjuru negara ini.

Akhir-akhir ini banyak tersaji di media elektronik maupun media cetak tentang konflik atau kerusuhan yang bermula dari perbedaan. Konflik atau kerusuhan yang mengatasnamakan SARA tersebut justru semakin memperuncing bahwa sebenarnya Indonesia memang tidak hanya memiliki satu warna. Semestinya, di tengah-tengah derasnya arus globalisasi dan majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Indonesia tidak lagi dihadapkan dengan problematika-problematika internal. Tanggung jawab, *precision*, *accuracy*, disiplin, dan kerja keras adalah ciri-ciri kebudayaan Indonesia yang harus dibangun kembali saat ini dan masa depan. Hanya dengan penghayatan itulah, di samping persatuan dan kesatuan nasional, akan terwujud suatu ketahanan cultural untuk menghadapi perputaran roda sejarah dunia (Daoed Joesoef, 1981:27). Dalam artikel ini, penulis akan mengulas tentang relasi antar etnis sebagai sebuah pendekatan dalam studi sejarah berbasis nilai-nilai Pancasila.

Pembelajaran Sejarah

Pembelajaran sejarah memiliki arti strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Permendiknas No. 22 Th. 2006). Oleh sebab itu, sejarah menjadi salah satu materi yang wajib diberikan dalam pembelajaran di sekolah, baik, di tingkat dasar maupun menengah. Dalam kurikulum sekolah, terdapat materi tentang sejarah nasional yang menjadi dasar pembelajaran sejarah. Meskipun demikian, batasan-batasan terkait dengan sejarah nasional dan tujuan pembelajaran sejarah dahulu pernah menjadi perdebatan yang menarik dan berkepanjangan oleh para sejarawan Indonesia, tepatnya pada tahun 1957, ketika diselenggarakan kongres sejarah nasional

pertama di Yogyakarta, dan nyaris masih menjadi permasalahan hingga saat ini.

Selanjutnya, dalam perspektif studi ilmu sejarah murni, kemungkinan perdebatan itu masih akan berlangsung panjang. Namun dalam perspektif studi pendidikan sejarah, perdebatan tersebut sebenarnya tidak pernah dimulai. Sejak awal kemerdekaan, pendidikan sejarah di sekolah tidak lain adalah pendidikan "sejarah nasional"Indonesia. Sejarah nasional, menurut Sartono Kartodirjo adalah sebuah unit historis (2014:41) yang menjadi objek kajian sejarah, dan *Indonesiasentris* adalah *point of view* yang berarti bahwa menempatkan bangsa Indonesia sebagai *drama personae* (2014:6) dalam mengkaji unit sejarah tersebut. Tujuan pembelajaran sejarah tidak sekedar menanamkan memori kolektif kepada peserta didik demi nasionalisme, tetapi juga adalah kecerdasan kolektif dan mendidik siswa untuk kritis mengkaji sejarah. Proses pembelajaran sejarah tidak lain adalah proses penjelasan sejarah, sedangkan penjelasan sejarah adalah usaha membuat unit sejarah *intelligible* (dimengerti secara cerdas) (Kuntowijoyo, 2008:1). Hal ini selaras dengan paradigma pembelajaran abad 21 yang sedang berkembang dewasa ini, seperti juga yang dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum terbaru di Indonesia saat ini.

Kurikulum 2013 menekankan dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah (*scientific approach*) (Kemdikbud, 2013:181). Pengajaran sejarah dalam konteks yang lebih sederhana merupakan sub-sistem dari kegiatan pendidikan sebagai usaha yang menunjuk pada pengaturan dan pengorganisasian lingkungan belajar. Pengorganisasian lingkungan belajar ini bertujuan untuk mendorong peserta didik agar memiliki motivasi belajar dan mengembangkan diri. Tujuan tersebut dalam pencapaiannya akan ditopang oleh berbagai komponen, termasuk kemampuan dalam menerapkan model dan metode pembelajaran. Usaha perbaikan masih

diperlukan kaitannya dengan proses pengajaran sejarah, antara lain tentang porsi pengajaran yang berasal dari ranah kognitif dan afektif (Soedjatmoko, 1976: 16). Kedua ranah tersebut harus selalu ada dalam proses pengajaran sejarah. Pembelajaran sejarah yang mengutamakan fakta keras, kiranya perlu mendapat perhatian yang signifikan karena pembelajaran sejarah yang demikian hanya akan menimbulkan rasa bosan dikalangan siswa dan pada gilirannya akan menimbulkan keengganan untuk mempelajari sejarah.

Implementasi

Sebagaimana dikatakan Allan Nevin (Ahmad Syafii Maarif, 2006: 29), bahwa sejarah adalah jembatan penghubung masa silam dan masa kini, dan sebagai petunjuk ke arah masa depan. Pembelajaran sejarah sebagai sub-sistem dari sistem kegiatan pendidikan merupakan sarana efektif untuk meningkatkan integritas dan kepribadian bangsa. Kochhar (2008: 33-36) mengemukakan bahwa memperkokoh rasa nasionalisme dan mengajarkan prinsip-prinsip moral adalah sasaran umum diselenggarakannya pembelajaran sejarah. Selain hal tersebut, pembelajaran sejarah bertujuan untuk memperluas cakrawala intelektualitas, dan memberikan gambaran yang tepat tentang konsep waktu, ruang dan masyarakat.

Pengajaran sejarah dalam konteks yang lebih sederhana merupakan sub-sistem dari kegiatan pendidikan sebagai usaha yang menunjuk pada pengaturan dan pengorganisasian lingkungan belajar. Pengorganisasian lingkungan belajar ini bertujuan untuk mendorong peserta didik agar memiliki motivasi belajar dan mengembangkan diri. Tujuan tersebut dalam pencapaiannya akan ditopang oleh berbagai komponen, termasuk kemampuan dalam menerapkan model dan metode pembelajaran. Usaha perbaikan masih diperlukan kaitannya dengan proses pengajaran

sejarah, antara lain tentang porsi pengajaran yang berasal dari ranah kognitif dan afektif (Soedjatmoko, 1976: 16). Kedua ranah tersebut harus selalu ada dalam proses pengajaran sejarah. Pembelajaran sejarah yang mengutamakan fakta keras, kiranya perlu mendapat perhatian yang signifikan karena pembelajaran sejarah yang demikian hanya akan menimbulkan rasa bosan dikalangan siswa dan pada gilirannya akan menimbulkan keengganan untuk mempelajari sejarah.

Model pembelajaran merupakan petunjuk bagi guru dalam merencanakan pembelajaran di kelas, mulai dari mempersiapkan perangkat pembelajaran, media dan alat bantu, sampai alat evaluasi yang mengarah pada upaya pencapaian tujuan pelajaran. Joyce dan Weil (2004:17) mengemukakan enam unsur penting yang menggambarkan suatu model pembelajaran: (1) sintaks, yakni suatu urutan pembelajaran yang biasa juga disebut fase; (2) sistem sosial, yaitu peran siswa dan guru serta norma yang diperlukan; (3) prinsip reaksi, yaitu memberikan gambaran kepada guru tentang cara memandang dan merespon apa yang dilakukan siswa; (4) sistem pendukung, yaitu kondisi atau syarat yang diperlukan untuk terlaksananya suatu model, seperti setting kelas; (5) Dampak instruksional, adalah hasil belajar yang dicapai langsung dengan cara mengarahkan para siswa pada tujuan yang diharapkan; (6) Dampak pengiring, adalah hasil belajar lain yang dihasilkan oleh suatu proses belajar mengajar, sebagai akibat terciptanya suasana belajar yang dialami langsung oleh para pelajar tanpa arahan langsung dari guru.

Model pembelajaran yang dimaksud pada penelitian ini adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Sedangkan fungsi model pembelajaran disini adalah sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran sejarah berbasis implementasi nilai-nilai

pancasila merupakan desain model pembelajaran yang solutif dan ideal untuk meningkatkan sikap toleransi dan kebhinekaan. Pancasila yang merupakan produk sejarah sekaligus dasar negara dari semua sisinya memiliki makna historis dan filosofis yang dibuat oleh pendiri bangsa. Oleh sebab itu, pembelajaran sejarah berbasis nilai-nilai pancasila dalam penerapannya bahwa setiap materi sejarah yang diajarkan di sekolah tidak bisa terlepas dari lima nilai utama pancasila, meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial.

Salah satu bentuk implementasi pembelajaran sejarah berbasis nilai-nilai Pancasila di SMA N 6 Yogyakarta adalah pembelajaran sejarah dengan materi Sejarah Pergerakan Nasional. Materi pergerakan nasional Indonesia memuat serangkaian peristiwa sejarah yang bermula dari lahirnya organisasi-organisasi pergerakan nasional, peristiwa Sumpah Pemuda, dan peristiwa-peristiwa lainnya yang kemudian mengantarkan Indonesia pada kemerdekaan. Peneliti melakukan observasi dalam pembelajaran sejarah di kelas XI IPS 2. Materi sejarah yang diajarkan adalah Peristiwa Sumpah Pemuda dengan Kompetensi Inti dan Indikator Capaian sebagai berikut:

3.4 Menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini
- 3.4.1 Menjelaskan latar belakang lahirnya kesadaran awal kebangsaan di Indonesia
- 3.4.2 Mengidentifikasi bentuk-bentuk kesadaran awal kebangsaan di Indonesia
- 3.4.3 Menganalisis makna nilai-nilai sumpah pemuda bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa dahulu dan sekarang

4.4 Menyajikan langkah-langkah dalam penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini dalam bentuk tulisan dan/atau media lain
- 4.4.1 Menyajikan hasil diskusi kelompok tentang nilai-nilai sumpah Pemuda dan makna bagi kehidupan kebangsaan Indonesia pada masa kini
- 4.4.2 Membuat tulisan tentang nilai-nilai sumpah pemuda pada masa dahulu dan masa kini yang dideklarasikan di depan kelas pada akhir pembelajaran

Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut sebagai berikut:

> Melalui kegiatan pembelajaran mata pelajaran Sejarah Indonesia peserta didik kelas XI SMA Negeri 6 Yogyakarta dapat memiliki pengetahuan tentang (KD-3) yaitu "Menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini, serta ketrampilan dalam (KD-4) yaitu mampu " Menyajikan langkah-langkah dalam penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini dalam bentuk tulisan dan/atau media lain yang kemudian dideklarasikan di depan kelas pada akhir pembelajaran, terutama tentang nilai-nilai toleransi dan kebhinekaan.

Dalam pembelajaran sejarah tersebut, langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan meliputi:

Kegiatan	Abstrak
Pendahuluan	1. Guru menyapa dan menanyakan kondisi siswa 2. Membuka pembelajaran dengan doa 3. Guru menampilkan sebuah gambar yang bertemakan indahnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman 4. Guru menyiapkan siswa untuk mengikuti proses belajar mengajar hari ini 5. Guru menanyakan tentang materi minggu sebelumnya 6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai

Kegiatan	Abstrak
Inti	**1. Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan)** a. Guru menampilkan beberapa gambar tentang keberagaman etnis di Indonesia b. Peserta didik mengamati gambar dan video tersebut dan menghubungkannya dengan meteri Sumpah Pemuda c. Peserta didik secara acak memberikan tanggapan tentang gambar dan video yang di amati **2. Melakukan observasi (pernyataan/ identifikasi masalah)** a. Berdasarkan pernyataan tersebut, guru meminta peserta didik menjelaskan tentang Latar belakang Peristiwa Sumpah Pemuda b. Peserta didik dikelompok ke dalam 5 kelompok secara heterogen dengan tugasnya masing-masing kelompok dengan nama-nama sebagai berikut: Pemuda Sumatera, Pemuda Kaum Betawi, Jong lava, Jong Ambon, dan Jong Celebes. **3. *Data collection* (Pengumpulan Data)** Masing-masing peserta didik dalam kelompok tersebut diberi materi dan tugas yang berlainan **4. Menganalisis data** Masing-masing kelompok mendiskusikan organisasi kedaerahannya yang meliputi tujuan organisasi, tokoh-tokoh, cirri khas organisasi, dan sumbangsihnya dalam konggres pemuda. **5. *Verification* (Mengkomunikasikan)** a. Peserta didik mewakili kelompoknya menyampaikan hasil diskusi di depan kelas (presentasi) b. Kelompok yang lain memperhatikan dan diwajibkan mengajukan pertanyaan atau sanggahan

Kegiatan	Abstrak
Penutup	1. Menyimpulkan a. Peserta didik wakil dari masing-masing kelompok mendeklarasikan hasil dari diskusinya dengan satu kalimat orasi (misalnya Jong Celebes... Pemuda Sulawesi cinta Indonesia, Jong Java berasaskan Trikoro Dharmo bersatu membangun Indonesia...,dst) menggunakan atribut kedaerahan (selempang daerah yang dibuat dari kertas manila) b. Guru dan Peserta didik bersama sama menyimpulkan hasil diskusi 2. Mengevaluasi Peserta didik diberikan pertanyaan lisan secara acak untuk mendapatkan umpan balik atas pembelajaran minggu ini, misalnya: a. Latar belakang lahirnya sumpah pemuda yaitu.... b. Isi sumpah pemuda adalah.... c. Makna sumpah pemuda yaitu.... 3. Merefleksikan Sebagai refleksi guru memberikan pembelajaran dan pelajaran tentang nilai-nilai apa yang diperoleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Contoh pertanyaan kegiataan refleksi a. Bagaimana proses pembelajaran kita hari ini, apakah menarik atau tidak ? b. Nilai-nilai apa saja yang kalian dapat setelah megikuti proses pembelajaran pada hari ini ? 4. Menutup a. Menginformasikan materi pertemuan yang akan datang b. Kegiatan diakhiri dengan salam dan doa

Implementasi Nilai-nilai Pancasila

Pembelajaran sejarah materi Peristiwa Sumpah Pemuda yang dilakukan di kelas XI IPS 2 SMA Negeri 6 Yogyakarta memiliki keterkaitan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila. Implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut dapat diamati secara langsung dalam pembelajaran maupun secara tersirat atau tidak langsung. Sebelum kita membahas mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran sejarah, berikut isi Pancasila:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan bunyi sila pertama sampai dengan sila kelima Pancasila tersebut, dapat diambil intisari nilai-nilai Pancasila dan implementasi dalam pembelajaran sejarah di kelas XI IPS 2 SMA Negeri 6 Yogyakarta sebagai berikut:

Sila Pertama, intisari dari sila pertama adalah nilai ketuhanan. Dalam peristiwa sejarah Indonesia, implementasi nilai ketuhanan tercermin ketika perumusan naskah Pancasila itu sendiri, yakni memasukkan unsure religius (memasukkan kata "ketuhanan" sebagai salah satu point isi Pancasila). Selain itu, nilai ketuhanan tercermin melalui semangat para pejuang dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Misalnya, Bung Tomo melalui orasi dalam Peristiwa 10 November di Surabaya atau yang dikenal dengan *Battle of Surabaya*. Dalam pembelajaran di sekolah, nilai ketuhanan berkaitan dengan

seluruh aktivitas yang melibatkan sikap religius, misalnya berdoa ketika mengawali dan mengakhiri pembelajaran, mengucap syukur, melafalkan *basmallah* ketika memulai presentasi, mengucapkan salam, dan sebagainya. Hal-hal tersebut sering dijumpai dalam proses pembelajaran sejarah di kelas XI IPS 2 SMA Negeri 6 Yogyakarta.

Sila Kedua, intisari dari sila kedua adalah nilai kemanusiaan. Indonesia sebagai negara yang multietnis memiliki beragam nilai dan norma sosial yang menempatkan setiap manusia diperlakukan dengan baik, santun, dihormati, dan taat pada hukum-hukum adat yang berlaku di masing-masing kelompok masyarakat. Namun, dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia diwarnai gejolak dan banyaknya problema terkait dengan kemanusiaan, khususnya pada masa penjajahan. Stratifikasi atau penggolongan pada masa kolonial Belanda yang menempatkan masyarakat asli Indonesia atau pribumi sebagai warga kelas tiga merupakan bentuk ketidak-adilan dan diskriminasi. Selain itu, perlakukan Jepang terhadap para wanita atau yang lebih dikenal dengan sebutan "Jugun Ianfu" juga merupakan contoh perlakukan di luar batas kemanusiaan. Hal tersebut merupakan contoh bahwa perlu adanya perlakuan yang adil dan beradab pada setiap manusia. Dalam pembelajaran sejarah, nilai kemanusian tercermin dalam sikap toleransi, menghargai pendapat orang lain, tidak membeda-bedakan teman dalam diskusi kelompok, meminjamkan alat tulis kepada teman yang tidak membawa (tolong-menolong), dan sebagainya.

Sila Ketiga, intisari dari sila ketiga adalah nilai persatuan. Persatuan merupakan sebuah kesadaran dan langkah awal bangsa Indonesia dalam mengupayakan kemerdekaan. Kesadaran bahwa organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok kedaerahan merupakan satu kesatuan yang kemudian disebut Indonesia merupakan kekuatan utama dalam mewujudkan proses demi proses yang mengantarkan pada kemerdekaan.

Dalam Pancasila, bunyi sila ketiga "Persatuan Indonesia" adalah sebagai kunci dan pegangan setiap masyarakat bahwa kita adalah satu. Nilai persatuan dalam pembelajaran sejarah terutama pada materi Sumpah Pemuda sangat tampak. Hal tersebut tercermin dari kekompakan masing-masing kelompok saat berdiskusi dan mempersiapkan presentasi. Meskipun kelas XI IPS 2 merupakan kelas multi etnis, namun mereka tetap memegang teguh kekompakan dan kebersamaan. Dalam sehari-hari di lingkungan kelas atau sekolah, peserta didik kelas XI IPS 2 menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi.

Sila keempat ,intisari dari sila keempat adalah nilai musyawarah. Peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau, terutama yang terkait dengan sejarah nasional tidak terlepas dari nilai-nilai musyawarah. Misalnya, perumusan Pancasila, Perumusan Naskah Proklamasi, beberapa agenda rapat PPKI pasca proklamasi yang menghasilkan berbagai keputusan penting terkait kenegaraan, dan sebagainya. Implementasi nilai musyawarah dalam pembelajaran sejarah di kelas XI IPS 2 tercermin dari sikap peserta didik dalam menentukan siapa anggota diskusi yang akan tampil presentasi di depan kelas mewakili kelompok. Peserta didik yang kebetulan ditunjuk teman-temannya untuk presentasi pun tampil di kelas dengan senang hati dan tanpa paksaan.

Sila kelima, intisari dari sila kelima adalah nilai keadilan. Dalam perjalanan sejarah nasional Indonesia, nilai keadilan tercermin dalam beberapa contoh, misalnya: pada masa sebelum kemerdekaan hanya kalangan tertentu yang memperoleh kesempatan untuk bersekolah, namun pasca kemerdekaan diberi kesempatan yang sama pada masyarakat untuk bersekolah. Selain itu, pemerintah memberi kebebasan untuk masing-masing daerah mengembangkan potensinya demi kelangsungan hidup masyarakat bernegara. Implementasi nilai keadilan tercermin ketika dalam masing-masing kelompok diskusi melakukan musyawarah

untuk membagi tugas kelompok. Pembagian tugas kelompok dilakukan secara adil dan merata. Tidak ada seorang pun anggota diskusi yang tidak mendapat tugas, sehingga pelaksanaan diskusi berjalan lancar dan menyenangkan. Masing-masing kelompok terlihat sangat kompak dalam mempersiapkan materi untuk dipresentasikan di depan kelas.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap peserta didik kelas XI IPS 2 SMA Negeri 6 Yogyakarta memang dalam keseharian di kelas atau lingkungan sekolah mereka telah terbiasa menerapkan nilai-nilai Pancasila. Peserta didik telah sadar betapa pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka, baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur tersebut mampu digunakan sebagai benteng diri terhadap budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia.

Penutup

Pendidikan sejarah memiliki arti strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Salah satu bentuk implementasi pembelajaran sejarah berbasis nilai-nilai Pancasila di SMA N 6 Yogyakarta adalah pembelajaran sejarah dengan materi Sejarah Pergerakan Nasional (terutama Peristiwa Sumpah Pemuda). Pembelajaran sejarah materi Peristiwa Sumpah Pemuda yang dilakukan di kelas XI IPS 2 SMA Negeri 6 Yogyakarta memiliki keterkaitan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila. Implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut dapat diamati secara langsung dalam pembelajaran maupun secara tersirat atau tidak langsung. *Sila Pertama*, ketuhanan berkaitan dengan seluruh aktivitas yang melibatkan sikap religius,

misalnya berdoa ketika mengawali dan mengakhiri pembelajaran, mengucap syukur, melafalkan basmallah ketika memulai presentasi, mengucapkan salam, dan sebagainya. *Sila Kedua,* Nilai kemanusian dalam pembelajaran sejarah tercermin dalam sikap toleransi, menghargai pendapat orang lain, tidak membeda-bedakan teman dalam diskusi kelompok, meminjamkan alat tulis kepada teman yang tidak membawa (tolong-menolong), dan sebagainya. *Sila Ketiga*, Nilai persatuan dalam pembelajaran sejarah terutama pada materi Sumpah Pemuda sangat tampak. Hal tersebut tercermin dari kekompakan masing-masing kelompok saat berdiskusi dan mempersiapkan presentasi. *Sila keempat,* Implementasi nilai musyawarah dalam pembelajaran sejarah di kelas XI IPS 2 tercermin dari sikap peserta didik dalam menentukan siapa anggota diskusi yang akan tampil presentasi di depan kelas mewakili kelompok. *Sila kelima*, Implementasi nilai keadilan tercermin ketika dalam masing-masing kelompok diskusi melakukan musyawarah untuk membagi tugas kelompok secara adil dan merata.

PRAKSIS PENDIDIKAN PANCASILA DI LINGKUP PERGURUAN TINGGI

Pemahaman & Penghayatan Mahasiswa Tentang Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Bangsa

DWI SISWOYO;
RUKIYATI

Pendidikan pada hakikatnya adalah upaya sadar untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam menghadapi tantangan zaman. Pendidikan Tinggi tidak dapat mengabaikan realita kehidupan yang mengglobal yang digambarkan sebagai perubahan kehidupan yang penuh dengan paradoksal dan ketakterdugaan. Tugas utama perguruan tinggi adalah meningkatkan keterpelajaran masyarakat, dengan memperkenalkan mahasiswa kepada pengembangan konsep-konsep dan penguasaannya hingga tingkat perkembangannya terkini sehingga kelak memiliki kompetensi dalam bidangnya dan mampu menjalankan pekerjaan, terutama yang memerlukan keahlian tinggi.

Sejalan dengan upaya di atas, universitas perlu mengembangkan *soft skill* atau kemampuan non-teknis mahasiswa, seperti sikap dan

kepribadian, agar mahasiswa memiliki kemampuan mengenal diri dan masalah secara rasional, kemampuan selektif beradaptasi, dan memiliki keberanian intelektual dalam berinovasi (Gardiner, dkk., 2017). Dengan kata lain, perguruan tinggi berkewajiban mengembangkan kecerdaskan majemuk para mahasiswa untuk kelak dapat menjadi warganegara yang mempunyai bekal ilmu teknologi dan seni dengan kepribadian bangsa, yang berlandaskan pada nilai-nilai agama dan Pancasila. Dalam konteks pembekalan sebagaimana dimaksud, salah satu upaya yang ditempuh adalah diberikannya mata kuliah Pancasila pada jenjang Perguruan Tinggi, di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Universitas Negeri Yogyakarta.

Negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Dengan demikian mata kuliah pendidikan Pancasila ini dapat lebih fokus dalam membina pemahaman, dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Artinya, pendidikan Pancasila diharapkan menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalitas mereka sesuai dengan bidang studi masing-masing. Reformasi pada tahun 1998, merupakan sebuah revolusi, yaitu sebuah penjungkirbalikan berbagai nilai, norma, kultur dan struktur. Hal-hal penting yang dapat dicatat (yang pada masa orde baru tidak ada) adalah demokrasi sejati, multi partai, kebebasan pers, kemerdekaan berekspresi, pemisahan Trias politica yang lebih konsisten, dan otonomi/desentralisasi pemerintahan. Reformasi telah dijalani di negeri ini selama dua dekade. Perubahan sedang memberikan dampaknya pada proses penyesuaian sosio-budaya dalam masyarakat Indonesia. Perubahan itu juga membawa serta perilaku yang fenomenanya jauh dari nilai-nilai yang diidealkan para pembentuk negara yaitu nilai-nilai Pancasila.

Pada dekade akhir-akhir ini ada indikasi semakin nampak gejala tindakan-tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai religius dan nilai-nilai Pancasila. Agama dan Pancasila belum diamalkan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan di Indonesia belum sanggup melahirkan generasi yang utuh jati dirinya. Mereka memang cerdas (intelektual), tetapi kehilangan sikap jujur dan rendah hati. Mereka terampil, tetapi kurang menghargai sikap tenggang rasa dan toleransi (Juwono Sudarsono, 2008).

Visi mata kuliah Pancasila terkait dengan visi matakuliah untuk pengembangan kepribadian. Visi ini pada hakikatnya merupakan upaya untuk memberikan dasar-dasar kecakapan hidup secara sosial kepada mahasiswa yang merupakan intelektual muda sehingga tidak kehilangan jati diri sebagai warga bangsa, negara dan masyarakat Indonesia. Sejalan dengan visi tersebut, misi mata kuliah Pancasila adalah membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmunya, dengan penuh rasa tanggung jawab, baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan.

Seiring dengan visi dan misi matakuliah Pancasila, kita juga dapat melihat pada visi dan misi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Sebagai sebuah lembaga pendidikan, UNY memiliki perhatian dan fokus pada upaya pendidikan kepribadian atau karakter bangsa. Hal ini ditunjukkan dalam visi UNY, yaitu mampu menghasilkan ***insan yang bertaqwa, mandiri dan cendekia.*** Selain menghasilkan insan yang memiliki kecerdasan intelektual, tidak kalah penting kecerdasan emosional dan spiritual menjadi garapan UNY. Harapannnya UNY selaku lembaga pendidikan yang menyatakan diri sebagai *"leading in character education"* akan menghasilkan lulusan yang berkarakter taqwa, mandiri dan cendekia yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Lulusan perguruan tinggi

yang berkepribadian Pancasila adalah cita-cita seluruh elemen bangsa terlebih banyak harapan digantungkan ke pundak mereka sebagai *agent of change*.

Notonagoro (1980) menyatakan dalam hal implementasi Pancasila dasar filsafat negara, ada dua jaminan yang sebaik-baiknya, apabila yaitu:

1. Kita mempunyai kesadaran tentang wajib untuk melaksanakan Pancasila dan kesadaran itu telah melekat pada diri pribadi kita.
2. Kita mempunyai kesadaran akan timbulnya akibat lahir batin wajib melaksanakan itu tidak dipenuhi, yaitu dapat merusakkan hidup bangsa dan negara seluruhnya.

Untuk membangun intelektual muda yang berkepribadian Pancasila dapat dimulai dengan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi secara sistematis, dialogis, dan reflektif. Dimulai dengan adanya pemahaman yang benar tentang Pancasila, mahasiswa akan merasa memiliki Pancasila, dan diharapkan pula tindakannya sesuai dengan Pancasila. Pendidikan Pancasila telah dilaksanakan di UNY sejak lama sebagai bagian dari perkuliahan rumpun MKU. Perkuliahan ini bersifat wajib lulus dengan bobot 2 SKS. Walaupun telah berjalan sejak lama, belum ada penelitian untuk mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa terkait dengan Pancasila dan isu-isu kehidupan berbangsa bernegara. Di sisi lain, memahami nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila akan mengantarkan manusia Indonesia pada spektrum yang luas mengenai keindonesiaan. Oleh karena itu penelitian mengenai pemahaman dan isu-isu kehidupan berbangsa bernegara penting dilakukan sebagai bahan pertimbangan bagi pengembangan perkuliahan Pancasila di Universitas Negeri Yogyakarta khususnya, dan perguruan tinggi pada umumnya.

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pemahaman dan penghayatan mahasiswa terhadap esensi Pancasila

sebagai ideologi negara? dan 2) Bagaimana pemahaman dan penghayatan mahasiswa terhadap isu-isu kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika dialektis. Metode ini mengedepankan dialog dengan subjek penelitian untuk mencapai fusi horison makna yang terkait dengan kadar pemahaman dan penghayatannya terhadap nilai-nilai Pancasila.

Esensi nilai-nilai Pancasila ialah: religius (sila pertama), humanis (sila kedua), nasionalis (sila ketiga), demokratis (sila keempat), dan adil (sila kelima) Dwi Siswoyo, 2013).

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa semester 2 Prodi Psikologi, dan Prodi Kebijakan Pendidikan pada Fakultas Ilmu pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta yang menempuh perkuliahan Pancasila yang berjumlah 34 orang.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dialog dalam *focus group discussion* (FGD) dan penyampaian instrumen yang berisi pernyataan, kasus yang isinya terkait dengan kadar pemahaman serta penghayatan terhadap sila-sila Pancasila dalam sebuah kesatuan organis harmonis. Subjek menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada selembar kertas berdasarkan pemahaman dan refleksinya mengenai konsep Pancasila, penjabarannya, dan berbagai isu dalam kehidupan bernegara. Instrumen disusun oleh peneliti, kemudian dilakukan review oleh sesama sejawat peneliti yang telah dikenal mendalami dan mengajarkan Pancasila di perguruan tinggi.

Teknik analisis data dilakukan dengan interpretatif reflektif kritis dialektik. Merujuk kepada Noeng Muhadjir (2011), penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian naturalistic-interpretif sehingga analisis data lebih bersifat interpretasi makna sebagaimana yang direfleksikan secara kritis oleh para subjek. Prosedur analisis data mengikuti model

interaktif Miles & Huberman (1994) dengan tahap-tahap reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Dari penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh hasil mengenai pemahaman dan refleksi kritis para remaja kampus (mahasiswa) sebagai berikut.

1. Esensi nilai-nilai Pancasila

   Pandangan mahasiswa mengenai esensi Pancasila pada umumnya sudah benar. Ada yang menjawab singkat, tetapi ada pula yang menjawab panjang lebar. Pada intinya para subjek telah memahami esensi Pancasila, yaitu nilai-nilai luhur sebagai pedoman kehidupan berbangsa bernegara yang diambil dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat nusantara. Nilai-nilai Pancasila adalah kepribadian bangsa yang harus diwujudkan terus-menerus. Berikut ini beberapa jawaban yang menarik yang mencerminkan pandangan mereka.

   S7: "Pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara, bersumber pada nilai yang terkandung dalam masyarakat Indonesia, nilai Pancasila bersifat sebagai dasar, oleh sebab itu perlu kita sebagai mahasiswa untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila."

   S10: "Keagamaan/religius, humanis, nasionalis, demokratis, adil."

   S12: "Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan".

   S14: "Semangat yang diambil dari masyarakat nusantara dan dijadikan pedoman karena disesuaikan dengan masyarakat sekitar sehingga dapat dijadikan sebaik mungkin oleh warga masyarakat dan tidak akan berubah karena tepat sasaran dan dapat menyesuaikan zaman."

   S18: "Pancasila memiliki lima sila yang ada didalamnya, dimana dari masing-masing sila terkandung sebuah nilai. Sila satu mengandung nilai ketuhanan yang memiliki arti kebebasan

memeluk agama dan sebagai masyarakat berketuhanan. Sila dua mengandung nilai kemanusiaan yang memiliki arti menghargai manusia atau memanusiakan manusia. Sila tiga mengandung nilai persatuan yang memiliki arti sebagai bangsa yang besar diperlukan sebuah kesatuan dan kesatuan. Sila empat mengandung nilai kerakyatan yang artinya pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Sila lima keadilan yang artinya bahwa keadilan harus mengena siapa saja tanpa memandang siapa dia."

S 21: Pancasila adalah pedoman berbangsa dan bernegara yang seharusnya menjadi tata laku, pikiran, dan perbuatan setiap warga negara Indonesia. Nilai-nilai pancasila harus menjadi bagian kepribadian bangsa, yang terinternalisasi secara penuh sehingga terpancar dari perilaku dan perbuatan."

2. Pancasila adalah payung bagi seluruh umat beragama

Pada umumnya subjek mempunyai pandangan yang positif terhadap Pancasila sebagai paying bagi seluruh umat beragama. Salah seorang subjek (S1) mengatakan bahwa sila pertama Pancasila adalah sila yang berkedudukan paling tinggi yang mengayomi kehidupan bangsa Indonesia. Sedangkan subjek lainnya (S2) mengatakan bahwa Pancasila adalah ideology ideal dalam menyatukan dan mempersatukan umat beragama tanpa merasa ada yang dirugikan. Subjek (S3) mengatakan bahwa seluruh agama bermuara pada Yang Maha Kuasa dengan nama yang berbeda-beda. Pancasila mewujudkan hal itu dalam sila pertamanya. Sila pertama juga menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara agamis, tetapi tidak hanya pada satu agama. Subjek (S4) mengatakan Pancasila melindungi suatu umat beragama dan mampu bertoleransi dalam menjalankan

ibadahnya masing-masing, karena di dalam Pancasila tidak terdapat mengatasnamakan suatu agama tertentu.

Sejalan dengan pernyataan di muka, Subjek (S5) mengatakan Pancasila dibuat berdasarkan falsafah Indonesia yang berbeda latar belakang suka dan agamanya. Pancasila dapat menjadi dasar pedoman untuk melindungi semua keyakinan yang ada apa pun agamanya. Semua orang berhak mendapatkan perlindungan negara dan perlindungan hukum karena mereka adalah warga Negara Indonesia. Terkait dengan peran agama dinyatakan pula oleh Subjek (S6) bahwa agama melindungi negara dan agama juga berfungsi memperkuat eksistensi negara. Agama dan negara saling berkontribusi. Oleh karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam agama, maka dibutuhkan ideologi pemersatu untuk kedamaian bersama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa para mahasiswa yang juga adalah remaja kampus berpandangan positif terhadap peran Pancasila sebagai payung bagi seluruh umat beragama di Indonesia.

3. Pandangan bahwa semua agama pada sisi dalam mengajarkan hal yang sama, yaitu kebaikan dan keadilan.

Subjek 1 (S1) mengatakan adalah benar bahwa agama mengajarkan kebaikan dan keadilan, namun saat ini orang menganggap bahwa agama lah yeng menimbulkan konflik padahal pandangan tersebut salah karena kericuhan itu ditimbulkan dari orangnya bukan agamanya. Demikian pula S3 mengatakan sepakat dengan pernyataan di atas. Setiap agama selalu mengajarkan kebaikan; hanya saja penganutnya yang tidak menjalankan atau berlaku berlebihan sehingga agama kini dianggap rusuh dan menyeramkan.

S5 mengatakan untuk sisi kebaikan dan keadilan memang ada kesamaan inti ajaran, namun untuk hal lainnya tentu berbeda. S9

berpendapat senada bahwa semua agama mengajarkan umat untuk berbuat baik dan adil karena semua itu akan ada konsekuensinya. Jika kita ingin mendapatka perlakuan yang baik dan adil, maka perlakukan pula pada orang lain hal yang sama.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa para mahasiswa berpendapat sama. Agama mengajarkan kebaikan dan keadilan, tetapi pemeluk agama terkadang yang tidak menjalankanya atau berlebihan dalam memaknainya sehingga agama kini dianggap menyeramkan.

4. Upaya memecah belah bangsa dengan penggunaan isu-isu politik identitas yang terkait dengan SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan)

Menurut pemahaman mahasiswa (S1), upaya memecah belah bangsa dengan menggunakan isu-isu politik identitas terkait SARA sebaiknya tidak dilakukan karena hal tersebut tidak sesuai dengan harkat martabat bangsa yang berpedoman pada Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Sedangkan mahasiswa lainnya (S2) mengatakan isu ini sangat sensitif dan tidak perlu dipermasalahkan. Hanya saja, nafsu manusia untuk berkuasa telah menutup mata dan memuat isu SARA ini menguasai panggung politik serta saling mengumbar kebencian di atas perbedaan. Ini tidak seharusnya terjadi pada Indonesia yang sejak awal sudah 'deal' dengan Bhineka Tunggal Ika. Para pemberi isu SARA seharusnya membuka mata dan telinga apa yang ia lakukan telah menyakiti seluruh elemen bangsa.

Dinyatakan pula oleh S4 bahwa tiap suku, agama, ras, seharusnya lebih waspada, jernih, tidak mudah terpancing isu dan mementingkan kepentingan bersama.S5 menggarisbawahi pernyataan subjek lainnya dengan menyatakan "kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan oknum-oknum di balik meningkatnya isu-isu yang memecah belah

tersebut, tetapi sebagai warga negara yang mengamalkan pancasila, semestinya kita tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu tersebut. Kita harus memiliki filter yang kuat dan Pancasila merupakan filter rakyat Indonesia untuk menghadapi hal-hal seperti itu."

S14 mengatakan mengingkatnya isu politik terkait SARA diakibatkan meningkatnya egosentris kedaerahan. Hal tersebut dimanfaatkan oleh beberapa oknum politik untuk memperoleh suara dan menimbulkan perpecahan; oleh karena itu perlu dibangun rasa persatuan dan kesatuan yang lebih kokoh. Sedangkan S16 mengatakan hal yang senada bahwa zaman sekarang bukan identitas SARA yang membuat kita hebat, tetapi identitas diri sebagai Indonesia yang mampu bersaing dengan negara lain, sedangkan S 15 mengatakan masyarakat harus memiliki pemikiran yang baik, serta memiliki keyakinan yang benar supaya tidak mudah terpengaruh. Masyarakat adalah suara mayoritas yang harus dijaga keutuhannya.

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya para remaja kampus yaitu mahasiswa telah menyadari sepenuhnya akan adanya isu SARA yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politiknya. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah memperkuat ketahanan bangsa dengan pemikiran dan keyakinan yang benar supaya tidak mudah terpengaruh oleh berbagai isu. Isu SARA seharusnya sudah tidak muncul lagi, tetapi yang diperlukan adalah isu berupa tantangan Indonesia sekarang ini, yaitu Indonesia yang hebat, yang mampu bersaing dengan negara lain.

5. Upaya menangkal HOAKS, ujaran kebencian, dan kampanye berbau SARA oleh Satgas POLRI

Dinyatakan oleh subjek (S1) bahwa untuk menangkal hoaks

seharusnya tidak perlu menunggu kiprah konkret Satuan Tugas yang dibentuk POLRI. mulai saja dari diri kita sendiri. Perlu adanya pemikiran untuk tidak melakukan penyebaran yang berkaitan dengan hal tersebut serta perlu ada penyaringan kebenaran terhadap data atau berita agar meminimalisir masalah tersebut. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat S 2 bahwa fungsi polisi memang untuk hal-hal seperti ini, namun untuk menangkal sendiri tidak perlu POLRI yang bertindak. Diperlukan kesadaran dari diri sendiri bahwa hoaks, ujaran kebencian dan kampanye berbau SARA tidak perlu disebarluaskan. Kesadaran diri dapat ditumbuhkan dengan edukasi sejak dini, dan ini dirasa lebih efektif daripada sekedar membuat satuan untuk hal tersebut.

S7 mengatakan dalam menangkal hoaks seharusnya tidak harus menunggu POLRI, dapat dilakukan oleh diri sendiri seperti berpikir jernih, akan tetapi dalam penangkapan terhadap penyebar hoaks itu tetap perlu. Demikian pula S8 menyatakan hal yang senada "kita tidak perlu menunggu POLRI guna menangkal hoaks, tetapi kita berpartisipasi untuk tidak langsung terus percaya kepada isu-isu yang ada dengan menyaring informasi yang tersebar."

S12 berpendapat yang sama bahwa Satgas Nusantara POLRI memang dibutuhkan untuk menghindari isu SARA, hoaks, dan ujaran kebencian, namun perlu diperhatikan lagi adalah cara berfikir masyarakat dari semua lapisan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik demi kemajuan dan keamanan suatu bangsa. Jika masyarakat sudah memiliki pemikiran dewasa, maka masyarakat tidak bergantung pada satgas tersebut.

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa para mahasiswa sepakat untuk menangkal hoaks, ujaran kebencian dan kampanye berbau SARA harus dimulai dari diri sendiri, yaitu

berpikir jernih, harus dapat menyaring, tidak mudah percaya dengan informasi sesat yang disebarkan. Satgas diperlukan dalam rangka ketertiban dan hokum, tetapi yang lebih penting lagi adalah edukasi sejak dini kepada warga Negara agar tidak mudah terpancing hoaks, ujaran kebencian, dan SARA.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemahaman dan penghayatan mahasiswa tentang hakikat nilai-nilai Pancasila pada umumnya mencapai taraf **sangat baik**, begitu pula terhadap nilai humanis, nilai nasionalis, nilai demokratis dan nilai adil. Sedangkan pemahaman dan penghayatannya terhadap nilai religius sebagian besar baru mencapai taraf **baik,** dan belum mencapai **sangat baik**. Hali ini perlu mendapat perhatian lembaga pendidikan, pendidikan tinggi khususnya melalui Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, karena Sila 1 (religius) sebagai urat tunggang atau sumber pangkal dari 4 sila lainnya.
2. Pemahaman dan penghayatan mahasiswa terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kaitannya dengan berbagai persoalan yang melanda kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dewasa ini, **sangat baik**. Hal ini perlu dipelihara bahkan dikembangkan agar nilai-nilai Pancasila semakin membumi dalam kehidupan bangsa Indonesia. mesti menjadi payung dan panduan dalam kehidupan bermasyarakat.

Mewujudkan Kampus Pancasila?

GRENDI HENDRASTOMO;
NUR ENDAH JANUARTI;
NUR HIDAYAH

Dinamika kehidupan kampus tidak dapat dilepaskan dari interaksi yang terjadi antara civitas akademika. Kampus sebagai kawah candradimuka untuk mengembangkan pola pikir dan pengetahuan menjadi magnet bagi individu untuk bergabung. Keinginan untuk mengembangkan diri dan mendalami ilmu menjadi daya tarik individu untuk datang, hadir dan pada akhirnya menjadi bagian dari dunia kampus. Dunia kampus merupakan tempat untuk bertemunya ide ataupun gagasan dari beragam karakter, latar belakang, pengetahuan maupun lingkungan social yang mendorong munculnya perbedaan. Perbedaan menjadi salah satu penguat, perekat sekaligus menyimpan potensi untuk mendorong pertentangan. Indonesia sebagai negara dengan beragama budaya memiliki banyak keragaman yang disatukan salah satunya melalui simbol dan ideologi negara yaitu Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi negara sering diartikan sebagai ide dan cita-cita harapan yang sulit untuk dimanifestasikan dalam wujud nyata. Nilai-nilai Pancasila lebih banyak didiskusikan dalam tataran wacana tanpa menyentuh sisi praksis. Pada akhirnya Pancasila lebih banyak diajarkan secara teori daripada dipraktekkan dalam realita nyata. Pengamalan nilai-nilai Pancasila masuk dalam diri individu melalui paksaan kognitif dibandingkan dengan aktualisasi nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi ini memunculkan Pancasila di pahami lebih karena ancaman bukan karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Memahami Pancasila, artinya menempatkan semua warga negara dalam posisi yang setara. Frasa Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia perlu dipahami tidak hanya berdasarkan teks tetapi juga pada sisi praksis. Ideologi Pancasila perlu terus menerus disuarakan sebagai landasan dasar kehidupan berwarganegara. Perguruan tinggi sebagai salah satu menara pengetahuan perlu mengupayakan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam praktek berkehidupan kampus. Perguruan tinggi menjadi contoh dimana civitas akademiknya sangat beragam, berasal dari segala penjuru tanah air yang memiliki keberagaman dan perbedaan. Nilai-nilai Pancasila perlu disemai di perguruan tinggi tidak hanya secara legal melalui kurikulum dan perkuliahan, tetapi perlu diimplementasikan dalam praksis berkehidupan di kampus.

Kondisi saat ini menunjukkan kondisi ideal tersebut masih jauh dari kenyataan. Peristiwa pelarangan mahasiswa bercadar di sejumlah perguruan tinggi menunjukkan masih ada diskriminasi dan penanaman nilai-nilai yang melenceng dari Pancasila (Faruq, 2018). Pada saat ini gesekan di masyarakat semakin sering terjadi. Konflik membuncah dengan sangat cepat tanpa bisa dicegah dan terkadang berasal dari perbedaan pendapat dan cara pandang yang berujung pada perpecahan. Dikotomi minoritas dan mayoritas masih sering muncul sebagai bentuk

penekanan dan pemaksaan kuasa mayoritas terhadap minoritas. Dalam konteks ini toleransi menjadi salah satu nilai utama yang perlu dikedepankan. Toleransi merupakan sikap saling menghormati dan menghargai akan perbedaan-perbedaan yang ada tanpa syarat. Membangun persatuan dan kebersamaan memerlukan upaya dialogis, mendorong dan menumbuhkembangkan kesetaraan antar sesama.

Universitas Negeri Yogyakarta sebagai salah satu perguruan tinggi kependidikan terbaik, memiliki semangat untuk membumikan Pancasila melalui praktek-praktek toleransi di dalam kehidupan kampus. UNY berupaya untuk menjadi Lembaga yang mengimplementasikan nilai Pancasila dalam tataran praksis sebagai wujud dan tanggung jawab untuk membumikan pancasila dalam praktek Pendidikan.

Menumbuhkan Inklusifitas Sosial dalam Organisasi Mahasiswa

Menjadi pertanyaan bersama tentang bagaimana mengimplementasikan atau mewujudkan kampus Pancasila? Mewujudkan nilai-nilai Pancasila di Perguruan Tinggi perlu dilakukan dan diinternalisasikan dalam diri civitas akademika. Elemen kampus perlu bersama-sama mewujudkan kampus berlandaskan Pancasila. Dosen, Tenaga Pendidikan, Mahasiswa, perlu bersama-sama menciptakan suasana yang sesuai dengan semangat keberagaman. Tidak hanya dari sisi individu, Perguruan Tinggi perlu membangun dan mengembangkan kebijakan yang mengarah pada upaya untuk menciptakan kesetaraan baik dalam wujud sarana maupun prasarana.

Menurut Yudi Latif, pemahaman Pancasila tentang keberagaman di kalangan generasi muda harus terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari mulai tingkat keyakinan, pengetahuan, hingga tindakan (Media Indonesia, 2017). Di perguruan tinggi mayoritas mahasiswa melakukan

kegiatan utama di dalam kelas, beragam cara melakukan internalisasi telah dilakukan melalui proses pembelajaran (Murdiono, 2010; Supeni, 2015) baik melalui kerangka kurikulum, silabus, hingga strategi pembelajaran. Internalisasi melalui proses pembelajaran tidak dapat dikatakan gagal, tetapi dibanyak hal sering kali tidak maksimal karena dalam lingkungan pendidikan proses pembelajaran di kelas hanya salah satu dari aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa selain di kelas juga melakukan aktivitas extrakurikuler di luar kelas melalui beragam kegiatan yang ada dan dikembangkan di perguruan tinggi. Salah satunya melalui organisasi mahasiswa.

Organisasi mahasiswa merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan gagasan dalam rangka pengembangan diri. Berkumpul, berdiskusi, menjadi salah satu cara organisasi berkembang. Wacana dan alur pemikiran mahasiswa dikontruksi lebih banyak melalui kegiatan-kegiatan organisasi mahasiswa. Mahasiswa akan belajar nilai-nilai keberagaman, memupuk toleransi antar sesama melalui organisasi. Disisi lain organisasi mahasiswa juga bisa menjadi sumber radikalisasi dan intoleransi karena sifatnya yang mengikat dan dekat antar sesama mahasiswa. Radikalisme dan intoleransi sering kali berkembang akibat minimnya kegiatan organisasi kemahasiswaan yang berorientasi untuk memupuk nilai keberagaman. Organisasi mahasiswa justru sering menunjukkan eksklusifitas dan memutuskan program berbasis dominasi (Wardah, 2011). Oleh sebab itu perlu untuk memaknai keberagaman dari sudut pandang mahasiswa, memupuk inklusifitas sosial melalui internalisasi nilai keberagaman dalam kegiatan organisasi mahasiswa.

Inklusifitas sosial di ranah pendidikan merupakan suatu upaya untuk melembagakan dan membudayakan keberagaman sebagai salah satu unsur nilai pancasila. Istilah inklusif disini bukan seperti yang tertulis dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas)

Nomor 70 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya, tetapi inklusif dalam arti yang lebih umum. Artinya inklusif disini bukan seperti pendidikan inklusif yang meniadakan hambatan peserta didik yang mengalami kelainan untuk bersekolah di sekolah standard (umum), tetapi inklusif dalam arti tidak ekslusif, terdapat pembauran siswa dari berbagai latar belakang dan strata sosial.

Istilah inklusif diartikan dengan persamaan, keadilan, dan hak individual dalam pembagian sumber-sumber seperti politik, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Masing-masing dari aspek-aspek tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan satu sama lain. Istilah inklusif berkaitan dengan banyak aspek hidup manusia yang didasarkan atas prinsip persamaan, keadilan, dan hak individu.

Inklusif disini justru lebih kearah pluralisme, pluralisme adalah sebuah kerangka dimana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormat dan toleransi satu sama lain. Mereka hidup bersama (koeksistensi) serta membuahkan hasil tanpa konflik asimilasi. Penegasan pluralisme adalah ketika diakuinya wacana kelompok, individu,komunitas, sekte dan segala bentuk perbedaan sebagai fakta yang harus diterima dan dipelihara. Dalam pluralisme, keberbedaan diakui adanya dan karenanya bukan ingin dilebur dan disatukan dalam bentuk homogenitas, kesatuan, tunggal, mono dan ika (Ridwan, 2002:77). Pluralisme kemudian dimengerti sebagai kenyataan adanya perbedaan karakter, tingkah polah, perilaku yang barangkali sangat menyebalkan, tetapi harus diterima sebagai realitas yang ada.

Pluralisme dalam pendidikan dimunculkan untuk memperlihatkan bahwa adanya siswa pintar, bodoh, kaya, miskin, berbeda agama, etnis, merupakan suatu keniscayaan yang ada dan memang nyata, sehingga walaupun malu dan tidak ingin bersama dengan siswa bodoh misalnya, tetapi realita tetap ada dan harus diterima sebagai bagian dari ketidaksamaan antar masing-masing individu. Dengan demikian pluralisme akan mendorong munculnya toleransi, saling menghargai dan perubahan pola pikir dan tindakan yang berpijak pada kepentingan bersama. Setiap orang harus menganggap perbedaan sebagai bagian dari kehidupan dan kenyataan, sebab setiap orang hidup ditengah-tengah orang lain, sebagaimana orang lain juga hidup ditengah-tengah banyak orang (Ridwan, 2002:87).

Pluralisme yang dimunculkan dalam pendidikan inklusif merupakan pembuktian amanat UUD 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Hak pendidikan yang dimaksudkan adalah pendidikan yang tidak mengikat ras, agama, latar belakang, dan sebagainya. Apalagi Indonesia juga merupakan negara multikultural. Berbagai agama, beragam suku, beragam budaya, semua ada di Indonesia. Untuk mewujudkannya, diperlukan kebijakan tentang pendidikan inklusi di Indonesia agar bisa diterapkan secara menyeluruh, dengan kata lain pemerintah dituntut untuk berusaha mewujudkan pencapaian hak setiap warga memperoleh pendidikan tanpa kecuali.

Konsep pendidikan yang inklusif juga didukung oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jelas tertulis bahwa "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa". Ada dua hal (Mukayanah, 2009) yang perlu ditekankan dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan (UU Sisdiknas) di

atas. Pertama, mengenai demokratisasi pendidikan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa prinsip dalam demokrasi adalah mengutamakan penjaminan hak, termasuk hak dalam pendidikan. Merujuk pemikiran Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hadjar Dewantara, pendidikan seharusnya merupakan media dan bukan tujuan. Pendidikan hanyalah sarana untuk mendapatkan tujuan. Dan tujuan itu tidak lain adalah menjadikan manusia hasil pendidikan sebagai manusia merdeka lahir maupun batin. Tidak terjajah secara ekonomi, fisik, politik, dan sebagainya. Sedangkan pendiskriditan manusia dengan cara memisahkan pendidikan mereka dengan masyarakat lain merupakan suatu bentuk penjajahan secara mental. Pemisahan pendidikan ini hanya akan membunuh potensi yang ada dalam diri manusia.

Kedua, yang perlu digarisbawahi adalah mengenai prinsip penyelenggaraan pendidikan secara berkeadilan. Sebagaimana yang sudah sering disampaikan, pendidikan merupakan hak. Adalah tidak adil jika satu pihak mendapatkan pendidikan yang layak, sedang pihak lainnya tidak. Bukan keadilan namanya jika setiap orang merasa tidak dihargai satu sama lain. Dan itu yang terjadi dalam pendidikan kita selama ini. Pemisahan antara sekolah umum dan sekolah luar biasa hanyalah salah satu bentuk ketidakadilan. Dan dengan sekolah inklusif, harapan untuk segera merealisasikan penyelenggaraan pendidikan berkeadilan akan segera terpenuhi.

Pada akhirnya inklusifisme sosial di ranah pendidikan adalah pendidikan untuk semua, tanpa sekat, tanpa melihat status sosial, kemampuan akademis, agama, etnis dan latar belakang mahasiswa. Pendidikan inklusif ingin mengenalkan sejak dini kepada mahasiswa supaya mereka mengenal lebih dekat apa itu toleransi, apa itu keberagaman, apa itu kebhinekaan yang ada di Indonesia.

Menumbuhkan Nilai Keberagaman dan Toleransi di Perguruan Tinggi

Nilai keberagaman tidak hanya dipraktekkan dalam kegiatan perkuliahan, tetapi juga dipraktekkan di semua kegiatan himpunan mahasiswa. Pada implementasinya, sering kali toleransi tidak secara penuh dipratekkan oleh mahasiswa sebagai anggota organisasi. Pemahaman tentang keberagaman lebih banyak didasarkan atas dasar pemakluman. Kondisi inilah yang perlu untuk ditanggulangi, dicarikan solusi sehingga proses penanaman nilai keberagaman tidak terputus. Konsekuensi yang mesti dihadapi oleh universitas adalah mencari model, jalan bagaimana cara terbaik untuk memberikan pemahaman terhadap keberagaman dari semua aspek.

Selama ini pemahaman tentang keberagaman berhenti pada aspek kognitif, teoritis yang minim aksi nyata. Tidak ada bukti dan penelitian yang mengupayakan dan melihat seberapa dalam pemahaman mahasiswa terkait dengan keberagaman. Selama ini kegiatan organisasi dipandang sebagai proses yang biasa dilakukan, sehingga berbagai cara untuk mengeser pola-pola yang sudah ada sulit untuk dilakukan.

Dalam organisasi mahasiswa, pola-pola yang dilakukan saat ini diberbagai kegiatan merupakan pola-pola yang secara kultural diturunkan dari mahasiswa angkatan-angkatan sebelumnya yang dibanyak hal terkadang tidak sesuai dengan kondisi terkini. Pola-pola kegiatan secara kultural dan terstruktur dilembagakan dan menjadi satu model yang digunakan dan ironisnya diyakini sebagai sesuatu yang benar dan tidak bisa berubah. Hal tersebut disebabkan karena beberapa kondisi (1) secara organisasi posisi subordinasi yang menciptakan dikotomi senior dan junior masih terjadi, dimana junior menganggap bahwa apa yang dilakukan angkatan sebelumnya sebagai pola/pattern yang diduplikasi pada kepemimpinan berikutnya. (2) secara kultural,

ada keterbelenguan pemikiran, dimana pengurus organisasi sadar bahwa perlu ada perubahan, tetapi tidak bisa berbuat banyak ketika secara kultural, pengurus dan anggota yang lain tidak menyepakati perubahan. (3) munculnya pemimpin di belakang layar yang lebih memiliki kuasa, orang-orang kuat ini berupaya menjadi dalang dan mengatur kegiatan bahkan melakukan intervensi untuk kepentingan kelompok. (4) munculnya kelompok-kelompok kepentingan yang berupaya menggunakan jaringan organisasi untuk melembagakan kekuasaan kelompok tertentu dengan 'memaksakan' ide-ide untuk diberi media atau wadah. Keempat hal tersebut menjadi penyebab mandegnya penyemaian nilai-nilai keberagaman di organisasi mahasiswa.

Jaringan mahasiswa dengan organisasi lain turut memperlemah upaya internalisasi nilai-nilai keberagaman, dikarenakan ketika ada upaya-upaya untuk memberikan kesetaraan bagi semua, di klaim sebagai upaya untuk memberikan ruang dan organisasi tersebut di pinggirkan. Secara psikologi tidak banyak aktivis organisasi yang siap untuk menghadapi klaim dan serangan dari organisasi lain.

Hingga saat ini praktek-praktek yang menunjukkan ketidaksetaraan masih dipelihara, bukan karena tidak mengerti/memahami, tetapi justru karena ketidakmampuan untuk membawa kesadaran kearah tindakan. Mahasiswa sadar bahwa praktek ketidaksetaraan masih terjadi, tetapi kesadaran mereka tidak diimbangi dengan upaya lanjutan untuk memberikan ruang kebebasan dan berekspresi di kalangan mahasiswa, ironisnya pengampu kebijakan justru menjadi pihak yang menutup kemungkinan munculnya kesetaraan.

Upaya untuk menginternalisasi keberagaman di organisasi mahasiswa perlu menggunakan model-model yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Upaya itu perlu dimulai dari tataran kebijakan, sarana-prasarana, iklim/ekosistem hingga pada upaya diskusi secara

terstruktur dan personal didalam organisasi mahasiswa. Upaya untuk menumbuhkan nilai keberagaman dan toleransi di perguruan tinggi dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut.

1. Kebijakan Universitas

   Universitas perlu memiliki kebijakan untuk melakukan 'intervensi' melalui kegiatan-kegiatan mahasiswa atau bahkan menyediakan pelatihan-pelahtihan bagi calon-calon pengurus organisasi dan anggotanya. Pemahaman tentang keberagaman menjadi salah satu materi softskill terkait dengan pemahaman lintas budaya. Selama ini universitas belum melakukan kontrol secara menyeluruh terhadap proses upgrading yang selalu dilakukan oleh organisasi mahasiswa ketika mereka mengubah susunan kepengurusan. Universitas perlu menangkap peluang ini untuk meningkatkan kompetensi sekaligus pemahaman tentang nilai keberagaman, sehingga ketika menjalankan organisasi, praktek-praktek ketidaksetaraan dapat diminimalisir. Selanjutnya universitas perlu memberikan contoh nyata terkait dengan toleransi terhadap perbedaan dengan menyediakan fasilitas yang sama untuk semuanya. Universitas juga perlu untuk menunjukkan kesetaraan baik secara simbolis maupun nyata, termasuk didalamnya tidak hanya menjadikan mahasiswa sebagai subjek kebijakan pemahaman keberagaman, tetapi juga perlu menyiapkan dosen maupun tenaga pendidik tentang makna keberagaman, tanpa pengecualian. Misalnya dalam menempatkan semua agama sama, dengan menghindari ucapan non-Islam dan langsung menyebut nama agama yang dimaksud, termasuk dalam memberikan ucapan selamat hari raya kepada semua agama. Dalam aspek gender, dibanyak organisasi secara tidak langsung masih mengutamakan laki-laki dibanding perempuan, di dosen dan

tenaga kependidikan, kasus yang sama juga masih sering terjadi, sehingga dapat dimulai dari mendorong kesetaraan gender di tingkat universitas. Dosen dan tenaga kependidikan ini yang akan menjadi role model bagi mahasiswa mengimplementasikan toleransi atas dasar kesetaraan.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Sampai saat ini penyediaan sarana dan prasarana masih terkadang menitikberatkan pada kelompok tertentu. Sebagaii contoh dalam segi agama, dari hasil penelitian kebutuhan akan beribadah tidak hanya dimiliki oleh pemeluk agama Islam, tetapi juga pemeluk agama Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu. Semua agama membutuhkan waktu khusus untuk beribadah. Kebutuhan akan ruang beribadah bukan sesuatu yang mutlak, tetapi ketenangan dalam beribadah perlu mendapatk fasilitas khusus. Universitas perlu menyediakan ruang ibadah yang diperuntukkan untuk semua agama. Di Hima Pendidikan Sosiologi, organisasi mencoba untuk memfasilitasi semua kepentingan agama, sebagai contoh ruang hima dapat dijadikan tempat ibadah untuk semua agama tanpa kecuali, walaupun sampai saat ini hima belum dapat menyediakan kebutuhan-kebutuhan untuk beribadah. Perlu ada kesepakatan di dalam organisasi bahwa ketika salah satu agama difasilitasi maka agama yang lain juga mendapat fasilitas yang sama. Peran universitas dalam hal ini memastikan kebutuhan semua pemeluk agama mendapatkan fasilitas yang setara. Kebutuhan-kebutuhan terkait dengan agama, budaya, bahkan gender perlu difasilitasi secara setara. Ketika universitas ingin menginternalisasikan nilai-nilai pancasila (nilai keberagaman dan toleransi) maka perlu ada kesetaraan dalam segi sarana dan prasarana.

3. Iklim/Ekosistem

Internalisasi nilai keberagaman perlu wadah dan ekosistem yang mendorong semua dapat mewujudkan toleransi dan mendorong terwujudnya kesadaran akan keberagaman. Di dalam organisasi kampus, perlu dibiasakan untuk mewujudkan kesetaraan dan menghargai kebersamaan yang dimulai dari hal-hal yang sederhana, tetapi justru simbolis. Hal yang selalu dilakukan setiap hari dan dalam kegiatan-kegiatan organisasi perlu ditumbuhkan semangat kesetaraan. Mulai dari (1) pengucapan salam baik hanya salam yang umum, atau kalau menggunakan salam berbasis agama maka perlu untuk mengucapkan salam untuk semua agama. (2) menganggap perbedaan bahasa dan dialek sebagai bagian keragaman yang tidak perlu dipermasalahkan, (3) mengurangi gurauan yang menyerempet etnisitas walaupun dilakukan dalam rapat terbatas, (4) menghargai kesetaraan gender dengan tidak menggunakan wanita sebagai bahan lelucon (sexist).

Menumbuhkan iklim/ekosistem ini tidak mudah karena masing-masing organisasi memiliki budaya tersendiri. Di hima pendidikan sosiologi, membangun iklim ini jauh lebih cepat dikarenakan pemahaman secara teori sering disampaikan dalam perkuliahan maupun dalam proses pengembangan organisasi. Perlu penekanan dan contoh nyata sehingga kesadaran secara pengetahuan dapat menjadi kesadaran nyata.

4. Diskusi

Internalisasi nilai keberagaman melalui kegiatan organsasi mahasiswa dapat dilakukan dengan melakukan diskusi langsung. Model diskusi menjadi salah satu cara yang tepat untuk mendialogkan perbedaan dan keragaman yang ada. Mahasiswa dari berbagai latar

belakang dipandu untuk dapat mengemukakan pendapat dengan membahas isu-isu perbedaan dan keberagaman. Model ini muncul dari diskusi grup terfokus maupun wawancara dengan informan yang menganggap bahwa cara yang mungkin dilakukan untuk mendorong pemahaman akan keberagaman adalah dengan berdialog.

Organisasi mahasiswa (Hima) perlu untuk menyelenggarakan dialog-dialog terbuka yang terkait dengan perbedaan pada waktu awal tahun ajaran. Diskusi dan dialog memberikan tempat yang setara pada semua untuk dapat berpendapat dan mengutarakan gagasan. Hingga kini bias toleransi sering muncul bukan karena ketidakpahaman akan perbedaan tetapi karena pemahaman perbedaan hanya tersampaikan dari satu sudut pandang. Dengan diskusi dan dialog maka akan muncul pendapat dan argumentasi dari beragam sudut pandang dan justru dari individu yang berbeda baik dari aspek budaya, agama, bahasa, gender maupun etnisitas. Dialog dalam pemahaman antar budaya dapat memberikan pengalaman baru akan pentingnya kesadaran akan keberagaman.

Penutup

Mewujudkan kampus Pancasila memerlukan daya juang untuk melakukan berbagai hal baik secara simbolik maupun praktek nyata. Praktek di kehidupan kampus menunjukkan bahwa penanaman nilai-nilai Pancasila secara umum selalu digalakkan oleh civitas kampus, hanya saja bias pemahaman masih terjadi terutama dalam memaknai nilai keberagaman, kesetaraan dan toleransi. Nilai keberagaman masih sering dimaknai dari satu sudut pandang dengan melakukan pembandingan satu sama lain. Keberagaman dipahami sebagai sebuah anugerah, tetapi disisi lain masih muncul permasalahan terkait dengan toleransi. Kacamata memahami keberagaman dan toleransi masih

dilakukan berbasis hubungan mayoritas dan minoritas. Dalam organisasi mahasiswa, kegiatan-kegiatan dilakukan dengan basis kebiasaan dan kuantitas, artinya beragam keputusan didasarkan pada jumlah bukan berdasarkan pada aspek kesetaraan.

Praktek toleransi dan penanaman nilai keberagaman untuk mewujudkan kesetaraan (inklusifitas social) diupayakan melalui beragam cara, tidak hanya melalui perkuliahan tetapi juga melalui proses pembudayaan baik secara verbal maupun nonverbal. Perguruan tinggi perlu mendorong dan menumbuhkan nilai keberagaman khususnya dalam organisasi mahasiswa melalui 4 hal, yaitu dalam wujud kebijakan di tingkat universitas, dimana universitas perlu menyisipkan nilai-nilai pancasila didalam kegiatan softskill dan mendampingi sekaligus mengarahkan organisasi mahasiswa sejak awal untuk membekali pengurus dan anggota tentang nilai keberagaman; penyediaan sarana dan prasarana, universitas perlu menyediakan fasilitas yang sama untuk semua mahasiswa dari beragam latar belakan, termasuk didalamnya ruang ibadah bagi semua agama; membangun iklim dan ekosistem berbasis Pancasila; dan menumbuhkan diskusi dan dialog setara untuk semua. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dibangun model penanaman nilai keberagaman dengan merancang panduan implementasi kurikulum terutama melalui organisasi mahasiswa. Perlu upaya struktural dan sistemik untuk masuk dan mendialogkan nilai keberagaman dan toleransi.

Online Discussion Forum untuk mengkonstruksi Pengetahuan dan Interaksi Mahasiswa

TRI WAHYUNI FLORIASTI

Penanaman nilai-nilai keadilan dari sila ke-2 Pancasila perlu diimplementasikan dalam proses belajar dan pembelajaran di program studi Pendidikan Bahasa Inggris FBS UNY. Implementasi ini perlu dilakukan karena sila ke-2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradap memberikan kandungan nilai keadilan yang dimaksudkan adalah memberikan bimbingan bagaimana berkomunikasi dengan sesama manusia, diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajiban asasinya tanpa membedakan suku, agaman, jenis kelamin dan kedudukan sosial. Pancasila merupakan dasar dalam menentukan arah pendidikan moral dan keteladanan bagi mahasiswa UNY. Dosen perlu melihat ini sebagai sebuah kebutuhan dan acuan dalam mendisain pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang tetap mengedepankan nilai keadilan sila ke-2.

Manusia memiliki hak-hak asasi dasar yaitu merasakan pendidikan yang sama tanpa melihat latar belakang agama, suku, golongan dan status sosial dalam masyarakat. Melihat hak dasar tersebut, penelitian implementasi nilai-nilai Pancasila khususnya sila ke-2 merupakan langkah nyata yang tepat

di proses belajar dan pembelajaran di Universitas Negeri Yogyakarta. UNY mempunyai program daring yang memberikan kesempatan pembelajaran jarak jauh melalui *e-learning* yang telah difasilitasi salah satunya *digital library*. Jangkauan pembelajaran ini nantinya diharapkan mencapai tidak hanya tingkat lokal saja, tetapi juga nasional bahkan Internasional. Hal ini seiring dengan pendapat dari Natonagoro (1995: 19) yaitu manusia bergaul antar bangsa-bangsa berdasarkan keadilan dan beradab untuk membangun kekeluargaan.

Penanaman nilai-nilai tersebut perlu implementasikan sejak awal pada mahasiswa UNY melalui pembelajaran (Fattah, 2013). Sehingga mahasiswa dapat mengembangkan sikap saling menghargai dan bekerjasama dalam kehidupan sehari-hari (Pitoyo dkk, 2012: 16-18). Dari uraian diatas dapat diwakilkan dengan gambar 1 dibawah ini.

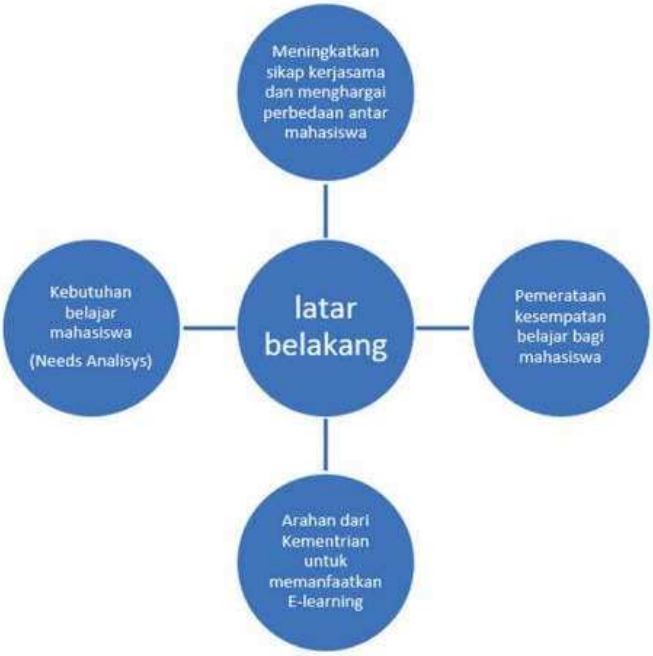

Gambar 1. Lingkaran Latar belakang

Melihat kebutuhan untuk menerapkan nilai-nilai keadilan dalam pembelajaran maka dosen perlu melakukan langkah nyata yaitu mendisain dan pemutahiran bahan ajar dengan mengintegrasikan teknologi perlu

dilakukan oleh dosen sebagai salah satu upaya untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Inggris yang terbaru. Penggunaan bahan ajar dan media pembelajaran yang sama berulang kali bukanlah hal yang salah tetapi akan menimbulkan kebosanan pada mahasiswa. Dapat juga berakibat pada berkurangnya mutu kemutakhiran materi yang akhirnya akan menurunkan kualitas proses pembelajaran dan dapat berdampak pada tingkat penguasaan keterampilan berbahasa Inggris. Pemutahiran bahan ajar dilakukan dengan melihat tujuan yang akan dicapai pada mata kuliah tersebut, kebutuhan mahasiswa dan permasalahan dalam pembelajaran. Penelitian ini mencoba merintis mengembangkan model pembelajan daring yang mengimplementasikan nilai-nilai keadilan sila ke 2 Pancasila.

Selanjutnya, model yang dikembangkan yaitu dengan melakukan inovasi cara penyampaian dengan memanfaatkan teknologi *Online Discussion Forum* (ODF) melaui *e-learning*. Sarana *e-learning* yang telah disediakan oleh UNY sangat membantu dalam proses belajar dan pembelajaran. Dengan memanfaatkan sarana tersebut dapat mengatasi keterbatasan alokasi waktu belajar di dalam kelas. Mahasiswa dan dosen dapat melanjutkan proses belajar dan beriteraksi *offline* maupun *online* melalui *e-learning* dan *blended learning*. Adapun pengertian blended learning dan istilah elearning yang diusung oleh Kurthen 2007 dalam Gruba dan Hinkelman (2014: 4) dalam Tomplinson dan Whittaker (2013) dapat dicermati dalam taksonomi tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Taksonomi istilah blended learning

Istilah	Definisi
Web-enhanced	Penggunaan materi online sangat mini, misalnya memberikan silabus dan pengumuman.
Blended	Porsi online kurang dari 45% dari porsi pertemuan di kelas.
Hybrid	Aktifitas online antara 45%-80% dari tatap muka di kelas.

Alasan yang melatarbelakangi pemilihan ODF sebagai media pembelajaran yaitu pertama, peran ODF sebagai salah satu input. Mahasiswa dapat pajanan yang memadai sesuai dengan kebutuhan belajar mereka melalui diskusi online. Selain alasan itu, dosen bukan lagi sebagai satu-satunya sumber belajar dan model yang dapat diikuti dan dicontoh oleh mahasiswa. Kedua, mahasiswa perlu berpartisipasi dalam proses belajar sebanyak mungkin. Melalui ODF mahasiswa bisa menggali informasi sebanyak mungkin tanpa terkendala waktu belajar karena ODF memberikan waktu yang lebih leluasa. Ketiga, partisipasi mereka dalam ODF lebih efektif karena pembelajaran lebih leluasa, dikaitkan dengan pengetahuan yang sebelumnya, merefleksikan nilai- nilai atau paham yang mereka anut, mahasiswa memegang kendali atas apa yang mereka pelajari, kapan dan bagaimana cara belajar. Hal ini diharapkan mampu mendorong konstruksi pengetahuan. Selain itu, terjadinya sikap kerjasama, saling menghargai selama diskusi online. Sehingga, sikap tersebut dapat terefleksi dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Adapun model ODF pelaksanaan dan komposisinya dalam *blended learning* dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Model ODF pelaksanaan dan komposisi *blended learning*

Mode of study	Tatap muka	e-learning (controlled practice)	e-learning (ODF)
Durasi	100 menit/ pertemuan per minggu	100 menit/ pertemuan per minggu	3 hari dalam seminggu
Frekuensi	8 kali (termasuk tes)	3 kali	3 kali

Sebagaimana yang tertera di tabel di atas, ODF dilaksanakan selama 100 menit di setiap pertemuan. Ini merupakan *half-controlled activity.* Temanya disesuaikan dengan materi dan latihan yang dipelajari pada

controlled practice. Sebelum ke *e-learning*, mahasiswa telah mempelajari materi baru beserta latihannya, berdiskusi dan *peer-editing* di pertemuan tatap muka. Selanjutnya, *independent study* berperan sebagai *reinforcement* atau penguatan agar apa yang mereka pelajari dapat masuk dalam *long-term memory.* Terakhir, siklus ini berakhir di tahap *follow up* yang bertujuan untuk mereview atau memberi *assessment.* Selain itu, untuk melihat apakah terdapat permasalahan selama proses ODF dan *e-learning.* Model siklus *blended learning* tersebut dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini.

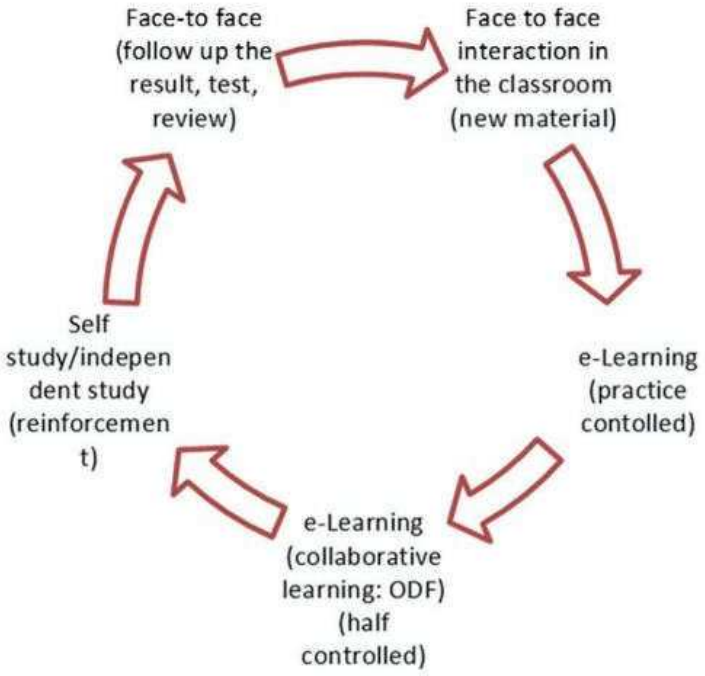

Gambar 2. Model siklus dalam blended learning

Terdapat protokol di dalam menjalankan *blended learning* yang diikuti oleh dosen dan mahasiswa. Protokol tersebut dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini. Terdapat empat langkah yang perlu dilakukan sebelum melaksanakan program ini. Di awali dengan registrasi pada SIAKAD, log

in dan enroll pada mata kuliah yang dituju pada e-learning UNY yaitu, Besmart. Kemudian, dosen berperan sebagai manajer, evaluator, asisten pada saat e-elearning berlangsung.

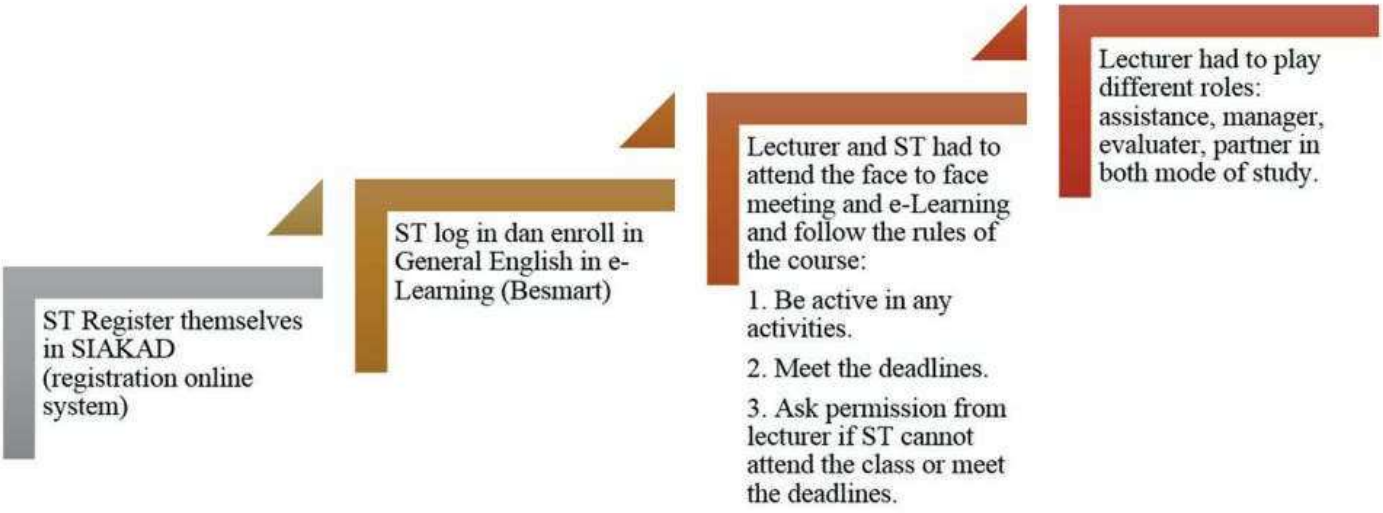

Gambar 3. Protokol Blended learning di Besmart.

ODF dapat diakses pada link berikut ini dengan menggunkana akun UNY dan password yang didapat saat registrasi *http://besmart.uny.ac.id/v2/mod/forum/view.php?id=98759*. ODF dirancang satu minggu sekali dengan topik yang saling berkaitan satu sama lainnya. Ada peraturan tertentu yang perlu diikuti oleh mahasiswa saat ODF, misalnya mereka diwajibkan untuk posting satu respon dan memberi paling sedikit 3 tanggapan pada respon mahasiswa lainnya.

Adapun hasilnya dari penelitan penggunaan ODF dapat dilihat dari penjelasan berikut ini. Data yang dipakai adalah transkrip yang ada saat ODF berlangsung pada topik 1 dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini. Transkript tersebut dianalisis kontenya. Tujuan pertamanya untuk melihat tingkatan mengkonstruksi pengetahuan saat ODF. *Interactive Analysis Model* (IAM) digunakan sebagai alat yang valid untuk

menganalisisnya. IAM diusung oleh (Gunawardena, 1997) dan (Nor Fariza, 2010). Tujuan keduanya untuk menggambarkan *situation of collaborative learning*, maka digunakan *the collaborative behaviour* yang terdiri dari tiga kategori (Nor Fariza, 2010).

Tabel 3. *Content analysis IAM model:* 5 level

Phase 1 - Sharing or comparing of information	A. Statement of observation
	Example: The arena of completion, because not everyone can step on the arena without having a very difficult process to go through. The arena of completion is very meaningful to me especially the Pencak Silat arena. In my observation, if you want to enter one of the competition venues you have to go through a very heavy selection and need high fighting spirit.
	C. Statement of opinion and provide example for discussion
	Example: I agree with you. I have often come to stadium to watch football matches, my favorite place that I want to go to is The Bung Karno Stadium. This stadium is a home for Jakarta's team and also the Indonesia National team. Why do I want to come here? Because this is the cage of my favorite team which is Persija Jakarta, besides that, this is the biggest stadium in Indonesia. It would be better to come here if the Asia competition.
Phase II – discovery and exploration of dissonance or inconsistency among ideas, or concepts or statements	B. Answering questions to clarify source of extent disagreement

	Example: Because the place is far from air pollution, cool, calm and can relieve stress
	C. Restating participant's position
	Example: For me, it is the roar of the waves, the gusts of the wind, the blue sea water looks very beautiful, some white coral and beach sand add to the beauty of the amazing beach.
Phase III – negotiation of meaning or co-construction of knowledge	C. Showing agreement
	Example: Yes, you are right, in mosque my heart feels calm and peaceful. It is the best place in the world
	D. Proposals and negotiation of new statements embodying compromise, co-construction
	Example: your description and explanation about mosque that in there you feel calm and not burdened when you were there you just think of your worship with God that makes you calmer, is matching with my vision. There is a Ka'bah in Mecca, which is the direction of Muslims when worshiping. Mecca is a dream for every Muslim.
Phase IV – testing and modification of proposed synthesis or co-construction	A. testing the proposed synthesis

	Example: let me know If I should participate, with the condition of the weather in your explanation, when exposed to hypothermia there are steps for handling it, for example: changing wet clothes, covering the body, drink warm water, and warm bath can help improve the temperature of the body. I am interested in climbing up, they will work, won't they?
Phase V – agreements or applications constructed meaning	D. Metacognitive statements illustrating understanding of knowledge or ways of thinking have changed as result of the interaction
	Example: Capturing the atmosphere of the sunrise on the mountain is the most memorable thing in my nose. I realize that climbing a mountain is not an easy thing, it takes a struggle and a strong determination to reach the top. And considering the condition of the body to face the hypothermia as you mention in your argumentation, it will be harder than before.

Hasil dari topik 1 dapat dilihat pada gambar 4 di bawah ini. Phase I berjumlah 39% dari jumlah keseluruhan danjuga merupakan yang tertinggi. Selanjutnya, phase II mencapai 3% di bawah ini, yaitu 36%. Phase II dan IV jauh berada di bawah yaitu 11% dan 8%. Sedangkan, phase V berjumlah hanya 6%.

Phase I tentang *sharing and comparing information.* Pada phase ini, mahasiswa membagikan informasi pada seleuruh peserta ODF. Ini merupakan aksi untuk menunjukkan pemahaman mereka terkait topik yang dibicarakan. Selanjutnya, phase II berisi tentang *discovery and exploration of dissonance or inconsistency among ideas, concepts or*

statements, yang terdiri dari dua sub kategori. Pada phase ini, mahasiswa mendiskusikan beberapa ide dan konsep dengan mahasiswa laiinya. Mereka membahasa ide dari sudut pandang mereka yang didukung oleh kesamaan konteks jika mereka dalam posisi tersebut. Contoh dan pengalaman pribadi juga dilontarkan untuk memperkuat tanggapannya.

Kemudian pada phase III dan phase IV merupakan tahapan *co-construction of knowledge*. Hal ini terlihat tidak hanya pada level tata bahasa saja tetapi juga pada level diskors. Bukti ini juga dapat dilihat dari jawaban atau respon yang diberikan saat berdiskusi. Terkahir phase V tidak banyak nilainya. Phase ini terkait dengan mengaplikasikan pengetahuan baru yang telah mereka peroleh saat ODF.

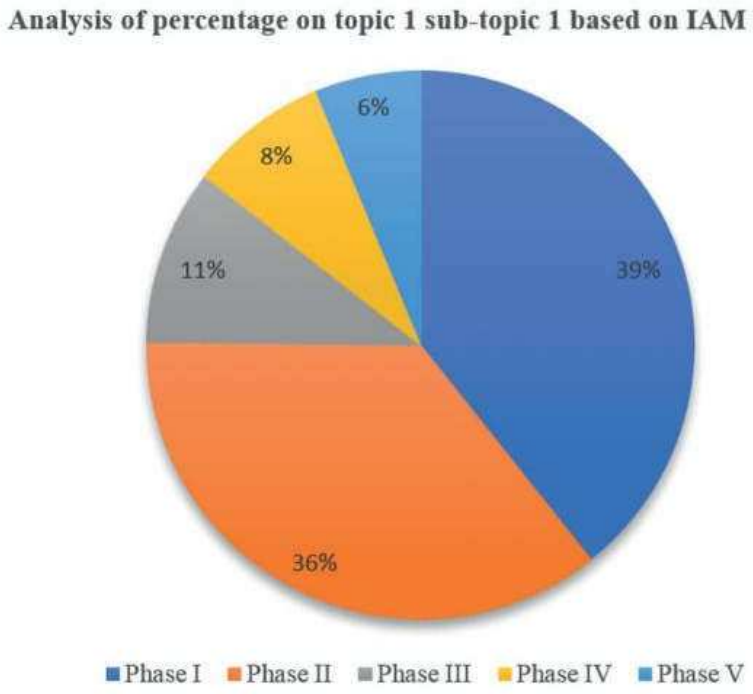

Gambar 4. Hasil IAM pada topik 1

Berdasarkan gambar 4 dan penjelasannya, dapat disimpulkan bahwa bertukar ide, menjawab pertanyaan, bertanya, menyatakan persetujuan

dan menyatakan posisi merupakan indikator *construction of knowledge*.

Selanjutnya, *the collaborative behavior* dianalisis saat terjadi interaksi selama ODF. Hasilnya terbagi dalam empat kategori berbeda yang dapat dilihat pada gambar 5 dan tabel 4 di bawah ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa *contributing category exchanging information (Ei)* mencapai 55% dan diikuti oleh *seeking input (Si)* yaitu 28%. Sementara itu, *help-giving category (Hg)* memperoleh 12% dan yang terkecil yaitu *giving feedback (Fg)* sebesar 5%.

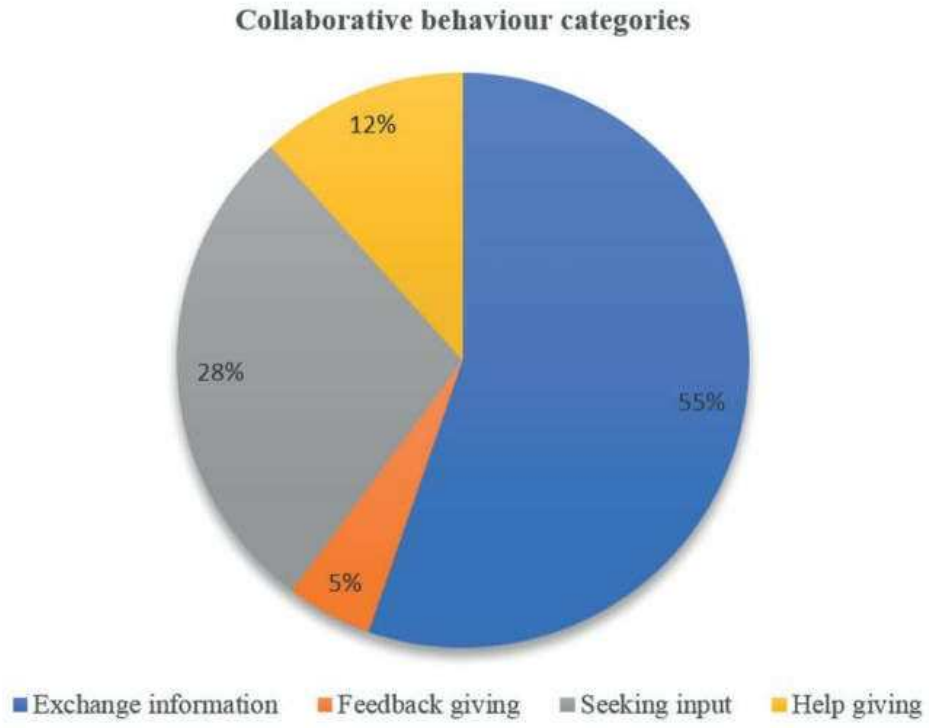

Gambar 5. Hasil *the collaborative behavior* topik 1

Dari tabel 4 di bawah ini, hasilnya menunjukkan ada tiga perilaku yang berbeda pada *contributing category*: pertama, *exchanging information* menjadi hal yang mendominasi. Salah satu tujuannya adalah untuk menunjukkan pengetahuan mereka terkait topik tersebut dan mencoba

memberi masukan yang lebih jauh. Kedua, perilaku *help giving* merupakan indikator bila mahasiswa bersemangat untuk membantu yang lainnya dengan menjawab pertanyaan, dan menjelaskan beberapa hal dengan memberi contoh-contoh yang relevan.

Ketiga, perilaku *feedback giving* dan *seeking input* merupakan kategori yang bertujuan untuk memeberi penjelasan yang lebih dalam yang dibagikan oleh peserta ODF lainnya. Selainnya itu, mahasiswa juga membagikan tips yang inovatif.

Jadi, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *the collaborative behavior* memiliki peran signifikan karena memberikan kontribusi pada *five phases of interaction*. Dengan kata lain, mahasiswa mendapat kesempatan tidak hanya untuk belajar tetapi juga untuk mengkonstruksi pengetahuan melalui ODF.

Tabel 4. Content analysis for categories of collaborative behavior

Category	Description
Contributing	Feedback giving (Fg): Example: I agree with your explanation that maintaining body condition is also a deterrent to avoid hypothermia, because body temperature will be more stable. I think we can survive in the mountain.
	Exchanging information (Ei): Example: I watched the situation in the mountain and ever experienced it there. I know some tips that help me like bringing coat, doing warming up in dangerous condition such as the ones you had mentioned before.
	Help giving (Hg): Example: yes of course, I do not mind to describe it for you. It had beautiful scenery such as rice fields with terasering system in arranging the land that you can find in rice fields. This is a system of planting rice. The fields look like stairs.

Category	Description
Seeking Input	Help seeking (Hs): Example: What is SLG? Is it an extension? I do not understand when you use it. Can you help me by explaining it to me?

Kesimpulannya, dari data topik 1 menunjukkan bahwa terjadi keterlibatan yang intens pada mahasiswa saat ODF. Kemudian dari hasil analisisnya menunjukkan bahwa jawaban atau respon yang panjang yang disertai contoh dan pandangan personal, membagikan link dan memberi klarifikasi, menunjukkan terjadinya beragam level interaksi. Hasilnya juga menunjukkan cara berfikir mahasiswa yang bertingkat sampai pada tingkatkan mengkonstruksi pengetahuan melalui ODF. Mahasiswa belajar dengan baik saat mereka menerima *feedback* dari sesame peserta ODF. Output pembelajaran yang dihasilkan juga membaik.

Selanjutnya, penggunaan *blended learning* meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam memberi respon pada topik yang diberikan jika dibandingkan dengan diskusi saat *face to face interaction* di kelas.

Implementasi Nilai-nilai Sila Ke-4 Pancasila dalam Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Prancis

SITI PERDI RAHAYU;
ROSWITA LUMBAN TOBING;
SITI SUMIYATI

Kemajuan teknologi sekarang ini telah membawa perubahan perilaku manusia dalam segala segi kehidupan. Perubahan yang bersifat positif tentunya diperlukan sikap yang bijak dalam menghadapi era teknologi 4.0 yang sangat canggih ini, karena salah menyikapinya akan membawa dampak buruk yang berkepanjangan. Nilai-nilai Pancasila seakan semakin tenggelam ditengah-tengah hingar bingarnya dunia anak muda milenial Oleh karena itu peran orang tua, para pendidik dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam membimbing generasi muda penerus bangsa ini. Pendidikan formal memang bukan satu-satunya tempat menempa sikap dan perilaku peserta didik, karena dalam pendidikan ini banyak unsur yang harus disampaikan melalui proses belajar mengajar, tetapi setidaknya dalam proses pembelajaran ini peserta didik telah dikenalkan bagaimana sikap dan perilaku yang baik, yang sesuai dengan norma-norma, dan budaya Indonesia.

Adanya berbagai kondisi faktual masyarakat Indonesia saat ini mengharuskan semua pihak yang berkompeten menciptakan upaya-upaya untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Kondisi-kondisi tersebut antara lain: 1) menguatnya paham-paham individualism, egoisme sektoral, sikap materielistis, dan mengendurnya sikap tolereansi, 2) banyak terjadi konflik sosial dalam masyarakat, 3) penegakan hukum belum optimal, 4) pembangunan demokrasi, 5) penyalahgunaan atau praktek KKN, dan 6) masih tingginya pengganggguran dan kemiskinan (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2014 : 10). Berdasarkan fakta-fakta inilah, implementasi nilai-nilai Pancasila perlu diupayakan terus menerus di semua bidang, seperti di bidang politik, ekonomi, agama, sosial, budaya, pendidikan, dan bahkan juga di bidang pertahanan dan keamanan. Salah satu bidang yang akan menjadi fokus implementasi nilai-nilai Pancasila dalam tulisan ini adalah bidang pendidikan, khususnya pendidikan di perguruan tinggi.

Sesuai dengan kurikulum KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) yang sekarang sedang digunakan dalam proses belajar mengajar di UNY, tidak terkecuali di Jurusan Pendidikan Bahasa Prancis, FBS, kompetensi utama dan pertama yang harus dikembangkan adalah tentang sikap. Berdasarkan itulah tulisan ini akan mengembangkan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-4. Salah satu mata kuliah yang menjadi fokus pengembangan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke 4, ini adalah mata kuliah *Compréhension Ecrite V,* yaitu mata kuliah keterampilan berbahasa membaca yang ada di semester V, karena dalam mata kuliah ini mahasiswa harus melaksanakan diskusi dalam kelompok kecil dan besar untuk memecahkan masalah dan menyimpulkan berbagai pendapat untuk mencapai kesepakatan.

Sila 1-5 Pancasila memiliki 36 butir pengamalan sebagai pedoman

praktis pelaksanaan Pancasila. Butir-butir ini juga telah ditetapkan dalam Ketetapan MPR no. II/MPR/1978 tentang Ekaprasetya Pancakarsa. Sila ke-4, khususnya, memiliki 7 butir pengamalan, yaitu : 1) mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, 2) tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, 3) mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, 4) musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan, 5) dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah, 6) musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, dan 7) keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu sistem nilai, sehingga pada hakekatnya sila-sila Pancasila tersebut merupakan suatu kesatuan. Nilai-nilai Pancasila tersebut menjadi dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam bernegara. Contoh sikap positif terhadap pancasila pada sila ke-4 seperti: 1) menghargai pendapat orang lain, 2) tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, 3) masalah dalam kelompok belajar kita selesaikan dengan berunding atau bermusyawarah, 4) ikut dalam PEMILU jika sudah cukup umur baik tingkat Nasional maupun Lokal, dan 4) tidak marah atau sakit hati jika pendapat kita ditolak. Koesoema (2007: 136) menyatakan bahwa pelaksanaan penanaman dan peningkatan nilai-nilai moral tertentu dalam diri peserta didik, seperti nilai-nilai yang berguna bagi pengembangan pribadinya sebagai makhluk individual sekaligus sosial dapat dilakukan melalui pendidikan karakter. Dengan demikian penanaman nilai-nilai Pancasila juga merupakan salah satu bagian dari pendidikan karakter. Di Perguruan Tinggi, pendidikan karakter mendesak untuk dilaksanakan. Hal ini dilaksanakan untuk mengantisipasi

terjadinya penyimpangan atau disorientasi dan disharmonisasi nilai-nilai.

Penanaman atau implementasi nilai-nilai sila ke-4 Pancasila kepada mahasiswa dapat dilakukan dengan pendekatan pembelajaran kontektual (*Contextual Teaching and Learning (CTL)*, yaitu konsep belajar yang membantu dosen mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta mahasiswa, dan mendorong mahasiswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan perapan aatau aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat. CTL dapat diterapkan dalam kurikulum apa saja, bidang studi apa saja, dan kelas yang bagaimanapun keadaannya, dan cukup mudah dilaksanakan (Aqib, 2014: 1-6). Pembelajaran CTL lebih menekankan pada proses belajar bukan sekedar pada hasil belajar (Sanjaya, 2006: 268).

Implementasi nilai-nilai sila ke-4 Pancasila ini dilakukan melalui penelitian tindakan kelas (PTK), yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan cara : merencanakan, melaksanakan, dan merefleksi tindakan secara kolaboratof dan partisipatif dengan tujuan memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajarsiswa dapat meningkat (Kusumah, 2010 : 8). Ada empat tahapan untuk melaksanakan PTK ini, yaitu: 1) tahap perencanaan (*planning*), 2) tahap tindakan (*acting*), 3) tahap pengamatan (observing), dan 4) tahap refleksi(*reflecting*). Keempat tahap tersebut merupakan kegiatan dalam satu siklus, dan siklus ini selalu berulang, artinya setelah satu siklus selesai, barangkali guru atau peneliti menemukan masalah baru atau masalah lama yang belum tuntas pemecahannya, sehingga perlu dilanjutkan lagi dalam siklus kedua. Pelaksanaan siklus kedua ini juga melalui tahapan yang sama dengan pelaksanaan di siklus pertama (Kusumah, 2010 : 26).

Penanaman nilai-nilai sila ke-4 Pancasila pada mata kuliah *Compréhension Ecrite V* ini dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan, pada setiap pertemuan dosen mengamati perilaku mahasiswa yang berkaitan dengan nilai-nilai sila ke-4 Pancasila. Implementasi nilai-nilai ini dilakukan melalui beberapa tahapan dalam dua siklus. Siklus pertama, tahap perencanaan (*plan*): Masalah yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini adalah kurangnya perhatian atau ketidakpedulian mahasiswa terhadap Pancasila . Hal ini ditunjukkan bahwa mahasiswa tidak mampu menyebutkan sila 1-5 Pancasila dengan urut dan spontan. Mahasiswa juga kurang peduli atau tidak paham dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terutama nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-4 "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Peneliti tidak perlu melakukan survei, karena peneliti juga mempunyai pengalaman sebagai pengajar di kelas *Compréhension Écrite V* ini, sehingga peneliti dapat mengetahui segala permasalahan yang dihadapi di kelas tersebut. Setelah merumuskan permasalahan yang berkaitan dengan implementasi nilai-nilai sila ke-4 Pancasila terhadap mahasiswa pada mata kuliah *Compréhension Écrite V*. Kemudian peneliti membuat perencanaan pembelajaran dari siklus per siklus, yang berupa pendekatan pembelajaran yang akan diterapkan, media dan materi pembelajaran. Dan semuanya dituangkan dalam bentuk RPP (Rencana Pelakasanaan Pembelajaran).

Materi pembelajaran diambil dari buku metode pembelajaran bahasa Prancis ECHO 3 dengan berbagai modifikasi dan tambahan-tambahan. Ini adalah teks yang harus dibaca mahasiswa, dan selanjutnya menjadi bahan diskusi berdasarkan pertanyaan yang sudah disiapkan.

Materi Diskusi I

Faut-il arrêter de faire redoubler les élèves ?

Le redoublement est la pratique la plus étudiée au monde et toutes les analyses démontrent son inefficacité.

En primaire, il ne sert à rien et, en plus, il est dangereux psychologiquement. Chez les autres élèves, il reste souvent improductif, mais devient moins dramatique à mesure qu'ils avancent en âge. Ce jugement ne concerne pas le lycée, qui est à mettre à part, et plus précisément la Terminale[1] pour repasser le bac.

En Europe, le redoublement n'existe pas dans la plupart des pays et ceux qui le pratiquent en font une mesure[2] d'exception ne touchant que 3 % des élèves. En France, environ 50 % des élèves recommencent au moins une classe entre le CP et la Première. Nous sommes les champions d'Europe dans ce domaine ! Cette position tient à la perpétuation d'une mentalité culpabilisatrice : le regard que l'on porte ici sur l'enfant en échec est radicalement différent de celui des pays du Nord, où il devient le centre de toutes les attentions.

Je ne préconise[3] pas de supprimer le redoublement sans le remplacer. Il faut trouver autre chose en s'inspirant des systèmes qui fonctionnent. En Finlande, le maître garde la même classe deux ou trois ans et il est capable de s'occuper d'enfants qui progressent différemment. Un élève en difficulté n'est pas exclu de son « groupe classe », ce qui se passe en cas de redoublement. Couper un élève de son « groupe classe » contribue à l'échec du redoublement. Aucun élève ne s'en sort si, en plus, on lui ressert la même pédagogie : « Tu ne digères pas cette soupe, tu vas en avaler une autre assiette ! »

Christian Forestier, inspecteur général de l'Éducation nationale, *Fémina*, 15/06/2008.

1. Classe de préparation au baccalauréat, les élèves ont environ 18 ans. – **2.** Une décision, une action (prendre des mesures). – **3.** Proposer.

DÉCOUVERTE : IDENTIFIEZ LE DOCUMENT

1. Quel est le titre du texte ?
2. *D'où est-il extrait ?*
3. À quoi sert-il ?
4. À quoi vous font-ils penser ?

EXPLORATION

1. Qu'est-ce qui est critiqué dans l'article ?
2. Quels sont les arguments de l'auteur ?
3. Comparez le système éducatif en France et chez vous
4. Débat : Arrêter de faire redoubler les élèves est-il nécessaire ?

Système éducatif francais (Sistem Pendidikan di Prancis)

Ecole Maternelle (de 3 à 5 ans)	• Petite section • Moyenne section • Grande section
Ecole Primaire (de 6 à 10 ans)	• Cours préparatoire (CP) • Cours élémentaire première année (CE1) • Cours élémentqire deuxième année (CE2) • Cours moyen première année (CM1) • Cours moyen deuxième année (CM2)
Collège (de 11 à 14 ans)	• La sixième (6e) • La cinquième (5e) • La quatrième (4e) • La troisième (3e)
Brevet des collèges	• Le diplôme national du brevet évalue les connaissances acquises à la fin du collège.
Lycée (de 15 à 18 ans)	• La seconde (2nd) • La première (1ère) • La terminale (T)
Baccalauréat	• Diplôme national qui met un terme au cycle secondaire et permet d'aller à l'université.
Université	• Depuis 2004, système LMD • " L " pour Licence (3 ans) • " M " pour Master (2 ans) • " D " pour Doctorat (entre 2 à 3 ans)

CHEZ VOUS : .....!!!!!

Pada siklus pertama ini mahasiswa dibagi dalam lima kelompok. Jumlah mahasiswa yang dikenai tindakan ada 21 mahasiswa. Pada siklus pertama, mahasiswa diberikan materi yang disesuaikan dengan silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang telah diberikan pada minggu pertama perkuliahan. Siklus pertama dilaksanakan dalam dua kali pertemuan dengan tema: *Système éducatif en France.* Selanjutnya mahasiswa melakukan diskusi dalam kelompok kecil untuk membahas materi *Système éducatif en France* (Sistem Pendidikan di Prancis) yang telah dijelaskan sebelumnya dan membandingkannya dengan sistem pendidikan di Indonesia, diskusi dilanjutkan dalam kelimpok besar. Pada akhir diskusi mahasiswa pada masing-masing kelompok mendapat tugas melakukan komentar singkat tentang topik-topik yang disesuaikan dengan materi ajar yang telah diberikan.

Tahap Pelaksanaan Tindakan dan Observasi (*Action and Observation*): pada saat pembelajaran dimulai, dosen menjelaskan semua yang harus dikerjakan mahasiswa, dosen menjelaskan kata-kata yang sekiranya akan menjadi kesulitan mahasiswa, setelah penjelasan selesai, mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil untuk melakukan diskusi kelompok tentang tema yang ada dalam teks I "*Faut-il arrêter de faire redoubler les élèves ?*" (sistem Pendidikan di Prancis), kemudian membandingkannya dengan tema yang sama yang ada di Indonesia. Setelah itu masing-masing kelompok harus mempresentasikan hasil diskusinya, dan juga harus memberi komentar presentasi kelompok lain. Pada saaat mahasiswa melakukan diskusi kemompok hingga presentasi, dosen dan kolaborator memperhatikan perilaku masing-masing mahasiswa yang berkaitan dengan nilai-nilai sila ke-4 Pancasila. Perilaku yang dimaksud mencakup : 1) memberi kesempatan kepada mahasiswa lain untuk dapat mengambil bagian dalam diskusi, 2) menjawab pertanyaan dosen dan menjawab tidak paham jika perlu, 3) mendorong anggota lain

untuk ikut berperan, 4) Membuat anggota lain merasa kuat dan penting, 5) menyatakan pendapat positif terhadap aktivitas yang dilakukan teman, 6) berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun, 7) mendukung aktivitas teman dalam pembelajaran *Compréhension Écrite V*, 8) mendorong kerjasama kelompok dalam pembelajaran *Compréhension Écrite V*, 9) menghargai masukan dari teman lain dalam kelas/kelompok, 10) mengatakan sesuatu yang diyakin benar, 11) Menunjukkan upaya terciptanya kelompok yang dapat bekerja sama dengan baik, 12) mengecek pemahaman/memperjelas pertanyaan dari kelompok lain / dari dosen, 13) Meminta ide dan pendapat kepada semua anggota untuk membantu menyelesaikan masalah, 14) mencipatakan suasana kelompok yang akrab, 15) melindungi reputasi anggota kelompok lain, 16) membicarakan anggota lain dalam kelompok secara positif, 17) menghargai hasil yang dicapai anggota kelompok peserta mata kuliah *Compréhension Écrite V*, 18) menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam kelompok, 19) menghormati pendapat orang lain, 20) Memberi sumbangan informasi sesuai yang dibutuhkan, 21) Menunjukkan sikap kompetitif untuk mendapatkan hasil yang terbaik, 22) Menunjukkan sikap sportif untuk mendapatkan hasil yang terbaik, 23) Menahan diri ketika ada perbedaan pendapat antarkelompok, 24) Melaksanakan tugas sesuai dengan kesepakatan dalam kelas oleh dosen dan mahasiswa

Hasil pada siklus pertama yang diperoleh dari pengamatan perilaku mahasiswa tentang nilai-nilai sila ke-4 Pancasila dapat dikatakan bahwa implementasi belum dapat berjalan dengan baik, karena masih ada banyak mahsiswa yang belum dapat menyesuaikan diri dalam kelompok, masih ada sebagian mahasiswa yang kurang aktif dalam kegiatan kelompok. Hal itu tentu berpengaruh terhadap keberhasilan mahasiswa dalam penguasaan materi dan pengaplikasian nilai-nilai Pancasila. Namun sebaliknya, ada juga beberapa mahasiswa yang sangat

menonjol baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar. Oleh karena itu, hal ini menjadi masukan untuk siklus berikutnya, supaya semua mahasiswa memiliki perilaku-perilaku yang mengandung nilai-nilai silake empat Pancasila. Tahap Refleksi (*Reflection*): melakukan diskusi antara dosen, peneliti dan atau kolaborator untuk membahas hal-hal atau masalah-masalah yang muncul di kelas penelitian. Jadi, refleksi ini dilakukan setelah implementasi nilai-nilai sila ke-4 Pancasila dan hasil dari observasi pada kelas penelitian tersebut adalah: 1) anggota kelompok diskusi perlu diubah lebih heterogen dalam kemampuan, 2) materi perlu disampaikan seminggu sebelumnya supaya mahasiswa dapat mempelajari dan menyiapkan, sehingga diskusi dapat berjalan dengan lancar, dan dosen juga perlu menekankan pentingnya pengamalan nilai-nilai sila ke-4 Pancasila itu dalam mata kuliah *Compréhension Écrite V,* karena hal ini akan memperlancar interaksi diskusi dalam menyelesaikan soal-soal yang telah diberikan oleh dosen, dan mampu menungkapkan kembali sesuai dengan bahasanya sendiri. Berdasarkan refleksi inilah, siklus kedua dilaksanakan untuk meningkatkan pengamalan nilai-nilai sila ke-4 Pancasila oleh para mahasiswa.

Siklus kedua, tahap perencanaan (*plan*): berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertama maka pada siklus kedua ini direncakan tindakan untuk meningkatkan hal-hal yang masih belum mencapai hasil maksimal pada siklus pertama. Pada siklus kedua ini mahasiswa diberi pengarahan untuk dapat menanamkan nilai-nilai sila ke-4 Pancasila. Diskusi kelompok masih tetap dilakukan, dengan anggota kelompok diubah lebih heterogen. Siklus kedua dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan dengan tema: *Langues régionales et son enseignement en France* .

Materi Diskusi II: Langues régionales et son enseignement en France

Les langues régionales en France

Jusqu'à la fin du Moyen Âge, la France est un puzzle de territoires qui ont chacun leur langue, leurs coutumes et leurs lois. L'unité politique et juridique de ces territoires se fait progressivement grâce aux conquêtes, aux acquisitions et aux mariages des rois de France, puis avec la Révolution et la politique de Napoléon Ier.

Mais l'unification linguistique sera plus lente. Le français (dialecte de la région parisienne) va s'imposer petit à petit dans les villes puis dans les campagnes. Ces campagnes, qui représentent à l'époque un pourcentage important de la population, resteront bilingues jusqu'à la première moitié du XXe siècle.

Une volonté d'unification linguistique existait dès la Révolution mais il faudra attendre la IIIe République pour que le gouvernement puisse imposer une école obligatoire, laïque, gratuite et où l'on ne s'exprime qu'en français. Aujourd'hui, les personnes qui parlent encore une langue régionale ne l'utilisent plus pour la communication quotidienne. Les langues régionales sont devenues « des sujets d'étude, presque objets de culte en même temps qu'un moyen d'affirmer son identité[1] ».

1. Henriette Walter, *Le Français dans tous les sens*, Robert Laffont, 1988.

L'enseignement des langues régionales

En France, l'enseignement facultatif de certaines langues régionales – le basque, le breton, le catalan et l'occitan – est autorisé depuis 1951. Des décrets ont ensuite ajouté le corse, puis le tahitien et les langues mélanésiennes. Depuis 1970, ces langues régionales peuvent être utilisées comme option au baccalauréat. C'est un enseignement qui progresse fortement.

Pendant l'année scolaire 2001-2002, 252 858 élèves bénéficiaient d'un enseignement de langues régionales. Ils sont 404 351 aujourd'hui, soit près de 60 % de hausse !

Tous niveaux confondus, l'alsacien arrive en tête avec 163 820 élèves. Ensuite vient l'occitan (plus de 80 000 élèves, collégiens et lycéens), le tahitien (50 000 élèves) et le corse (34 598 élèves). Le breton touche 23 432 élèves, le basque 11 062 élèves et le catalan 13 048.

Extrait du site liberation.fr

DÉCOUVERTE : IDENTIFIEZ LE DOCUMENT

- Quel est le titre du texte ?
- D'où est-il extrait ?
- À quoi sert-il ?
- À quoi vous font-ils penser ?

EXPLORATION

Dites si les phrases suivantes sont vraies ou fausses

- *La France a mis environ 1000 ans à se construire*
- *Sous Napoléon 1, le territoire de la France avait à peu près son visage actuel*
- À l'époque de Molière, tous les Français parlaient la même langue
- *Beaucoup d'arrière-grands-pères des Français d'aujourd'hui étaient bilingues*

- *Dans les école, l'enseignement des langues régionales est obligatoire*
- *Dans certaines régions, aujourd'hui, les gens ne se parlent pas en francais*

Tahap pelaksanaan Tindakan dan Observasi (*Action and Observation*): dalam pelaksanaan PBM, mahasiswa dibagi dalam kelompok-kelompok seperti pada siklus pertama. Dosen berkeliling diantara kelompok mahasiswa untuk membantu menghidupkan diskusi kelompok. Dosen juga mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa yang dianggap kurang ikut berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Dengan demikian mahasiswa yang ditanya berusaha untuk menjawab dan teman dalam kelompok membantu. Pada akhir kegiatan hampir semua mahasiswa dalam kelompok memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Selama pelaksanaan pada siklus ini, dosen pengampu membantu agar nilai-nilai sila ke-4 Pancasila oleh mahasiswa dalam kelompok bisa lebih baik dari siklus sebelumnya. Mahasiswa juga diberi tugas (pada masing-masing kelompok) untuk membahas materi yang telah diberikan. Pada saat diskusi dosen dan kolaborator melaksanakan observasi dan membantu mahasiswa jika mengalami kesulitan pada saat diskusi. Pada saat mahasiswa berdiskusi, dosen dan kolaborator memperhatikan implementasi nilai-nilai sila ke-4 Pancasila oleh masing-masing mahasiswa. Presentasi kelompok dilakukan dengan memberi kesempatan kepada kelompok mahasiswa yang ingin memberi pendapat mereka. Hampir semua kelompok siap untuk memberi pendapat. Pada siklus kedua ini, kelas tampak semakin hidup. Hal ini tampak pada semakin beraninya mahasiswa mengajukan pertanyaan, mengeluarkan pendapat, bahkan menyanggah pendapat kelompok lain. Hasil terhadap nilai-nilai ke-4 Pancasila tersebut tampak meningkat dilihat dari semakin kompak mahasiswa dalam kegiatan diskusi baik dalam kelompok maupun antarkelompok. Nilai-nilai ke-4 Pancasila yang diimplementasikan dan

diamati masih sama dengan siklus pertama (ada 24 poin)

Hasil observasi terhadap nilai-nilai sila ke-4 Pancasila pada siklus kedua kedua tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan atas perilaku mahasiswa dalam mengimplementasikan nilai-nilai sila ke-4 Pancasila. Hal ini semakin tampak pada kerja kelompok yang dilakukan mahasiswa sangat hidup, diskusi dapat berjalan dengan sangat baik dan lancar, demikian juga presentasi dalam kelompok besar hampir dapat dilakukan oleh semua mahasiswa, walaupun masih ada sedikit mahasiswa yang kurang maksimal dalm mengimplementasikan nilai-nilai tersbut. Tahap Refleksi (*Reflection*): perilaku mahasiswa dalam berdiskusi semakin menunjukkan nilai-nilai sila ke-4 Pancasila. Mahasiswa semakin berani mengungkap pendapatnya, memberi saran, mengkritik, bahkan berani juga menunujkkan ketidaksetujuannya dengan pendapat kelompok lain. Sementara itu mahasiswa juga semakin bijaksana ketika mendapat kritkan, atau pendapat yang kontra dengannya, mahsiswa semakin menyadari adanya perbedaan, dan dapat menerima dengan lapang dada.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran kontekstual atau *Contextual Teaching and Learning* (CTL) dapat meningkatkan penanaman nilai-nilai sila ke-4 Pancasila mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Prancis yang mengikuti mata kuliah *Compréhension Écrite V* . Hal ini tampak pada: 1) mahasiswa hafal dengan sila ke1-5 Pancasila, 2) mahasiswa paham tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila ke-4, 3) keaktifan mahasiswa pada kegiatan pembelajaran di kelas yang terungkap pada aspek-aspek yang diuraikan pada indikator yang sesuai dengan nilai-nilai sila ke-4 Pancasila . Kesimpulan lain menunjukkan bahwa mahasiswa semakin percaya diri dalam menyampaikan pendapat, memberi saran, mengkritik dan menerima masukan atau kritikan,

sehingga atmosfir akademis dalam kelas semakin tampak hidup. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama mahasiswa dalam kelompok semakin baik. Mahasiswa semakin baik dalam kemampuan mengungkapkan pendapat dalam bahasa Prancis.

Akhirnya, sebagai insan kampus yang terlatih dalam berpikir kritis dan logis, hendaknya selalu menyadari pentingnya berpegang teguh pada kepribadian yang luhur berdasarkan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila harus terus menerus dihidupkan dalam masyarakat, ke dalam perilaku sehari-hari. Semua dosen, mahasiswa, dan karyawan agar bergandengan tangan menjalankan nilai-nilai Pancasila untuk menangkal paham yang berseberangan, atau yang tak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa atau ideologi bangsa. Pancasila haruslah merupakan pijakan paling utama dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, terlebih generasi muda yang lebih dekat dengan tren komunikasi global.

Pengembangan Model Ketahanan Keluarga Berlandaskan Nilai-nilai Pancasila Melalui Kegiatan Kuliah Kerja Nyata

KOKOM KOMARIAH;
WAGIRAN;
AGUSTINA TRI WIJAYANTI

Terbentuknya Indonesia sebagai negara dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa Indonesia, dan selanjutnya tugas kita mempertahankannya dari ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Ancaman-ancaman suatu bangsa menyerang dari berbagai sudut, mulai dari aspek ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi. Guna menghadapi segala ancaman tersebut diperlukan suatu ketahanan yang kokoh dari setiap unsur suatu bangsa atau negara.

Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri dari ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi suatu ancaman, tantangan dan hambatan baik dari dalam maupun dari luar, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan integritas dan kelangsungan bangsa.

Meningkatkan ketahanan nasional harus terus menerus dilakukan, karena kemunduran suatu bangsa akan berakibat rendahnya kualitas bangsa. Guna meningkatakan ketahanan nasional tersebut, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan ketahanan keluarga, karena salah satu faktor melemahnya ketahanan nasional adalah akibat rapuhnya ketahanan keluarga. Dengan demikian membangun ketahanan keluarga akan berdampak pada kuatnya ketahanan nasional.

Keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam negara memiliki peran yang sangat penting dalam dan menjadi sumber ketahanan nasional. Thomas Lickona menyebutkan ada 10 tanda kemunduran bangsa, sebagai akibat rendahnya kualitas keluarga, yaitu meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk, pengaruh peergroup yang kuat dalam tindak kekerasan. meningkattnya perilaku yang merusak diri seperti narkoba, sex bebas, dan alkohol, kaburnya pedoman moral baik dan buruk, penurunan etos kerja, rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, rendahnya rasa tanggung jawab baik sebagai individu dan warga Negara, ketidakjujuran yang telah membudaya, dan adanya saling curiga dan kebencian.

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan karakter setiap individu. Karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas baik yang tecermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau sekelompok orang.

Universitas Negeri Yogyakarta mempunyai tugas menyiapkan kader-kader pembina di masyarakat. Salah satu kegiatan pembelajaran yang langsung berhadapan dengan masyarakat adalah KKN (Kuliah

Kerja Nyata). KKN direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis berdasarkan tema yang digali dari potensi masyarakat, dirumuskan, dan dilaksanakan bersama masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memacu kemampuan masyarakat dalam pengembangan diri dan wilayah sehingga kesejahteraannya meningkat.

Karakteristik Model Ketahanan Keluarga Berlandaskan Nilai-nilai Pancasila Melalui Kegiatan Kuliah Kerja Nyata

Karakteristik model yang dihasilkan mengacu pada konsep ketahanan keluarga, nilai-nilai Pancasila, dan pembelajaran di Masyarakat. Ketahanan keluarga (*family strength atau family resilience*) merupakan suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994). Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin. Dalam pandangan yang lain, ketahanan keluarga mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan (Sunarti, 2001), kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga .

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tersebut maka ketahanan keluarga dapat diukur menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial). Dengan

demikian, tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu: (1) ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan; (2) ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi; (3) ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri.

Realita permasalahan bangsa yang berkembang saat ini, seperti: (1) disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila; (2) keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila; (3) bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (4) memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; ancaman disintegrasi bangsa; dan melemahnya kemandirian bangsa (Kemdiknas, 2010:8-9). Maka dari itu, pembangunan Karakter Bangsa merupakan upaya kolektif-sistemik suatu negara kebangsaan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global yang berkeadaban untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi Ipteks berdasarkan Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Karakter yang berlandaskan falsafah Pancasila artinya setiap aspek karakter harus dijiwai ke lima sila Pancasila secara utuh dan komprehensif 1) Bangsa yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, tercermin antara lain hormat dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai

dengan agama dan kepercayaannya itu; tidak memaksakan agama dan kepercayaannya kepada orang lain. 2) Bangsa yang Menjunjung Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; tercermin dalam pengakuan atas persamaan derajat, hak, dan kewajiban; saling mencintai; tenggang rasa; tidak semena-mena; terhadap orang lain; gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; 3) 3. Bangsa yang Mengedepankan Persatuan dan Kesatuan Bangsa; tercermin dalam sikap menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan; rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 4). Bangsa yang Demokratis dan Menjunjung Tinggi Hukum dan Hak Asasi Manusia; tercermin dalam perilaku yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara; tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama; 5) Bangsa yang Mengedepankan Keadilan dan Kesejahteraan, tercermin antara lain dalam perbuatan yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Membangun Karakter melalui keluarga merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki dan atau membentuk tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak (budi pekerti), insan manusia (masyarakat) sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang baik anak dalam keluarga berdasarkan nilai-nilai Pancasila

Karakteristik model yang dihasilkan adalah integrasi nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan dalam upaya meningkatkan ketahanan keluarga. Pencapaian ketahanan keluarga sesuai dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup 5 (lima) dimensi sebagai berikut:

Gambar 3. Dimensi Pengukur Tingkat Ketahanan Keluarga

Beberapa variable dalam dimensi pengukur tingkat ketahanan keluarga menurut BPS (2016) adalah 1) Dimensi Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga, yang diukur berdasarkan Legalitas Perkawinan, dan Legalitas Kelahiran. Keutuhan Keluarga diukur berdasarkan Keberadaan pasangan suami-istri yang tinggal bersama dalam satu rumah. Kemitraan Gender diukur berdasarkan Kebersamaan Dalam Keluarga; Kemitraan Suami-Istri; Keterbukaan Pengelolaan Keuangan; dan Pengambilan Keputusan Keluarga. 2) Dimensi Ketahanan Fisik, tercermin oleh adanya tubuh yang sehat dan terbebas dari berbagai penyakit dan kelemahan, 3) Dimensi Ketahanan Ekonomi, digambarkan kemampuan keluarga dalam memenuhi berbagai kebutuhan keluarga untuk melangsungkan kehidupannya secara nyaman dan berkesinambungan. 4) Dimensi

Ketahanan Sosial Psikologis, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, kepedulian suami terhadap istri dan kepuasan terhadap keharmonisan keluarga (Sunarti dalam Puspitawati (2015), dan 5) Dimensi Ketahanan Sosial Budaya. yang menggambarkan tingkat ketahanan keluarga dilihat dari sudut pandang hubungan keluarga terhadap lingkungan sosial sekitarnya..

Kuliah Kerja Nyata berbasis Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dijadikan proses pembelajaran bagi mahasiswa sekaligus wahana pemberdayaan masyarakat. Pola ini direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis berdasarkan tema yang digali dari potensi masyarakat, dirumuskan, dan dilaksanakan bersama masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memacu kemampuan masyarakat dalam pengembangan diri dan wilayah sehingga kesejahteraannya meningkat. KKN PPM diharapkan dapat lebih meningkatkan empati, kepedulian, kerjasama mahasiswa secara multidisipliner dan kontribusi daya saing daerah dan nasional, serta mendorong terciptanya *learning community.* Melalui *learning community* diharapkan mahasiswa dapat memantapkan kepribadian, kepekan sosial, kemampuan hidup bermasyarakat, pengetahuan tentang pelestarian, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan mempunyai wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni.

KKN sebagai wadah pembelajaran di masyarakat dapat menumbuhkembangkan daya kritis, daya kreatif, apresiasi dan kepekaan mahasiswa terhadap nilai-nilai sosial dan budaya demi memantapkan kepribadian sebagai bekal hidup bermasyarakat selaku individu dan makhluk sosial yang (a) bersikap demokratis, berkeadaban, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, bermartabat serta peduli terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, (b) memiliki kemampuan untuk menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan,

teknologi, dan seni; dan (c) ikut berperan mencari solusi pemecahan masalah sosial budaya dan lingkungan hidup secara arif. Ada 3 ranah dalam pelaksanaan KKN yaitu pengembangan kepribadian mahasiswa (*personality development*), pemberdayaan masyarakat (*community emporwerment*), dan pengembangan kelembagaan (*institutional development*). Menurut Pardjono (2005) pemberdayaan masyarakat melalui KKN meliputi tiga ranah kegiatan, yaitu: Pertama **penyadaran,** yaitu mampu mendorong dan menumbuhkan kesadaran akan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. **Kedua,** pembelajaran. mahasiswa bersama-sama berupaya membentuk *learning society*, **Ketiga,** pendampingan.Upaya ini dikerjakan agar masyarakat memiliki pasangan dalam melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan.

Pengembangan Model Ketahanan Keluarga Berlandaskan Pancasila

Model implementasi ketahanan keluarga berdasarkan nilai-nilai Pancasila melalui Program KKN adalah suatu kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan KKN di masyarakat. Model implementasi ketahanan keluarga Pancasila mengacu pada model sosial dirancang untuk memanfaatkan fenomena kerjasama, karena dengan kerjasama dapat membangkitkan dan menghimpun tenaga atau energi secara sinergi, dengan semangat kelompok, kebersamaan dan interaksi sosial.

Guna pengembangan model ketahanan keluarga berlandaskan Pancasila dibutuhkan pemahaman tentang kondisi masyarakat dimana model akan diterapkan. Oleh karena itu untuk keperluan ini dilakukan *need assesment* di 4 (empat) Dusun yang terletak di Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta yaitu Dusun Selobonggo,

Ngentak, Ganggong, dan Karangwuni.

Pelaksakaan program KKN di masyarakat berdasarkan 3 (tiga) prinsip yaitu (1) dapat dilaksanakan (*feasible*), (2) dapat diterima (*acceptable*), dan (3) berkesinambungan (*sustainable*). Oleh karena itu Program KKN yang dilaksnakan harus berasal dari kebutuhan masyarakat, pemerintah setempat dan memperhatikan kebutuhan mahasiswanya itu sendiri. Berdasarkan prinsip tersebut dapat dicontohkan pilihan program sebagai berikut:

Tabel 1. Identifikasi *need assessment* masyarakat, pemerintah daerah, mahasiswa

Komponen	Identifikasi kebutuhan	Pilihan Program
Masyarakatat	a. Pengelolaan sampah	1. Program pengelompokkan sampah berdasar jenis sampah 2. Program penanaman bibit TOGA 3. Program tanaman hidroponik 4. Pendampingan kegiatan kerohanian 5. Pengembangan kewirausahaan 6. Pembentukan Komunitas siaga bencana
	b. Inovasi pengembangan tanaman salak	
	c. Peningkatan religiusitas	
	d. Penanaman tanaman obat keluarga (TOGA)	
	e. Penanaman hidroponik setiap keluarga	
	f. Komunitas siaga bencana	
Pemerintah Daerah	a. Terciptanya lingkungan yang sehat, bersih dan indah (sesuai Perda Kab Sleman No. 4 Tahun 2015 ttg pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	
	b. Strategi pengembangan salak sbg komoditi utama pemerintah daerah Sleman (sesuai Perda Kab. Sleman No. 20 tahun 2001)	
	c. Pemberdayaan masyarakat Siaga Bencana berbasis komunitas (sesuai Perda Kab Sleman No. 12 Tahun 2011)	

Komponen	Identifikasi kebutuhan	Pilihan Program
	d. Terciptanya masyarakat dengan tingkat kesadaran religiusitas yang tinggi (sesuai Perda Kab Sleman No. 7 tahun 2005)	
Mahasiswa	a. Program sesuai dengan keahliannya	
	b. Program berbatas waktu	
	c. Program mempunyai keberterimaan di masyarakat	
	d. Sumber dana terbatas	
	e. Program terukur	
	f. Mendapat dukungan dan partisipasi dari masyarakat	

Integrasi Program KKN dengan dimensi ketahanan keluarga mencakup 5 aspek yaitu : (1) Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga, (2) Ketahanan Fisik, (3) Ketahanan Ekonomi, (4) Ketahanan Sosial Psikologi, dan (5) Ketahanan Sosial Budaya, dan pelaksnaannya dapat dilakukan melalui program individu dan kelompok. Sebagai contoh integrasi program kelompok dapat difocuskan pada 4 (empat) dimensi ketahanan keluarga, dan program individu difokuskan pada satu program ketahanan keluarga, sehingga pengukuran tingkat ketahanan keluarga pada program kelompok dapat dicontohkan sebagai berikut:

Tabel 2 Integrasi Program dengan Dimensi Ketahanan Keluarga

Program	Green and Clean	"one family one product":	Komunitas siaga bencana
Dimensi Ketahanan sosio-psikologis	Aspek keharmonisan keluarga	Aspek keharmonisan keluarga	Aspek Kepatuhan hukum

Program	Green and Clean	"one family one product":	Komunitas siaga bencana
Dimensi Ketahanan Fisik	Aspek kesehatan keluarga	Aspek kecukupan pangan	-
Dimensi Ketahanan Ekonomi	-	Aspek kepemilikan rumah	-
Dimensi Ketahanan Sosial-Budaya	Aspek kepedulian sosial	Aspek kepedulian sosial	Aspek keeratan sosial

Dari tiga program unggulan yang dilakulakukan oleh masyarakat Desa Bangunkerto, bisa mewujudkan pola ketahanan keluarga yang baik, dimana masing-masing aspek dapat terwujud di setiap kegiatan yang dilaksanakan di desa Bangunkerto.

Tabel 3. Integrasi program dengan pengukur ketahanan keluarga berlandasarkan nilai-nilai Pancasila

Program Kegiatan	Dimensi Ketahanan Keluarga	Perwujudan	Landasanyang terkandung dalam Nilai-nilai Pancasila
Program *Green and Clean*	Ketahanan Sosial-Psikologis	Mewujudkan Keharmonisan keluarga	Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa (sila 1) Mengedepankan Keadilan dan Kesejahteraan (sila 4, sila 5)
	Ketahanan Fisik	Mewujudkan kesehatan keluarga	Mengedepankan Kerakyatan dan Kesejahteraan masyarakat (sila 4)
	Ketahanan Sosial budaya	Mengembangkan sikap kepedulian sosial	Menjunjung Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (sila 2) Mengedepankan Persatuan dan Kesatuan (sila 3)

Program Kegiatan	Dimensi Ketahanan Keluarga	Perwujudan	Landasanyang terkandung dalam Nilai-nilai Pancasila
Program *"one family one product"*	Ketahanan sosio-psikologis	Mewujudkan Keharmonisan keluarga	Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa (sila 1) Mengedepankan Keadilan dan Kesejahteraan (sila 4, sila 5)
	Ketahanan Fisik	Mewujudkan ketahanan pangan	Mengedepankan Keadilan dan Kesejahteraan (sila 5)
	Ketahanan Ekonomi	Kepemilikan rumah Pendapatan keluarga	Keadilan seluruh masyarakat (sila 5) Mengedepankan kesejahteraan masyarakat (sila 4)
	Ketahanan Sosial Budaya	Mengembangkan rasa kepedulian sosial	Menjunjung Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (sila 2)
Program Komunitas siaga bencana	Ketahanan sosio-psikologis	Menciptakan kepatuhan hukum	Demokratis dan Menjunjung Tinggi Hukum dan HAM (sila 4)
	Ketahanan Sosial Budaya	Mengembangkan keeratan sosial	Mengedepankan Persatuan dan Kesatuan (sila 3)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa program *Green and Clean* (GAC) dapat menciptakan dimensi ketahanan keluarga sosio-psikologis, fisik, ekonomi dan sosial budaya. Program "*one family one product* juga dapat menciptakan dimensi ketahanan sosio-psikologis, ekonomi dan sosial budaya, sedangkan program komunitas siaga bencana dapat mewujudkan dimensi ketahanan sosio-psikologis dan sosial budaya. Integrasi dari masing-masing program dapat terinternalisasi ke dalam nilai-nilai Pancasila seperti Menjunjung Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Mengedepankan Persatuan dan Kesatuan, Mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat, yang nampak jelas disetiap pelaksanaan program nilai-nilai tersebut muncul.

Model Hipotetik Ketahanan Keluarga berdasarkan Nilai-nilai Pancasila

Hasil studi ini menemukan model hipotetik yang bertumpu pada kajian teori, analisis lapangan, dan *focus grup discusion* serta validasi para ahli.. Model hipotetik implementasi ketahanan keluarga berdasarkan nilai-nilai pancasila mempunyai 3 tahap yaitu persiapan/orientasi, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam tahap persiapan, diidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan dari masyarakat, mahasiswa dan pemerintah setempat. Hal ini dilakukan dalam rangka mengidentifikasi beberapa program yang sesuai kebutuhan masyarakat, baik program individu maupun kelompok. Dimana masing-masing dari program dirancang untuk sasaran, strategi/ metode dan sarana pencapainya, yang diintegrasikan dalam pola ketahanan keluarga dan nilai-nilai Pancasila.

Setelah didapatkan beberapa program unggulan yang dapat diimplementasikan dan dikembangkan melalui beberapa aksi/tindakan nyata dan partispasi aktif para mahasiswa KKN dan juga bimbingan dosen pendamping lapangan. Strategi dan pendekatan implementasi dimaksudkan sebagai prosedur teknis untuk pengorganisasian konten ketahanan keluarga berbasis nilai-nilai pancasila kepada masyarakat sasaran dan pengelolaan peserta didik sebagai subjek belajar.

Setting implementasi dilakukan di lokasi KKN. Lokasi KKN sebagai tempat implementasi memiliki beberapa kelebihan yaitu; (1) autentik, tujuan sudah terarah; (2) akses untuk dekat masyarakat yang dituju; (3) keterlibatan secara intens, karena mahasiswa berada di lokasi; (4) penguatan intrinsik. Dikaitkan dengan unsur model pembelajaran, pelaksanaan di lokasi tempat kelompok sasaran merupakan sistem pendukung yang diperlukan untuk terlaksananya implementasi model. Setelah program terimplementasikan dengan baik, adapaun capaian program yang didapatkan berupa pola ketahanan keluarga yang

menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap program KKN.

Hasil validasi dengan beberapa pakar terkait didapatkan rekomendasi dan masukan-masukan, sehingga hasilnya dapat dirangkum bahwa menjadi konsep model ketahanan keluarga dapat dikembangkan untuk kegiatan KKN di baik di pedesaan, perkotaan, maupun daerah perbatasan sebagai berikut :

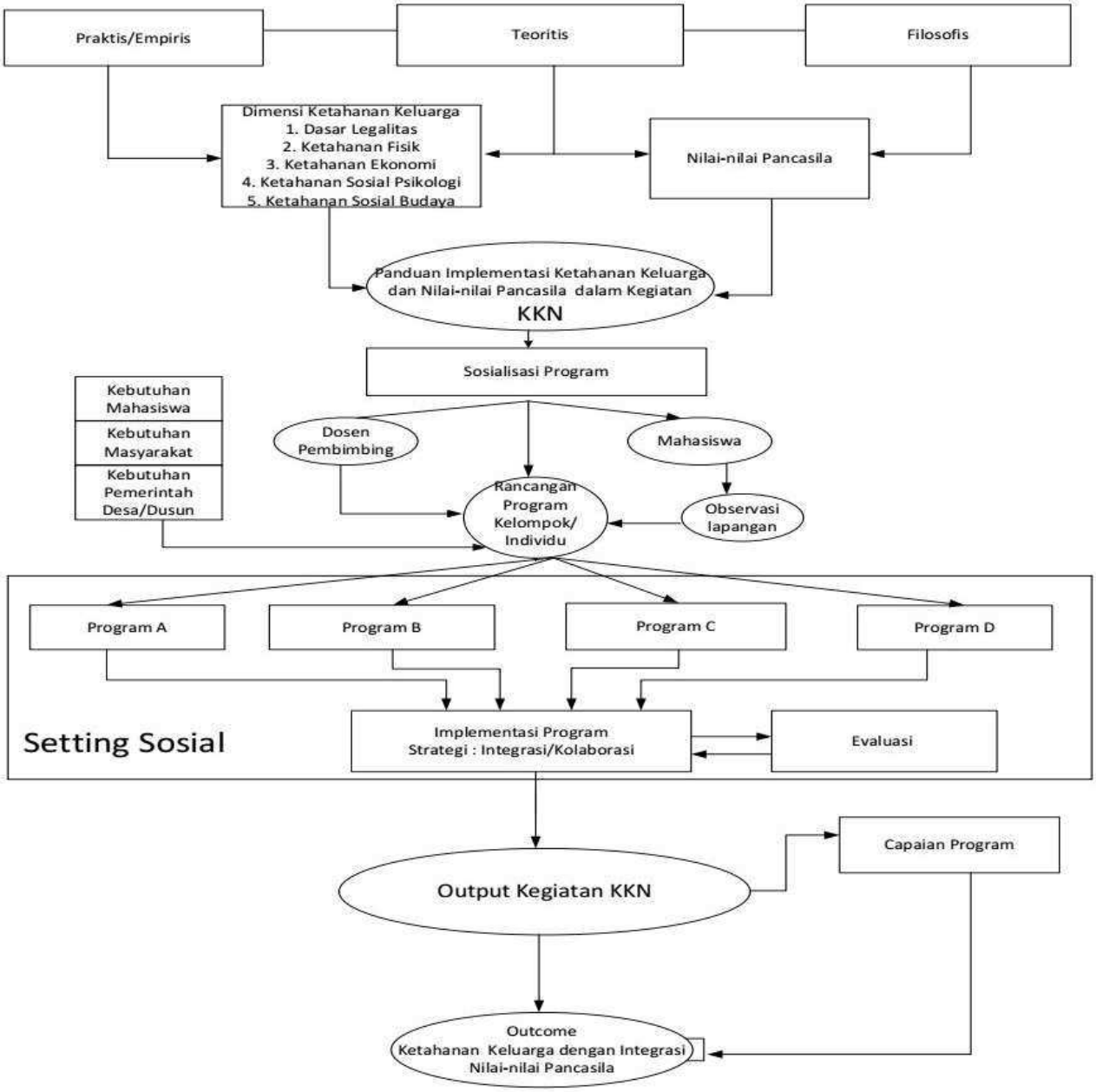

Gambar 1. Model Hipotetik Ketahanan Keluarga Berlandaskan Nilai-nilai Pancasila melalui KKN

Berdasarkan gambar di atas model hipotetik ketahanan keluarga berlandaskan nilai-nilai Pancasila menggambarkan bahwa model KKPS (Ketahanan Keluarga Pancasila) dibangun berdasarkan kajian teoritis, philosophis dan kajian empiris di lapangan. Selanjutnya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan mahasiswa dalam merancang program perlu dilakukan analisis kebutuhan masyarakat dan pemda setempat sehingga program kegiatan diintegrasikan dengan Ketahanan Keluarga Pancasila.

Penutup

Model hipotetik ketahanan keluarga berlandaskan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan KKN, dapat diimplementasikan melalui kegiatan KKN baik di pedesaan, perkotaan maupun daerah perbatasan. Hasil studi pendahuluan, semua program KKN dapat dilandasi oleh nilia-nilai Pancasila dan ketahanan keluarga secara universal. Guna melengkapi model hipotetik ini, perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan buku panduan, pelatihan untuk dosen dan mahasiswa agar percepatan pembangunan meningkatkan kualitas keluarga dapat segera terwujud.

Keteladanan Nilai-nilai Pancasila dalam Olahraga Pencak Silat Berbasis Takwa, Tanggap, Tanggon, Tangguh, dan Trengginas

SB. PRANATAHADI;
ALI SATIA GRAHA;
DANARDONO;
OKKY I.P.

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang perlu kita junjung tinggi dan kita selamatkan dari rongrongan pengaruh globalisasi. Globalisasi yang kini ada ditengah-tengah kita adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari. Perkembangan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi telah menjadikan dunia menjadi tanpa batas. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga memperoleh dan mengalami dampak serta perubahan akibat globalisasi. Dampak dan perubahan dari globalisasi tidak hanya bersifat positif, namun juga negatif.

Kemudahan akses informasi dan pengetahuan, kompetisi, integrasi, dan kerja sama yang semakin berkembang merupakan dampak positif dari globalisasi, namun ternyata hal tersebut juga berdampak negatif. Dampak negatif tersebut diantaranya adalah lahirnya generasi instan

(generasi sekarang yang inginnya bisa langsung menikmati tanpa melalui proses perjuangan dan kerja keras), kemerosotan moral, dan sikap konsumerisme. Mulai dari cara berpakaian, interaksi antar sesama, penyalahgunaan narkoba, tawuran pelajar, bullying, seks bebas hingga pornografi, kini menjadi marak di kalangan orang dewasa bahkan anak-anak. Globalisasi menyediakan pilihan untuk manusia dapat memanfaatkannya secara positif maupun negatif. Sayangnya, masyarakat Indonesia masih bersikap konsumtif dan terlalu terlena dengan segala kemudahan yang dibawa oleh globalisasi, lalu cenderung memberi efek negatif seperti pada liputan 6 petang SCTV pada hari kamis tanggal 15 juni 2017 4 gadis remaja dikebumen terlibat pengeroyokan.

Indonesia memerlukan sumberdaya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai sebagai pendukung utama dalam pembangunan. Untuk memenuhi sumberdaya manusia tersebut, pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Hal ini sesuai dengan UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada Pasal 3, menyebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pada surat kabar tribunnews.com pada tanggal 16 september 2017 megatakan pentingya pendidikan karakter antisipasi perubahan budaya.

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, jelas bahwa pendidikan di setiap jenjang, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Maupun SMA/MA/SMK/MAK harus diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan

tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan santun dan berinteraksi dengan masyarakat.

Berdasarkan penelitian di Harvard University Amerika Serikat, ternyata kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis *(hard skill)* saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain *(soft skill)*. Penelitian ini mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20 persen oleh *hard skill* dan sisanya 80 persen oleh*soft skill*. Bahkan orang-orang tersukses di dunia bisa berhasil dikarenakan lebih banyak didukung kemampuan *soft skill* daripada *hard skill*. Hal ini mengisyaratkan bahwa mutu pendidikan karakter sangat penting untuk ditingkatkan. Pendidikan karakter memiliki tiga fungsi utama. Pertama, fungsi pembentukan dan pengembangan potensi. Pendidikan karakter membentuk dan mengembangkan potensi siswa agar berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku sesuai dengan falsafah pancasila. Kedua, fungsi perbaikan dan penguatan. Pendidikan karakter memperbaiki dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi warga negara dan pembangunan bangsa menuju bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Ketiga, fungsi penyaring. Pendidikan karakter memilah budaya bangsa sendiri dan menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan karakter bangsa yang bermartabat (Zubaidi, 2011: 18).

Rohman (2012: 65) mengemukakan bahwa pendidikan karakter itu sendiri adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen

pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ekstrakulikuler, pemberdayaan sarana dan prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga sekolah. Zuchdi, Prasetya, dan Masruri (2010) juga berpendapat bahwa pembelajaran karakter tidak hanya melalui bidang studi tertentu, tetapi diintegrasikan ke dalam berbagai bidang studi.

Makin merosotnya moralitas sebagai dampak dari globalisasi menyebabkan karakter anak bangsa menjadi rapuh dan mudah terombang-ambing. Hal ini menyebabkan dekadensi moral, serta semangat kreatifitas dan produktivitas bangsa semakin menurun, yang kemudian digantikan semangat hedonisme dan konsumerisme. Disinilah pentingnya internalisasi pendidikan karakter secara lebih intensif, baik dalam program intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, sebagai pondasi yang dapat membekali anak didik untuk menyongsong masa depannya. Karakter yang kuat akan menghasilkan mental yang kuat, semangat yang kuat, pantang menyerah, gigih, kerja keras, tidak manja, dan berani berproses.

Jamal Ma'mur Asmani dalam bukunya Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah menuliskan "Pendidikan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Pendidikan karakter di sekolah dapat dilakukan melalui pengintegrasian dalam kegiatan pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Pendidikan karakter melalui kegiatan pembelajaran intrakurikuler adalah dengan mengintegrasikannya ke dalam mata pelajaran yang mengarah pada internalisasi nilai-nilai dalam tingkah laku sehari-hari

melalui proses pembelajaran dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian (Jamal. 2012: 59).Pendidikan karakter melalui pembelajaran ekstrakurikuler adalah dengan mengintegrasikannya ke dalam kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat peserta didik melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berwenang di sekolah. (Jamal, 2012: 62).Sesuai dengan pendapat Triatmanto (2010) yang menyimpulkan bahwa Pendidikan karakter di sekolah tidak akan berhasil baik bilamana dukungan lingkungan yang berupa kehidupan keluarga, masyarakat,dan teknologinya tidak membantu.

Pendidikan karakter bukan hanya sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter adalah usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan karakter yang baik harus melibatkan pengetahuan yang baik, perasaan yang baik dan perilaku yang baik sehingga terbentuk perwujudan kesatuan perilaku dan sikap hidup peserta didik.

Karakter berasal dari nilai tentang sesuatu. Suatu karakter akan melekat dengan nilai dari perilaku seseorang. Karena itu, dalam perspektif pendidikan karakter, tidak ada perilaku anak yang tidak bebas dari nilai (Kesuma, dkk., 2011:2). Nilai-nilai pendidikan karakter yang dikembangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaanada delapan belas karakter. Nilai-nilai tersebut bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Adapun delapan belas nilai tersebut yaitu: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah

air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.

Dilihat dari segi komponennya, pendidikan karakter lebih menekankan pentingnya tiga komponen karakter yang baik (components of good character) yaitu moral knowing atau pengetahuan tentang moral, moral feeling atau perasaan tentang moral dan moral action atau perbuatan bermoral (Lickona, 1991: 21).Pendidikan karakter tidak melulu merupakan tugas dari sekolah, tetapi menjadi tugas semua pihak baik itu keluarga, tokoh masyarakat dan pihak lainnya. Sebagai organisasi beladiri, perguruan memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter generasi muda. Terlebih perguruan pencak silat tumbuh dan berkembang banyak dilingkungan pendidikan, mulai sekolah, pondok pesantren hingga kampus-kampus, baik melalui kegiatan ekstrakuriluler (diluar jam pelajaran) maupun masuk dalam program muatan lokal (ekskul wajib dalam jam pelajaran).

Tujuan pendidikan karakter yang diharapkan Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) adalah seperti berikut. Pertama, mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif siswa sebagai manusia dan warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku siswa yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab siswa sebagai generasi penerus bangsa. Keempat, mengembangkan kemampuan siswa menjadi ma-nusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. Kelima, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (dignity). (Kemdiknas, 2010: 9).

Salah satu pendidikan yang di dalamnya dapat mengembangkan karakter tangguh bagi anak adalah dengan memberikan pendidikan pencak silat. pendidikan pencak silat dapat mengembangkan lima nilai karakter yang khas yakni karakter taqwa, tangguh, trengginas, tanggap dan tanggon (Mulyana 2014). Dari fakta dilapangan dan diidentifikasi beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain: 1). pada era globalisasi berkembang sangat pesat, keteladanan implementasi nilai-nilai Pancasila semakin berkurang; 2). Pendidikan karakter anak bangsa semakin memprihatinkan, digerus kemajuan teknologi; 3). Model pendidikan karkater dan keteladanan Pancasila semakin susah ditemukan; 4). Belum ditemukan panduan keteladanan implementasi nilai-nilai Pancasila yang mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat kampus dan umum. Berawal dari hal tersebut maka permasalahan muncul adalah Bagaimanakah model keteladanan nilai-nilai Pancasila pada olahraga beladiri berbasis 5T ?. Yang dimaksud 5T adalah: Takwa, Tanggap, Tanggon, Tangguh dan Trengginas.

Nilai-nilai Pancasila dalam Olahraga Pencak Silat

Terminologi kata Pancasila dan Pencak Silat apabila di ucapkan dengan lafal yang cepat akan terdengar penuh kemiripan. Ditinjau dari asal usul kata Pencak Silat adalah bahwa kata Pencak = Panca, dan Silat = sile', Silaturahim. Jadi kata Pencak Silat bisa memiliki . Dalam makna yang lain di dalam pencak silat juga memiliki lima nilai yang dikembangkan yaitu nilai religius, etis, estetis, atletis, dan sportif. Berawal dari hal tersebut sangat jelas bahwa ajaran dan nilai-nilai pancasila telah di implementasikan pada olahraga beladiri asli Indonesia yaitu Pencak Silat melalui ajaran perilaku, tatakrama, dan nilai-nilai dalam jatidiri pencak silat. Berdasarkan empat aspek dalam pencak silat juga dengan

jelas terdiri dari aspek mental spiritual, aspek seni, aspek beladiri, dan aspek olahraga. aspek mental spiritual sejalan dengan sila pertama pada pancasila yaitu Ketuhanan yang maha Esa.

Dalam tataran sikap dan perilaku pesilat juga di kenal adanya istilah 5 T, yaitu Takwa, Tanggap, Tanggon, Tangguh dan Trengginas. Dari 5T tersebut tersirat materi yang diajarkan kepada para pesilat untuk takwa dengan menjalankan segala perintah Tuhan Yang Maha Esa, taat beribadah dan menjalankan semua yang diperintahkan dan menjauhi dari semua yang dilarangNya. Dari unsur 5T tersebut dapat dijelaskan secara detail dari makna setiap kata tersebut. **Takwa** diartikan beriman, yaitu didalam diri pesilat terdapat Rasa keterikatan (sence of commitment) kepada kaidah-kaidah, nilai-nilai agama yang diyakini oleh setiap pesilat. **Tanggap** diartikan peka terhadap sesuatu sehingga menimbulkan rasa dan sikap peduli, memiliki kepekaan, dan responsif yang tinggi. Disamping peka juga cermat yang memuat adanya dimensi kecerdasan dan kecerdikan dalam melakukan sesuatu. **Tanggon**, yaitu diwujudkan bahwa dalam diri pesilat memiliki sikap teguh dan konsisten. Dimana teguh dan konsisten merupakan sikap yang tahan uji dalam menghadapi godaan dan cobaan, serta memiliki sikap disiplin dan tanggung jawab yang sangat tinggi. Tangguh, diartikan bahwa pesilat memiliki keuletan yang diwujudkan dalam perilaku pantang menyerah dan penuh perhitungan, dan kemampuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang selalu datang setiap saat. Sedangkan Trengginas yaitu kemampuan pesilat untuk lebih aktif, kreatif untuk mampu mengambil keputusan dengan cepat, memiliki keterampilan pendukung yang cukup baik, dan selalu memiliki banyak alternatif solusi. Dari berbagai nilai Pancasila yang di dalam pencak silat selanjutnya akan di jelaskan bagaimana cara mengimplementasikan 5T dalam kehidupan sehari-hari melalui olahraga beladiri Pencak Silat dijelaskan sebagai berikut.

Nilai Takwa dalam Pencak Silat

Dalam pembelajaran Pencak Silat secara terstruktur dilakukan tahapan pembukaan, berdoa, penjelasan terkait inti pembelajaran, colling down, dan diakhiri doa penutup. Berdasarkan hasil dari pengumpulan data diperoleh bahwa implementasi nilai sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembelajaran pencak silat selalu dilaksanakan pada awal dan akhir pembelajaran dengan mengambil sikap duduk bersimpuh, mengatur nafas dengan rileks dan tenang, selanjutnya menunduk untuk berdoa kepada Tuhan.

Berdoa merupakan suatu kebutuhan rohani yang sangat diperlukan oleh manusia di dalam kehidupan. Disamping itu berdoa berfungsi sebagai alat komunikasi antara hamba dengan Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan yang ingin dicapai dengan berdoa bukan hanya sekedar mengajukan permohonan ataupun permintaan saja kepada Tuhan, akan tetapi juga menyerahkan segala perkara itu hanya kepada Tuhan sehingga awal dan akhir dalam latihan pencak silat diberi perlindungan keselamatan, dan kesuksesan atas ilmu yang dipelajari dan bermanfaat. Tata cara pelaksanaan tersebut dalam pembelajaran dilakukan dengan : 1). mahasiswa atau atlet dibariskan dengan rapi dan berhitung untuk mengetahui jumlah yang hadir dalam pembelajaran, 2). Merapikan seragam pencak silat dari baju, sabuk dan celana, 3). Pelatih memberi aba-aba untuk duduk bersimpuh, mengatur nafas dan tenang, selanjutnya memimpin berdoa, 4). Setelah selesai berdoa dilanjutkan dengan berdiri tegak. Evaluasi dalam berdoa di awal dan akhir pembelajaran bahwa berdoa harus dilaksanakan dengan hening tanpa suara apapun dan dilaksanakan dengan fokus, khusuk. Disamping pengamalan tersebut, pelatih juga berpesan untuk bersikap, berperilaku dengan menjalankan perintah agamanya masing-masing, dan menjauhi segala yang

dilarangnya. Bentuk implementasi nilai sila pertama jug dilaksanakan dengan berbagai bentuk yang lain.

Nilai Tanggap dalam Pencak Silat

Sila kedua Pancasila adalah Kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasi nilai sila kedua dalam olahraga beladiri pencak silat antara lain dalam bentuk tanggap atau responsif terhadap berbagai hal yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari seperti menolong kepada seseorang yang membutuhkan, menolong dan melindungi pada kaum yang lemah tanpa mengharapkan imbalan dari yang ditolongnya. Dalam konteks pembelajaran pencak silat yang dilakukan di hall beladiri atau di padepokan, nilai tanggap terhadap kebersihan lingkungan latihan,sehingga apabila lingkungan latihan bersih akan menimbulkan kenyamanan dalam berlatih. Kebersihan lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting dan tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Menjaga kebersihan lingkungan di tempat latihan sama artinya menciptakan lingkungan yang sehat, bebas dari kotoran seperti debu, sampah dan bau yang tidak sedap. Kebersihan lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap kenyamanan, keindahan, dan keasrian yang nantinya bermuara pada kedamaian.

Salah satu cara pembudayaan sikap tanggap dalam pembelajaran pencak silat terhadap kebersihan lingkungan dilakukan dengan berbagai cara antara lain ada pelatih yang tidak memerintahkan kepada pesilat untuk membersihkan, tetapi langsung memberikan contoh untuk membersihkan, dan para pesilat langsung paham mereka segera membantunya. Tanggap terhadap lingkungan, paham terhadap tugas yang harus dilakukan, dan mengerti dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh para pesilat. Dalam ajaran Ki Hajar Dewantoro di kenal

dengan 3 nge, yaitu ngerti, nglakoni, ngevaluasi. Dengan demikian diharapkan pesilat harus paham, dan bisa menjalankan, serta mampu mengevaluasi dengan tugas dan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari untuk kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban.

Nilai Tanggon dalam Pencak Silat

Nilai tanggon dapat dimaknai sebagai kemampuan seorang pesilat untuk mengatasi berbagai permasalahannya dengan penuh disiplin diri, tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan tujuan yang telah ditetapkannya. Disiplin merupakan sikap untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercayai yang merupakan tanggung jawabnya. Sikap tanggon akan dapat membuat seseorang terlatih dan terkontrol dengan mengajarkan bentuk-bentuk tingkah laku yang pantas dan tidak pantas, dan juga pengendalian diri sendiri dan pengarahan diri sendiri terhadap pengaruh dari pihak luar. Disamping hal tersebut juga dijelaskan bahwa sikap tanggon ini dapat dilihat dari kemampuan untuk memperhitungkan segala sesuatu yang terkait dengan akurasi, ketepatan waktu, ketepatan untuk pengambilan keputusan, keberanian untuk menentukan dan mengambil pilihan baik secara individu maupun kelompok.

Berdasarkan sejarah pencak silat di era perjuangan, telah dibuktikan bahwa pencak silat mampu menjadi garda depan dalam perjuangan kemanusiaan, kemerdekaan Indonesia karena kegigihan para pendekar untuk mengobarkan persatuan dan menjaga negara kesatuan republik indonesia.

Nilai Tangguh dalam Pencak Silat

Tangguh dapat di artikan kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu dengan jiwa yang jiwa pantang menyerah, penuh dengan strategi dan mampu memprediksi berbagai kemungkinan, serta keberanian

mengambil sebuah keputusan dalam waktu yang singkat. Jiwa pantang menyerah adalah sebutan lain bagi pribadi yang tidak merasa lemah terhadap sesuatu yang terjadi dan menimpanya. Jiwa pantang menyerah adalah sebuah wujud kepribadian seseorang yang tanpa rasa bosan bangkit dari sesuatu kegagalan ke gagalan lain yang akhirnya mencapai sukses dan keberhasilan.

Dalam pembelajaran pencak silat penanaman nilai tangguh bertujuan untuk memberikan semangat dalam berusaha, dan meningkatkan daya juang. Dalam implementasi pembelajaran pencak silat bisa dilaksanakan dengan berbagai cara, yang antara lain dengan mengadakan kegiatan out bond. Kegiatan berupa out bond memiliki dimensi pembelajaran soft skill (kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan personal) dan hard skill (kegiatan yang dilakukan untuk keterampilan teknis atau penguasaan bidang. Kegiatan ini dilakukan dengan bentuk pembelajaran segala ilmu yang disesuaikan dan dilakukan dialam terbuka dalam bentuk kegiatan yang efektif yang menggabungkan fisik dan mental.

Nilai Trengginas dalam Pencak Silat

Nilai trengginas dalam pencak silat di ajarkan semenjak anak mengikuti awal latihan melalui prasetya pesilat yang salah satunya, bahwa pesilat Indonesia adalah kesatria yang tahan uji dalam menghadapi cobaan dan godaan. Denhgan demikian, di dalam diri pesilat dapat muncul berbagai macam sikap dan karakter. Adapun karakter yang muncul antara lain mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Percaya diri adalah meyakini pada kemampuan dan penilaian diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang efektif. Dalam hal ini termasuk kepercayaan atas kemampuan didalam dirinya. Hal ini dutujukan untuk meningkatkan harga diri, motivasi diri dan yang paling penting akan melejitkan potensi diri.

Nilai-Nilai Pancasila dalam Pencak Silat

Nilai-nilai dari sila dalam pencasila secara tidak langsung telah diajarkan dalam setiap kali berlatih. Dan secara eksplisit nilai pancasila telah dituangkan ke dalam ikrar pesilat dan prasetya pesilat Indonesia yang antara lain dijelaskan sebagai berikut.

Tabel: Nilai-nilai Pancasila dalam Pencak Silat

No.	Sila dalam Pancasila	Nilai dalam Pencak Silat
1.	Sila ke satu	Kami pesilat Indonesia adalah warga negara yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berbudi Pekerti Luhur Aspek pendidikan Mental Spiritual yang diajarkan
2.	Sila ke dua	Pesilat adalah insan yang menghormati sesamanya serta mencintai persahabatan dan perdamaian. Siap dan berani membela yang benar dan memerangi yang salah
3.	Sila ke tiga	Kami pesilat Indonesia adalah pejuang yang cinta bangsa dan tanah air Indonesia Kami pesilat Indonesia adalah pejuang yang menjunjung tinggi persaudaraan dan persatuan Indonesia
4.	Sila ke empat	Pesilat adalah insan yang senantiasa berpikir dan bertindak positif, kreatif dan dinamis Dalam setiap penyelesaian selalu dengan musyawarah dan mufakat
5.	Sila ke lima	Kami pesilat Indonesia adalah kesatria yang senantiasa menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan

Dengan melihat tabel diatas, maka sudah sangat jelas bahwa implementasi nilai-nilai pancasila dalam pembelajaran pencak silat diberikan kepada murid-muridnya.

Penutup

Bersadarkan kajian hasil penelitian dan pembahasan di atas, disimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pencak silat terwujud dalam sikap tanggap, tanggon, tangguh, tanggap dan trengginas, yang didasari oleh ajaran yang dituangkan dalam ikrar pesilat dan prasetya pesilat Indonesia. Pembiasaan yang dibangun dalam diri setiap siswa akan menghasilkan pembudayaan dalam diri, yang akhirnya menjadi pola perilaku dan gaya hidup pesilat.

Implementasi Nilai-nilai Pancasila di Asrama Mahasiswa

SUTIRMAN

Pancasila sebagai dasar negara seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia. Agar setiap warga negara Indonesia dapat menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidupnya, maka nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan pada setiap diri warga negara. Penanaman nilai-nilai Pancasila harus dimulai sejak dini pada jenjang pendidikan paling bawah sampai jenjang pendidikan tinggi. Hasil dari penanaman nilai-nilai Pancasila adalah implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila mengandung nilai-nilai yang ideal dan luhur untuk memandu kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seharusnya dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan damai. Sekarang ini nilai-nilai Pancasila mulai memudar dalam kehidupan masyarakat. Paling

tidak ada lima pokok permasalahan yang menyebabkan memudarnya nilai-nilai Pancasila, yaitu pemahaman, ekslusifisme, kesenjangan sosial, pelembagaan, dan keteladanan. Memudarnya nilai-nilai Pancasila ditunjukkan dengan munculnya fenomena yang mengkhawatirkan, yaitu terjadinya konflik dalam masyarakat. Konflik yang terjadi tidak hanya pada level masyarakat bawah, tetapi juga terjadi pada golongan elit politik. Kenyataan yang demikian tersebut sangat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu diperlukan upaya bersama oleh semua pihak untuk menjaga nilai-nilai Pancasila termasuk oleh perguruan tinggi.

Universitas Negeri Yogyakarta sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk membangun generasi muda yang memiliki karakter Pancasila. Upaya menanamkan nilai Pancasila telah dilakukan oleh Universitas Negeri Yogyakarta dalam lingkungan pembelajaran di kelas maupun di asrama mahasiswa. Salah asrama mahasiswa yang dikelola adalah Asrama Mahasiswa Kampus Wates.

Asrama Mahasiswa UNY Kampus Wates berada di komplek UNY Kampus Wates yang beralamat di Jalan Mandung, Wates, Kulon Progo. Asrama Mahasiswa yang sering sebut juga dengan Rusunawa UNY Kampus Wates dirancang dan dibangun oleh Kementerian Perumahan Rakyat pada tahun 2009. Secara hukum, status kepemilikian Rusunawa adalah milik Kementerian Perumahan Rakyat. Sampai saat ini belum dilakukan penyerahan kepada pihak UNY. Namun UNY diberi kewenangan dalam penggunaannya sejak tahun 2010. Asrama mahasiswa terdiri atas dua bangunan yakni Asrama Putra dan Asrama Putri. Asrama Putri berupa bangunan yang terdiri atas 5 lantai dan Asrama Putra terdiri atas 4 lantai dengan jumlah kamar keseluruhan 174 kamar. Setiap kamar berkapasitas untuk 3 mahasiswa, sehingga daya tampung asrama keseluruhan sejumlah 522 mahasiswa.

Pengelolaan Asrama Mahasiswa UNY Kampus Wates dilakukan oleh pengelola asrama yang terdiri atas dewan pengarah, penanggung jawab, ketua, dan seksi-seksi.

Tabel 1. Struktur Organisasi Pengelola Asrama Mahawsiswa UNY Kampus Wates

Pengarah
Penanggung Jawab
Ketua
Keuangan
Kerohanian dan Pendidikan Karakter
Bakat dan Minat
Penalaran dan Kegiatan Insidental
Kebersihan dan Kesehatan
Umum dan Perlengkapan
Keamanan
Administrasi

Fasilitas yang ada dalam asrama terdiri atas fasilitas fisik (gedung) dan fasilitas untuk kegiatan-kegiatan asrama. Fasilitas yang ada dalam asrama disajikan pada tabel.

Tabel 2. Fasilitas Asrama Mahasiswa UNY Kampus Wates

No.	Nama Fasilitas
1	Kamar Asrama terdiri atas tempat tidur, rak buku, almari dan meja kursi belajar
2	Selasar lantai dasar untuk kegiatan mahasiswa dan belajar bersama
3	Kamar mandi dan WC

No.	Nama Fasilitas
4	Mushola dan gedung pembinaan karakter sebagai sarana ibadah dan pendalaman agama
5	Sarana olahraga (tenis meja, catur, bulutangkis, bola voli, sepakbola, bola basket, footsal, kolam renang)
6	Sarana Seni Budaya (band modern, rebana, gamelan jawa)
7	Tempat pemajangan media cetak
8	Ruang menerima tamu
9	Televisi
10	Mesin cuci
11	Ruang makan bersama beserta mebelair dan perlengkapannya
12	Ruang pertemuan mahasiswa
13	Ruang sekretariat asrama
14	Ruang dan dapur penjaga asrama
15	Ruang jemur pakaian
16	Gudang
17	Tempat parkir kendaraan
18	Warung asrama

Selain menyediakan fasilitas asrama secara fisik, pengelola Asrama Mahasiswa UNY Kampus Wates juga melakukan pembinaan mahasiswa melalui berbagai kegiatan. Kegiatan pembinaan diarahkan untuk membangun karakter dan *softskill* mahasiswa.

Kegiatan yang diselenggarakan di Asrama Mahasiswa UNY Kampus Wates terdiri atas kegiatan rutin dan kegiatan khusus. Kegiatan rutin merupakan kegiatan yang dilakukan secara terjadwal dan diperuntukkan bagi seluruh warga asrama. Sedangkan kegiatan khusus adalah kegiatan yang dilaksanakan secara insidental.

Tabel 3. Kegiatan Asrama Mahasiswa UNY

No	Nama Kegiatan	Tujuan
1.	Penyambutan Peserta PPG	Penyampaian tata tertib berasrama
2.	Pengukuhan Kelurahan PPG (Lurah, Carik dan RT)	Membentuk organisasi peserta PPG berasrama
3.	Pemeriksaan Kebugaran Jasmani	Mengetahui kebugaran peserta dan tindak lanjut untuk menjaga kebugaran selama mengikuti PPG
4.	Bela Negara	Menumbuhkan, meningkatkan, dan mempertebal wawasan kebangsaan sebagai warga negara Indonesia
5.	Pertemuan Bulanan	Menjalin komunikasi dan kerjasama antara pengelola dengan peserta, peserta dengan peserta, bertindak selaras dengan yang diucapkan, menepati janji, berkorban untuk orang lain, keaktifan mengikuti kegiatan
6.	Senam Sehat Bersama	Penanaman disiplin dan menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani peserta dan pengelola
7.	Makan Bersama	Bersikap inklusif dan toleran, penanaman sikap disiplin, toleransi dan etika makan
8.	Seminar Wawasan Kebangsaan	Menambah wawasan kebangsaan sebagai warga negara terdidik
9.	Seminar Nasional	Peserta memperoleh wawasan tentang peta kebutuhan tenaga guru, peluang dan kesempatan menjadi guru di Indonesia
10.	Pembinaan kerohanian/ pendalaman agama	Menjalankan ajaran agama (beribadah), menjauhi larangan agama, ketaatan pada norma hukum dan peraturan sesuai dengan agamanya masing-masing dan mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama

No	Nama Kegiatan	Tujuan
11.	Pengenalan Lingkungan Sekitar	Responsif/cepat tanggap, suka menolong, penanaman kehidupan sosial di lingkungan masyarakat
12.	Bina Lingkungan Fisik dan Mental	Penanaman hidup bersih, sehat dan kepedulian terhadap masyarakat lingkungan sekitar.
13.	Kursus Mahir Dasar	Dapat mengatur orang lain, dapat diatur orang lain, loyal, baik sebagai pemimpin maupun anggota , memiliki inisiatif.
14.	Kursus Bahasa Inggris	Peningkatan dan pendalaman berbahasa Inggris.
15.	Pelatihan IT	Peningkatan dan pengembangan teknologi informasi melalui media pembelajaran berbasis komputer
16.	Ketrampilan: Menyulam, Boga	Peningkatan kemampuan usaha kecil mandiri.
17.	Olah raga pilihan: sepak bola, tenis meja, bulu tangkis, basket, bola voli, futsal, renang.	Penyaluran bakat, minat dan kegemaran, cinta olahraga.
18.	Seni pilihan : hadroh/rebana, band, karawitan dan seni tari.	Penyaluran bakat, minat dan kegemaran, mencintai budaya Indonesia
19.	Penerbitan Bulletin bulanan	Penyaluran bakat menulis dan asah pikiran, peka terhadap lingkungan
20.	Outdoor Activity	Penanaman kerjasama, tolerasi, disiplin, empati, simpati.
21.	Diskusi dan Belajar Bersama	Penguatan bidang akademik dan pembudayaan belajar bersama.
22.	Wisata Budaya/ Akademik	Pengenalan budaya lokal dan cinta tanah air
23.	Monitoring PPG – Rektor UNY	Mengetahui, menampung, dan memotivasi peserta dalam mengikuti PPG SM3T

No	Nama Kegiatan	Tujuan
24.	Pelatihan perawatan jenazah	Membekali kehidupan bermasyarakat dalam merawat jenazah
25.	Penulisan buku/ buletin dan album kenangan	Membekali gemar menulis dan menuangkan ide dalam bentuk tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan
26.	Peringatan Hari Besar Nasional	Meningkatkan nasionalisme dan wawasan kebangsaan.
27.	Mawaris	Memberikan pemahaman terhadap warisan orang tua
28.	Sekolah Pra Nikah	Memberikan bekal kehidupan yang sakinah, mawadah dan warohmah
29.	Malam Pentas Seni	Mengembangkan kreatifitas dan jiwa seni peserta PPG.

Nilai-nilai Pancasila telah implementasikan di Asrama Mahasiswa UNY Kampus Wates melalui berbagai kegiatan. Implementasi nilai-nilai Pancasila di Asrama Mahasiswa UNY Kampus Wates, dilakukan melalui berbagai kegiatan yang telah diprogramkan. Masing-masing kegiatan diarahkan untuk mewujudkan terciptannya kondisi yang implementasi sila-sila dalam Pancasila.

Implementasi nilai sila Ketuhanan Yang Mahas Esa dilakukan melalui kegiatan pengajian rutin dan pembinaan kerohanian. Kegiatan pengajian rutin dan pembinaan kerohanian dimaksudkan untuk menanamkan keimanan dan ketaqwaan dengan mengedepankan sikap toleransi beragama. Penanaman nilai ketuhanan diselenggarakan sesuai dengan agama masing-masing. Sebagian besar penghuni Asrama Mahasiswa UNY Kampus Wates memeluk agama Islam. Untuk mendukung implementasi nilai ketuhanan bagi mahasiswa yang beragama Islam, di lingkungan asrama telah dibangun prasarana berupa masjid. Di asrama juga tersedia ruang pertemuan yang dapat dipergunakan untuk pembinaan nilai-nilai

ketuhanan bagi mahasiswa yang beragama lain selain Islam.

Melalui pembinaan nilai-nilai Ketuhanan diharapkan dapat membentuk pribadi mahasiswa yang beriman dan bertakwa. Keimanan dan ketakwaan seseorang akan mengendalikan seseorang untuk senantiasa berperilaku baik. Perilaku baik yang dilakukan oleh setiap individu akan mendorong terbentuknya perilaku kelompok yang baik pula. Pada akhirnya apabila setiap orang telah menginternalisasi nilai-nilai Ketuhanan dengan baik, maka akan membentuk masyarakat yang berketuhanan dengan sikap toleransi yang tinggi.

Nilai-nilai sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab di Asrama Mahasiswa Kampus Wates dikembangkan melalui beberapa kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi pertemuan bulanan, senam sehat bersama, pengenalan lingkungan sekitar, serta bina lingkungan fisik dan mental.

Kegiatan pertemuan bulanan merupakan kegiatan pertemuan seluruh penghuni dan pengelola asrama yang diadakan secara rutin setiap bulan. Pertemuan bulanan dimaksudkan untuk menjalin komunikasi dan kerjasama antara pengelola dengan penguni asrama, dan sesama penghuni asrama. Kegaitan pertemuan rutin bulanan juga menjadi ajang untuk membiasakan perilaku yang konsekuen, menepati janji, berkorban untuk orang lain, dan keaktifan mengikuti kegiatan.

Kegiatan lain yaitu senam sehat bersama yang dilaksanakan setiap minggu. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membentuk sikap disiplin dan menjaga kesehatan jasmani penguni asrama. Disiplin merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa penghuni asrama dan sangat berguna dalam berbagai aspek kehidupan. Kesehatan jasmani mahasiswa penghuni asrama juga menjadi perhatian agar dapat mendukung keberhasilan studi.

Kegiatan pengenalan lingkungan sekitar dimaksudkan untuk membangun sikap responsif dan suka menolong. Mahasiswa harus perduli dengan lingkungan sekitar dan terbiasa hidup bermasyarakat. Kegiatan pengenalan lingkungan sekitar dilakukan dengan cara bersilaturahim kepada warga masyarakat yang berada di sekitar asrama mahasiswa.

Selain pengenalan lingkungan, dilakukan pulan kegiatan bina lingkungan fisik dan mental. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menanamkan sikap hidup bersih, sehat dan kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Kegiatan bina lingkungan fisik dilakukan dengan cara mengadakan kerja bakti di lingkungan asrama dan kerja bakti bersama warga. Kegiatan bina lingkungan mental dilakukan dalam bentuk pengajian bersama warga sekitar.

Penanaman nilai Persatuan Indonesia dilakukan melalui kegiatan peringatan hari besar nasional, wisata budaya, diskusi dan belajar bersama, *outdoor activity,* serta seminar wawasan kebangsaan. Kegiatan peringatan hari besar nasional diselenggarakan di lingkungan kampus Wates. Peringatan hari besar nasional menjadi wahana untuk membangun jiwa nasionalisme dan memperkuat wawasan kebangsaan. Dengan jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat maka para mahasiswa akan memiliki semangat unutk memperkuat persatuan bangsa.

Penanaman nilai persatuan juga dilakukan melalui kegiatan wisata budaya. Melalui kegiatan wisata budaya, para mahasiswa dapat mengenal bebagai budaya bangsa sehingga menumbuhkan sikap rasa cinta budaya dan tanah air. Dengan rasa cinta budaya dan cinta tanah air maka dapat menjadi pemersatu bangsa.

Kegiatan belajar bersama dimaksudkan untuk membangun kerjasama. Demikian pula dengan *outdoor activity*, salah satu targetnya

adalah untuk membangun kerjasama. Kegiatan seminar wawasan kebangsaan juga diarahkan untuk membentuk jiwa patriotisme yang dapat mempertahankan kutuhan bangsa.

Penanaman nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawatan Perwakilan dilakukan melalui kegiatan pembentukan pengurus warga asrama. Kegiatan pembentukan pengurus warga asrama sebagai upaya untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi.

Penanaman nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilakukan melalui kegiatan makan bersama, diskusi dan belajar bersama. Kegiatan makan bersama di asrama diselenggarakan untuk mendorong tumbuhnya sikap berbagi dan toleransi. Kegiatan belajar dan diskusi bersama juga diarahkan untuk menumbuhkan sikap berbagi dan menumbuhkan jiwa sosial.

Mahasiswa sebagai generasi muda penerus perjuangan bangsa perlu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Mahasiswa yang berjiwa Pancasila menjadi modal bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi jaminan bagi keberlangsungan generasa bangsa dari masa ke masa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman nilai Pancasila tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan di Asrama Mahasiswa UNY Kampus Wates. Berdasarkan hasil analisis data penelitian diketahui bahwa pemahaman mahasiswa tentang nilai Pancasila masih kurang baik. Namun demikian partisipasi mahasiswa dalam berbagai kegiatan di Asrama Mahasiswa UNY Kampus Wates diketahui cukup aktif.

Merujuk kepada data analisis regeresi, diketahui bahwa pengaruh pemahaman nilai Pancasila terhadap partisipasi mahasiswa dalam kegiatan di Asrama Mahasiswa UNY Kampus Wates sangat kecil. Pengaruh pemahaman nilai Pancasila terhadap partisipasi mahasiswa dalam kegiatan di Asrama Mahasiswa UNY Kampus Wates hanya sebesar 0,5%. Angka tersebut menunjukkan bahwa 99,5% partisipasi mahasiswa dalam kegiatan di Asrama Mahasiswa UNY Kampus Wates dipengaruhi oleh faktor lain selain pemahaman nilai Pancasila. Analisis ini juga didukung oleh angka signifikansi sebesar 0,274 yang lebih besar dari angka toleransi kesalahan 5%, sehingga terbukti bahwa pemahaman nilai Pancasila tidak berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi mahasiswa dalam kegiatan di Asrama Mahasiswa UNY Kampus Wates.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila di Asrama Mahasiswa UNY Kampus Wates telah dilakukan melalui berbagai kegiatan. Berbagai kegiatan di Asrama Mahasiswa UNY Kampus Wates telah dirancang dan dilaksanakan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila.

Pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila ternyata tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan di Asrama Mahasiswa UNY Kampus Wates. Secara regresi, pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila tidak berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi mahasiswa dalam kegiatan di Asrama Mahasiswa UNY Kampus Wates.

Pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai Pancasila perlu ditingkatkan. Upaya meningkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila oleh mahasiswa dapat dilakukan melalui kegiatan forum diskusi Pancasila, seminar dan sarasehan Pancasila, serta debat Pancasila.

MRAPP (*My Real Action Plan for* Pancasila): Model Pengembangan Penanaman Nilai Pancasila di Perguruan Tinggi

TAAT WULANDARI;
ANIK WIDIASTUTI;
NASIWAN

Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari suku, agama dan ras yang beragam. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 Indonesia dihuni 237 juta penduduk, memiliki 1,86 juta km^2 daratan, 3,2 juta km^2 lautan, dan 17.604 pulau. Hal tersebut menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara terbesar di dunia berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Hal ini dapat menumbuhkan kesadaran bahwa segala yang diraih pada hakikatnya membutuhkan pertolongan orang lain sehingga melahirkan kesadaran bahwa setiap manusia dapat terpanggil hatinya untuk bekelakuan baik untuk orang lain serta lingkungannya. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan mengendalikan diri dalam segala kepentingan agar dapat hidup yang selaras dan seimbang di dalam masyarakat. Hubungan sosial yang selaras dan seimbang dalam

pandangan Pancasila di dalam masyarakat tidak netral namun dijiwai oleh nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila sebagai suatu kesatuan. Manusia harus hidup dan dapat bekerja sama dengan manusia yang lain dalam bermasyarakat (Kaelan, 2010: 31).

Berdasarkan penjelasan tersebut, Bangsa Indonesia memiliki Pancasila yang dijadikan sebagai ideologi yang berasal dari nilai-nilai kepribadian asli Indonesia. Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan penting dalam negara Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, sebagai dasar filsafat negara, serta sebagai asas persatuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai nilai-nilai, diantaranya adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kemasyarakatan, nilai nasionalisme, nilai persatuan, dan nilai keadilan sosial (Huda, 2018).

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ketika menjadi dasar negara maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebaiknya yang melandasi kehidupan masyarakat cara berpikir dan bertindak. Tiap butir dalam Pancasila terkandung nilai luhur yang sudah selayaknya menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia untuk diimplementasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Berdasarkan pernyataan ini, maka Pancasila menjadi pedoman maupun acuan yang dapat dipergunakan warga negara dalam berperilaku sehingga tercipta warga negara yang baik.

Pada masa pemerintahan tiga dasawarsa terakhir ini, pelembagaan nilai-nilai Pancasila hanya sebatas retorika. Bangsa Indonesia masih memamerkan sebagian perilaku yang berbanding terbalik dengan apa yang diamanatkan Pancasila. Keadaan tersebut saat ini masih belum mencerminan praktek nilai-nilai Pancasila secara langsung. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapat konflik yang berasal dari peristiwa kekerasan serta intoleransi kelompok minoritas ataupun kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda. Konflik-konflik tersebut terjadi di

berbagai daerah dan sangat meresahkan masyarakat. Konflik tersebut diantaranya disebabkan oleh permasalahan yang sepele tetapi berimbas ke hal yang besar.

Laporan Tahunan 2015 Komnas HAM (2016) menyebutkan terjadi peningkatan laporan kasus kebebasan dalam berkeyakinan dan beragama dari 74 pengaduan pada tahun 2014 menjadi 87 pengaduan. Tiap pengaduan tersebut mencakup lebih dari satu tindakan. Selain itu menurut Laporan Wahid Institute tahun 2015 (2016), setidaknya telah terjadi peningkatan laporan kasus kebebasan dalam berkeyakinan dan beragama pada tahun 2015 mencapai 190 peristiwa dalam 249 tindakan. Laporan tersebut mencatat terjadi kenaikan 23% dari tahun 2014 dengan jumlah 158 peristiwa dengan 187 tindakan pelanggaran. Pada awal 2017, bahkan terjadi konflik yang mengatasnamakan agama cenderung meningkat. Hal ini terindikasi di daerah di Depok, Jawa Barat. Pada tanggal 23 Februari 2017 terjadi penyegelan Masjid Al-Hidayah milik Jemaat Ahmadiyah Sawangan oleh Satpol PP Kota Depok (Fauzi, 2017).

Segala perpecahan dan konflik yang terjadi sangat tidak mencerminkan jati diri Bangsa Indonesia. Akhir-akhir ini budaya dan arah perpolitikan di Indonesia diwarnai dengan isu konflik, etnisitas, dan ancaman disintegrasi wilayah Indonesia. Di sinilah diperlukan Pancasila sebagai falsafah Bangsa Indonesia. Dalam tataran filasafat, nilai-nilai yang terkandung didalamnya sebaiknya diturunkan ke dalam hal-hal yang bersifat implementatif dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih pada era industri 4.0 saat ini. Era modern saat ini pun menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Indonesia khususnya generasi muda dalam mempererat persatuan di tengah keberagaman.

Sekarang ini komunikasi dan teknologi berkembang pesat. Media elekronik maupun media sosial dapat mempengaruhi sikap dan tindakan generasi muda yang cenderung tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.

Munculnya fenomena yang dapat mengancam ideologi negara saat ini seperti pemasangan atribut PKI dalam bentuk logo, striker dan bendera yang ditemukan di salah satu kamar kost mahasiswa yang dianggap menjadi sumber keresahan dan mengancam ideologi bangsa (Gredinant, 2017). Selain itu, kehidupan bernegara pada saat ini terancam dengan masifnya korupsi. Menurut survei yang dilakukan ACFE Indonesia tahun 2016 dalam Siregar (2017), kasus yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi. Korupsi dilihat sebagai jenis kebohongan yang paling merugikan. Korupsi menjadi penyebab penyalahgunaan dan beban generasi berikutnya. Oleh sebab itu, korupsi suatu masalah yang ringan melainkan harus dihilangkan dari kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merupakan perilaku tindak pidana, bahkan dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Generasi muda tidak hanya dilatih berpikir kritis tetapi harus mampu mengambil tindakan. Pembelajaran pun harus dapat melatih keterampilan berpikir kritis (Narmaditya, dkk., 2018). Dari Pancasila saja korupsi sangat bertentangan dengan kelima sila dalam Pancasila. Perilaku korupsi merupakan tindakan dosa yang dilarang dalam agama manapun. Tindakan tersebut tentu bukanlah hal yang adil dan beradab sehingga mengakibatkan terjadinya perpecahan. Prinsip inilah yang dijelaskan pada sila kelima yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia (Rukiyati, dkk., 2016: 44)

Penanaman Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah mudah. Semangat nilai-nilai Pancasila mencerminkan nasionalisme masyarakatnya. Sementara masyarakat Indonesia menunjukkan penurunan nasionalisme (Bakar, dkk., 2018). Implementasi nilai-nilai Pancasila perlu direvitalisasi sebagai dasar negara bersama norma-norma agama. Rumusan pancasila itulah dalam hukum positif

Indonesia secara yuridis-konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga Negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga Negara, tanpa kecuali (Ramadhani, 2016: 12).

Kenyataan pancasila yang demikian disebut sebagai kenyataan yang objektif bahwa kenyataan itu ada pada pancasila itu sendiri terlepas dari suatu yang lain atau terlepas dari pengetahuan orang. Kenyataan objektif yang ada pada pancasila, sehingga pancasila sebagai suatu sistem bersifat khas dan berbeda dengan sistem-sistem falsafah yang lain. Hal ini secara ilmiah disebut sebagai filsafah secara objektif (Notonegoro, 1975: 14). Berdasarkan hal tersebut maka nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila pertama sampai dengan sila kelima meruapakan cita-cita, harapan, dambaan bangsa Indonesia yang dapat diwujudkan secara bersama-sama. Telah dipahami bahwa nilai-nilai tersebut harapannya dapat terimplementasi dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penerapan nilai Pancasila memiliki tanggung jawab yang sama besar sebagai warga negara, pejabat negara, aparatur pemerintah yang berpedoman pada dasar falsafah Pancasila. Demikian pula institusi pendidikan maupun perguruan tinggi sebaiknya mampu menterjemahkan nilai-nilai Pancasila sehingga terdapat upaya dalam mewujudkan dan melaksanakan secara nyata oleh segenap mahasiswa yang terdapat pada suatu perguruan tinggi. Mahasiswa sebagai *agent of change* pada era sekarang ini dituntut untuk berperan mengawal kinerja pemerintah seperti mengontrol dan memberikan masukan dalam rangka menentukan kebijakan yang memihak pada rakyat.

Selain itu mahasiswa merupakan generasi yang dipersiapkan dengan sungguh-sungguh untuk dapat mengabdi dan meneruskan tangga pemerintahaan sekarang ini. Harapan besar untuk mahasiswa adalah dapat meneruskan tonggak kepemimpinan di masa depan untuk

dapat menampung segala aspirasi dari masyarakat. Sebagai seorang mahasiswa yang memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, namun juga memiliki tanggung jawab terhadap bangsa diharapakan memiliki kecerdasan intelektual, spritual serta emosional. Sehingga bangsa ini akan memiliki calon pemimpin yang yang dalam berpikir dan bertindak tidak akan menyimpang dari norma, hukum dan dasar negara Pancasila.

Pancasila memiliki kedudukan yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk itu Pancasila sebaiknya mendapat tempat untuk dipertahankan dan dilestarikan melalui kegiatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan cara merevitalisasi dan mengaktualisasikan. Oleh karena itu menjadi perhatian dan tanggung jawab semua pihak khususnya pendidik dalam proses pendidikan perlu menanamkan nilai-nilai Pancasila. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik di atas mencerminkan tergesernya nilai-nilai Pancasila, termasuk dalam dunia pendidikan. Nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila perlu dibelajarkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pendidikan tentang Pancasila di ranah Perguruan Tinggi.

Oleh karena itu penulis memiliki ide ini mengembangkan model penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara Indonesia. Penanaman nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan di dalam kegiatan pembelajaran, sebagaimana dinyatakan oleh Murdiono (2017) bahwa "penanaman nilai-nilai Pancasila melalui integrasi pada kegiatan intrakurikuler maupun ekstra kurikuler". Oleh karena itu, sangat penting dan mendesak untuk mengembangkan suatu model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk berupa model penanaman nilai-nilai Pancasila yang dinamakan MRAPP (*My Real Action Plan for Pancasila*).

MRAPP (*My Real Action Plan for Pancasila*) merupakan model

penanaman nilai-nilai Pancasila melalui mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dikembangkan berdasarkan identifikasi potensi masalah yang dilakukan dengan cara observasi langsung ketika perkuliahan. Produk yang dikembangkan dalam ide ini adalah model pembelajaran untuk penanaman nilai-nilai Pancasila. Model pembelajaran MRAPP terdiri dari 7 langkah kegiatan seperti yang tercantum pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. Langkah-langkah Model MRAPP

Langkah-langkah model pembelajaran yang terdapat pada bagan di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut.

Langkah 1: Observasi lapangan

Model pembelajaran MRAP (*My Real Action Plan For Pancasila*) pada prinsipnya merupakan suatu pembelajaran berbasis kegiatan riil.

Sebagai bahan merancang aksi mahasiswa melakukan studi awal berupa observasi lapangan untuk menggali masalah yang akan dipecahkan dengan merancang aksi yang disebut dengan *real action*. Observasi lapangan dapat dilakukan di organisasi atau lembaga yang akan dijadikan lokasi melaksanakan *real action*.

Langkah 2: Penentuaan salah satu sila dari Pancasila

Pada langkah ini, mahasiswa menentukan salah satu sila dari Pancasila yang nantinya akan menjadi basis r*eal action* mereka. Oleh sebab itu, salah satu butir tersebut harus dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sinilah kemudian hal-hal apa saja yang akan menjadi *real action* muncul untuk diselesaikan oleh mahasiswa.

Langkah 3: Perancangan *Real Action*

Langkah ini melatih mahasiswa menjadi mandiri. Mahasiswa diberi dorongan untuk menentukan kegiatan nyata. Mahasiswa diberikan keleluasaan untuk berinovasi dan berkreasi melalui rancangan *real action*. Kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelompok dan atau individual.

Langkah 4: Pembuatan Jadwal Kegiatan *Real Action* dan Presentasi Proposal MRAP

Mahasiswa membuat jadwal untuk melaksanakan dan melaporkan hasil r*eal action*. Kegiatan dapat dilakukan selama semester perkuliahan berlangsung. Meskipun demikian, mereka tetap harus membuat sebuah penjadwalan yang menjaga agar proyek dapat terselesaikan secara baik dengan menggunakan waktu yang efektif. Di sinilah kemampuan berpikir mahasiswa juga dilatih untuk kritis dan pandai memperkirakan hal-hal apa yang perlu mereka lakukan untuk persiapan, pembuatan, hingga *real action* mereka dapat terselesaikan tanpa harus molor dari batas waktu yang ditetapkan.

Langkah 5: Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan *Real Action/Progress Report*

Pada waktu tatap muka, dosen dapat menggunakan waktu untuk memantau kegiatan. Hal-hal apa saja yang mendukung dan menghambat kegiatan dibicarakan bersama. Jika terdapat hambatan maka harus dicari solusinya oleh kelompok tersebut dan dosen memeriksa agar semua dapat terkendali. Langkah keempat ini tidak hanya dilihat dari aspek dosen saja, tetapi juga harus dilihat dari aspek mahasiswa. Apakah sudah berjalan sesuai perencanaan mereka atau belum? Apa hambatan yang ditemui? Lalu apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya? Kemajuan proyek perlu tersus dipantau oleh dosen yang mungkin dapat memberikan bantuan tambahan jika memang diperlukan. Selain itu mahasiswa juga harus belajar bekerja sesuai rencana jadwal yang mereka buat, apakah semuanya sudah berjalan dengan baik.

Langkah 6: Pelaporan Proses dan Hasil Kegiatan *Real Action*

Langkah ini merupakan tahap untuk tiap kelompok melaporkan proses dan hasil kegiatan. Dosen juga memberikan penilaian terhadap hasil kegiatan *Real Action* mahasiswa. Laporan proses dan hasil kegiatan dapat berupa poster, video aksi, cerita pendek atau cerpen, cerita bergambar atau komik. Laporan ini dibuat sesuai dengan kreativitas mahasiswa masing-masing.

Langkah 7: Pelaksanaan Refleksi

Tahap ini dosen memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan refleksi diri atas kerja tiap-tiap kelompok. Dosen juga memfasilitasi mahasiswa untuk berpikir dan mengingat kembali hal-hal terbaik apa yang telah dapat mereka buat selama mengerjakan kegiatan *real action*, lalu hal-hal apa yang masih perlu diperbaiki.

Berdasarkan hasil uraian di atas, permasalahan yang terjadi di Indonesia semakin berkembangnya waktu semakin bertambah. Keberagaman, korupsi, dan intoleransi terkadang menjadi masalah yang cukup meresahkan masyarakat. Hal ini perlu disebabkan kurangnya pengamalan nilai Pancasila di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengimplementasian nilai Pancasila salah satunya adalah di perguruan tinggi. Penulis menawarkan solusi pengembangan model pananaman nilai Pancasila di kalangan mahasiswa yang terintegrasi dengan satuan mata kuliah.

Pengembangan model penenaman nilai-nilai Pancasila ini disebut dengan MRAPP *(My Real Action Plan for Pancasila)* dengan tujuh langkah pembelajaran yang terdiri dari: a) observasi lapangan, b) penentuan salah 1 sila dari Pancasila; c) perancangan *real action*/proposal; d) pembuatan jadwal kegiatan *real action* dan presentasi proposal; e) pemantauan pelaksanaan *real action/progress report*; f) pelaporan proses dan hasil *real action*; g) pelaksanaan refleksi. Melalui model penanaman MRAPP diharapkan nilai-nilai dalam sila Pancasila dapat terinternalisasi di kalangan generasi muda. Generasi muda pula diharapkan dapat mengilhami nilai-nilai Pancasila dalam setiap perilaku dan dapat menyelesaikan seluruh permasalahan bangsa di masa yang akan datang dengan prinsip Pancasila.

Pentingnya Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Perkuliahan Kewirausahaan

TEJO NURSETO

Banyaknya wirausaha merupakan kunci suksesnya sebuah bangsa termasuk Indonesia. Pada masa pembangunan dan era perdagangan global seperti ini sangat dibutuhkan mental dan kemampuan wirausaha agar Indonesia mampu bersaing dengan Negara lain. Indonesia kaya akan sumber daya alam, tinggal bagaimana masyarakat mampu mengelola dan membuat peluang usaha dari kekayaan alam tersebut. Tugas untuk menumbuhkan wirausaha muda diemban oleh Prodi Pendidikan Ekonomi FE UNY melalui matakuliah kewirausahaan.

Mata kuliah kewirausahaan membekali mahasiswa membangun motivasi wirausaha, membentuk karakter/ sikap kewirausahaan, memahami konsep kewirausahaan, dan melatih keterampilan

berwirausaha. Cakupan matakuliah ini meliputi motivasi berwirausaha, pengembangan *mindset* dan konsep kewirausahaan, ekonomi kreatif, peluang usaha, manajemen SDM, manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, *bussines plan*. Pengalaman belajar yang dilakukan mahasiswa antara lain aktivitas mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, mengkomunikasikan dan mencipta. Selain itu mahasiswa juga melakukan aktivitas untuk berlatih mendirikan usaha. Sistem evaluasi yang digunakan adalah penilaian autentik dengan teknik penilaian observasi, kinerja , penilaian produk, dan penilaian projek. Nilai- nilai karakter yang dikembangkan meliputi religious, mandiri, tangguh, tanggung jawab, displin, peduli, kerjasama, kreatif, inovatif, keberanian, menanggung resiko, orientasi pada tindakan, kerja keras dan santun.

Dalam ilmu ekonomi terdapat sebuah istilah siapa yang kuat maka ialah yang akan menang, sehingga umumnya dalam pengembangan ekonomi selalunya mengarah pada persaingan bebas sangat jarang yang mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal tersebut tentunya kurang sesuai dengan nilai- nilai Pancasila lebih mengarah pada ekonomi kerakyatan. Maka dari itu system perekonomian di Indonesia berdasarkan pada asas ekonomi kekeluargaan untuk seluruh bangsa.

Karakteristik Implementasi Nilai- nilai Pancasila dalam Perkuliahan Kewirausahaan

Pengertian Ekonomi Pancasila

Mubyarto (1999: 46) menyatakan bahwa Ekonomi Pancasila sebagai ilmu, seni, dan moral, untuk membantu bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila. Ekonomi Pancasila adalah ekonomi moral bukan sekedar *"economics"* atau"*political economy*", karena jiwanya adalah falsafah hidup bangsa Indonesia yang sudah tertanam dalam kalbu seluruh rakyat Indonesia.

Gambar 1. Indahnya gotong royong di perdesaan

Kebersamaan dan gotong royong merupakan jati diri bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia sedari kecil dididik untuk menjadi manusia yang hidup komunal, bukan individual. Landasan Hukum Ekonomi Pancasila Kelahiran Ekonomi Pancasila sebenarnya sudah setua Republik Indonesia. Alasannya, Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan muasal Ekonomi Pancasila tercetus pada saat terbentuknya Indonesia sebagai sebuah bangsa berdaulat. Dalam Pancasila, sumbernya terdapat pada Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sedangkan dalam UUD 1945, sumbernya ada pada Pasal 27 (2), Pasal 33, dan Pasal 34. Pasal 27 (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Limbong, 2011).

Karakter Ekonomi Pancasila

Mengenai Ekonomi Pancasila, Mubyarto dalam Agusalim dkk (2014) mengemukakan tiga karakter khasnya. Ketiganya adalah sebagai berikut:

Pertama, Dalam sistem ekonomi Pancasila, koperasi merupakan soko guru perekonomian. Koperasi merupakan salah satu bentuk paling konkret dari usaha bersama. Dalam pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Bung Hatta menyebut asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Sejak tahun 1980an komitmen pemerintah pada koperasi semakin menunjukkan titik terangnya. Hal ini dapat terlihat dengan terbentuknya menteri khusus yaitu Menteri Muda Urusan Koperasi. **Kedua**, Perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Ekonomi Pancasila bertekad untuk mengembalikan hakikat ilmu ekonomi sebagai ilmu moral dan memperjuangkan revolusi moral ekonomi sehingga roda ekonomi bangsa dapat digerakkan oleh rangsangan ekonomi, moral, dan sosial. Salah satu contohnya melalui Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya). **Ketiga**, Egalitarianisme kehendak yang dari seluruh masyarakat Indonesia ke arah keadaan kemerataan social. Ekonomi Pancasila membawa *spirit* kekeluargaan dan solidaritas. Dengan spirit kekeluargaan dan solidaritas, jurang antara kaya dan miskin tidak terlalu lebar seperti pada ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis menciptakan jurang pemisah antara yang kaya dan miskin.

Gambar 2. Mengenal Ekonomi Pancasila

Pengertian Wirausaha

Kewirausahaan dengan asal kata entrepreneur berasal dari bahasa Perancis berarti *between taker* berarti perantara. Bygrave dalam Alma (2011:24) menyatakan sebagai berikut: *entrepreneur is the person who perceives an opportunity and creates an organization to pursue it.* Dari defenisi di atas ditekankan bahwa seorang wirausaha adalah orang yang melihat adanya peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut.

Gambar 3. Potret Ekonomi Kreatif

Dengan demikian, kewirausahaan mengajarkan kepada seseorang kemampuan untuk mencari peluang sebagai solusi kehidupan yang akan ditemui di dalam masyarakat. Fenomena saat ini pembelajaran di perguruan tinggi masih banyak yang belum menekankan pentingnya kewirausahaan. Dalam artian lain, belum semua perguruan tinggi menjadikan kewirausahaan sebagai program kampus yang mengajarkan ilmu seputar wirausaha. Hal ini tentu saja mempengaruhi pola pikir

mahasiswa, sehingga setelah lulus mereka cenderung untuk tidak menyukai dunia wirausaha dan tergantung kepada lapangan kerja yang disediakan pemerintah.

Pengembangan Program Pendidikan Kewirausahaan

Menurut Muhammmad Ali (2017) Pengembangan Program Pendidikan Kewirausahaan Terpadu Berorientasi Ekonomi Kerakyatan Pada Universitas Hamzanwadi Selong Kabupaten Lombok Timur. Hasil penelitian dan pengembangan mengindikasikan bahwa program pendidikan kewirausahaan terpadu berorientasi ekonomi kerakyatan efektif dalam meningkatkan minat dan kesadaran mahasiswa dalam berwirausaha, membentuk sikap dan karakter mahasiswa dalam berwirausaha, meningkatkan pengetahuan.

Gambar 4. Mahasiswa Mempresentasikan Tugasnya

Belajar pada kesuksesan negara maju seperti Eropa dan Amerika yang hampir seluruh perguruan tingginya menyisipkan materi kewirausahaan (*entrepreneurship)* dihampir setiap mata kuliahnya, negara-negara di Asia seperti Jepang, Singapura dan Malaysia juga menerapkan materi-materi

entrepreneurship minimal di dua semester. Itulah yang menjadikan negara-negara tersebut menjadi negara maju dan melakukan lompatan panjang dalam pembekalan lulusannya untuk terjun ke tengah masyarakat sebagai manusia yang berperan dalam pembangunan bangsanya. Menurut Kuswara (2012:3) sedikitnya ada tiga usaha dalam meningkatkan gema kewirausahaan bagi mahasiswa, yaitu:

1. Pendirian Pusat Kewirausahaan

   Beberapa perguruan tinggi telah menggagas berbagai pusat kewirausahaan (*enterpreneurship)* kampus dapat, seperti *BSI Entrepreneruship Center* (BEC) di BSI, UNY (Plaza UNY).
2. Entrepreneurship Priority

   Sesuai acuan kurikulum dan standar nasional pendidikan, maka perguruan tinggi di Indonesia baik negeri maupun swasta meskipun ketinggalan, sudah mulai sadar akan pentingnya kewirausahaan di kampus dan menjadikan mata kuliah kewirausahaan sebagai salah satu matakuliah penting yang harus diberikan kepada mahasiswa
3. Pengembangan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)

   Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti Program kewirausahaan yang digagas pendidikan tinggi (Dikti) telah meluncurkan program kewirausahaan untuk mahasiswa sejak juli 2009 berbentuk hibah program kreativitas bagi manusia yang berminat untuk berwirausaha.

Implementasi Nilai Ekonomi Pancasila dalam Perkuliahan Kewirausahaan

Perencanaan Penelitian

Suwarsih Madya (2011) mengemukakan bahwa gagasan pokok penelitian ini adalah orang yang melakukan tindakan harus juga terlibat dalam proses penelitian sejak awal. Mereka tidak hanya menyadari perlunya melaksanakan program tindakan tertentu, tetapi secara

emosional ikut terlibat dalam program tindakan tersebut. Setting penelitian ini adalah Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Ekonomi – Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian tindakan ini dilaksanakan pada semester gasal tahun 2018/2019 untuk matakuliah Kewirausahan. Penelitian ini melibatkan mahasiswa reguler semester III kelas Unggulan sebanyak 29 mahasiswa. Pihak- pihak yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah : seorang dosen sebagai kewirausahaan, dosen pengamat (observer) berjumlah 3 orang, mahasiswa sebagai subjek didik yang berjumlah 29 orang. Teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan angket.

Tabel 1. Indikator dan Instrumen Implementasi Ekonomi Pancasila

No	Indikator	Instrumen	Teknik Pengambilan data
1.	Kebersamaan	Pedoman observasi	Observasi
2.	Efisiensi Berkeadilan	Angket	Observasi

Kegiatan perencanaan peneilitian antara lain sebagai berikut:

1. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila. RPP digunakan sebagai acuan dosen dalam melaksanakan pembelajaran.
2. Menyusun dan menyiapkan lembar observasi pembelajaran dan lembar aktivitas mahasiswa saat belajar kelompok.
3. Menyiapkan panduan pedoman wawancara dan angket untuk mahasiswa

Pelaksanaan Penelitian

Pada siklus pertama pelaksanaan tindakan ini dosen melaksanakan pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran dilakukan berdasarkan RPP yang sebelumnya telah disiapkan oleh peneliti. RPP tersebut terlebih dahulu telah dikonsultasikan kepada ahli kewirausahaan dan ahli pembelajaran. Selama tindakan berlangsung, peneliti dibantu oleh observer mengamati secara langsung tanpa mengganggu jalannya proses pembelajaran.

Gambar 5. Dosen memberi Intruksi

Pada siklus 2 pelaksanaan penelitian meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Dosen membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, mengecek kehadiran mahasiswa dengan melakukan presensi online, kemudian melakukan presentasi secara singkat dan menyampaikan kompetensi dasar yang akan dicapai.
2. Dosen menyampaikan garis besar materi, sebelum memulai pelajaran dosen mengadakan apersepsi yaitu memberikan pertanyaan siapa

yang mengetahui tentang ekonomi Pancasila.

3. Dosen memancing pertanyaan
4. Bagi yang dapat menjawab benar mendapat hadiah poin
5. Dosen memberikan panduan pembelajaran dengan menggunakan *Gallery Walk*. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:
   a) Dosen memberikan topik yang sudah di pecah sebelumnya ke setiap kelompok
   b) Mahasiswa mencari materi dari berbagai sumber bisa dari buku dan internet.
   c) Mahasiswa menuliskan materi yang di dapat, bisa berupa *mind mapping*, poster, dsb. Mahasiswa berusaha menulis materi semenarik mungkin dan mudah untuk di pahami
   d) Setiap anggota perkelompok di beri nomor 1-5 sebagai kelompok yang membahas sila 1-5 Pancasila. Kemudian setiap mahasiswa yang memiliki nomor 1 berkumpul dalam satu kelompok. Begitu juga dengan nomor yang lain berkelompok sesuai dengan nomornya.
   e) Kelompok baru yang terbentuk mengunjungi karya secara bergantian.
   f) Anggota kelompok yang terlibat dalam pembuatan karya menjelaskan dengan detail materi yang mereka buat.
   g) Setiap mahasiswa yang berkunjung mengamati, mencatat, bertanya, dan mengoreksi hasil karya tiap kelompok yang berbeda

Setelah selesai berpindah ke karya yang lain dan mahasiswa yang terlibat dalam pembuatan menjelaskan kepada anggota kelompok barunya.

Pada siklus II dapat dilihat bahwa karakter mahasiswa dalam kategori cukup sebanyak 8 mahasiswa (27,58%), tinggi 14 mahasiswa (48,3%), sangat tinggi 7 mahasiswa (24,14%). Tidak ada mahasiswa yang berada dalam kategori rendah. Dalam pembelajaran sudah tercapai indikator keberhasilan tindakan. Keberhasilan pembelajaran ini tidak dapat terlepas dari peran dosen yang tetap memeberikan arahan.

Tabel 2. Kategorisasi Karakter berkeadilan Belajar Siklus II

Kategori	Kategori	%
Sangat Tinggi	8	27.5862
Tinggi	12	41.3793
Cukup	9	31.0345
Rendah		0
Sangat Rendah		0
	29	100

Sumber: Data primer diolah

Pada siklus II dapat dilihat bahwa prestasi belajar mahasiswa dalam kategori tinggi sebanyak 12 mahasiswa (41,38%), cukup 9 mahasiswa (31,03%) dan sangat tinggi sebanyak 8 mahasiswa (27,58%). Dalam pembelajaran sudah tercapai indikator keberhasilan tindakan. Sehingga tidak perlu tindak lanjut pada siklus berikutnya. Mahasiswa A mengatakan dengan menggunakan metode *gallery walk* mereka dapat menyampaikan pendapat secara lebih merata.

Hasil Penelitian Tentang Implementasi Nilai- nilai Pancasila dalam Perkuliahan Kewirausahaan

Pada siklus 2 sudah tidak ada lagi mahasiswa yang berada pada kategori rendah dan rendah sekali, mereka sudah dapat bekerja sama

dan menghargai pendapat teman. Kalimat yang dikeluarkan sudah lebih lancar dari pada siklus I. Mereka lebih bersemangat dalam melakukan diskusi dan lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, untuk mengetahui peningkatan disiplin mahasiswa antara siklus I dan II dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Perbandingan Siklus I dan siklus II Karakter Kebersamaan

Kategori	Jumlah	%	Jumlah	%	perubahan
Sangat Tinggi	0	0	7	24.1379	24.13793
Tinggi	3	10.3448	14	48.2759	37.93103
cukup	18	62.069	8	27.5862	-34.4828
Rendah	6	20.6897		0	
Sangat Rendah	2	6.89655		0	
	29	100	29	100	

Sumber: Data primer diolah

Tabel 4. Perbandingan Siklus I dan siklus II Karakter Keadilan

Kategori	Jumlah	%	Jumlah	%	perubahan
Sangat Tinggi	0	0	8	27.5862	27.58621
Tinggi	2	6.89655	12	41.3793	34.48276
cukup	21	72.4138	9	31.0345	-41.3793
Rendah	5	17.2414		0	
Sangat Rendah	1	3.44828		0	
	29	100	29	100	

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui telah terjadi peningkatan untuk kategori tinggi, tinggi dan cukup. Sedangkan kategori rendah dan sangat rendah menjadi tidak ada. Ini menandakan upaya untuk memperbaiki nilai kebersamaan dan keadilan yang dilakukan sudah menunjukkan peningkatan. Ini ditunjukkan oleh aktivitas mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran antara lain

1. Percaya diri ketika mengemukakan pendapat yang berasal dari kelompoknya
2. Adil dalam pembagian kelompok
3. Tidak ada yang mendominasi pembicaraan dalam kelompok tersebut
4. Bersedia berbagi peran dalam kelompok
5. Kebersamaan dalam merencanakan tugas
6. Adil dalam merencanakan pekerjaan, membuat media, menyelesaiaka tugas, menggunakan waktu dengan seefektif dan seefisien mungkin.

Gambar 6. Diskusi Kelompok

Hasil temuan khas dari penelitian ini adalah menerapkan debat dan mental berwirausaha dapat menjalankan prinsip ekonomi Pancasila yang tidak hanya mencari profit pribadi, namun juga menciptakan benefit bagi orang di sekitarnya. Prinsip keadilan dan kebersamaan ini perlu dijunjung tinggi supaya dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan masayarakat secara luas.

Penutup

Perguruan tinggi sebagai salah satu wadah yang memfasilitasi warga untuk mendapatkan pengajaran, pendidikan dan pelatihan serta memotivasi mahasiswa menjadi generasi cerdas yang mandiri, kreatif, inovatif dan mampu menciptakan berbagai peluang pekerjaan (usaha). Untuk itu sebuah keharusan bagi setiap perguruan tinggi segera mengubah arah kebijakan perguruan tingginya, baik yang bersifat *high Learning university* and *Research University* maupun yang bersifat *Entrepreneurial University* . Hasil rekomenadasi dari penelitian ini antara lain adalah

1. Karakter yang muncul dalam pembelajaran kewirausahaan adalah kebersamaan dan keadilan. Terjadi peningkatan nilai karakter mahasiswa dari siklus I ke siklus II. Pada karakter kebersamaan kategori sangat tinggi terjadi peningkatan sebesar 24,14%, pada kategori tinggi sebesar 37,93%. Demikian pula pada karakter keadilan kategori sangat tinggi terdapat peningkatan sebesar 27,59%, dan kategori tinggi sebesar 34,48%.
2. Melalui model ini mahasiswa ketika berwirausaha dapat menjalankan prinsip ekonomi Pancasila yang tidak hanya mencari profit pribadi, namun juga menciptakan *benefit* bagi orang di sekitarnya.

PANCASILA DALAM
PRAKSIS PENDIDIKAN

V

MENJAWAB TANTANGAN PENDIDIKAN PANCASILA

HALILI

MENJAWAB TANTANGAN PENDIDIKAN PANCASILA

HALILI

Restorasi dan reaktualisasi Pendidikan Pancasila menemukan urgensinya setelah dalam satu dekade ini kita mengalami begitu banyak persoalan patogenik yang menjangkiti entitas kebangsaan kita. Salah satu masalah terbesar kita terkait dengan ideologi negara adalah kelalaian kita dalam merawat dan mentranformasikan ideologi kebangsaan kita dari mulanya rumusan-rumusan ideal-abstrak menjadi praktik-praktik kolektif kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan.

Ada semacam kealpaan dalam konteks itu.[1] Kealpaan inilah yang membuat kelompok-kelompok konservatif mudah mengintrusi dunia pendidikan dengan paham, ideologi dan doktrin mereka. Konservatisme keagamaan kontra Pancasila ini memicu terjadinya beberapa kasus intoleransi, diskriminasi, dan eksklusi sosial atas identitas keagamaan yang berbeda.

Intoleransi merupakan salah satu fakta objektif yang mengkhawatirkan, sebab ketiadaan penerimaan dan ekspresi penolakan terhadap *liyan* menandakan terjadinya kemiskinan peradaban[2] yang mengandung dampak sosietal sangat panjang jika tidak segera diantisipasi. Pokok persoalan intoleransi terletak pada dimensi struktural di mana elite tidak bisa memberikan harapan besar bahwa intoleransi adalah masalah bersama dengan keberpihakan elite yang semestinya jelas. Elite dalam konteks ini turut menjadi stimulan bagi terjadinya ekspresi intoleransi di tengah-tengah masyarakat. Mereka, di beberapa ruang sosial yang tersedia, seperti kelas-kelas pendidikan agama dan forum-forum pengajian agama, ikut berkontribusi dalam mempertegas batas-batas interaksi sosial berbasis identitas keagamaan, bahkan memperkuat resistensi sosial atas identitas yang berbeda *(liyan, other)*.

Merespons salah satu realitas sosial demikian, penanaman dan penguatan ideologi nasional melalui dunia pendidikan semakin mendesak. Secara institusional, lembaga pendidikan seharusnya jadi etalase besar untuk kebinnekaan Indonesia. Jika lembaga pendidikan gagal menjadi contoh persemaian toleransi, maka kemiskinan peradaban akan semakin menjadi-jadi. Secara fungsional, pendidikan juga mesti memainkan peran optimal dalam membangun resiliensi sosial warga dengan ideologi partikularnya masing-masing untuk tetap mengikatkan secara sukarela dalam identitas kolektif negara-bangsa yang *Bhinneka Tunggal Ika.*

Momentum Kebangkitan

Dalam catatan pendek dan lekas penulis, terdapat tiga momentum yang patut dicatat sebagai penanda kebangkitan gerakan revivalisme (kebangunan rohani) Pancasila. *Pertama,* narasi 'empat pilar kebangsaan' yang dicetuskan oleh MPR RI di bawah kepemimpinan Taufiq Kiemas. Sejak

terpilih secara aklamasi sebagai Ketua MPR pada tahun 2009, menantu Bung Karno tersebut bergerak intensif untuk *blusukan* di kalangan elit lintas partai dalam suasana politik yang tidak mudah karena tensi politik yang tinggi dan terpolarisasi antara kubu koalisi pemerintah pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan kelompok oposisi dengan Megawati Sukarnoputri, istri Taufiq Kiemas, sebagai komandan utama. Taufiq bergerak aktif untuk membangun kesepahaman di level elit mengenai kelahiran Pancasila yang pada dekade itu masih dalam 'sengketa akademis' antara tanggal 1 Juni, 22 Juni, atau 18 Agustus. Hilirnya, MPR kemudian melembagakan 'Sosialisasi Empat Pilar' yang membuat narasi-narasi Pancasila kembali mengisi ruang-ruang pendidikan nonformal di hotel-hotel, gedung-gedung pemerintah, dan tempat-tempat pertemuan.

Terlepas bahwa gagasan 'empat pilar' sendiri masih meninggalkan kontroversi yang melibatkan para akademisi, politisi, dan bahkan hakim Mahkamah Konstitusi hingga kini, 'sosialisasi empat pilar' harus dicatat sebagai program intensif yang membuat narasi Pancasila kembali menguasai ruang-ruang publik. 'Sosialisasi Empat Pilar' yang pertama kali dihelat pada 2012 kini diselenggarakan dalam aneka format, mulai dari pelatihan, lokakarya, cerdas-cermat, hingga jambore dan perkemahan.

Kedua, masuknya kembali Pancasila dalam kurikulum pendidikan formal. Setelah pada 2011 muncul polemik sekaligus keprihatinan tentang hilangnya 'Pancasila' dari nomenklatur kurikulum[3], berkembang dialektika yang sangat masif dari publik, akademisi, praktisi, dan pemangku kebijakan pendidikan tentang pentingnya memasukkan kembali Pancasila sebagai nomenklatur kurikulum terutama dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Peringatan hari lahir Pancasila pada tahun itu dan setahun berikutnya diwarnai dengan wacana pengembalian Pendidikan Pancasila ke dalam kurikulum. Ujungnya, Pancasila kembali masuk dalam Kurikulum 2013. Pada saat

yang saat yang sama, terjadi perubahan nomenklatur mata pelajaran di jenjang pendidikan dasar dan menengah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Ketiga, institusionalisasi lembaga khusus untuk 'mengurus' pembinaan Pancasila. Pemerintahan Joko Widodo telah mengambil kebijakan krusial untuk memberikan landasan politiko-yuridis bagi kanalisasi kebangkitan (*resurgence*) Pancasila sebagai ideologi. Salah satu penanda paling benderang adalah institusionalisasi Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) yang sekarang dinaikkan status kelembagaannya menjadi Badan (BPIP) melalui Perpres Nomer 7 Tahun 2018.

Apakah kebangunan rohani dalam bentuk kurikulerisasi Pancasila dalam pendidikan nonformal dan formal serta institusionalisasi badan pembinaan khusus memadai untuk memfungsionalkan Pancasila sebagai ideologi yang bekerja *(working ideology)*? Tentu belum. Dibutuhkan konsolidasi lebih lanjut dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui etos penyelenggara negara dan dalam bentuk kebijakan pembangunan di berbagai bidang.

Pertama, kode dan teladan perilaku elit politik. Dalam konteks itu, diperlukan penegakan hukum atas politisasi sentimen SARA yang dilakukan oleh, terutama, elit dan para politisi, melalui politisasi agama, ujaran kebencian atas identitas *liyan,* intoleransi, kekerasan verbal atas dasar sentimen mayoritas untuk kepentingan politik elektoral. Integrasi kebangsaan berdasarkan nilai-nilai Pancasila harus diletakkan melampaui kekuasan politik yang diburu elit melalui kontestasi elektoral. UU Pemilu dan UU Pilkada sebenarnya telah memadai, namun diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan adil.

Penegakan hukum atas politisasi SARA dan sentimen lain yang relevan selama ini lebih banyak menyasar publik non elit. Terkait tragedi

terorisme mutakhir misalnya, beberapa politisi dari parpol-parpol tertentu menyatakan bahwa aksi teror merupakan *political gimmick,* rekayasa, atau pengalihan isu. Mereka tak tersentuh penegakan hukum. Aparat hanya menjerat simpatisan dan afilian politik mereka yang mengekspresikan pandangan serupa di lini masa media sosial.

Kedua, kebijakan negara yang berorientasi pada realisasi tujuan ultima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, akan mengonsolidasi revivalisme Pancasila dalam beberapa tahun terakhir. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan ekonomi akan memberikan basis yang solid bagi Pancasila sebagai ideologi nasional.

Tantangan Pendidikan Pancasila

Seperti yang telah diulas di muka, restorasi dan reaktualisasi Pancasila yang paling mendasar mula-mula harus dilakukan melalui lembaga pendidikan, khususnya melalui Pendidikan Pancasila. Namun demikian, restorasi atau reaktualisasi Pancasila melalui proses pendidikan di Lembaga-lembaga pendidikan formal hari ini bukan perkara mudah. Terdapat beberapa tantangan yang mesti mendapatkan perhatian tersendiri, mulai dari tantangan faktual deideologisasi Pancasila hingga soal pembangunan kultur dan ekosistem yang kondusif bagi penanaman nilai-nilai inti Pancasila.

Deideologisasi Pancasila

Mesti diakui secara objektif bahwa gerakan untuk menolak ideologi Pancasila atau paling tidak untuk mendeligitasinya sebagai ideologi nasional mulai dan bahkan semakin marak dan mengkhawatirkan. Fenomena negatif tersebut terjadi di begitu banyak kalangan dan kelompok sosial. Data begitu banyak lembaga riset mengonfirmasi situasi kurang baik tersebuti.

Survei SETARA Institute (2016) di DKI Jakarta dan Bandung Raya menunjukkan, 5,8 persen pelajar mendukung upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara.[4] Laporan survei Alvara Research Centre (2017) di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar menunjukkan, 19,4 persen pegawai negeri sipil (PNS) anti Pancasila. Survei LSI pada 2018 menjelaskan signifikansi penurunan dukungan publik terhadap Pancasila, yaitu di angka 75,3 persen, padahal 13 tahun sebelumnya masih di angka 85,2 persen.[5]

Data SETARA Institute tersebut tidak proporsional untuk hanya kita baca secara kuantitatif bahwa angka 5,8 merupakan angka yang relatif kecil. Data tersebut akan lebih presisi untuk kita baca sebagai fenomena tersedianya resistensi atas Pancasila di kalangan pelajar yang *notabene* merupakan generasi masa depan bangsa. Dengan demikian, mestinya terjadi pelipatgandaan kecemasan sekaligus kewaspadaan kita untuk mengantisipasi agar generasi masa depan bangsa pada gilirannya mereka menjadi subjek inti negara-bangsa, mereka akan menjadi ideolog sekaligus pendukung militan Pancasila sebagai ideologi nasional.

Namun, keberhasilan ideologisasi Pancasila kepada generasi masa depan bangsa tersebut ditentukan oleh keberhasilan kita memberikan respons yang komprehensif atas data faktual yang disajikan oleh SETARA Institute. Dalam konteks itu, harus menjadi keinsafan kita juga bahwa gerakan dan narasi-narasi kontra dan anti Pancasila saat ini terus bekerja yang tidak semata-mata dalam kerangka mendialektikan premis-premis ideologis namun lebih jauh lagi untuk mendeideologisasi Pancasila.

Tidak saja di kalangan pelajar, laporan survei Alvara Research Centre yang dipaparkan di muka bahwa deideologisasi Pancasila telah juga merambah kalangan aparat sipil negara (ASN). Padahal secara yuridis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, ASN harus loyal terhadap Pancasila sebagai dasar negara.

Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 5 Tahun 2014, secara khusus mengatur ASN. Dalam UU ini, Pasal 1 (1) ditegaskan bahwa ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di instansi pemerintah. Pasal 3 merinci bahwa ASN bekerja berlandaskan prinsip (a) nilai dasar; (b) kode etik dan kode perilaku; (c) komitmen, integritas moral, dan tanggungjawab pada pelayanan publik; (d) kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (e) kualifikasi akademik; (f) jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan (g) profesionalitas jabatan.

Sebagai profesi, menurut butir b pada Pasal 3, ASN dalam bekerja terikat dengan Kode Etik dan Kode Perilaku. Pasal 15 menegaskan bahwa Kode Etik dan Kode Perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku dimaksud pada Pasal 15 (1) berisi pengaturan perilaku, agar ASN (a) melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi; cermat dan disiplin, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh perintah itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan; (b) melayani publik dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan; (c) menjaga kerahasiaan negara; (d) menjaga suasana kerja agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas; (e) menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien; (f) memberi informasi secara benar dan tidak menyesatkan ke pihak lain yang memerlukan informasi terkait kedinasan; (g) tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, kekuasaan, status, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain; (h) memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi serta integritas ASN; dan (i) melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.

Pasal 4 UU RI No 5 Tahun 2014 merinci acuan nilai dasar kerja ASN. Nilai dasar itu mencakup (a) memegang teguh ideologi Pancasila; (b) setia dan mempertahankan UU Dasar Negara RI Tahun 1945, dan pemerintahan yang sah; (c) mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia; (d) menjalankan tugas secara profesional dan objektif; (e) membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian; (f) menciptakan meliu kerja yang nondiskriminatif; (g) memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur; (h) mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja pada publik; (i) memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah; (j) memberi layanan pada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya-berhasil guna dan santun; (k) menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama; (l) mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, dan pencapaian hasil; (m) mendorong kinerja pegawai, dan kesetaraan dalam pekerjaan; serta (n) meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

Ringkasnya, ASN bekerja dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan memegang teguh ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh negara. Di sini, ASN harus (a) memegang teguh ideologi Pancasila; (b) setia dan mempertahankan UUD Negara RI Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah; (c) mengabdi kepada negara, dan rakyat Indonesia; dan (d) menjalankan tugas secara profesional, serta tidak berpihak pada kepentingan tertentu dalam melayani hajat publik.

Secara kualitatif, akhir-akhir ini, gejala radikalisme beragama sudah menyasar ASN sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Untuk kasus personel ASN yang terpapar radikalisme, kita dapat menyebut sejumlah peristiwa. Misalnya, seorang terduga teroris yang ditangkap di Banyuwangi beberapa waktu lalu adalah berstatus ASN di Politeknik

Negeri Banyuwangi. Kasus lain dan masih lekat di ingatan publik adalah keterlibatan seorang ASN Kantor Kementerian Agama Jawa Timur, minimal pembiarannya terhadap suaminya, yaitu Budhi Satrio, yang terlibat jaringan radikal. Contoh lain adalah kasus penangkapan 4 orang terduga teroris di Probolinggo, 29 Mei 2018 lalu, yang salah satunya berstatus PNS.

Jumlah ASN yang terpapar radikalisme sangat mengkhawatirkan. Hariyono, pelaksana tugas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam seminar persiapan riset ini mensinyalir bahwa berdasarkan hasil penelitian, ASN yang pro radikalisme, atau bersikap anti terhadap Pancasila, jumlahnya lebih dari 10%.[6] Ini tentu bukan jumlah yang bisa diabaikan, karena para ASN tersebut menyebar dan bergerak laten, bahkan imanen di tubuh pengelola harian negara Indonesia.

Sampai di sini, kasus ASN terdampak ajaran radikalisme agama tidak bisa dibiarkan. Sebab bila ASN terjebak dan terpapar paham radikalisme dan terlibat aksi intoleran dan kekerasan, selain profesonalitas dan integritas kerja tercederai, ASN juga mempertaruhkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

Selain penguatan dukungan atas narasi-narasi kontra dan anti Pancasila di kalangan pelajar dan ASN sebagaimana hasil survei SETARA Institute dan Alvara Institute di muka, juga terjadi fenomena penurunan dukungan terhadap Pancasila di kalangan publik. Data laporan survei yang dirilis oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan bahwa dukungan terhadap Pancasila terus mengalami penurunan selama 13 tahun terakhir. Menurut data survei tersebut, pada tahun 2005 dukungan kepada Pancasila mencapai 85,2 persen. Namun, pada survei 13 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2018, dukungan atas Pancasila menurun menjadi 75,3 persen atau turun sebesar 10 persen.[7]

Depolitisasi Pancasila[8]

Tantangan yang lain dalam melakukan reaktualisasi dan restorasi Pancasila melalui dunia pendidikan adalah fakta bahwa politisasi Pancasila di masa lalu berdampak pada terbangunnya psikososial yang negatif terhadap setiap upaya untuk mengakselerasi pembinaan ideologi Pancasila. Politisasi Pancasila pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dimulai dari proyek desukarnoisasi, dilanjutkan dengan agenda rekayasa Pancasila.

Desukarnoisasi dimulai segera setelah Soeharto mengambilalih kekuasaan melalui kudeta merangkak *(creeping coup)* pada 1966. Soeharto langsung 'memproklamasikan diri' untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kekuatan-kekuatan politik penopang ideologi Sukarnoisme dan narasi-narasi yang mengglorifikasi peran besar Sukarno dalam perumusan Pancasila dihabisi dan dipangkas sedemikian rupa.

Politisasi untuk menghapus Sukarno dari ingatan publik berlanjut pada 1970, ketika Komando Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) melarang Peringatan Kelahiran Pancasila 1 Juni, sebab seremoni tersebut tidak boleh tidak akan menjadi ruang bagi publik untuk mengungkap kembali ingatan mengenai Sukarno.

Politik desukarnoisasi dirancang lebih lanjut dengan melibatkan akademisi melalui teori pengaburan peran sejarah Sukarno. Nugroho Notosusanto, misalnya, mengisyaratkan bahwa Sukarno bukanlah orang yang pertama kali membincangkan Pancasila di depan Publik. Pidato M. Yamin dikesankan mendahului pemaparan Sukarno mengenai Pancasila. Tahun 1977, M. Hatta membantah doktrin tersebut. Namun buku Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI edisi 1995 benderang menyuratkan Pidato M. Yamin mengenai Dasar Negara, pada 29 Mei 1945. Sukarno baru berpidato di kesempatan ketiga, setelah Supomo.

Sejak tahun 1978, Pemerintah Orba menegaskan Soehartoisasi Pancasila; dalam arti politisasi Pancasila melalui tafsir tunggal Pancasila versi Rezim Soeharto. PMP, BP-7, P-4, dan Asas Tunggal merupakan penegasan politisasi tersebut. Fase Pancasila di era rezim Soeharto inilah yang disebut Asvi Warman Adam sebagai gelombang rekayasa.[9]

Rekayasa yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru melahirkan dampak tak terbayangkan. Selain gagal memaksa rakyat Indonesia melupakan Sukarno, pemerintahan Soeharto melahirkan trauma kolektif atas politisasi Pancasila. Kapok massal tersebut melahirkan gugatan depolitisasi. Pancasila dipersoalkan secara formal, meski secara substantif merupakan konstruksi ideal filosofis sebagai ideologi negara.

Pancasila yang merupakan integrasi dari lima nilai dasar luhur yang bahkan secara universal *established* kerap dipersoalkan. Sistematika nilai fundamental dalam Pancasila yang *logically accepted* secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis, pada kenyataannya sering disangkal. Meskipun konstruksi apik *prime cause,* dasar antropologis, spirit, instrumen politis, dan tujuan negara dalam Pancasila sangat meyakinkan, tetap saja terjadi resistensi yang antara lain diakibatkan oleh politisasi Pancasila oleh Pemerintah Orde Baru di masa lalu.

Hingga kini 'gugatan sosial' atas setiap upaya untuk mengarusutamakan Pancasila selalu saja muncul. Komentar-komentar negatif terkait dengan institusionalisasi Pancasila termasuk pembinaannya melalui lembaga-lembaga pendidikan formal masih terus berhadapan dengan narasi depolitisasi Pancasila sebagai antitesis atas politisasi Pancasila oleh rezim yang dominan sepanjang 32 tahun kekuasaan rezim Orde Baru.

Deindoktrinasi Pendidikan Pancasila

Tuntutan deindoktrinasi Pendidikan Pancasila hari ini, sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh sejarah panjang pembelajaran Pancasila

sebagai nomenklatur pendidikan di masa lalu. Indoktrinasi pendidikan Pancasila yang menjadi watak dominan pendidikan kewarganegaraan di masa lalu pada akhirnya memunculkan tuntutan deindoktrinasi, yang akhirnya juga memperuat gugatan atas intensifikasi penanaman nilai-nilai Pancasila melalui program pendidikan formal.

Pada masa Orde Baru, bersamaan dengan menguatnya kekuasaan rezim dan sebagai agenda ekoran dari politisasi Pancasila yang sudah diulas penulis pada bagian sebelumnya dalam tulisan ini, Pancasila masuk sebagai mata pelajaran pada 1976, melalui subjek Pendidikan Moral Pancasila (PMP), menggantikan *Civics* (Kewarganegaraan). Kebijakan Pemerintah Orba itu dapat dibaca sebagai bagian dari politisasi—tentu dalam makna negatif. Politik pendidikan tersebut berorientasi pada indoktrinasi Pancasila yang ditafsir tunggal Pemerintah. Sekaligus juga depolitisasi warga negara dengan tekanan pendisiplinan moral.

Pendidikan kewarganegaraan *(civic education)* yang sejak pemerintahan Sukarno sudah ada, dan dalam dunia pendidikan hampir seluruh negara dibelajarkan, orientasi dominannya adalah pendidikan politik dan penguatan kapasitas politik warga negara *(political capacity building)*. Sementara Pendidikan Pancasila merupakan diseminasi ideologis untuk memperkuat nalar (kognitif/*knowledge*), rasa (afektif/*disposition*), dan laku (psikomotor/*skill*) ideologis warga negara.

Hilangnya Pendidikan Pancasila dari dunia pedagogis kita diresmikan oleh diundangkannya UU Sisdiknas, dimana Pendidikan Pancasila menurut Pasal 37 bukan lagi muatan wajib seluruh jenjang pendidikan. Subjek ideologis ini kehilangan *locus* formal dalam pembelajaran. Sesuai UU, beberapa perguruan tinggi "berani" menghapus Pendidikan Pancasila dalam kurikulumnya. Hanya sedikit Kampus yang tetap mengajarkan Pendidikan Pancasila sebagai Mata Kuliah Umum.

Situasi tersebut meningkatkan kompleksitas tantangan pembelajaran Pancasila melalui program-program pendidikan formal. Meskipun tersedia momentum kebangkitan—sebagaimana penulis ulas pada bagian awal tulisan ini, tuntutan deindoktrinasi tersebut melahirkan rintangan psikologis *(psychological obstacles)* di kalangan pendidik dan subjek didik dalam membelajarkan dan mempelajari Pancasila.

Substansiasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila[10]

Akumulasi beberapa tantangan sebelumnya menguatkan juga tuntutan substansiasi Pancasila dalam pembelajarannya. Pembelajaran Pancasila dalam konteks itu tentu tidak relevan untuk sekadar diproyeksikan sebagai agenda memasyarakatkan hafalan atas sila-sila Pancasila. Lebih dari itu, substansiasi pendidikan Pancasila semestinya diorientasikan untuk menginternalisasikan kebajikan-kebajikan utama *(virtues)* yang secara kultural menjadi kausa materialis Pancasila sekaligus orientasi final bagi bertumbuhnya peradaban kebangsaan Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai *filosophische gronslag* sekaligus *weltanschauung.*

Bagaimana cara membelajarkan kebajikan-kebajikan utama dalam Pancasila? Sejak proklamasi kemerdekaan hingga kini, Indonesia telah merancang, mengembangkan, dan telah memiliki paling tidak sepuluh kurikulum pendidikan. Namun mengapa karakter negatif manusia dan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Mochtar Lubis (1976)[11] dan Koentjaraningrat (2000)[12] masih relevan? Secara sederhana dapat diasumsikan bahwa berbagai perubahan kurikulum tidak berkorelasi secara positif dengan transformasi disposisional dan attitudinal manusia dan bangsa Indonesia.

Secara substantif, pendidikan Pancasila harus memberikan tekanan lebih besar kepada pembangunan watak-watak utama, yang dimulai dari

internalisasi nilai-nilai utama. Pembangunan dan internalisasi aneka nilai di dalam pendidikan untuk itu menjadi perkara mendesak. Nilai, sebagaimana menjadi kesepahaman para ahli, merupakan sesuatu yang berharga; kualitas yang melekat pada sesuatu; dan segala hal positif yang menggerakkan perilaku dan sifat seseorang, baik dalam lingkup personal maupun interaksional. Apa dan bagaimana membangun nilai-nilai utama untuk menjadi pondasi bagi terwujudnya peradaban dan generasi unggul? Meminjam logoterapi Viktor Frankl, nilai dapat dikategorikan ke dalam tiga tipe: *creative values, experiential values,* dan *attitudinal values.*[13]

Secara sederhana, *creative values* ialah nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam proses internal berkarya atau berkreasi, contoh: melalui melukis akan tumbuh dan berkembang nilai menghargai keindahan dan harmoni. *Experiential values* merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dari mengalami langsung melalui proses interaksional di dalam lingkungan, misal nilai kejujuran akan tumbuh dan berkembang dari mengalami sendiri indahnya lingkungan yang jujur dan melalui interaksi yang jujur pula. Sedangkan *attitudinal values* merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dari sikap dan perilaku yang ditampilkan oleh diri, seperti nilai respek dan menghargai diri sendiri akan tumbuh dan berkembang dari perilaku membantu dan menolong orang lain.

Dengan paradigma demikian, maka agenda substansiasi Pendidikan Pancasila harus dimulai dari menumbuhkan dan membangun nilai-nilai dan keutamaan generik yang terkandung di dalam Pancasila, seperti spiritualitas relijius dan teistik, humanisme dan keadaban, nasionalisme dan integrasi sosio-nasional, watak dan perilaku demokratis, serta keadilan dan kesejahteraan untuk semua.

Titik tekan utama pembelajaran kebajikan-kebajikan utama tersebut terletak pada bagaimana proses pendidikan Pancasila di kelas-kelas,

bukan pada bagaimana wajah dan muatan kurikulum. Kelas-kelas pembelajaran Pancasila dan pembelajaran integratif Pancasila melalui subjek kurikuler lainnya memainkan peran krusial dalam melaksanakan agenda sekaligus menjawab tantangan substansiasi Pancasila.

Kelas-kelas mestinya menjadi ajang untuk membangun nilai-nilai kejujuran sebagai bagian dari spiritulitas teistik subjek didik, melalui proses kreasi dan berkarya. Aktivitas menggambar bagi anak-anak Sekolah Dasar merupakan sarana untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai kejujuran dengan berpijak pada apa yang nyata-nyata dimiliki anak serta membangun respek melalui pemberian apresiasi yang presisi. Menggambar bukanlah medium untuk menghakimi anak-anak pintar menggambar atau tidak, bukan pula pada apakah satu gambar bagus atau tidak, apalagi jika dihadapkan pada fakta bahwa satu anak hanya punya satu pensil sedangkan anak yang lain menggunakan aneka pensil warna dan beragam warna crayon dan kertas gambar mahal karena subjek didik yang yang sedang berkreasi berasal dari keluarga berpunya *(the have)*.

Beberapa inisiatif dan prakarsa pedagogis-andragogis yang dipraktikkan, diteliti, dan ditulis oleh akademisi Universitas Negeri Yogyakarta pada bagian terdahulu dalam buku ini merupakan upaya konkret untuk menjawab tantangan dan melakukan agenda substansiasi Pendidikan Pancasila. Program-program dimaksud tentu perlu diperdalam *(intensified)*, diperluas *(extensified)* dan disesuaikan *(contextualized)* dengan keunikan peserta didik dan lingkungan naturo-sosialnya, juga tahap perkembangan kognitif dan moralnya.

Pembangunan Kultur dan Ekosistem Pancasila

Merujuk pada cara pandang Frankl di muka, penaman nilai juga dipengaruhi oleh kultur dan ekosistem komunal yang bersifat eksternal. Sebab, penanaman nilai juga berlangsung dalam bentuk dan melalui

akumulasi pengalaman atau nilai eksperiensial. Sebangun dengan cara pandang tersebut, selain agenda substansiasi pendidikan Pancasila, kita juga dihadapkan pada tantangan pembangunan kultur dan ekosistem yang menopang penanaman dan pembangunan watak Pancasilais melalui internalisasi keutamaan-keutamaan Pancasila.

Kementerian pendidikan dan kebudayaan juga lembaga-lembaga pendidikan formal mestinya menjamin lingkungan mikro dan makro yang sehat bagi penumbuhkembangan *experiential values*. Kejujuran sebagai salah satu virtu Pancasila akan tumbuh dengan baik dalam lingkungan mikro pendidikan yang penuh kejujuran. Tampilan ujian nasional yang sarat kecurangan dan dialami siswa dalam pengalaman kehidupan riilnya akan menjadi racun yang merubuhkan keutamaan substantif yang sudah tumbuh dan dibangun bersama di dalam proses pembelajaran. Penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah dan korupsi dalam kementerian atau dinas pendidikan akan menjadi kendala besar pembangunan watak dan nilai-nilai utama di kalangan anak didik kita. Penilaian yang tidak apa adanya oleh pendidik akan berfungsi kontraproduktif bagi upaya membangun nilai-nilai kejujuran di kalangan generasi muda kita.

Proses pendidikan di lembaga pendidikan mestinya menjadi medium pembiasaan perilaku dan aktivitas-aktivitas baik sebagai aktualisasi nilai-nilai utama Pancasila, seperti membantu dan menolong sesama, membuang sampah pada tempatnya, mematikan lampu yang tidak dibutuhkan di siang hari, bekerja sama, dan sebagainya. Ketika perilaku menolong orang lain dibiasakan, akan tumbuh penghargaan pada diri sendiri. Selain itu, juga akan muncul kesadaran mengenai pentingnya fisik yang sehat serta kejujuran pada diri sendiri dan orang lain bahwa seseorang mampu atau tidak mampu mengangkat barang, dan sebagainya. Melalui aktivitas kerjasama, di dalam diri peserta didik akan

bertumbuh syukur dan tafakkur tentang kelebihan dan kekurangan diri dan orang lain. Melalui sinergi dan kolaborasi akan terbangun hormat pada kelebihan orang lain, kesadaran dan upaya belajar untuk mengatasi kekurangan diri, dan nilai-nilai luhur lainnya.

Dalam spektrum itu, sekolah dan lembaga pendidikan tidak mungkin menjadi pemain tunggal dalam proyek pembangunan peradaban bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah juga harus memastikan *linkage* antara pendidikan di sekolah dengan pendidikan dalam keluarga serta masyarakat berbangsa dan bernegara.

Transformasi Ideologis[14]

Peran optimal guru (dan dosen) dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila akan menjadi salah satu solusi programatik bagi transformasi ideologis Pancasila, di ranah struktural maupun kultural. Sukarno pernah menegaskan, Pancasila sebagai ideologi hendaknya mengalami "penarikan ke atas" dan "penarikan ke bawah".[15] Dalam artian, di satu sisi mesti senantiasa diidealisasi dan diabstraksi sebagai payung bagi berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, Di sisi lain harus ada langkah manifestasi, derivasi, dan implementasi. Hanya dengan simultansi langkah di dua aras itu dimungkinkan tegaknya Negara Pancasila.

Sebagai sistem nilai, Pancasila kumpulan keutamaan puncak *(virtues)* yang lebih dari cukup untuk mewujudkan negara paripurna—meminjam Yudi Latif (2011).[16] Secara partikularis, masing-masing sila adalah nilai luhur pilihan dari berbagai nilai universal yang hidup *(living values)* dalam rahim nusantara. Secara integratif, kesatuannya merupakan preferensi ideologis yang direnungkan mendalam oleh pendiri bangsa, tidak saja substansinya, tapi juga strukturnya.

Namun demikian, transformasi ideologis falsafah negara tidak

pernah berlangsung secara otomatis. Secara koeksistensial terdapat tiga anasir elementer dalam transformasi filsafat menjadi ideologi: *logos*, *pathos*, dan *ethos* (Kunto Wibisono, 1996). Pada aras paling dasar sebuah pemikiran filsafat harus menjadi sistem pengetahuan: diketahui, dipahami, diteorisasi, dan direinterpretasi secara progresif. Di samping itu, ada keharusan penghayatan, sehingga *logos* Pancasila mewujud sistem keyakinan atau kepercayaan *(belief system)*. Dengan dua hal tersebut, akan mudah terwujud sistem perilaku *(ethical system)*. Dengan demikian, sempurnalah ideologi.

Memakai kerangka tersebut, dapat direfleksikan sekaligus dievaluasi bagaimana kita memperlakukan Pancasila sebagai *philosofische grondslag*. Di level *logos* saja, masih sangat jauh dari ideal. Sedikit sekali ikhtiar untuk "menarik ke atas" Pancasila sebagai sumber epistemik.

Prof Mubyarto, guru penulis saat bersama berbagai elemen kaum muda Yogyakarta mengelola Sekolah Ekonomi Rakyat (SER), bekerja keras mengonseptualisasi terma yang digagas Emil Salim: Ekonomi Pancasila. Pak Muby bersama para ekonom progresif lainnya gigih merumuskan Pancasila sebagai panduan moral dalam pembangunan ekonomi dan ekonomika.

Sayang, konsep ekonomi Pancasila lebih sering ditertawakan. Para ekonom dan pemangku kebijakan lebih percaya pada fundamentalisme pasar dibandingkan nilai inti Pancasila untuk memandu ekonomi dan ekonomika. Hingga wafat, beliau "kesepian", bahkan di fakultasnya sendiri.

Pancasila mestinya juga menjiwai pengembangan ilmu politik. Satu dari Trisila yang diabstraksi Sukarno dari Pancasila adalah sosio-demokrasi. Ilmuwan politik tidak banyak mengeksplorasi gagasan tersebut. Hingga kita terpesona mendapati negara-negara Skandinavia yang menganut *social democracy* (sering juga disebut *social market)*

dalam dekade terakhir mendominasi nomor-nomor buncit dalam Indeks Negara Gagal.

Bahkan, belakangan akademisi politik terkagum-kagum dengan *deliberative democracy*. Para ilmuwan mulai mendiskusikan dan mendiseminasikannya di kelas-kelas ilmu dan teori politik. Bukankah demokrasi permusyawaratan sudah menjadi preferensi para pendiri bangsa 66 tahun lalu dan nyata tersurat dalam sila keempat?

Lalu, bagaimana dengan elemen *pathos* dan *ethos? Sami mawon*. Ada ketidakpercayaan pada Pancasila, sehingga Pancasila belum menjadi pedoman perilaku. Fenomena fundamentalisme agama merepresentasi ketidakpercayaan itu. Intoleransi di tengah masyarakat-bangsa menjelaskan pengabaian Pancasila sebagai pedoman perilaku. Pancasila belum "ditarik ke bawah".

Selanjutnya, bagaimana tranformasi ideologis itu harus dimulai? Relevansi dan aktualitas nilai fundamental Pancasila tidak perlu diperdebatkan lagi. Keberagamaan plural, penghormatan pada kemanusiaan, orientasi terhadap bangsa sendiri, demokrasi perwakilan dan permusyawaratan, serta kemakmuran untuk seluruh warga merupakan nilai luhur pilihan. Menarik Pancasila ke fase perdebatan jelas kemunduran belaka.

Namun, diperlukan instrumentasi untuk mewujudkan nilai dasar tersebut. *Geitslichen hintergrund* Pancasila sudah terkonstruk dalam UUD 1945. Maka pasal-pasal UUD yang tidak selaras dengan *core values* Pancasila mesti direamandemen. Lalu dibutuhkan UU dan regulasi lain di bawahnya yang konsisten melaksanakan nilai dasar Pancasila dan UUD 1945 tersebut.

Berbagai peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, migas, ketenagalistrikan, air, ketertiban umum dan sebagainya, baik nasional maupun daerah, berseberangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Sedikit diantaranya sudah dicabut dan dibatalkan, tapi sebagian besar lainnya masih berlaku. Dengan nilai instrumental yang konsisten, nilai fundamental Pancasila akan manifes dalam praksis kebernegaraan.

Dengan demikian, transformasi ideologis Pancasila akan memberikan konteks sekaligus daya dukung bagi transformasi pedagogis Pancasila. Membelajarkan Pancasila untuk generasi muda di ruang-ruang kelas akan akan lebih berdaya guna dengan aktualisasi konkrit nilai-nilainya di lingkungan masyarakat dan negara. Manifestasi nilai-nilai kebajikan luhur Pancasila di level masyarakat dan negara dipastikan akan sinambung melalui pembelajaran Pancasila yang berdaya guna di ruang kelas. Dalam konteks itu, peran esensial pendidik dalam pembelajaran Pancasila tidak pernah bisa berdiri sendiri *(isolated)* dari peran-peran profesional lainnya dalam lingkup negara-bangsa.

Penutup

Sebagai catatan akhir, panca tantangan yang dihadapi pembelajaran Pendidikan Pancasila bertemu dengan momentum kebangkitan rohani Pancasila pada bangsa ini. Momentum kebangkitan tersebut memberikan ruang besar bagi upaya untuk merestorasi dan mereaktualisasi pembelajaran Pendidikan Pancasila, terutama melalui subjek kurikuler di lembaga-lembaga pendidikan formal, baik sebagai nomenklatur pedagogis khusus maupun dalam wujud integrasi tematik dalam beberapa subjek kurikuler umum. Selain itu, agenda reaktualisasi dan restorasi tersebut sejalan dengan ideal transformasi ideologis Pancasila dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan negara.

Inisiatif Universitas Negeri Yogyakarta mendekati konteks ini melalui agenda institusional-programatik untuk menjadi pusat ekselensi dalam pengembangan Pendidikan Pancasila patut diapresiasi sebagai langkah strategis bagi agenda nasional pembinaan Pancasila sekaligus bagi

peneguhan UNY sebagai kampus kebinekaan. Buku ini dan bahasan di dalamnya merupakan langkah awal yang memiliki signifikansi ontologis, epistemologis, dan aksiologis.

Dalam konteks itu, aspek kependidikan sebagai *academic benchmark* utama Kampus ini memberikan relevansi yang lebih kuat untuk melakukan perluasan cakupan dan mengundang kolaborasi sistemik Tri Sentra Pendidikan—sebagaimana dicitakan Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hadjar Dewantara—dalam agenda-agenda Pendidikan Pancasila dan pembinaan ideologi Pancasila. Perluasan agenda dan cakupan Pendidikan Pancasila dan pembinaan ideologi Pancasila tersebut tinggal menginsersikannya dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selama ini dicanangkan dan diselenggarakan.

Profisiat, UNY. Tabik! []

Catatan Kaki:

1 Aloysius Budi Kurniawan, 2019, "Bangsa Kita Alpa Memperkuat Ideologi Kebangsaan", *https://kompas.id/baca/utama/2019/03/16/bangsa-kita-alpa-memperkuat-ideologi-kebangsaan/*, diakses pada 22 April 2019

2 Kemiskinan peradaban terjadi jika kita tidak bisa melihat dan memahami perbedaan sebagai bagian dari kekayaan yang menyejahterakan kita dan memperkaya peradaban kolektif bermasyarakat dan berbangsa.

3 Harian *Kompas* memiliki peran signifikan dalam rekurikulerisasi Pancasila tersebut. Koran terbesar di Indonesia ini menghentak kesadaran publik melalui *headline*-nya pada tanggal 6 Mei 2011, 'Pendidikan Pancasila Dihapus: Nilai-nilai Toleransi Ditinggalkan'.

4 Tim Survei SETARA Institute, 2016, *Laporan Survei Potret Toleransi di Kalangan Pelajar pada SMA Negeri di DKI Jakarta dan Bandung Raya 2016,* Tidak Diterbitkan

5 Halili. 2019. "Mengelola Residu Kontestasi Ideologi". *Kompas.* 25 April 2019

6 Pandangan disampaikan dalam diskusi publik dalam rangka *kick-off* riset tentang "Penguatan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam Mencegah dan

Melawan Radikalisme di Kalangan Aparatur Sipil Negara", yang diselenggarakan oleh SETARA Institute pada September 2018 di JW Marriot Hotel Jakarta

7 Ulasan data survei dapat dibaca dalam Fakhrizal Fahri, 2018, "Survei LSI: Dukungan untuk Pancasila Terus Menurun Sejak 2005", pada laman *https://news.okezone.com/read/2018/11/12/337/1976909/survei-lsi-dukungan-untuk-pancasila-terus-menurun-sejak-2005*, diakses pada 15 April 2019. Juga pada analisis Dimas Ryandi (ed), 2018, "Intoleransi Menguat, Dukungan Pada Pancasila Menurun", dalam laman *https://www.jawapos.com/nasional/politik/05/12/2018/intoleransi-menguat-dukungan-pada-pancasila-menurun/*, diakses pada tanggal yang sama.

8 Sebagian pokok pikiran dalam subbab ini pernah diulas penulis di surat kabar harian *KOMPAS*. Lihat Halili (2012), "Politik (Pendidikan) Pancasila", *Opini KOMPAS*, 9 Mei 2011

9 Asvi Warman Adam, 2009, "Empat Gelombang Pancasila", dimuat pertama kali di *Okezone.com* pada 2 Juni 2009. Laman asli tulisan tersebut sudah tidak bisa diakses, namun opini Asvi dimaksud di-repost oleh beberapa blog dan dikutip oleh beberapa tulisan tentang perkembangan Pancasila.

10 Kerangka pikir Mochtar Lubis, Koentjaraningrat dan Viktor Frankl pada sub bab tulisan ini pernah digunakan penulis dalam *chapter* buku berjudul "Membangun Keutamaan Generik: Mendidik Generasi Indonesia Masa Depan" yang dimuat dalam buku bunga rampai dengan judul "Dilema Membangun Manusia Indonesia: Memilih Antara Tuntutan Global dan Kearifan Lokal", diedit oleh Nasiwan dan diterbitkan oleh CV PrimaPrint.

11 Mochtar Lubis, 2001. *Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

12 Koentjaraningrat, 2000. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Gramedia, Jakarta.

13 Theodore Millon, 2004. *Masters of Mind: Exploring the Story of Mental Illness from the Ancient Times to the New Millenium*. John Wiley and Sons Inc, New Jersey.

14 Sebagian buah pikiran pada bagian ini pernah dimuat dalam artikel populer yang terbit di surat kabar Harian Jogja. Halili. 2011. "Radikalisasi (Negara) Pancasila". *Kolom Harian Jogja*, 14 Oktober 2011.

15 Frasa tersebut dikutip Roeslan Abdulgani dari Bung Karno, sebagaimana ditulis oleh Notonagoro, 1962. *Pantjasila Dasar Negara Repoeblik Indonesia*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

16 Yudi Latif, 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

EPILOG

MEREFLEKSIKAN NEGARA PANCASILA dalam Tata Kebinekaan, Politik, dan Keadilan[1]

AHMAD SYAFII MAARIF[2]

Sudah menjadi fakta keras sejarah Indonesia yang kita warisi dari Pemerintah Hindia Timur Belanda merupakan sebuah bangsa dan negara yang secara kultural, agama, suku, dan golongan benar-benar bercorak pluralistik dengan segala kekuatan dan kelemahannya masing-masing.

Kekuatannya terutama terlihat pada keragaman budaya, adat-istiadat, bahasa, sejarah, dan etnisitas bak mozaik yang sangat kaya, menawan, dan tidak akan pernah kering untuk dijadikan sumber kajian dan inspirasi.

Sudah berapa banyak etnolog, antropolog, dan pakar ilmu sosial, domestik dan asing, yang menulis disertasi tentang keragaman budaya nusantara ini. Tetapi, jika kita lengah dan tidak arif dalam menjaga dan menganyam mozaik tersebut, keragaman itu dapat menjadi sumber

konflik antarsubkultur karena yang mungkin dipicu oleh kebanggaan dan keunggulan etnonasionalisme yang berlebihan.

Pengalaman kita selama ini telah menunjukkan, kekuatan nasionalisme Indonesia sebagai perekat keragaman tidak selalu berdaya menghadapi gejolak etno-nasionalisme itu.

Bentuk ekstrem berupa gerakan separatis yang berapa kali telah mengguncangkan bangunan keindonesiaan kita. Ini adalah bukti nyata betapa masih rentannya bangunan kultural bangsa ini, sekalipun penggunaan bahasa Indonesia sudah relatif merata. Sebagai bangsa yang belum berusia satu abad, keindonesiaan itu masih dalam suatu *on-going process* (proses yang masih berjalan).

Fenomena inilah yang tidak selalu dicermati sebagian (besar) elite politik nasional dan daerah. Isu putra daerah yang harus memimpin daerah tertentu jika ditempatkan dalam perspektif Sumpah Pemuda adalah sebuah kemunduran, jika bukan sebuah penyimpangan dari cita-cita besar dan mulia tentang keindonesiaan kita.

Menguatkan Kemanusiaan[3]

Memang kita sudah punya sasanti bhinneka tunggal ika yang kita warisi dari Mpu Tantular, pujangga kenamaan kerajaan Majapahit di abad- abad silam, tetapi di era Indonesia merdeka sasanti yang bernilai historis itu masih dalam proses menemukan formatnya yang efektif untuk memperkuat upaya integrasi nasional.

Pekerjaan ini jelas tidak mudah, karena pilar- pilar keindonesiaan kita secara kultural masih belum mantap benar, sekalipun telah dipatri dengan Sumpah Pemuda 1928. Dengan demikian, gagasan dan imbauan para pendiri bangsa dalam ungkapan antisipatif berupa *nation and character building* masih tetap relevan untuk situasi kebangsaan kita sampai hari ini.

Memang tidak mudah membangun pilar- pilar kebangsaan dengan karakter yang kokoh pada sebuah bangsa dan negara yang demikian beragam yang terdiri atas 13.466 pulau. Maka itu, tidaklah salah jika ada yang menamakan Indonesia sebagai sebuah benua maritim.

Sekiranya sasanti bhinneka tunggal ika dan semangat Sumpah Pemuda telah dipahami dan diamalkan dengan baik dan benar, sikap warga negara yang sah tidak lain kecuali mengembangkan kultur toleransi dengan menghalau kecenderungan intoleransi sampai ke batas-batas yang sangat jauh. Gejala antitoleransi yang marak akhir-akhir ini dilatari paham agama sempit yang kadang-kadang berhimpit dengan etno-nasionalisme.

Ini semua telah merusak dan mengacaukan pabrik sosial Indonesia yang dulu dengan susah payah telah dirancang dan dibangun oleh para pendahulu kita. Khusus mengenai intoleransi yang dipicu oleh paham agama tertentu, saya ingin mengutip dua ayat Alquran dalam surah yang berbeda, keduanya turun di era Madinah (622-632).

Pertama, saya turunkan makna ayat 13 dalam Surah al-Hujurat yang sering dikutip orang itu berbunyi, "Wahai segenap umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."

Artinya, terbentuknya bangsa-bangsa dan suku-suku dalam berbagai periode sejarah tidak untuk mencabik-cabik dan meruntuhkan perumahan kemanusiaan, tetapi untuk menguatkannya sehingga planet Bumi ini tidak terus berdarah-darah semata-mata karena perbedaan yang melahirkan paham sempit dan sikap tak toleran. Bumi ini disediakan Allah untuk seluruh makhluk, bukan hanya untuk jenis manusia,

sekalipun manusialah yang diberi tanggung jawab untuk menjaga dan mengelolanya.

Toleran terhadap Perbedaan

Manusia beradab pastilah bersikap toleran terhadap perbedaan, apa pun corak perbedaan itu. Itu idealnya. Dalam kenyataan empiris, idealisme ini sering benar diruntuhkan oleh perilaku mereka yang ingin memonopoli kebenaran atas nama agama, ideologi, atau atas nama apa pun.

Sikap tak toleran inilah yang mengacaukan arus sejarah menuju sebuah dunia cita-cita yang adil dan ramah, di atas segala perbedaan yang memang merupakan sunah Allah SWT itu. Kasus kekerasan terhadap kelompok-kelompok arus kecil di Indonesia, di mana polisi sering tak berdaya mengatasinya cukup meresahkan dan merupakan bukti kelompok ini dibuat agar merasa tidak aman dan tidak nyaman lagi hidup di bumi Pancasila ini.

Ini adalah sebuah kecelakaan sosial yang tidak boleh diperpanjang lagi, sebab energi kita sebagai bangsa akan terkuras oleh gangguan tak beradab semacam ini. Dalam sebuah latihan kepemimpinan yang diselenggarakan oleh LSM terkenal sekitar dua tahun yang lalu, saya pernah mengajak semua pihak untuk "merayakan perbedaan".

Setelah saya timbang-timbang belakangan, ungkapan itu terasa kurang mengena. Mungkin formula yang lebih tepat begini, "Mari kita kelola perbedaan dengan baik dan arif, demi terciptanya sebuah kehidupan yang lebih adil dan beradab di muka bumi."

Perbedaan tidak mungkin dan tidak perlu dibunuh, tetapi dikelola dan di kendalikan dengan lapang dada agar fabrik sosial tidak berantakan.

Ayat kedua tersebut dalam surat al-Hajj ayat 40, yang artinya, "... dan sekiranya Allah tidak memberi kemampuan kepada manusia untuk

mempertahankan dirinya terhadap satu sama lain, maka semua biara, gereja, sinagog, dan masjid pasti akan hancur berantakan, di dalamnya nama Allah banyak disebut. Dan sungguh Allah menolong siapa yang menolongnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Perkasa."

Alquran di sini dengan tegas mengatakan bahwa nama-Nya tidak hanya disebut terbatas di dalam masjid, tetapi juga dalam biara, gereja, dan sinagog. Artinya, tak seorang pun yang berhak menghalangi pihak lain dalam menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing.

Dengan demikian, perusakan terhadap tempat-tempat ibadah dari agama yang beragama sama artinya dengan pembangkangan terhadap ketentuan Allah dalam Alquran.

Pada saat Islam menjadi sasaran sebagai agama tertuduh, khususnya akibat Tragedi 11 September 2001, sekelompok kecil umat Islam menjadi tidak stabil secara psiko-emosional.

Dalam kondisi yang oleng ini, sebagian orang menjadi gelap mata dengan merusak tempat- tempat ibadah golongan lain, dimana nama Allah juga banyak disebut, sebagaimana ayat di atas memberikan testimoni.

Dalam menghadapi kasus-kasus tertentu, rupanya Alquran bersikap lebih toleran dibandingkan kelakuan sebagian umat Islam. Dari ke ruwetan psikologis yang semacam inilah bibit-bibit intoleransi itu bersumber. Tetapi, kelakuan yang menyimpang ini harus secepatnya di kontrol dan diluruskan dengan mengacu kepada diktum Alquran yang kebenarannya diakui dan dipercayai seluruh umat Islam, tanpa kecuali.

Kembali kepada konsep bhinneka tunggal ika. Tujuan Mpu Tantular dengan rumusan ini semula adalah agar antara penganut Hindu dan Buddha tidak saling menyerang karena merasa sebagai pihak yang paling benar. Ungkapan itu diikuti oleh: tan hana dharma mangrwa (tidak ada kebenaran yang mendua). Artinya, baik Hindu maupun Buddha sama-

sama menuju ke jalan kebenaran dengan cara dan metode yang berbeda.

Dengan berkata begini, tuan dan puan jangan salah paham. Bagi saya Islam adalah agama yang paling benar, sebab jika keyakinan ini tidak dimiliki, maka iman kita bisa goyang dan orang akan dengan mudah berganti agama, seperti berganti baju saja. Agama tidak bisa diperdagangkan dan dipermainkan. Agama adalah sesuatu yang sangat mendasar yang memberi makna sejati kepada kehadiran kita di alam semesta ini, sementara filsafat gagal memberikan makna itu.

Namun, kita juga harus bersedia memberikan posisi yang sama kepada pihak lain yang menganggap agamanya pula yang paling benar.

Dengan formula ini tidak ada alasan bagi siapa pun untuk bersikap antitoleransi. Bahkan, sebenarnya orang yang tak beriman pun berhak hidup di muka bumi dengan aman dan nyaman dengan syarat adanya kesediaan mengembangkan sikap saling menghormati, tidak punya agenda tersembunyi untuk menelikung dan menghancurkan satu sama lain.

Formula Alquran berikut ini tetap relevan sepanjang sejarah, "Bagimu agamamu, bagiku agamaku" (Surat al-Kafirun ayat 6). Surat Makkiyah ini membuka pintu untuk berbeda dengan tidak merusak perumahan kemanusiaan.

Pengkhianatan terhadap Pancasila

Keadaan bangsa dan negara belum juga ada perubahan fundamental setelah lebih dari tujuh dekade. Pancasila tetap saja tidak dipedomani secara nyata dalam cara kita mengurus bangsa dan negara, suatu kelengahan konstitusional yang sangat menyakitkan, jika bukan telah dan sedang berlakunya pengkhianatan kolektif. Keadilan sosial masih jauh dari kenyataan sebagian besar rakyat Indonesia.

Setiap pergantian sistem kekuasaan, selalu saja ada harapan untuk

kebangkitan dan perubahan mendasar agar lebih adil dan lebih baik. Tetapi, setelah sistem baru berjalan dengan 1.000 janji, kekecewaan dan rasa tidak nyaman di kalangan rakyat luas mencuat lagi dan lagi. Dengan demikian, kebangkitan sejati belum pernah terjadi selama sekian dasawarsa di era kemerdekaan.

Mula-mula kekecewaan itu dirasakan oleh kelompok kecil, kemudian radiusnya semakin meluas sehingga negara tidak mampu mengontrolnya lagi. Sistem Demokrasi Terpimpin (1959-1966) dan Demokrasi Pancasila (1966-1998) telah roboh secara dramatis, pertumpahan darah sesama anak bangsa sukar sekali dihindarkan. Ajaibnya adalah, Pancasila secara formal konstitusional tetap berada pada posisi puncak, sedangkan nilai-nilai luhurnya tidak pernah dijadikan pedoman dan acuan secara sungguh-sungguh dalam cara kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Era Reformasi sejak 1998 sampai sekarang dengan slogan anti-KKN, otonomi daerah, dan demokratisasi, ternyata telah berjalan tersendat-sendat, sementara tingkat pengangguran tidak semakin berkurang, berbarengan dengan munculnya orang kaya baru yang diuntungkan. Bahkan, ada pendapat yang mengatakan, Gerakan Reformasi telah mati suri.

Pertanyaannya adalah, mengapa bangsa ini tidak becus mengurus dirinya? Di mana letak kelemahan kita dalam berbangsa dan bernegara selama ini? Uraian berikut akan mencoba memberikan jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan semacam itu dan pertanyaan lain yang relevan.

Di sekitar era proklamasi 1945 dan tahun 1950-an, kita memang terganggu oleh masalah pertarungan Pancasila versus Islam sebagai dasar negara. Tetapi, dengan dikukuhkannya Pancasila sebagai dasar filosofi negara di era 1980-an dan diterima kemudian oleh kalangan masyarakat

luas, sebenarnya masalah fundamental ini telah selesai. Sekarang hampir tidak ada lagi kekuatan politik yang berarti yang mampu melawan kenyataan ini. Sekalipun masih ada beberapa kelompok masyarakat yang mencoba menghidupkan kembali kesetiaan primordialnya, pasti tidak mendapat pasaran yang berarti dalam proses kenegaraan kita.

Adapun sekarang Pancasila sudah jarang disebut sejak 15 tahun terakhir, jangan diartikan bahwa filosofi ini ingin diganti dengan yang lain. Sama sekali tidak. Yang terjadi di bawah permukaan adalah kekecewaan berat masyarakat karena nilai-nilai luhur Pancasila itu lebih banyak dijadikan retorika politik, sedangkan dalam perbuatan nilai-nilai itu malah dikhianati tanpa rasa malu. Jadi, yang berlaku adalah pengkhianatan terhadap Pancasila dalam praktik.

Mari kita cermati dalam kehidupan kolektif kita bagaimana nilai-nilai luhur Pancasila tidak lagi hidup dalam menuntun perilaku kita sebagai bangsa. Sila pertama adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa". Semestinya, sila ini dijadikan payung moral oleh semua kita. Benar, masjid, gereja, wihara, pura, klenteng, dan lain-lain tempat ibadat masih banyak pengunjungnya. Tetapi, apakah kehadiran orang di tempat-tempat ibadah itu ada pengaruhnya dalam memperbaiki perilaku kita sebagai individu atau secara kolektif? Saya sangat meragukan.

Dalam pantauan saya, sebegitu jauh proses internalisasi nilai-nilai luhur Pancasila belum terjadi secara efektif, terutama di kalangan pejabat tinggi, apalagi di kalangan politisi. Kenyataan ini sungguh sangat memprihatinkan. Tempat-tempat ibadah yang terus bertambah seperti tidak ada korelasi positif dengan perubahan perilaku ke arah kebaikan dan kejujuran. Ini suatu yang sangat serius yang sedang melingkungi kita, sebuah pertunjukan kemunafikan sosio-kultural yang masih menerpa bangsa ini secara keseluruhan.

Sila kedua adalah "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Rumusannya

sangat padat dan padu, memberi arah yang jelas ke mana bangsa ini semestinya bergerak. Tetapi, kenyataan pada masa-masa tertentu dan di daerah tertentu, sejak beberapa tahun belakangan, yang berlaku adalah proses penindasan kemanusiaan dengan cara yang zalim dan biadab. Tidak jarang dilakukan dengan alasan politik, ekonomi, dan bahkan agama. Kita telah kehilangan perspektif moral dalam berhubungan sesama anak bangsa.

Sistem politik sentralistis selama puluhan tahun telah menginjak-injak sila ini dengan membunuh rasa keadilan dengan cara yang tidak beradab. Di era reformasi, keliaran politik dan ekonomi semakin tidak dapat dibendung dan dikendalikan. Akibatnya, partisipasi dalam pemilu telah merosot secara dramatis. Demokrasi dijadikan ajang pertarungan berebut rezeki dan kekuasaan, sementara sebagian besar politisi masih saja merasa benar di jalan dusta tunanurani.

Sila ketiga Pancasila yaitu "Persatuan Indonesia" menyangkut masalah integrasi nasional yang telah diupayakan sejak awal abad ke-20. Adalah sebuah pandangan yang ahistoris jika kita menganggap bahwa persatuan bangsa sebagai sesuatu yang given dan final dengan adanya Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi 17 Agustus 1945.

Dua tonggak sejarah ini hanyalah modal utama untuk melangkah selanjutnya dalam upaya mengisi kemerdekaan. Masalah integrasi nasional yang terganggu akhir-akhir ini disebabkan oleh sikap salah pandang itu. Kita lupa bahwa masalah persatuan bangsa adalah sebuah proses yang tidak pernah selesai. Karena dia bergerak terus, maka kelalaian kita selama ini dalam memelihara dan merawatnya telah memicu munculnya gejala disintegrasi yang sangat berbahaya bagi hari depan Indonesia.

Lagi-lagi, di sini masalah keadilan yang telantar sekian lama menjadi faktor pokok mengapa kekuatan disintegratif mendapat peluang untuk

memperjuangkan kemerdekaan daerahnya, lepas dari bingkai Republik Indonesia yang sudah kita bangun dengan susah payah. Pendekatan militer semata untuk mencegah gerakan separatis ini tidak akan pernah efektif selama inti persoalannya berupa keadilan tetap saja tidak dihiraukan.

Sila "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/perwakilan" sebagai sila keempat merupakan sumber primer bagi sistem demokrasi yang ingin ditegakkan di Indonesia. Tetapi, karena pengaruh subkultur semifeodal atau sikap kebarat-baratan di kalangan sementara elite bangsa, kita sampai hari ini belum lagi mampu menciptakan sebuah sistem politik demokrasi yang kuat dan sehat sesuai dengan kondisi Indonesia.

Dalam sistem Demokrasi Liberal (1950-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1966), dan Demokrasi Pancasila (1966-1998), mereka yang mengaku sebagai pendukung demokrasi lebih banyak dalam teori, sementara dalam realitas politik mereka tidak toleran, sempit dada, dan mau menang sendiri. Akibatnya jelas, demokrasi tidak semakin mendekatkan bangsa kepada tujuan kemerdekaan: terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demokrasi tanpa rasa tanggung jawab terhadap kepentingan yang lebih besar dan budaya lapang dada bukan penyelesaian bagi hari depan Indonesia. Sementara, sistem otoritarian telah membunuh kekuatan-kekuatan kreatif yang pernah dimiliki bangsa ini.

Sila kelima adalah "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", sebuah sila yang manis sekali, tetapi telah kita sia-siakan sejak Proklamasi. Sedikit sekali perilaku kita yang dibimbing oleh sila ini dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keretakan antara kata dan laku semakin menganga dari hari ke hari, dari sistem politik yang satu

ke sistem yang lain. Kelatahan kita dalam menghayati dan melaksanakan sila ini sesungguhnya adalah faktor yang paling krusial mengapa masalah integrasi nasional belum semakin mantap dari waktu ke waktu, tetapi kita tidak juga mau belajar dari keteledoran ini.

Pada era Demokrasi Liberal dengan kekuasaan partai yang begitu besar, kabinet jarang sekali yang berumur panjang. Jika berlaku perbedaan pandang antara pemimpin partai yang belum tentu mengenai masalah mendasar, langsung kabinet dijatuhkan untuk diganti oleh kabinet yang baru dengan nakhoda yang lain. Kejadian ini berlangsung berkali-kali sehingga kabinet tidak pernah berusia sampai lima tahun. Ganti kabinet, ganti kebijakan dan program. Pemborosan energi politik terjadi berulang-ulang, tanpa rasa dosa terhadap bangsa dan negara.

Di era Demokrasi Terpimpin, kabinet dapat bertahan sampai enam tahun, tetapi demokrasi itu sendiri harus takluk ke bawah sistem otoritarian dengan subkultur semifeodal yang ada di belakang. Partai-partai yang tidak sejalan dengan penguasa disingkirkan untuk kemudian dibubarkan. Di bawah sistem ini, demokrasi tinggal nama dan Pancasila hanyalah dipakai untuk pembenaran terhadap libido kekuasaan tanpa kontrol.

Politik menjadi panglima, aspek kenegaraan yang lain harus tunduk kepada kehendak panglima. Sistem ini kemudian berantakan dan berguguran ibarat rumah yang terbuat dari kartu (untuk meminjam Bung Hatta) melalui tragedi berdarah dalam bentuk G30S/PKI. Entah berapa puluh ribu nyawa anak bangsa yang tertumpah sebagai biaya dari konflik politik dengan skala nasional. Tragedi ini berlaku enam tahun setelah Dekrit 5 Juli 1959 dengan mengukuhkan Pancasila dan UUD 1945, tetapi dengan mengorbankan Majelis Konstituante yang dinilai gagal menjalankan tugas konstitusionalnya.

Harapan dalam Dinamika Kekuasaan

Demokrasi Liberal telah gagal karena ketidaksabaran elite politik, Demokrasi Terpimpin berakhir dengan malapetaka nasional. Sejak paruh kedua tahun 1960-an, kita coba pula sistem baru yang kemudian dikenal Demokrasi Pancasila dalam format Orde Baru, di mana terjadi kongsi antara militer dan sipil dari kalangan "Mafia Berkeley".

Semula sistem ini telah berhasil menekan inflasi yang pada akhir era Demokrasi Terpimpin telah mencapai 650 persen, dan laju pembangunan dipuji banyak pihak, dalam dan luar negeri. Booming bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 1970-an telah semakin memberi legitimasi kepada sistem kekuasaan yang sedang berjalan, sehingga kesetiakawanan antara Soeharto dan AH Nasution yang berantakan seperti tidak dipedulikan orang lagi. Apalah salahnya mengorbankan seorang Nasution demi pembangunan bangsa. Begitu kira-kira logika yang berlaku saat itu.

Awal 1980-an, proses pembusukan sistem ini mulai terasa pada saat keluarga penguasa terjun ke dunia bisnis, tetapi sistem kekuasaan masih bertahan sampai suatu ketika datang angin puting beliung berupa krisis moneter di Asia Timur sejak 1997. Indonesia ternyata adalah negara yang paling rapuh dan rentan dalam menghadapi angin limbubu ini. Pada waktu negara-negara lain di kawasan ini telah berhasil memulihkan kondisi ekonominya, kita tetap saja bingung dan tertatih-tatih selama beberapa tahun karena tidak percaya diri.

Korupsi yang menggurita, kumulatif, dan sistemik, telah menawan bangsa ini sampai batas yang sangat jauh. Kekuatan Reformasi yang tidak pernah kompak itu telah semakin memperparah situasi yang memang sudah parah. Selama 15 tahun terakhir, pergantian kepemimpinan nasional telah terjadi sebanyak empat atau lima kali.

Lagi, setiap ada pergantian, muncul harapan baru untuk kemudian dalam tempo singkat redup lagi, sementara nasib rakyat kecil tetap saja

tidak tertolong. Mereka cukup dipuaskan dengan janji-janji kosong yang tidak ditepati. Ada slogan bagus dalam kampanye "bersama kita bisa", dalam kenyataannya "bersama kita berdusta". Atau memang bangsa ini terlalu besar sehingga kita tidak mampu mengurusnya?

Dengan utang negara sekitar Rp 2.000 triliun, luar negeri dan domestik, dapat dibayangkan betapa rapuhnya fundamental keuangan negara kita. Angka ini bila dibagi dengan jumlah penduduk 250 juta, maka setiap anak Indonesia sedang menanggung beban utang masing-masing Rp 8 juta. Kita tidak tahu persis berapa persen dari utang yang menggunung itu dipakai untuk kepentingan bersama dan berapa persen pula yang telah digarong.

Secara formal konstitusional Pancasila tetap berada di puncak, dalam realitas kita mengkhianatinya secara kolektif, seperti telah disinggung di atas. Akibatnya, budaya saling percaya antara sesama anak bangsa telah semakin menghilang, patriotisme semakin memudar, kita telah kehilangan perspektif masa depan. Seakan-akan negeri ini sudah tidak bertuan, padahal proses demokrasi kita sewaktu diadakan pemilihan langsung presiden dan wakilnya tahun 2004, seluruh dunia angkat topi kepada Indonesia. Kata mereka, ternyata Islam cukupcompatible dengan sistem demokrasi. Tetapi, peluang emas ini tidak cepat ditangkap sampai keadaan kembali memburuk. Rasa cemas dan ngeri dalam menatap masa depan sekarang dirasakan semua pihak, hampir tanpa kecuali. Saya sudah berbicara dengan banyak kalangan. Kesannya sama: keadaan tidak semakin baik.

Saya mengamati, kekurangan kita terutama terletak pada kenyataan sukarnya menemukan tipe pemimpin yang mau berjibaku membela bangsa dan negara. Situasi sekarang sangat tidak normal, demokrasi yang sedang berjalan adalah demokrasi setengah liar plus kebanyakan politisi yang tidak bertanggung jawab. Sedikit sekali di antara mereka yang

memikirkan bangsa ini secara sungguh-sungguh. Sebagian besar malah menikmati kondisi demokrasi yang centang perenang ini karena ada peluang memperkaya diri di lautan kemiskinan yang melanda sebagian besar rakyat kecil kita.

Apa yang disebut *sense of crisis* sudah tidak singgah lagi di otak mereka. Seakan-akan semuanya masih berjalan normal. Dalam situasi yang serbagalau ini, kita memerlukan munculnya pemimpin "gila" tetapi mengerti bagaimana nilai-nilai Pancasila itu dilaksanakan dalam perbuatan secara konsekuen dan bertanggung jawab. Tanpa pemimpin "gila" yang *disinterested*, akan sulit bagi bangsa ini untuk bangkit secara autentik dalam tempo yang tidak terlalu lama. Atau kita memang rela membiarkan bangsa ini tenggelam?

Tentu mereka yang gila dalam bentuk lain sajalah yang sampai hati melihat bangsa ini hilang dari peta bumi. Ada dua tipe gila di sini: satu, "gila" dalam tanda kutip, yang lain gila karena putus asa sehingga tidak mampu lagi melihat di ujung lorong sana masih ada seberkas sinar, asal kita mau berubah secara radikal memperbaiki keadaan bangsa.

Tersimpan harapan besar yang tulus dari seorang *senior citizen* agar kita mau berubah secara fundamental dengan menjadikan Pancasila yang disinari wahyu sebagai acuan utama kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyelesaian secara revolusi tampaknya tidak akan berjaya, sementara korbannya pasti akan sangat besar.

Oleh sebab itu, kita perlu duduk bersama membicarakan masalah bangsa ini secara komprehensif, tajam, tetapi tulus, sehingga kondisi *mutual distrust* (saling tidak percaya) dapat diubah menjadi *mutual trust* (saling percaya) dan kita akan dapat merumuskan bahasa dan langkah bersama untuk bangkit. Kita hanya bisa bangkit bila mau berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Kalau pun ungkapan revolusi dipandang perlu, itu sifatnya adalah mental, sebuah mental *revolution* ke arah perbaikan dan

pemulihan kehidupan bangsa dan negara secara menyeluruh, terarah, dan bertanggung jawab.

Apakah Pemilu selanjutnya akan menjawab semua ketidakpastian di atas, mari kita tunggu, dan gerak bola harus diarahkan kepada terpilihnya para pemimpin yang visioner, berani, dan bertanggung jawab, bukan pemimpin yang hobinya merengek, mengeluh, dan berlaku culas. Faktor terbesar mengapa kita setengah gagal mengurus bangsa dan negara terletak pada masalah kepemimpinan yang tidak menjadikan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dalam bahasa yang tegas dan jelas sebagai pedoman pertama dan utama dalam bertindak.

Ketimpangan Ekonomi di Negara Pancasila

Mengapa Negara Pancasila dan tidak hanya cukup menyebut Negara Indonesia saja? Alasannya terang benderang, karena sila kelima Pancasila yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" telah lama diabaikan dalam strategi pembangunan nasional, kecuali dalam kata dan wacana. Drama ini sudah berlangsung sejak proklamasi kemerdekaan lebih 71 tahun yang lalu.

Akibatnya juga terang benderang dalam makna yang sangat fatal; ketimpangan sosio-ekonomi di Negara Pancasila ini sudah berada di lampu merah, pada tikungan tanda bahaya bagi kelangsungan masa depan bangsa ini. Presiden, wakil presiden, menteri keuangan, dan banyak pengamat sudah sering menyebut masalah ketimpangan ini. Sekadar membincangkan, manfaatnya nol, manakala tidak diterjemahkan dalam kebijakan pembangunan sosial-ekonomi nasional yang berkeadilan berdasarkan Pancasila.

Tetapi tuan dan puan jangan lupa mengamati ini: jika ada lembaga tinggi negara yang masih membisu dan gagap menyebut isu ketimpangan ini, maka lembaga itu adalah yang berkantor di Senayan yang bangga

menyebut dirinya sebagai wakil rakyat. Entah rakyat mana yang diwakili, kita tidak tahu. Mungkin penyebutan sebagai lembaga wakil partai politik lebih tepat. Sudah cukup banyak wakil partai yang berkantor di Senayan ini menjadi pasien KPK. Dalam berbagai survei, ternyata lembaga ini adalah yang paling korup di negeri ini.

Pada hari-hari terakhir ini, masalah ketimpangan ekonomi ramai lagi dikomentari gara-gara informasi dalam TSCMP (the South China Morning Post), tertanggal 23 Februari 2017. Di bawah judul, "Wealth gap: four richest Indonesians worth more than poorest 100 million" (Jurang kekayaan: empat orang terkaya Indonesia melebihi harta 100 juta orang termiskin). Angka ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Oxfam, sebuah konfederasi internasional dari organisasi-organisasi amal dengan titik perhatian utama untuk melawan kemiskinan global, didirikan tahun 1942, berpusat di Inggris.

Sebagai LSM tingkat dunia yang telah berpengalaman selama 70 tahun, Oxfam yang bekerja sama dengan lebih 90 negara, temuan teranyarnya tentang ketimpangan ekonomi di Indonesia memang sudah berada di ambang batas toleransi. Kalimat pertama yang terbaca dalam laporan itu yaitu: "Empat orang Indonesia terkaya, hartanya melebihi milik 100 juta rakyat termiskin di negeri itu, sebuah kajian menemukan, sambil menyoroti betapa besarnya jumlah rakyat yang terpinggirkan saat ekonomi membengkak."

Presiden Joko Widodo dinilai masih gagal memenuhi janji-janjinya untuk memerangi ketidakadilan sambil menekankan agar pemerintah menaikkan pengeluaran bagi kepentingan pelayanan publik, dan agar korporasi dan orang kaya membayar pajak lebih besar. TSCMP mengutip lebih lanjut: "Indonesia telah menikmati sebuah pembengkakan ekonomi yang telah mengurangi jumlah rakyat yang hidup dalam kemiskinan

ekstrem, tetapi jurang antara kaya miskin semakin melebar dibandingkan dengan negara Asia Tenggara mana pun selama 20 tahun terakhir, temuan kajian Oxfam."

Kajian itu juga membeberkan, pada 2016, kekayaan kolektif empat taikun itu berada pada angka 225 miliar dolar Amerika. Menurut daftar orang kaya dari Forbes, mereka yang terkaya itu termasuk dua bersaudara Michael Hartono dan Budi Hartono, dan Susilo Wonowidjojo, semuanya adalah penguasaha rokok.

Sebagaimana kita ketahui, para taikun ini menjadi demikian kaya raya adalah juga karena sumbangan rakyat miskin perokok yang jumlahnya puluhan juta, tersebar dari kawasan perkotaan menembus sampai ke daerah pelosok yang jauh terpencil di seluruh nusantara. Di warung-warung, di atas kendaraan, bahkan di ruang ber-AC (bagi yang sedikit kaya), asap rokok itu terus saja mengepul. Iklan rokok terpampang di mana-mana, sekalipun di bawahnya tertulis: merokok membunuhmu!

Inilah suasana terkini dari Negara Pancasila kita, ketimpangan ekonomi semakin tajam yang diragakan dalam perbandingan angka di atas. Pemerintah sudah punya tekad bulat untuk melawan ketimpangan itu, tetapi alangkah sulitnya. Banyak faktor penghambatnya, termasuk sikap mental bangsa ini yang sulit berubah ke arah proses perbaikan radikal dan menyeluruh.

Para taikun dan pendukungnya di Senayan tentu akan berupaya keras agar UU Pertembakauan tidak sampai mematikan perusahaan mereka yang menggiurkan itu. Dan ironisnya, rakyat jelata yang ketagihan tembakau adalah sasaran empuk yang turut serta melestarikan ketimpangan ekonomi itu. Sebuah lingkaran setan yang belum ditemui jalan keluarnya. Quo vadis Negara Pancasila? []

Catatan Kaki:

1 Tulisan ini direorganisasi dari beberapa esai dan opini yang sudah pernah naik cetak pada Kolom 'Resonansi' di surat kabar harian *Republika*. Tulisan-tulisan tersebut adalah 1) "Bhinneka Tunggal Ika, Toleransi, dan Alqur'an (1)" yang terbit pada Selasa, 18 Desember 2012, 2) "Bhinneka Tunggal Ika, Toleransi, dan Alqur'an (2)" yang tayang pada Selasa, 08 Januari 2013, 3) "Pancasila dan Kekuasaan (I), terbit pada Selasa, 09 Juli 2013, 4) "Pancasila dan Kekuasaan (II), naik cetak pada Selasa, 16 Juli 2013, 5) "Pancasila dan Kekuasaan (III), terbit pada Selasa, 23 Juli 2013, dan 6) "Lampu Merah Ketimpangan Ekonomi di Negara Pancasila", tayang pada Selasa, 28 Februari 2017

2 Anggota Dewan Pengarah BPIP; Mantan Guru Besar Sejarah FIS UNY; Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah

3 Pemberian navigasi baru sebagai bagian dari reorganisasi sistematika gagasan dalam tulisan ini dilakukan oleh editor, sdr. Halili, berdasarkan approval langsung dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

BAGIAN I
REAKTUALISASI PENDIDIKAN PANCASILA: Sebuah Pengantar
Daftar Pustaka

Bull, N. J. 1973, *Moral Education*. London: Routledge & Kegan Paul.

Driyarkara, N. (2006). *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-Esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsanya*, A. Sudiarja, et.al. (ed.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Durkheim, E. 1992/1867. "Review of *Guyau's L'irreligion de l'avenir*." Trans. A. Giddens. In *Emile Durkheim: Selected Writings*, ed. A. Giddens. New York: Cambridge University Press.

Eagleton, T. 2005. *Holy Terror*. USA: Oxford University Press.

Gardner, H. 1993, *Multiple Intelligences: A Reader*. New York: BasicBooks.

Geertz, C. 1966/1993. *"Religion as a cultural system"*. Dalam C. Geertz: *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*, pp.87-125. Illinois: Fontana Press.

----------1968. *Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia*. Chicago: University of Chicago Press.

Haidt, J. 2012. *The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and Religion*. New York: Vintage Books.

Honsbawm, E. 2007. *Globalization, Democracy and Terrorism*. London: Little, Brown.

Kidder, K. 1995, *How Good People Make Tough Choices*. New York: Morrow.

Latif, Y. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*,. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

---------- 2014. *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*. Bandung: Mizan.

---------- 2015. *Revolusi Pancasila*. Bandung: Mizan.

----------2009. *Menyemai Karakter Bangsa: Budaya Kebangkitan Berbasis Kesasteraan*. Jakarta: Kompas.

Lickona, T. 1991. *Educating for character. New York*: Bantam Books.

_____2011. "Introduction", dalam K. Ryan, et.al. (eds.) *Happiness and Virtue,*

Beyond East and West: Toward A New Global Responsibility. Tokyo: Tuttle Publishing.

Putnam, R. 2000. Bowling Alone: *The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon and Schuster.

Ryan, K. 1996, "Character Education in the United States", *Journal For A Just And Caring Education*, No. 2 (January 1996), pp. 75-84.

BAGIAN II
DISKURSUS PENDIDIKAN PANCASILA
Daftar Pustaka

Abdulgani, Roeslan .1963. *Penggunaan ilmu Sejarah.* Bandung; Penerbit Prapanca.

.....1980. *The Bandung Connection: Konferensi Asia_Afrika di Bandung tahun 1955*. Jakarta: Gunung Agung.

.....1987. *Indonesia Menatap Masa Depan.* Jakarta: Pustaka Merdeka.

.....1955. *Pantjasila: The Prime Mover of The Indonesian Revolution.* Jakarta: Published by Prapantja.

Adams, Cindy . 2007. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.* Jakrta: Yayasan Bung Karno bekerjasama dengan PT. Media Pressindo. Jakarta -Yogyakarta.

Alfian .1982. *Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia.* Jakarta: LP3ES.

Anthony, Robert . 1986. *The Ultimate Secrets of Total Self-Confidence.* New York: A Berkley Books

Barnadib, Imam .1982. *Arti dan Metode Sejarah Pendidikan.* Yogyakarta: Yayasan penerbitan FIP-IKIP Yogyakarta.

Brezinka, Wolfgang .(1992). *Philosophy of educational knowledge: An Introduction to the foundations of science of education and practical pedagogics.* Dordrech:Kluwer Academic Publisher

Brodjonagoro, Sutedjo .1966. *Pendidikan Nasional Indonesia.* Yayasan Penerbitan FIP-IKIP YOGYAKARTA.

Buchori, Mochtar .1994. *Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia.* Yogyakarta: PT Tiara Wacana.

Darma, Budi .2002. "Humaniora: Mengacu pada Hati Nurani". dalam Sumijati et.al *Integrasi, Moral Bangsa, dan Perubahan*. Yogyakarta: Unit Pengkajian dan Pengembangan Fakultas Ilmu Budaya UGM.

Dewantara, Ki Hadjar .1952. *Pancasila.* Yogyakarta: NV. Usaha Penerbitan Indonesia.

..... 2013. *Ki Hadjar Dewantara: I (Pendidikan)*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.

Driyarkara . 1980. *Driyarkara tentang Pendidikan.* Yoyakarta : Penerbit Kanisius

..... 2006. Karya Lengkap *Driyarkara.*A. Sudiardja, dkk (ed). Yogyakarta : Penerbit Kompas, Gramedia & Kanisius.

Gadamer, Hans-Geoorg . (1977). *Philosophical Hermeneutics.* Berkeley: University of California Press.

Giroux, Henry A (2011). *On Critical pedagogy*. New York: The continuum International Publishing Group.

Hatta, Muhammad . 1976. *Indonesia Merdeka.* Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.

..... .1956. *Lampau dan Datang.* Diucapkan pada penerimaan doctor honoris causa dari Universitas Gadjah Mada 27 Nopember 1956.

.....1954. *Kumpulan Karangan IV*. Jakarta. Amsterdam. Surabaya: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia.

Kartodirdjo, Sartono (1998). "Orang cenderung membengkokkan sejarah". *Kedaulatan Rakyat* 12 Oktober 1998.

....., dkk. .1993. 700 *Tahun Majapahit: zsuatu Bunga Rampa*i. Surabaya: CV Wisnu Murti.

Kuntowijoyo .2003. "Epistemologi dan Paradigma Ilmu-ilmu Humaniora dalam Perspektif Pemikiran Islam" dalam Jarot Wahyudi et.al. *Menyatukan Kembali Ilmu-ilmuAgama dan Umum.* Yogyakrta: SUKA Press IAIN Sunan Kalijaga.

Latif, Yudi .2018. *Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun untuk Pembudayaan.* Jakarta: Mizan.

..... 2017. "Obat Luka Bangsa". *Kompas,* Selasa 14 Maret 2017.

Maarif, Ahmad Syafii .2019. *Mencari Autensitas dalam Dinamika Zaman.* Yogyakarta: Penerbit IRCiSoD.

....2009. *Titik-Titik Kisar di Perjalananku.* Bandung: Mizan Media Utama.

..... .2015. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*. Bandung: Mizan Media Utama.

Madjid, Nurcholis . 2004. *Indonesia Kita*. Jakarta: pT. Gramedia Pustaka Utama.

Maltz, Maxwell .1973. *Psycho-Cybernetics and Self-Fulfilment*. New York: Bantam Books.

Mayer, Frederick .(1963). *Foundations of education*. Columbus, Ohio: Charles E. Merrill, Books, Inc.

Nashir, Haedar .2018. Islam Wasathiyah. *Republika*. Rabu 2 Mei 2018.

Notonagoro & Abdulgani, Roeslan .1976. *Filsafat Pancasila dan Pengamalannya*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada & Depaetemen Dalam Negeri.

..... .1972. *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*. Jakarta: Universitas Pancasila.

Poerbakawatja, Soegarda .1976. *Ensiklopedi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung.

Sastrapratedja .2001. *Pendidikan sebagai Humanisasi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Siagian, Gayus .(1998). *Wasiat Bung Karno*. Jakarta: Ketut Masagung Corporation.

Siraj, Said Agil .2018. "Ulama dunia serukan persatuan". *Republika*. Kamis 3 Mei 2018.

Siswoyo, Dwi .2013. "Philosophy of Education in Indonesia: Theory and Thoughts of Institutionalized State (Pancasila)" in *Asian Social Science*. Volume 9 No. 12 September 2013. Canada: Canadian Center of Social Science and Education.

..... .2017. Sekolah dan Guru dalam Tantangan Zaman. Yogyakarta: UNY Press.

Soedjatmoko .1984. "Kata Pengantar" dalam Toeti Heraty Noerhadi. Aku dalam budaya. Jakarta: Pustaka Jaya.

..... 1986. Dimensi manusia dalam pembangunan. Jakarta: LP3ES

.....1994. *Menjelajah cakrawala: kumpulan karya visioner Soedjatmoko*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama.

..... . 2001. Kebudayaan Sosialis. Jakarta Timur: Melibas.

Sukarno .1990. *Bung Karno dan Islam : Kumpulan pidato tentang Islam 1953-1966*. Jakarta : Penerbit cv. Haji Masagung.

..... .1986. *Pancasila sebagai dasar Negara*. Jakarta : penerbit Inti Idayu Press-Yayasan Pendidikan Sukarno.

.....(1964). *Camkan Pancasila: Pancasila dasar Falsafah Negara.* Jakarta : Departemen Penerangan RI.

.....1964. *Dibawah bendera revolusi*, jilid pertama. Jakarta : panitya penerbit dibawah bendera revolusi

..... . .1965. *Dibawah bendera revolusi*, jilid kedua. Jakarta : panitya penerbit dibawah bendera revolusi.

Tilaar, H.A.R .2005. *Manifesto Pendidikan Nasional.* Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Whitehead, A.N .1955. *The Aims of Education and Other Essays*. London. 1955.

Yacob, T. 2004. *Harian Kedaulatan Rakyat*. 5 Februari 2004.

BAGIAN III
DESAIN PENDIDIKAN PANCASILA
Daftar Pustaka

Aman, Sofyan, dkk., 1982, *Pedoman Didaktik Metodik Pendidikan Moral Pancasila untuk para Guru SD, SLTP dan SLTA*, Jakarta: PN Balai Pustaka

Cogan, John J. 1998. "Citizenship Education for the 21st Century: Setting the Context," dalam John J. Cogan dan Ray Derricott, *Citizenship for the 21st Century: An Introduction Perspectives on Education*, London: Kogan Page Ltd, pp.1-20.

Darmodiharjo, D. (1980). "Orientasi Singkat Pancasila" Laboratorium Pancasila IKIP Malang. *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional, pp. 7-132

Dhakidei, D. (2001). "Sistem Sebagai Totalisasi, Masyarakat Warga, dan Pergulatan Demokrasi." dalam St. Sularto (editor). *Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, pp. 3-29.

Kuntowijoyo, 1996. "Pancasila adalah Objektivikasi Islam," *Ummat*, No. 4 Tahun II, 19 Agustus, pp. 46-47

Maarif, A.S. (1985). *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Samsuri. (2004). *Politik Islam Anti Komunis: Pergumulan Masyumi dan PKI di*

Arena Demokrasi Liberal. Yogyakarta: Safiria Insani Press

Samsuri. (2010). *Transformasi Gagasan Masyarakat Kewargaan (Civil Society) Melalui Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia (Studi Pengembangan dan Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Era Reformasi).* Disertasi Tidak Diterbitkan. Bandung: Program Studi Pendidikan IPS. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

Samsuri. (2011). *Pendidikan Karakter Warga Negara.* Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia

Sekretariat Jenderal MPR RI. (2001). *Ketetapan dan Keputusan Sidang Tahunan MPR Tahun 2001*. Jakarta: Setjen MPR RI

Sekretariat Negara RI. (1995). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) - Panitia Persiapan Kemerdekaaan Indonesia (PPKI).* Jakarta: Sekretariat Negara RI

Soepardo, *dkk.* (1962). *Civics, Masyarakat dan Manusia Indonesia Baru.* Jakarta:Balai Pustaka

Somantri, M. N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS.* Bandung: Rosda Karya

Suara Merdeka. (2001). "Kuntowijoyo: Kembalikan Pancasila sebagai Ideologi Negara," 25 Januari.

Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani.(1999). *Transformasi Bangsa Menuju Masyarakat Madani*, Jakarta: Kantor Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia

BAGIAN IV
PRAKSIS PENDIDIKAN PANCASILA
Daftar pustaka

Alt, Dorit and Roni Reingold. (2012). Changes in Teachers' Moral Role From Passive Observers to Moral and Democratic Leaders. Rotterdam: Sense Publishers.

Halstead, J.M. dan Pike, M.A. (2006). Citizenship and Moral Education.London: Routledge.

Stengel, Barbara S. and Alan R. Tom 2006). Moral Matters Five Ways to develop the Moral Life of Schools. New York: Teachers College Press.

Yudi Latif. (2013). Negara Paripurna. Bandung: Mizan

Yudi Latif. (2018). Wawasan Pancasila. Jakarta: Mizan

PRAKSIS PENDIDIKAN PANCASILA DI LINGKUP PRASEKOLAH DAN SEKOLAH DASAR

OUTBOND SEBAGAI MEDIA PENGENALAN NILAI-NILAI PANCASILA DI TAMAN KANAK-KANAK

Daftar Pustaka

Departemen Pendidikan Nasional. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah. Direktorat Pendidikan TK dan SD. 2004. *Kurikulum TK dan RA. Standar Kompetensi*. Jakarta.

Hartati, S. 2005 **Perkembangan Belajar pada Anak Usia Dini**. Jakarta: Depdiknas.

Hurlock, E.B. 2011. **Psikologi Perkembangan**. Jakarta: Erlangga.

Ismail, A. 2006 **Educations Games; Menjadi Cerdas dan Ceria dengan. Permaian Edukatif.** Yogyakarta: Pilar Media-Anggota IKPJ.

Rocmah, N. 2012. **Psikologi Pendidikan**. Yogyakarta: Teras,

Sudomo, A. 2000. **Bermain dan Permainan Anak.** Jakarta, Universitas. Terbuka.

KARAKTER KEBANGSAAN & GAMELAN BOCAH: *LEARNING BY DOING* ANAK USIA DINI

Daftar Pustaka

Bashori A. Hakim. (2010). *Pandangan masyarakat terhadap tindak kekerasan atas nama agama: Studi hubungan antara pemahaman dengan tindak kekerasan atas nama agama*. Jakarta: Kementerian Agama RI, Badang Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan.

Cornelis Lay. (2009). Kekerasan atas nama agama: Perspektif politik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 13, Nomor 1, Juli 2009 (1-19). ISSN 1410-4946.

Dwi Prapsiwi. (2012). Pengelolaan pembelajaran anak usia dini: Studi situs di TK negeri Pembina boyolali. *Thesis*. Surakarta: Program Studi Manajemen Pendidikan, UMS. Versi *online*.

Eko A. Meinarno, & Sri Fatmawati Mashoedi. (2016). Pembuktian kekuatan hubungan antara nilai-nilai pancasila dan kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Pancasila dan Kewarganegaraan*. Tahun 1, Nomor 1, Juni 2016.

Ihsan Ali-Fauzi, dkk., (2009). *Pola-pola konflik keagamaan di Indonesia* (1990-2008). Jakarta: Kerjasama YWP, MPRK-UGM, TAF.

MEMBELAJARKAN NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI MEDIA *BIG BOOK* KEPADA SISWA SEKOLAH DASAR

Daftar Pustaka

Essa, E.L. (2014). *Introduction to Early Childhood Education.* United States: Wardworth Cengage Learning.

Jackman, H.L. (2009). *Early Education Curriculum A Child's Connection to the World*. United States: Delmar Cengage Learning.

Loughry, D. (2001). The Case for Use of Big Books in the Early Years Classroom. *Early Child Development and Care. Vol. 169, pp. 85-96.*

Rahim, N.A., dan Harun, N.I. (2010). Student's Perception Towards Usage of the Big Book. *Gading Business and Management Journal. Vol 14. Pp. 47-54.*

Sadiman, A.S., dkk. (2006). *Media Pendidikan (Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudhana, N., dan Rifai, A. (2005). *Media Pengajaran*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Suyanto. (2007). *English for Young Learning (Melejitkan Potensi Anak Melalui English Class yang Fun, Asyik, dan Menarik)*. Jakarta: Bui Aksara.

PRAKSIS PENDIDIKAN PANCASILA DI LINGKUP SEKOLAH MENENGAH

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN "RODA TEBAK PANCASILA (ROTELA)" DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Daftar Pustaka

Branson, M. S. (Eds.). (1999). *Belajar civic education dari Amerika.* (Terjemahan Syafruddin, dkk.) Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) dan The Asia Foundation (TAF).

Cholisin. (2003). "PPKn paradigma baru dan pengembangannya dalam KBK". *Makalah.* Disampaikan pada *Training of Trainer (ToT)* Guru SLTP Mata Pelajaran PPKn, di Surakarta.

Johansson, E., et all. (2011). 'Practices For Teaching Moral Values In The Early Years: A Call For A Pedagogy Of Participation', *Education, Citizenship and Social Justice.* **6**, (2), 109–124.

Kirschenbaum, H. (1995). *100 ways to enhance values and morality in schools and youth settings.* Massachusetts: Allyn & Bacon.

Somantri, G. R. (2006). Pancasila dalam perubahan sosial-politik indonesia modern. Dalam I. Nasution & R. Agustinus (Penyunting), *Restorasi Pancasila: mendamaikan politik identitas dan modernitas* (hlm.1-31). Jakarta: Brighten Press.

PENANAMAN NILAI-NILAI PANCASILA BAGI SISWA SMA MELALUI *REFLECTIVE TEACHING*

Daftar Pustaka

Al Khanif, 2017, "Pancasila dalam pusaran Islam transnasional" dalam Al Khanif, Mirza Satria Buana, dan Manunggal Kusuma Wardaya (eds.), *Pancasila dalam pusaran globalisasi,* Yogyakarta: LkiS.

Biesta, G.J.J., *Learning Democracy in School and Society, Education, Lifelong Learning, and the Politics of Citizenship:* Rotterdam: Sense Publishers.

Cheng, Ch.Y., 2005, *New Paradigm for Re-engineering Education,*Dordrecht: Springer.

Creasy, R., 2018, *the Taming of education,* Cham, Switzerland: Palgrave macmillan.

Halstead, J.M. and Pike, M.A., 2009, *Moral and citizrnship eduction.* London: Routledge.

Latif, Y. 2013. *Negara Paripurna,* Jakarta: Mizan.

Latif, Y. 2015, *Revolusi Pancasila,* Jakarta: Mizan.

Latif, Y. 2016. *Mata Air Keteladanan,* Jakarta: Mizan.

Latif, Y, 2018), *Wawasan Pancasila,* Jakarta: Mizan.

Miller, J.P., 2007, *the Holistic Curriculum,* Toronto: OISE Press.

Print, M, and Lange, D., (Eds.) 2012, *Schools, Curriculum and Civic Education for Building Democratic Citizens,* Rotterdam: Sense Publishers.

Ricci, C. and Pritscher, C.P., 2015, *Holistic Pedagogy,* New York: Springer.

Stengel, B.S. and Tom, A.R. 2006, *Moral Matters, five ways to develop the moral life of schools,* New York: Tecaher College Press.

INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI PEMBELAJARAN PPKN DI SEKOLAH MENENGAH ATAS KOTA YOGYAKARTA

Daftar Pustaka

Creswell, John W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Penerjemah: Achmad Fawaid. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Euis Winarti. 2007. *Pengembangan Kepribadian*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Fraenkel. Jack R. 1977. *How to Teach about Value an analytic approach*. Whitehall Books Limited, Wellington, New Zealand.

Kaelan. M.S. 2008. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta. Paradigma

Lexy J Moleong. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya

Oemar Hamalik. 2007. *Proses Belajar Mengajar*. Cetakan keenam. Jakarta. Bumi Aksara.

Risieri Frondizi. 2001. *Pengantar Filsafat Nilai*. Penerjemah: Cut Ananta Wijaya. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Soerjono Soekanto. dan Mustofa Abdullah,1982. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat,* Rajawali Pers. Jakarta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta. Bandung.

Zaim Elmubarok. 2009. *Membumikan Pendidikan nilai, Mengumpulkan yang Terserak, Menyambung yang Terputus dan Menyatukan yang Tercerai*. Alfabeta. Bandung.

MEMBUDAYAKAN PANCASILA DI RUANG KEAGAMAAN SISWA SMK

Daftar Pustaka

Agustinus Edward Tasma dan Heru Santosa. (2006). "Polemik epistemologi pancasila dan demokrasi yang konstruktif beserta implementasinya". *HUMANIKA*. Vol. 6. No. 1. 45-51.

Ahmad Syafii Maarif. (2009). *Islam dalam bingkai keindonesiaan dan kemanusiaan: sebuah refleksi sejarah*. Bandung: Mizan.

An, X., Hannum, E. C., & Sargent, T. (2008). "Teaching quality and student outcomes: academic achievement and educational engagement in rural Northwest China". *Education*, 5(2), 309–334.

Bagus Mustakim. (2011). *Pendidikan karakter, membangun delapan karakter emas menuju indonesia bermartabat.* Yogyakarta: Samudra Biru.

Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). *Kerangka acuan pendidikan karakter tahun anggaran 2010*. Jakarta: Kemendiknas.

Nur Kholik Ridwan. (2013). "Pancasila dan deradikalisasi berbasis agama". *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. II, No 1, 2013/1434. 173-196.

Skourdoumbis, A. (2014). "Teacher effectiveness: making the difference to student achievement?" *British journal of educational studies*, 62(2), 111–126.

Vinta Larasati dan Abdul Gafur. (2018). "Hubungan kompetensi pedagogis dan kompetensi profesional guru PPKn dengan prestasi belajar siswa sekolah

menengah". *Jurnal Civics*: Media Kajian Kewarganegaraan Vol. 15 No. 1. 45 – 51.

Y. Ch. Nany S. (2009). "Menanamkan nilai pancasila pada anak sejak usia dini". *Humanika*,Vol. 9. No. 1. 107-116.

Permendikbud nomor 62 tahun 2014 tentang Ektrakurikuler.

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETELADANAN PENDIDIKAN KI HAJAR DEWANTORO DALAM PENDIDIKAN KARAKTER DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Daftar Pustaka

Danim, Sudarwan. 2006. *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Daulay, Haidar Putra. 2012. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Daradjat, Zakiah. 1979. *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*. Jakarta: Gunung Agung

Dewantara, Ki Hadjar, 1954. *Masalah Kebudayaan*. Pertjetakan Taman Siswa, Jogjakarta.

Hamengkubuwono X, (2010). Pendidikan Karakter Bangsa dalam Konsep Ki Hajar Dewantoro. Makalah disajikan pada seminar nasional di kadipaten Pakualaman Yogyakarta, 29 Mei 2010.

Koentjaraningrat. 2004. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.

Lickona T, (1991). Educating for Character. Bantam Books.

Nata, Abuddin. 2012. *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Maragustam. 2010. *Mencetak Pembelajar Menjadi Insan Paripurna (Falsafah Pendidikan Islam)*. Yogyakarta: Nuha Litera. Miskawaih, Ibn. Tt. *Tahdzib al-Akhlaq wa Tahhir al-Araq*. Mesir: Dar al-Kutub

Mulkhan, Abdul Munir, dkk. 1998. *Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren, Religiusitas Iptek.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Mulyasa, Enco. 2011. *Menjadi Guru Profesional.* Bandung: Remaja Rosdakarya

Muthahhari, Murtadha. 1995. *Filsafat Akhlak.* Bandung: Pustaka Hidayah

Muthohar, M. Aris. 2001. *Tata Krama di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat.* Jakarta: SIC

Mudji, Sutrisno SJ. 1994. *Dialog Kritis dan Identitas Agama.* Bandung: Mizan.

Pranarka, A.M.W. 1986. *Relevansi Ajaran-ajaran Ki Hadjar Dewantara Dewasa ini dan di Masa yang akan Datang*", dalam *Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara*, Lembaga Pengkajian Kebudayaan Sarjana Wiyata Tamansiswa, Yogyakarta

P.M. Laksono, dkk. 2016. Antropologi Pendidikan. Aneh : Biasanya Tidak Apa-Apa. Yogyakarta: Kepel Press.

Suyanto, (2010). Urgensi pendidikan karakter. Waskitamandiribk.wordpress. com. diunduh 19 september 2010.

Undang-Undang No.12 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Yulianingsih dan Ismantoro. 2002. *Dengan Budi Pekerti Mendidik Anak Didik Seutuhnya.* Suplemen Republika, Sabtu, 11 Mei 2002

PEMBELAJARAN SEJARAH BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA

Daftar Pustaka

Abd. Rahman Hamid. 2014. *Pembelajaran Sejarah.* Yogyakarta: Ombak.

Ahmad Syafii Maarif. (2006). "Keterkaitan antara sejarah, filsafat, dan agama", dalam *Kearifan sang profesor: bersuku-suku bangsa untuk kenal-mengenal.* Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Press.

Anderson,Benedict. (2008). *Imagined Communities (Komunitas-komunitas Terbayang).* Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Insist Press).

Bogdan & Steven Jean Taylor. (1975). *Introduction to qualitative research methods.* New York: John Wiley & Sons

Borg, Walter R. dan Meredith D. Gall.(1983). *Educational Research: An Introduction (fourth edition)*. New York: Longman

Budi Susanto. (2003). *Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.

Daoed Joesoef. 1981. "Ilmu Pengetahuan bagi Pembangunan Kesehatan Nasional" *Analisa tahun X No .1, Januari 1981*. Jakarta Pusat: CSIS.

Felix Baghi, SVD. 2012. *Pluralisme, Demokrasi, dan Toleransi*. Maumere: Ledalero.

Grosby,Steven. (2011). *Sejarah Nasionalisme, Asal Usul Bangsa dan Tanah Air*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Heri Susanto. (2014). *Seputar Pembelajaran Sejarah*. Yogyakarta: Aswaja Presindo.

Joyce B., & Weil M.. (2000). *Model of Teaching*. Boston: Allyn and Bacon.

Kaelan. (2005). *Metode penelitian kualitatif bidang filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.

Nieveen, K. (1999). *Prototyping to Reach Product Quality*. Dalam Plomp, T; Nieveen, N; Gustafson, K; Branch, R.M; dan van den Akker, J (eds). *Design Approaches and Tools in Education and Training*. London: Kluwer Academic Publisher

Nucci, larry P. 2015. *Handbook Pendidikan Moral dan Karakter*. Bandung: Nusa Media.

Sartono Kartodirdjo. (1992). *Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sontosudarmo,Alip dan Tukiran. (2003). *Keragaman Etnis dan Pengelolaan Wilayah*. Prosiding Lokakarya Nasional: Menuju Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Berbasis Ekosistem untuk Mereduksi Konflik Antar Daerah. Fakultas Geografi UGM. 30 Agustus 2003.

Soedjatmoko. 2010. *Menjadi Bangsa Terdidik Menurut Soedjatmoko*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

UNESCO. 1994. *Tolerance: The Threshold of Peace (Preliminary version)*. Paris: UNESCO.

PRAKSIS PENDIDIKAN PANCASILA DI LINGKUP PERGURUAN TINGGI

PEMAHAMAN DAN PENGHYATAN MAHASISWA TENTANG NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BANGSA

Daftar Pustaka

Darmodihardjo, Dardji . 1983. *Pancasila dalam Beberapa Perspektif*. Jakarta: Areis Lima.

Dwi Siswoyo. 2013. "Philosophy of Education in Indonesia: Theory and Thoughts of Institutionalized State (Pancasila)" in *Asian Social Science*. Volume 9 No. 12 September 2013. Canada: Canadian Center of Social Science and Education.

Gardiner, Mayling Oey, dkk. 2017. *Era Disrupsi Peluang dan Tantangan Perguruan Tinggi Indonesia.* Jakarta: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Paristiyanti, dkk. 2016. *Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Hoed, Benny H. 2016. Amnesia Budaya sebagai Gejala Krisis dalam Kebudayaan Indonesia. Sarumpaet, Riris K. Toha (ed). *Krisis Budaya?*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Notonagoro . 1980. *Pancasila Secara Ilmiah Populer.* Jakarta: CV. Pancuran Tujuh.

Lickona, Thomas. (1991). *Educating for character – How our schools can teach respect and responsibility*. New York: Bantam Books.

Sodiq A. Kuntoro. (2012). Konsep Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal sebagai Dasar Pembentukan Karakter Bangsa. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan*. Program Studi Ilmu Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.

Wolfgang Althof, Berkowitz dan Marvin. (2006). Moral education and character education: Their relationship and roles in citizenship education. *Journal of Moral Education*. Desember 2006. Vol. 35.

MEWUJUDKAN KAMPUS PANCASILA?

Daftar Pustaka

Faruq, D. U. (2018). *Menristekdikti Harap Tak Ada Diskriminasi di Kampus*. Retrieved Maret 2019, from MetroTvNews.com: http://jatim.metrotvnews.com/peristiwa/nbw3pjBb-menristekdikti-harap-tak-ada-diskriminasi-di-kampus

MPR RI. (2012). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Murdiono, M. (2010). Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Moral Religius dalam Proses Pembelajaran di Perguruan Tinggi. *Cakrawala Pendidikan*, 99-111.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor

35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta diakses dari http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2017/bn748-2017.pdf

Ridwan, Nur Khalik. (2002). *Pluralisme Borjuis, Kritik Atas Nalar Pluralisme Cak Nur*. Yogyakarta: Galang Press

Supeni, S. (2015). Pengembangan Model Internalisasi Pendidikan Karakter Pancasila Pada Guru Pendidikan Anak Usia Dini. *Cakrawala Pendidikan*, 118-127.

Suroto. (2016). Dinamika Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan berbasis Kearifan Lokal dalam Upaya Memperkuat Karakter Unggul Generasi Muda. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6 (2), 1040-1046.

Wardah, F. (2011). *Radikalisme Mulai Marak di Berbagai Perguruan Tinggi Favorit*. Retrieved Maret 21, 2018, from VOA Indonesia: https://www.voaindonesia.com/a/bnpt-radikalisme-marak-di-perguruan-tinggi-133451968/100501.html

ONLINE DISCUSSION FORUM UNTUK MENGKONSTRUKSI PENGETAHUAN DAN INTERAKSI MAHASISWA

Daftar pustaka

Akin, L. N. (2007). CREST + Model: Writing Effective Online Discussion Questions. *Journal of Online Learning and Teaching. Vol. 3, No. 2*.

Atkinson, D. (1997). A Critical Approach to Critical Thinking in TESOL. *TESOL Quarterly 31/1*, 71-94.

Fu, Cuijiao., Depei Qlan Liu., Xiaopeng Gao. (2017). Effect of Online Discussion Forum in Blended Learning Mode. *Academia Journal of Educational Research 5 (10) DOI: 10.15413/ajer.2017.0315*, 377-383.

Floriasti, T. W. (2012). Developing Character Building through Multicultural Reading Text. *International Conference ACLL.* Osaka: ACLL.

Graham, C. (2004). *Blended Learning Systems: Definition, Current Trends, and Future Directions.* Available online at www.publicationshare.com.

Gruba, P. a. (2012). *Blended Technologies in Second Language Classrooms.* Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Gunawardena. Charlotte N., T. A. (1997). Analysis of a Global OnlineDebate and The Development of an Interaction Analysis Model for Examining Social Construction of Knowledge in Computer Conferencing. *Journal of Educational Computing Research, Vol. 17 (4)*, 397-431.

Hussin, Supyan. (2009). Revisiting e-Forums in English Language Teaching & Learning. In M. A. Embi, *Computer - Mediated Communication* (pp. 90-111). Selangor: Karisma Publications SDN.BHD.

Li, Yanyan., Huang, Ronghuai. (2008). An Analysis of Online Interaction Discourse in Knowledge Forum. *International Conference on Computer Science and Software Engineeirng, Vol. 5* (pp. 45-48). CSSE.

MacDonald, J. (2006). *Blended Learning and Online Tutoring.* Aldershot Hampshire: Gower.

Mason, R. (1992). Evaluation Methodologies for Computer Conferencing Applications. In A. R. (Ed.), *Collaborative Learning Through Computer Conferencing* (pp. 105-116). Berlin: Springer-Verlag.

Montero, B. W.-C. (2007). A discussion Forum Interactions: Text and Context. *System, Vol. 35*, 566-582.

Nor Fariza Mohd. Nor, N. A. (2010). E-Learning: Analysis of Online Discussion

Forums in Promoting Knowledge Construction through Collaborative Learning. *WSEAS Transaction and Communication*, 53-62.

Oliver, M., Trigwell. (2005). Can Blended Learning be Redeemed? *E-Learning 2/1*, 17-26.

Omar, Azura., Amir, Zaini., Mohamad, Maslawati. (2018). Facilitating Online Learning: Students' Online Discussion Strategies for a Project Work at a Technical University in Malaysia. 3L: The Southeast Asian Journal of English Language Studies – Vol 24(4), 102-114.

Robert, A. Ellis, Pardo, A., Han, Feifei (2016). Quality in Blended Learning Environment - Significant Differences in How Students Approach Learning Collaborations. Computers and Education, 90-102.

Rodriguez. Mark A. (2014). Content Analysis as a Method to Asses Online Discussions for Learning. *SAGE Open sgo.sagepub.com*, 1-13.

Marra, Rose., Klimczak, Aimee K., Moore, Joi L (2004). Content Analysis of Online Discussion Forums: A comparative Analysis of Protocols. *Educational Technology Research and Development Vol. 52, No. 2*, 23-40.

Sharma, P., Barrett, B. (2007). *Blended Learning.* Oxford: Macmillan.

Stracke, E. (2007). A road to understand: A qualitative study into by learners drop out of a blended language learning (BLL) environment. *ReCALL 19/1*, 57-58.

Tomlinson, Brian., Whittaker, Clare. (2013). *Blended Learning in English Language Teaching: Course Design and Implementation.* London: British Council.

Thao, V. (2003). The Contribution of Multimedia Tools to EFL Setting Unfamiliar with Technology. *Asian EFL Journal, 5 (3)*, 1-14.

Vygotsky, L. (1978). *Mind and Society.* Cambridge MA: Harvard University Press.

Vygotsky, L. (1962). *Thought and Language (E Hanf-mann & G. Vakar, Trans).* Cambridge, MA: MIT Press.

Walker, Aisha. (2015, July 30). *Language Skills in Digital Age.* Retrieved from aishawalker.com.

Zarei, Nafiseh., Hussin, Supyan. (2014). Impact of Learning Management Blog on Students' Language Learning and Acquisition. GEMA Online Journal of Languages Studies, 51-63.

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI SILA KE-4 PANCASILA DALAM PEMBELAJARAN KETERAMPILAN BERBAHASA PRANCIS DI JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS, FBS, UNY

Daftar Pustaka

Aqib, Zainal. (2014). ***Model-model Media, dan Strategi Pembelajaran Kontekstual (Inovatif)***. Bandung :CV.Yrama Widya

Giradet, J dan Pécheur J. (2008). ***Echo 3 : Méthode de Français***. Paris: CLE International

Koesoema A, Doni. (2010). ***Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global***. Jakarta: Grasindo

Kusuma, Wijaya dan Dedi Dwitagama. (2010). ***Mengenal Peneliian Tindakan***. Edisi kedua. Jakarta : PT Indeks

Sanjaya, Wina. (2006). ***Strategi Pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan***. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sekretariat JenderalMPR RI. (2014). ***Bahan Tayang Materi Sosialisasi Pancasila, UUD RI 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika***. Edisi Revisi

PENGEMBANGAN MODEL KETAHANAN KELUARGA BERLANDASKAN NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA

Daftar Pustaka

BPS. (2016). *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jakarta

Euis Sunarti. (2001). Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya. Telaah Kasus Pengaruhnya terhadap kualitas kehamilan (*Disertasi*) Bogor. IPB.

Frankerberger TR dan M.K.Km Caston. (1998). *The Household Livelihood Security Concep, Nutrition and Agricultural Journal.*

_____, Nomor 21 Tahun (1994) *Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. 1 Juni 1994*. Jakarta

Herin Puspitawati. (2012). *Gender dan Keluarga*: Konsep dan Realita Indonesia. Bogor PT IBP Pers.

_____. (2015). *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan dan Ketahanan*

Keluarga. Bogor. Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia. IPB.

Mc. Taggart, R dan Kemmis, S. (1988). *The Action Research Planner*. Melbourne. Deakin University.

Mas'oed, Mohtar. (2003). *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Megawangi, Ratna. (1999). *Membiarkan Berbeda*, Bandung: Mizan.

Undang-undang No 52 Tahun (2009). *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. 29 Oktober 2009*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161. Jakarta.

Soedijarto. (1998). *Menciptakan Kinerja Sistem Pendidikan Nasional dalam Menyiapkan Manusia Indonesia Abad ke-21*, Jakarta: Rineka Cipta.

Syarif Beauvoir, Simone De Beauvoir. (2003). *The Second Sex Kehidupan Perempuan,* diterjemahkan oleh Toni B. Febriantono, dkk, Pustaka Prometea.

Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974. Perkawinan. 2 Januari 1974. Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1974. Jakarta.

Wals, Froma. (1996). *The Concep Family Rilience: Crisis and Challenge*. Fam. Proc. 35:261-268

KETELADANAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM OLAHRAGA PENCAK SILAT BERBASIS TAKWA, TANGGAP, TANGGON, TANGGUH, DAN TRENGGINAS

Daftar Pustaka

Asmani, Jamal Ma'mur. (2012). *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. Yogyakarta; Diva Press.

Atok Iskandar. (1992). Pencak silat. Jakarta: Depdikbud.

Bungin, Burhan. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jalaludin. (2012). Membangun SDM Bangsa Melalui Pendidikan Karakter. Jurnal Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.Retrieved From htttp://jurnal.upi.edu/penelitian-pendidikan/view/1399/Membangun-

SDM-Bangsa-Melalui-Pendidikan-Karakter.

Kesuma, dkk. (2011). Pendidikan Karakter: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Kemendiknas. (2011). Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter. Jakarta: Pusat Kurikulum Perbukuan.

Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum

Kriswanto, Erwin Setyo. (2015). Pencak Silat Sejarah dan Perkembangan Pencak Silat, Teknik-Teknik dalam Pencak Silat, Pengetahuan Dasar Pertandingan Pencak Silat. Yogyakarta: PustakaBaruPress.

Lickona, T. (1992). *Educating for Character/ Mendidik untukMembentuk Karakter*. Penerjemah Jumu Abdu Wamaunguno. Ed. 1. Cet. 3. (2013). Jakarta: Bumi Aksara.

Mulyana. (2012). *Pembentukan Karakter melalui Pembinaan Pencak Silat di SMPN 22 Bandung*. Disertasi. Program Pendidikan Olahraga Sekolah Pascasarjana UPI.

Mulyana. (2014). *Pendidikan Pencak Silat*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyasa, E. (2014). *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.

O'ong Maryono. (2000) *Pencak Silat Merentang Waktu*. Yogyakarta: Galang Press.

Sedyawati, Edi. (1997). Pedoman penanaman Budi Pekerti Luhur. Jakartta: Balai. Pustaka.

Siswantoyo. (2008). *Napak Tilas Jejak Pencak Silat*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Soetjiningsih. (2004). *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. Jakarta: CV Sagung Seto.

Subagyo, P. Joko. (1997). *Metode Penelitian: Dalam teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND*. Bandung: Alfabeta

Sukmadinata, N.S. (2006). *Metode Penelitian Tindakan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Triatmanto. 2010. "Tantangan Implementasi Pendidikan Karakter Di Sekolah." Cakrawala Pendidikan. Tahun XXIX.Vol. 1 No. 3. 2010 Edisi Khusus Dies

Natalis UNY.

Wening. Sri. (2007). Pembentukan karakter Bangsa Melalui Pendidikan Nilai. Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan.

Zubaedi. 2011. Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan. Jakarta: Prenada Media Group.

Zuchdi, Darmiyati, Prasetya, Zuhdan Kun, dan Masruri Muhsinatun Siasah.. (2010). "Pengembangan Model Pendidikan Karakter Terintegrasi dalam Pembelajaran Bidang Studi di Sekolah Dasar,". Cakrawala Pendidikan. Tahun XXIX.Vol. 1 No. 3. 2010. Edisi Khusus Dies Natalis UNY.

MRAPP (*MY REAL ACTION PLAN FOR* PANCASILA): MODEL PENGEMBANGAN PENANAMAN NILAI PANCASILA DI PERGURUAN TINGGI

Daftar Pustaka

Bakar, K. A. A., Noor, I. A. M., Widodo. (2018). Nurturing nationalism character values at primary school in Jayapura, Papua. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 37(1), 42-56, from DOI: *https://doi.org/10.21831/cp.v37i1.13616*

Huda, M.C. (2018). "Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara: Implemetasi Nilai-Nilai Keseimbangan dalam Upaya Pembangunan Hukum di Indonesia". *Resolusi Jurnal Sosial Politik*. Vol. 1 No. 1 Juni 2018 ISSN 2621-5764. from *https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/resolusi/issue/view/11*

Fauzi, A. (2017). "Agama, Pancasila dan Konflik Sosial di Indonesia". *Jurnal **Lentera Hukum***, Vol 4, No. 2, p. 122-130, ISSN 2621-3710. From: *https://jurnal.unej.ac.id/index.php/eJLH/article/view/5295*.Doi: *https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i2.5295*

Gredinant, D. (2017). "Application Of State Defense Education In College"s. *Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Darat Volume 3 Nomor 1: 1-17.*

Kaelan. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma Offset.

Murdiono, M., Miftahudin., Kuncorowati, P. W., (2017). The Education of the National Character of Pancasila in Secondary School Based on Pesantren.

Jurnal Cakrawala Pendidikan, 36 (3), 423-434 from DOI: *https://doi.org/10.21831/cp.v36i3.15399*

Ramadhani. (2016). *repository.unpas.ac.id /13097/4/12*

Rukiyati, dkk. (2016). *Pancasila*. Yogyakarta: UNY Press

Siregar, S. L. (2017). "Literature Review: Perilaku Korupsi dan Penyebabnya". *Fundamental Management Journa*l ISSN: 2540-9816 (print) 2540-9220 (online) Volume:2 No.1 April, p.47-56.

PENTINGNYA IMPLEMENTASI NILAI- NILAI PANCASILA DALAM PERKULIAHAN KEWIRAUSAHAAN

Daftar Pustaka

Agusalim, Lestari, Muhammad Karim, Asep Saefuddin (2014). Rekonstruksi Ekonomi Pancasila Sebagai Perwujudan Keberlanjutan Pembangunan Nasional. Kesejahteraan Sosial Journal of Social Welfare *http://www.universitas-trilogi.ac.id/journal/ks* Vol. 1 No. 1, Januari 2014, p 39-52 ISSN: 2354-9874 diunduh tanggal 25 Maret 2018

Ali, Muhammmad .2017. Pengembangan Program Pendidikan Kewirausahaan Terpadu Berorientasi Ekonomi Kerakyatan Pada Universitas Hamzanwadi Selong Kabupaten Lombok Timur. Disertasi.UM

Buchari Alma, 2007. *Kewirausahaan.Bandung*: Alfa Beta

Kuswara, Heri, 2012. *Mewujudkan Entrepreneurial Campus adalah sebuah Keharusan. (Daring)*. Tersedia dari: www.dikti.go.id. (10 April 2018).

Limbong, Bernard, 2012. *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*. Jakarta: Pustaka Margaretha

Madya, Suwarsih. (2011). *Teori dan Praktik Penelitian Tindakan (Action research)*. Bandung : Alfa Beta

Mubyarto (1987). *Ekonomi Pancasila, Gagasan dan Kemungkinan*. Jakarta: LP3ES

Mubyarto. (1999). *Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalisme meuju Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta:Aditya Media

Nurseto, Tejo dkk. 2018. *Implementasi Nilai- Nilai Pancasila dalam Perkuliahan Kewirausahaan*. Yogyakarta: UNY

BAGIAN V
MENJAWAB TANTANGAN PENDIDIKAN PANCASILA
Daftar Pustaka

Adam, Asvi Warman. 2009. "Empat Gelombang Pancasila". *Okezone.com*, 2 Juni 2009.

Fahri, Fakhrizal. 2018. "Survei LSI: Dukungan untuk Pancasila Terus Menurun Sejak 2005", pada laman *https://news.okezone.com/read/2018/11/12/337/1976909/survei-lsi-dukungan-untuk-pancasila-terus-menurun-sejak-2005*, diakses pada 15 April 2019.

Halili. 2011. "Radikalisasi (Negara) Pancasila". *Kolom Harian Jogja,* 14 Oktober 2011.

Halili. 2012. "Politik (Pendidikan) Pancasila", *Opini KOMPAS,* 9 Mei 2011.

Halili. 2015. "Membangun Keutamaan Generik: Mendidik Generasi Indonesia Masa Depan", dalam Nasiwan (Ed). *Dilema Membangun Manusia Indonesia: Memilih Antara Tuntutan Global dan Kearifan Lokal*. Yogyakarta: CV PrimaPrint.

Halili. 2019. "Mengelola Residu Kontestasi Ideologi". *Kompas.* 25 April 2019.

Koentjaraningrat. 2000. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.

Kurniawan, Aloysius Budi. 2019. "Bangsa Kita Alpa Memperkuat Ideologi Kebangsaan", *https://kompas.id/baca/utama/2019/03/16/bangsa-kita-alpa-memperkuat-ideologi-kebangsaan/*, diakses pada 22 April 2019.

Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Lubis, Mochtar. 2001. *Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Millon, Theodore. 2004. *Masters of Mind: Exploring the Story of Mental Illness from the Ancient Times to the New Millenium.* New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.

Notonagoro. 1962. *Pantjasila Dasar Negara Repoeblik Indonesia.* Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Ryandi, Dimas Ryandi. 2018. "Intoleransi Menguat, Dukungan Pada Pancasila

Menurun", dalam laman *https://www.jawapos.com/nasional/politik/05/12/2018/intoleransi-menguat-dukungan-pada-pancasila-menurun/*, diakses pada 15 April 2019.

Tim Survei SETARA Institute. 2016. *Laporan Survei Potret Toleransi di Kalangan Pelajar pada SMA Negeri di DKI Jakarta dan Bandung Raya 2016.* Tidak Diterbitkan.

UNGGUL, KREATIF, INOVATIF | TAKWA, MANDIRI, CENDEKIA

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jl. Colombo No. 1 Karangmalang, Yogyakarta 55281
• Telp/Fax 0274 542185, rektor: 0274 512192
• E-mail: humas@uny.ac.id • Laman: www.uny.ac.id.

UNYOFFICIAL